LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN INVESTASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

TAHUN

2023

KATA PENGANTAR

Kita panjatkan puji syukur terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2023 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan bagian penting dari rangkaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dan terintegrasi dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.

Laporan kinerja adalah ikhtisar penjelasan secara singkat dan lengkap terkait capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara.

Dalam penyusunan laporan kinerja, aspek pengukuran kinerja serta evaluasi dan pengungkapan *(disclosure)* secara memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja menjadi aspek terpenting. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa tujuan pelaporan kinerja adalah: 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal terus berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan kinerja dalam berbagai kebijakan, program, serta kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dokumen RPJMN 2020-2024 memiliki visi ***"Terwujudnya Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***. Visi tersebut menjadi cita-cita, pondasi, dan arah pembangunan nasional. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia telah menetapkan tujuh agenda pembangunan. Salah satunya adalah ***"Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan"*.** Untuk mewujudkan agenda tersebut perlu peningkatan inovasi dan kualitas investasi sebagai modal utama. Kementerian Investasi/Badan

Koordinasi Penanaman Modal memiliki komitmen dan ikhtiar untuk mewujudkan dan menerjemahkan perbaikan dan peningkatan kualitas investasi dalam berbagai kebijakan, program, serta kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja tahun 2023. Rencana Kerja tahun 2023 ini memiliki posisi strategis sebagai upaya perwujudan agenda pembangunan nasional dan menjadi pondasi transisi menuju Indonesia Emas 2045.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023***.*** ***Pertama***, meningkatnya realisasi penanaman modal memiliki empat indikator kinerja yaitu: 1) Nilai realisasi penanaman modal; 2) Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder; 3) Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa); dan 4) Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM. ***Kedua***, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal memiliki satu indikator kinerja yaitu 5) Peringkat kemudahan berusaha *(ease of doing business)*. ***Ketiga***, terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani memiliki dua indikator kinerja yaitu 6) Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM; dan 7) Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM.

Presiden menargetkan realisasi investasi di Indonesia sebesar Rp1.400 Triliun pada tahun 2023. Target ini lebih tinggi dibanding Rencana Strategis Kementerian Investasi sebesar Rp1.090,8 Triliun. Presiden menetapkan target yang lebih tinggi dibanding dokumen Rencana Strategis karena pada tahun 2022 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berhasil meningkatkan realisasi investasi sebesar Rp1.207,2 Triliun. Pada tahun 2023 ini, sepanjang periode Januari-Desember, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal kembali berhasil meningkatkan realisasi investasi dan melampaui target Presiden dengan capaian realisasi investasi sebesar Rp1.418,9 Triliun. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen dan ikhtiar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerjanya berdasarkan evaluasi pada tahun 2022. Peningkatan realisasi investasi ini berdampak pada kenaikan serapan tenaga kerja Indonesia menjadi 1.823.543 tenaga kerja pada tahun 2023.

Peningkatan realisasi investasi di atas juga diikuti oleh peningkatan realisasi penanaman modal sekunder yang mencapai Rp596,3 Triliun. Capaian ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar Rp483,9 Triliun. Sebaran penanaman modal berkualitas di luar pulau Jawa juga menujukkan peningkatan persentase menjadi 51,5% pada tahun 2023, sedangkan terkait kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM capaian tahun 2023 sebesar 56,2%. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga terus menunjukkan kinerja positif dalam upaya perwujudan kemudahan berusaha. Mengacu pada *World Competitiveness Yearbook* 2023 yang diterbitkan oleh *Institute for Management Development* (IMD), Indonesia berada di peringkat 34 pada tahun 2023. Dalam rangka perwujudan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menetapkan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian nilai reformasi birokrasi dengan predikat/nilai BB (71,91) serta opini BPK/nilai dengan capaian predikat WTP pada tahun 2023.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal memiliki peran strategis sebagai *focal point* dan *hub* antara semua sektor investasi dan kementerian teknis. Pada tahun 2023, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal terus menjadi *lead* sektor berbagai kerja kolaboratif, intregratif, dan reformatif untuk meningkatkan realisasi investasi serta menciptkan iklim investasi yang kondusif. Dalam menjalankan fungsi dan peran tersebut, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas serta transparansi penggunaan anggaran untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan sepanjang tahun 2023. Komitmen Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja ini. Laporan kinerja yang disusun ini menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan inovasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal selama tahun 2023.

Laporan Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2023 ini merupakan pondasi serta pijakan upaya untuk terus melakukan inovasi dan transformasi kinerja kelembagaan instansi pemerintah yang produktif, efisien, serta efektif kedepannya. Selain itu, Laporan kinerja ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban serta penyampaian informasi kepada publik terkait realisasi anggaran serta berbagai capaian kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sepanjang tahun 2023. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga terus berupaya mewujudkan cita-cita sebagai lembaga yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional serta perwujudan Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Februari 2024
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari laporan kinerja ini adalah pertanggungjawaban kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal selama tahun 2023 sesuai Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Laporan ini mencakup capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan selama tahun 2023, serta menunjukkan peningkatan kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dibandingkan tahun sebelumnya.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal memiliki tiga sasaran strategis dengan tujuh indikator kinerja pada perjanjian kinerja 2023. ***Pertama***, meningkatnya realisasi penanaman modal memiliki empat indikator kinerja yaitu: 1) Nilai realisasi penanaman modal; 2) Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder; 3) Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa); dan 4) Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM. ***Kedua***, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal memiliki satu indikator kinerja yaitu 5) Peringkat kemudahan berusaha *(ease of doing business)*. ***Ketiga***, terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani memiliki dua indikator kinerja yaitu 6) Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM; dan 7) Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM.

Capaian kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2023 secara keseluruhan menunjukkan kinerja sangat baik. Hal ini ditandai dengan tingginya pencapaian nilai capaian indikator kinerja pada setiap sasaran. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM tahun 2023 sebesar 109,87, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 106,06. Rata-rata pencapaian sasaran kinerja (NPS) mencapai 106,58 (kategori sangat baik) dengan tingkat efisiensi mencapai 9,56. Rincian pencapaian sasaran kinerja (NPS) sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis 1 (SS-1): Meningkatnya realisasi penanaman modal sebesar 112,52% (kategori sangat baik);
2) Sasaran Strategis 2 (SS-2): Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal tidak dapat diketahui hasilnya dikarenakan indikator peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) tidak dirilis oleh Bank Dunia dan untuk sementara digantikan dengan *Report of Doing Business* sebesar 120,00% (kategori sangat baik)
3) Sasaran Strategis 3 (SS-3): Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani sebesar 94,95% (kategori baik).
4) Sasaran Program 1 (SP-1): Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal sebesar 111,54% (kategori sangat baik);
5) Sasaran Program 2 (SP-2) : Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis sebesar 100% (kategori sangat baik);

6) Sasaran Program 3 (SP-3): Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal sebesar 113,85% (kategori sangat baik);
7) Sasaran Program 4 (SP-4): Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal sebesar 108,42% (kategori sangat baik);
8) Sasaran Program 5 (SP-5): Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal sebesar 100,00%(kategori sangat baik);
9) Sasaran Program 6 (SP-6): Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal sebesar 96,81% (kategori baik);
10) Sasaran Program 7 (SP-7): Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebesar 120,00% (kategori sangat baik); dan
11) Sasaran Program (SP-8): Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal sebesar 94,33% (kategori baik).

Dalam rangka mendukung capaian kinerja tahun 2023 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp Rp1.094.951.654.261 atau mencapai 97,02% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.128.605.685.000. Penggunaan anggaran ini jika dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 106,58% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 9,56%. Adanya efisiensi dan capaian kinerja yang sangat baik di tahun 2023 sebagai gambaran semakin baiknya penerapan akuntabilitas di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Keberhasilan ini sebagai wujud tingginya komitmen dan berbagai upaya akseleratif yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain berupaya untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga berupaya untuk mengimplementasikan berbagai rencana tindaklanjut yang temuat pada laporan kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022). Hal ini agar ada keberlanjutan dan perbaikan, tidak hanya berkaitan dengan akuntabilitas kinerja, namun berkaitan juga dengan akselerasi program dan kegiatan yang dilakukan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Upaya ini merupakan wujud dari komitmen dan konsistensi Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk terus berupaya melakukan perbaikan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

DAFTAR ISI

TAHUN 2023

BAB 01 PENDAHULUAN

I-1 Latar Belakang
I-6 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
I-13 Peran Strategis Kementerian Investasi/BKPM
I-16 Tantangan dan Permasalahan
I-18 Sistematika Laporan Kinerja

BAB 02 PERENCANAAN KINERJA

II-1 Perencanaan Kinerja
II-10 Penetapan Kinerja

BAB 03 AKUNTABILITAS KINERJA

III-2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023
III-3 Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023
III-6 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
III-81 Keterkaitan Kinerja Unit Kerja dalam Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian
III-83 Capaian Kinerja Indikator RPJMN 2020-2024
III-85 Capaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Terhadap Target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023
III-85 Capaian Kinerja Anggaran
III-86 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB 04 INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

IV-2 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2022
IV-21 Upaya Akseleratif Lainnya dalam Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas di Tahun 2023 Berdasarkan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Tahun 2022

BAB 05 PENUTUP

V-1 Kesimpulan
V-3 Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

1. Daftar Penghargaan
2. Pernyataan Telah Direviu
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Manual IKU
5. Pohon Kinerja
6. *Cascading* Kinerja

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
TAHUN 2023

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Investasi memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6-6,0 persen per tahunnya. Untuk mencapai target tersebut, investasi (penanaman modal tetap bruto/PMTB) Indonesia harus tumbuh sebesar 6,6 – 7,0 persen pada setiap tahunnya. Target investasi tersebut dilakukan melalui skenario investasi swasta, baik asing, dalam negeri, maupun pemerintah. Dalam rangka peningkatan investasi swasta, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan mulai dari deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan sampai peningkatan iklim kemudahan berinvestasi. Untuk investasi pemerintah, peningkatan investasi dilakukan melalui upaya penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan produktivitas, dan efisiensi investasi.

Pertumbuhan investasi memiliki korelasi positif dengan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur perkembangan ekonomi suatu negara. Investasi menjadi salah satu komponen utama dalam perhitungan PDB dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, peningkatan nilai investasi akan berpengaruh positif terhadap peningkatan PDB dan sebaliknya. Posisi tersebut membuat investasi mempunyai peran strategis dalam perkembangan ekonomi negara. Investasi juga berdampak terhadap pencipataan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan daya beli masyarakat. Dampak tersebut relevan dengan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut semakin memperkuat peran strategis investasi dalam menciptakan kestabilan, perbaikan, serta peningkatan kondisi perekonomian Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0-6,3 persen pada tahun 2023. Namun, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 belum memenuhi target tersebut yaitu sebesar 5,05 persen. Capaian ini juga lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 5,31 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini akibat dari adanya gejolak ekonomi global dan tingginya inflasi. Guncangan ekonomi global pasca pemulihan akibat pandemi Covid-19 dan terjadinya perang Rusia-Ukraina telah berdampak pada terkontraksinya beberapa sistem ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Angka inflasi Indonesia pada periode Januari 2024 menunjukkan tren yang menurun yaitu sebesar 2,57 persen (*y-on-y)* dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 105,19. Inflasi *y-on-y* terjadi akibat kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, diantaranya: 1) Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,84 persen; 2) Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,01 persen; 3) Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,37 persen; 4) Kelompok kesehatan sebesar 1,88 persen; 5) Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,68 persen; 6) Kelompok pendidikan sebesar 1,57 persen; 7) Kelompok transportasi sebesar 1,11 persen; 8) Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,02 persen.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berperan vital dalam meningkatkan realisasi investasi serta menjadi *focal point* penghubung seluruh sektor investasi dari kementerian teknis. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan penghubung utama antara pemerintah dan dunia usaha. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2020-2024. Target realisasi investasi Indonesia pada tahun 2023 adalah Rp 1.099,8 triliun dengan persentase sebaran penanaman modal berkualitas di luar Pulau Jawa sebesar 50,6 persen dan kontribusi investasi dalam negeri termasuk PMDN untuk UMKM sebesar 51,9 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan dengan

target Presiden Republik Indonesia sebesar Rp 1.400 trilliun. Presiden menetapkan target yang lebih tinggi dibanding dokumen rencana strategis karena pada tahun 2022 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berhasil mencapai realisasi investasi sebesar Rp 1.207,2 Triliun.

Pada tahun 2023 sepanjang periode Januari-Desember, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal kembali mampu meningkatkan realisasi investasi dan melampaui target Presiden dengan capaian realisasi investasi sebesar Rp 1.418,9 triliun atau sebesar 101,3 persen dari target Presiden dan 129,0 persen dari target Rencana Strategis. Dari data realisasi capaian tersebut, sebesar Rp 744 triliun atau sebesar 52,4 persen merupakan PMA dan Rp 674,9 triliun atau sebesar 47,6 persen merupakan PMDN. Realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 730,8 triliun atau sebesar 51,5 persen dan realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar 688,1 trilliun atau sebesar 48,5 persen. Peningkatan realisasi investasi ini berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja Indonesia menjadi 1.823.543 jiwa pada tahun 2023. Berdasarkan sektor realisasi PMA dan PMDN tertinggi pada tahun 2023, terdapat lima sektor berikut: 1) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar Rp 200,3 Trilliun; 2) Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar Rp 159,8 Trilliun; 3) Pertambangan sebesar Rp 156,5 Trilliun; 4) Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran sebesar Rp 115,2 Trilliun; dan 5) Industri Kimia dan Farmasi sebesar Rp 105,0 Trilliun.

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 terdapat dalam lima sektor berikut: 1) Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar US$ 11,8 Million atau 23,4 persen; 2) Transportasi, Gudang, dan Telekomuniasi sebesar US$ 5,6 Million atau 11,2 persen; 3) Industri Kimida dan Farmasi sebesar US$ 4,8 Million atau 9,6 persen; 4) Pertambangan sebesar US$ 4,7 Million atau 9,4 persen; dan 5) Industri Kertas dan Percetakan sebesar US$ 3,4 Million atau 6,8 persen. Untuk realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertinggi terdapat pada sektor: 1) Pertambangan sebesar Rp 86,7 Trilliun atau sebesar 12,8 persen; 2) Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran sebesar Rp 77,1 Trilliun atau sebesar 11,4 persen; 3) Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar Rp 76,7 Trilliun atau sebesar 11,4 persen; 4) Industri makanan sebesar Rp 54,8 Trilliun atau sebesar 8,1 persen; dan 5) Jasa lainnya sebesar 52 Trilliun atau sebesar 7,7 persen.

Berdasarkan wilayah/lokasi realisasi PMA dan PMDN pada tahun 2023, terdapat lima besar Provinsi sebagai berikut: 1) Provinsi Jawa Barat dengan total realisasi sebesar Rp 210,6 Trilliun atau sebesar 14,8 persen; 2) Provinsi DKI Jakarta dengan total realisasi sebesar Rp 166,7 Trilliun atau sebesar 11,7 persen; 3) Provinsi Jawa Timur dengan total realisasi sebesar Rp 145,1 Trilliun atau sebesar 10,2 persen; 4) Provinsi Sulawesi Tengah dengan total realisasi sebesar Rp 112,0 Trilliun atau sebesar 7,9 persen; dan 5) Provinsi Banten dengan total realisasi sebesar Rp 103,9 Trilliun atau sebesar 7,3 persen. Untuk realisasi PMA tertinggi berada di wilayah: 1) Provinsi Jawa Barat dengan realisasi sebesar US$ 8,3 Million atau 16,5 persen; 2) Provinsi Sulawesi Tengah dengan realisasi sebesar US$ 7,2 Million atau 14,4 persen; 3) Provinsi Maluku Utara dengan realisasi sebesar US$ 5,0 Million atau 9,9 persen; 4) Provinsi DKI Jakarta dengan realisasi sebesar US$ 4,8 Million atau 9,6 persen; dan 5) Provinsi Jawa Timur dengan realisasi sebesar US$ 4,7 Million atau 9,4 persen.

Realisasi PMDN tertinggi terdapat di lima besar wilayah berikut: 1) Provinsi DKI Jakarta dengan realiasi sebesar Rp 96,2 Trilliun atau sebesar 14,1 persen; 2) Provinsi Jawa Barat dengan realiasi sebesar Rp 88,0 Trilliun atau sebesar 13,0 persen; 3) Provinsi Jawa Timur dengan realiasi sebesar Rp 74,9 Trilliun atau sebesar 11,1 persen; 4) Provinsi Kalimantan Timur dengan realiasi sebesar Rp 52 2 Trilliun atau sebesar 7,7 persen; dan 5) Provinsi Riau dengan realiasi sebesar Rp 48,2 Trilliun atau sebesar 7,1 persen. Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sebagian besar besar dari lima

negara berikut: 1) Singapura dengan realisasi sebesar US$ 15,4 Million; 2) Republik Rakyat Tiongkok dengan realisasi sebesar US$ 7,4 Million; 3) Hongkong dengan realisasi sebesar US$ 6,5 Million; 4) Jepang dengan realisasi sebesar US$ 4,6 Million; dan 5) Malaysia dengan realisasi sebesar US$ 4,1 Million.

Upaya peningkatan realisasi investasi di Indonesia menghadapi beberapa tantangan baik dari dalam negeri maupun global. Pada tahun 2024 ini, Indonesia memasuki tahun politik melalui penyelanggaraan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta Anggota dewan perwakilan daerah. Berdasarkan tren realisasi investasi pada penyelanggaraan pemilihan umum tahun 2014 dan 2019, bahwa realisasi investasi tidak terdampak signifikan oleh tahun politik. Pada tahun 2014, realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar Rp 66,7 Trilliun, meskipun pertumbuhan investasi melemah dari 24,6 persen menjadi 17 persen. Pada tahun 2019, realisasi investasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp 88,3 Trilliun dan kenaikan pertumbuhan dari 4,1 persen menjadi 12,2 persen. Data historis ini menujukkan bahwa tahun politik tidak berdampak signifikan terhadap tren realisasi investasi. Pertumbuhan investasi juga tetap terjaga selama iklim investasi kondusif dan transisi pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Tantangan realisasi investasi ke depan juga menghadapi beberapa risiko global pada aspek ekonomi, lingkungan, dan geopolitik yang saling berkaitan antara lain: 1) Pelemahan pertumbuhan ekonomi; 2) Krisis sumber daya alam; 3) Konflik bersenjata; 4) Polarisasi sosial; serta 5) Misinformasi dan disinformasi. Risiko global tersebut berdampak pada kompetisi global yang semakin sengit untuk mengamankan rantai pasok dan menarik investasi. Perubahan iklim global telah berdampak pada kompetisi negara-negara dunia untuk menciptkan kebijakan iklim yang protektif. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan *Inflation Reduction Act* (IRA) pada tahun 2022. Amerika Serikat mengalokasikan dana US$ 500 Miliar untuk mengurangi emosi karbon, menurunkan biaya kesehatan, dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Selain itu, Pemerintah Amerika Serikat mendorong investasi dan pengadaan pasokan dari dalam negeri atau mitra FTA serta mengecualikan *foreign entities of concern* (FEOC) dari Tiongkok, Rusia, Iran, dan Korea Utara. Uni Eropa juga mengeluarkan kebijakan EU fit for 55. Kebijakan tersebut menargetkan Uni Eropa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 55% pada tahun 2030, termasuk *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)* agar pengurangan emisi Uni Eropa tidak menghasilkan peningkatan emisi di luar perbatasan.

Berdasarkan tingkat keparahannya, *ranking* risiko global untuk investasi menempatkan risiko lingkungan pada peringkat 1-4 meliputi: 1) *Extreme weather event;* 2) *Critical change to earth system*; 3) *Biodiversity loss and ecosystem collapse*; dan 4) *Natural resource shortages.* Pada peringkat ke 5-6 menempatkan risiko teknologi meliputi: 5) *Misinformation and disinformation*; dan 6) *Adverse outcomes of AI technologies*. Kondisi tersebut menekankan bahwa risiko global yang paling berdampak pada realisasi investasi sebagian besar terkait dengan lingkungan serta teknologi. Seluruh negara dunia telah menempatkan ini sebagai tantangan yang harus dicari solusinya. Namun, minimnya opsi pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi kendala dalam mewujudkan komitmen global pengurangan emisi di sektor energi. Peningkatan realisasi investasi juga mendapatkan tantangan hilangnya daya tarik insentif fiskal pasca penetapan *Global Minimun Tax* (GMT) yang akan ditetapkan pada tahun 2025.

Berbagai tantangan tersebut menjadi peluang sekaligus kendala untuk terus meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menyiapkan berbagai pondasi di tahun 2023 dalam menghadapi berbagai tantangan realisasi penanaman modal ke depan. Beberapa

kebijakan, program, dan kegiatan diarahkan dalam merespon risiko global serta *megatrend* dunia yang menjadi *game changer.* Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah merumuskan empat strategi. ***Pertama,*** peningkatan kemudahan berusaha. ***Kedua,*** memperkuat koordinasi pemerintah. ***Ketiga,*** mengoptimalkan dan memperluas kerja sama. ***Keempat,*** menyiapkan proyek investasi berkelanjutan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menerjemahkan berbagai strategi tersebut ke dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menetapkan kebijakan Investasi Hijau dan Hilirisasi Sumber Daya Alam. Selain itu, terdapat beberapa kajian yang telah dihasilkan dalam rangka pengembangan penanaman modal ke depan diantaranya: 1) Kajian Investasi Hidrogen Hijau di Indonesia (Potensi dan Tantangan); 2) Pengembangan Investasi Mineral Kritis Komoditas Pasir Besi untuk Mendukung Industri Prekursor Baterai di Indonesia; 3) Analisis Strategis: Penguatan Keterlibatan Sektor Swasta *(Investor Engagement)* untuk Peningkatan Investasi di Bidang Infrastruktur; 4) Kajian Ekosistem Investasi Industri *Charging* untuk Kendaraan Listrik Roda Dua, Empat, atau Lebih; 5) Kajian Pengembangan Investasi Kawasan Industri Hijau di Kabupaten Lebak, Banten; 6) Kajian Skema Investasi Proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Indonesia.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menjalankan berbagai peran startegis tersebut dengan mengendepankan prinsip-prinsip ***good governance*** meliputi transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan *fairness.* Prinsip akuntabilitas menekankan pada komitmen dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan rangkaian sistematis dan terintegrasi dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal memiliki tiga sasaran strategis dengan tujuh indikator kinerja pada perjanjian kinerja 2023. ***Pertama,*** meningkatnya realisasi penanaman modal memiliki empat indikator kinerja yaitu: 1) Nilai realisasi penanaman modal; 2) Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder; 3) Sebaran penanaman modal berkualitas di luar Pulau Jawa; dan 4) Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM. ***Kedua,*** meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal memiliki satu indikator kinerja yaitu 5) Peringkat kemudahan berusaha. ***Ketiga,*** terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani memiliki dua indikator kinerja yaitu 6) Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM; dan 7) Opini atas Laporan Kementerian Investasi/BKPM.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara. Penyusunan Laporan kinerja (LKj) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2023 ini merupakan pondasi serta pijakan upaya untuk terus melakukan inovasi dan transformasi kinerja kelembagaan instansi pemerintah yang produktif, efisien, serta efektif kedepannya.

Selain itu, Laporan kinerja ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban serta penyampaian informasi kepada publik terkait realisasi anggaran serta berbagai capaian kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sepanjang tahun 2023. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga terus berupaya mewujudkan cita-cita sebagai lembaga yang andal, profesional, inovatif, dan berintregritas dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional serta perwujudan Indonesia Emas 2045.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi, Kementerian Investasi memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Investasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Investasi;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Investasi; dan
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Investasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Investasi, Menteri Investasi dibantu oleh:

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
2. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
4. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
5. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas;
6. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, bahwa BKPM memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
4. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
6. Pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
8. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
10. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
11. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
12. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
13. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM;
14. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM;
15. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM terdiri dari:
1. Kepala;
2. Wakil Kepala;
3. Sekretariat Utama;
4. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
5. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
6. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
7. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
8. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
9. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
10. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
11. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penetapan peraturan ini dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, struktur organisasi Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai berikut.

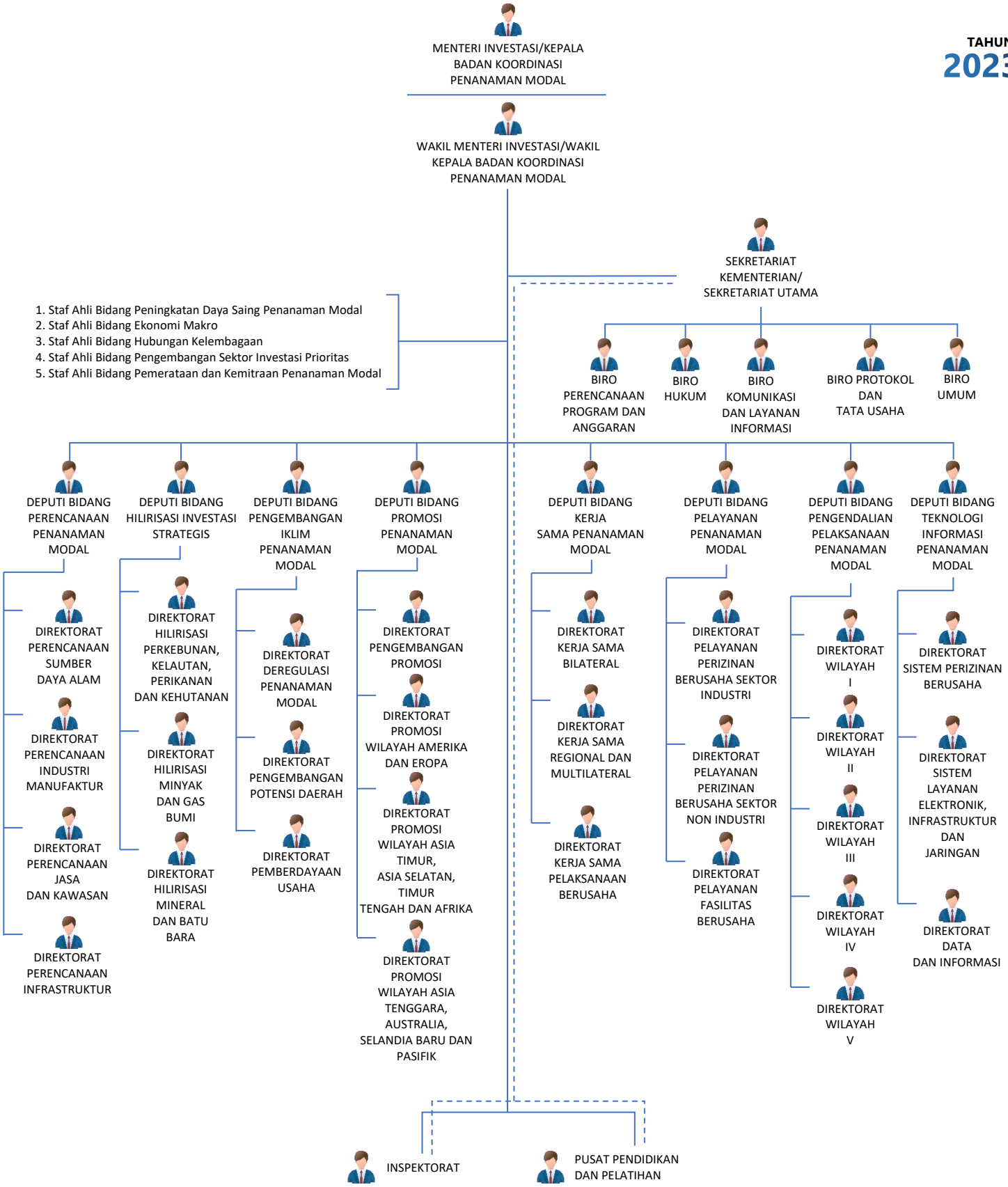

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kementerian Investasi/BKPM

Berdasarkan struktur organisasi di atas dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berikut ini merupakan tugas dan fungsi masing-masing bagian:

Menteri/Kepala mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas, antara lain:

1. membantu Menteri/Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Investasi/BKPM; dan
2. membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM.

Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama menyelenggarkan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Investasi/BKPM;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Investasi/BKPM;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Investasi/BKPM;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
7. Pengelolaan data dan informasi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
3. pengkajian dan pengusulan perencanaan dan inovasi penanaman modal nasional menurut sektor usaha;
4. pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
7. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
3. pengembangan potensi dan peluang bidang hilirisasi investasi strategis;
4. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi investasi strategis; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
3. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
4. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
7. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
3. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi penanaman modal;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi penanaman modal;
6. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman

modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
3. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
4. koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama penanaman modal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
3. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
4. koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
5. koordinasi pemberian pelayanan perizinan, pelayanan berbantuan, dan pelayanan fasilitas penanaman modal;
6. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan penanaman modal;
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penanaman modal;
8. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan penanaman modal; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
4. fasilitasi persebaran penanaman modal di seluruh Indonesia dan penyelesaian permasalahan dan kendala pelaku usaha;
5. koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis risiko dan pengawasan administratif dan atau fisik realisasi penanaman modal;
6. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

7. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala

Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi penanaman modal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala

Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri/Kepala juga dibantu oleh staf ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, yang terdiri dari:

1. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
   Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro
   Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan ekonomi makro.
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
   Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan hubungan kelembagaan.
4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas
   Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan sektor investasi prioritas.
5. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem
   Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan teknologi informasi dan integrasi sistem

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Investasi/ BKPM didukung oleh 708 orang pegawai (per 31 Desember 2023) dari berbagai bidang keahlian dan disiplin ilmu, yang terdiri dari laki-laki 373 orang atau 53% dan perempuan 335 orang atau 47%. Pegawai Kementerian Investasi/BKPM tersebut tersebar pada 9 (sembilan) Unit Eselon I dengan komposisi pegawai sebagai berikut:

1) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama: 201 pegawai;
2) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal: 68 pegawai;
3) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis: 32 pegawai;
4) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal: 47 pegawai;

5) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal: 62 pegawai;
6) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal: 43 pegawai;
7) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal: 67 pegawai;
8) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Modal: 77 pegawai.
9) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal: 53 pegawai

Pegawai Kementerian Investasi/BKPM tercatat sedang melaksanakan tugas belajar sebanyak 19 orang, diperbantukan pada Instansi lain sebanyak 17 orang, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) sebanyak 11 orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia Kementerian Investasi/BKPM sebagai berikut: S3 sebanyak 6 orang (0,85%); S2 sebanyak 250 orang (35,31%); S1/D4 sebanyak 380 orang (53,67%); D3 sebanyak 39 orang (5,51%); SLTA sebanyak 32 orang (4,52%); dan di bawah SLTA sebanyak 1 orang (0,14%).

1.3. Peran Strategis Kementerian Investasi/BKPM

Kementerian Investasi/BKPM memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan dunia usaha. Kementerian Investasi/BKPM berawal dari pembentukan Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA) pada tahun 1967. Lembaga ini bertugas untuk memberikan pertimbangan terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Pembentukan badan ini sebagai tindak lanjut pemerintah pasca adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dua produk hukum tersebut menjadi dasar aturan dan pondasi dalam penyelanggaraan penanaman modal di Indonesia. BPPMA berganti nama menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1973 dengan perluasaan tugas sebagai koordinator penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan restrukturasi penanaman modal melalui penerbitan Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM mempunyai peran strategis untuk mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta antar Pemerintah Daerah. BKPM juga memiliki peran aktif sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor serta bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi.

Pemerintah Indonesia mengganti nomenklatur dari Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Kementerian Investasi melalui pengesahan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021. Kementerian Investasi/BKPM dipimpin oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang bertugas dalam memimpin dan mengoordinasikan: 1) Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang investasi; dan 2) Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal. Kementerian Investasi/BKPM memiliki peran strategis sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Investasi/BKPM menjadi penghubung utama antara pemerintah dan dunia usaha. Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya bertugas dalam meningkatkan realisasi penanaman modal tetapi juga memperoleh investasi berkualitas untuk menggerakkan perekonomian serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang sejalan dengan sasaran pembangunan nasional.

Investasi berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04 persen (*y-on-y).* Konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tersebut. Komsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,83 persen pada tahun 2023. Kenaikan upah

minimum dan bantuan sosial pemerintah menjadi faktor pendorong utama peningkatan konsumsi rumah tangga. Dalam tantangan ekonomi global dan inflasi yang tinggi, peningkatan konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga. Investasi tumbuh sebesar 4,40 persen dan didukung oleh realisasi program pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan investasi ini menujukkan besarnya kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian di Indonesia.

Kementerian Investasi/BKPM terus berupaya meningkatkan layanan penanaman modal serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penetapan produk hukum tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengesahan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM. BKPM telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sejak 26 Januari 2015. Dalam menyelenggarakan PTSP, Kementerian Investasi/BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kementerian Teknis/Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan serta menjadi urusan Pemerintah di bidang penanaman modal. Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM juga dapat melimpahkan wewenang yang diberikan oleh Kementerian Teknis/Lembaga dengan hak substitusi kepada PTSP Provinsi, PTSP Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atas Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Badan Koordinasi Penanaman Modal kemudian berubah menjadi Kementerian Investasi pada tahun 2021 melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dengan perubahan ini, Kementerian Investasi/BKPM memiliki rentang tugas yang lebih luas dalam penyelenggaraan urusan investasi di Indonesia. Penyelenggaraan urusan investasi di Indonesia juga harus didukung oleh koordinasi serta komunikasi antar jenjang penyelenggara urusan investasi baik secara horizontal maupun vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah diubah dua kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah melalui Perturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diamanatkan juga bahwa pembinaan teknis atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal di daerah guna meningkatkan realisasi investasi dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam rangka percepatan serta penciptaan iklim investasi kondusif dengan pemanfaatan teknologi digital dan berbasis risiko. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem *Online Single Submission* (OSS) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, seluruh pelayanan perizinan berusaha meliputi pendaftaran berusaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan izin operasional komersial melalui lembaga OSS yang ditegaskan dilaksanakan oleh BKPM.

Kementerian Investasi/BKPM memiliki tanggung jawab utama terhadap penyelenggaraan urusan investasi di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan

Berusaha. Inpres tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga didelegasikan kepada BKPM. Hal ini, dilakukan dalam rangka mewujudkan proses perizinan berusaha yang lebih cepat. Kementerian Investasi/BKPM menjadi *focal point* serta *hub* semua sektor investasi dari kementerian teknis. Sebagai penghubung utama antara bisnis dan pemerintah, kementerian bertanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Kementerian Investasi/BKPM merupakan dua lembaga pemerintah yang dipimpin oleh menteri dan kepala yang sama dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang investasi dan membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Wewenang Kementerian Investasi berhubungan dengan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, sementara Kementerian Investasi/BKPM berperan sebagai eksekutor atas kebijakan di bidang penanaman modal. Setelah Badan Koordinasi Penanaman Modal diubah statusnya menjadi Kementerian Investasi di tahun 2021 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu guna menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam pembangunan dan pengembangan sistem *Online Single Submission* (OSS), serta melaksanakan reformasi sistem perizinan berbasis risiko dan reformasi perpajakan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdasar pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development)* dan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju fase negara maju pada tahun 2045.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuntut organisasi publik untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Salah satu fokus utama dalam produk hukum ini adalah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, dan kemudahan berusaha. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang terkait langsung dengan perizinan dan kemudahan berusaha, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

Reformasi dan transformasi perizinan berusaha diperkuat melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu fokus utama dalam kebijakan tersebut adalah perbaikan proses bisnis dan administrasi dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission (OSS)*. Hal ini diarahkan untuk memangkas rantai sistem administrasi dan birokrasi sehingga dapat mempermudah kegiatan para pelaku usaha. Dari sisi kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan pemutakhiran penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti *e-procurement*, Satu Data Indonesia, dan Kebijakan Satu Peta. Pada sisi kelembagaan, dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja, pemerintah menghadapi tantangan berat dalam merealisasikan pola perumusan proses bisnis yang efektif dan optimal, pengelolaan sumber daya yang efisien dan kreatif untuk menunjang prioritas nasional dalam peningkatan nilai tambah ekonomi, serta pembentukan iklim serta peningkatan kinerja investasi.

Untuk mendukung perizinan berusaha berbasis risiko, Kementerian Investasi/BKPM telah menerbitkan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, antara lain:

1. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
2. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan
3. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

1.4. Tantangan dan Permasalahan

Kementerian Investasi/BKPM menghadapi beberapa tantangan pada tahun 2023 antara lain:

1. Gejolak ekonomi global akibat kondisi geopolitik dan geoekonomi;
2. Kondisi infrastruktur daerah yang belum merata;
3. Permasalahan pengadaan lahan di daerah.

Kementerian Investasi/BKPM juga telah mengidentifikasi beberapa permasalahan utama khususnya dalam upaya meningkatkan realisasi investasi antara lain:

1. Nilai Realisasi Penanaman Modal
   a. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu akibat krisis kesehatan, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan dan kemampuan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
   b. Permasalahan regulasi dan birokrasi yang masih menghambat proses perizinan investasi. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi, masih ada ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan daerah, lamanya proses perizinan, dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait.
   c. Kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan. Untuk menarik investor, Indonesia perlu meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta memperbaiki fasilitas dan konektivitas infrastruktur. Hal ini dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi investasi.
   d. Masuknya tahun politik yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan gejolak politik. Hal ini dapat mempengaruhi iklim investasi dan stabilitas sosial di Indonesia.

2. Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder
   a. Kurangnya bahan baku dan bahan penolong, banyak industri yang masih bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan ketersediaan pasokan.
   b. Infrastruktur yang belum memadai, masih ada beberapa daerah yang belum memiliki akses yang memadai ke jalan, pelabuhan, bandara, atau jaringan listrik, sehingga menimbulkan biaya logistik yang tinggi.
   c. Tidak terdapatnya utilitas, masih ada beberapa industri yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih, gas, atau limbah, sehingga berdampak pada efisiensi dan lingkungan.
   d. Kurang tersedianya tenaga ahli, masih ada kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri dengan yang dimiliki oleh tenaga kerja, sehingga memerlukan pelatihan dan pengembangan.
   e. Adanya tekanan produk impor, masih ada beberapa industri yang menghadapi persaingan yang ketat dari produk impor yang lebih murah atau berkualitas, sehingga memerlukan perlindungan dan peningkatan daya saing.
   f. Pengelolaan limbah plastik sebagai limbah B3, masih ada beberapa industri yang belum memiliki sistem pengelolaan limbah plastik yang baik, sehingga menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan.
   g. Kendala yang dihadapi sektor industri kecil menengah (IKM), masih ada beberapa IKM yang belum memiliki akses yang mudah ke permodalan, perizinan, teknologi, atau pasar, sehingga memerlukan bantuan dan fasilitasi dari pemerintah dan swasta
   h. Kurangnya perencanaan logistik sektor industri, masih ada beberapa industri yang belum memiliki sistem logistik yang terintegrasi, efisien, dan andal, sehingga memerlukan peningkatan infrastruktur dan regulasi.
   i. Penguatan basis data sektor industri, masih ada beberapa industri yang belum memiliki data yang akurat, lengkap, dan terkini, sehingga memerlukan peningkatan sistem informasi dan koordinasi.
3. Sebaran Penanaman Modal Berkualitas di Luar Jawa
   a. Infrastruktur: Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan bandara diluar jawa mempersulit akses kelokasi indsutri dan meningkatkan biaya logistik, Pasokan energi yang tidak stabil dan mahal di beberapa daerah di luar Jawa menjadi hambatan;
   b. Keterampilan tenaga kerja: Keterampilan tenaga kerja di luar Jawa belum tentu sesuai dengan kebutuhan industri modern dan kurangnya akses pelatihan dan pendidikan berkualitas untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja;
   c. Biaya: Biaya logistrik yang tinggi di luar Jawa membuat produk menjadi kurang kompetitif dan biaya tenaga kerja di beberapa daerah di luar Jawa bisa lebih tinggi dari pada di Jawa;
   d. Keamanan: Ketidakstabilan politik beberapa daerah di luar Jawa dapat menimbulkan risiko bagi investor dan tingkat kriminalitas yang tinggi dibeberapa daerah di luar Jawa dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi.
4. Kontribusi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) terhadap UMKM
   a. Dari sudut pandang pelaku usaha, masih terbatasnya akses terhadap modal dan pembiayaan, terutama UMKM, menjadi salah satu kendala yang menghambat perluasan dan pengembangan usaha mereka. Selain itu, masih banyak ruang bagi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lokal, terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan industri 4.0 dan ekonomi digital, karena bidang- bidang tersebut merupakan potensi usaha yang masih terbuka luas bagi PMDN dan UMKM.

b. Dari sisi pemerintah, dukungan dan fasilitasi terhadap usaha lokal dapat lebih ditingkatkan dengan memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM) dan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

5. Peringkat Kemudahan Berusaha *(Ease of Doing Bussiness)*
   Kemudahan berusaha di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Investasi/BKPM, namun juga seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pelayanan perizinan berusaha bagi para investor yang akan dan telah berinvestasi di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi antara lain adanya ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antara peraturan-peraturan di Indonesia yang menyulitkan bagi investor. Namun Kementerian Investasi/BKPM telah dan senantiasa berusaha mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi investor.
6. Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis
   Untuk meningkatkan kualitas hilirisasi investasi strategis diperlukan komitmen dari berbagai pihak dalam percepatan penyiapan dan pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi yang prospektif untuk ditawarkan maupun dikerjasamakan, sehingga dapat meningkatkan realisasi investasi dan peningkatan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
7. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM
   Terdapat perubahan mekanisme evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baru ditetapkan pada TW III Tahun 2023, sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian dokumen oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM.
8. Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM
   a. Terbitnya peraturan pelaksanaan anggaran baru yang belum tersosialisakan dengan baik sehingga implementasi pelaksanaan pada Kementerian/Lembaga menjadi terkendala.
   b. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia khususnya di bidang pengelolaan anggaran, sehingga terdapat rangkap jabatan antara tugas dan fungsi pada unit kerja dengan pengelola anggaran.

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2023 memiliki susunan sebagai berikut:

1) **RINGKASAN EKSEKUTIF**
   Pada bab ini gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM selama tahun 2023.
2) **BAB I PENDAHULUHAN**
   Bab ini memberikan gambaran terkait penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Kementerian Investasi/BKPM.
3) **BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**
   Bab ini akan memberikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas pembangunan nasional dan penyusunan rencana kerja serta anggaran.
4) **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
   a. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023. Subbab ini akan menguraikan capaian kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
   b. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023. Subbab ini diuraikan rincian penilaian kinerja organisasi yang

dicapai selama tahun 2023 menggunakan empat perspektif *Balanced Scorecard* (BSC).

c. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja. Subbab ini akan menyampaikan rincian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program yang dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, serta gambaran perkembangan dan kendala yang dihadapi.
d. Keterkaitan Kinerja Unit Kerja dalam Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian. Subbab ini akan menyampaikan keterkaitan kinerja dan peran unit kerja dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi/BKPM
e. Capaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Terhadap Target Nasional Dalam RPJMN 2020-2024. Subbab ini memaparkan capaian indikator target yang terkait dengan peran strategis Kementerian Investasi/BKPM yang tercantum pada Lampiran RPJMN 2020-2024.
f. Capaian Kinerja Anggaran. Subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Subbab ini akan menguraikan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target.

5) BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

a. Tindak lanjut atas evaluasi AKIP tahun 2022. Sub bab ini akan meguraikan hasil evaluasi dan rekomendasi penyelanggaraan AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sub bab ini juga akan memaparkan terkait tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM selama tahun 2023 atas rekomendasi yang telah diberikan.
b. Upaya akseleratif lainnya dalam meningkatkan kinerja tahun 2023 berdasarkan rencana tindak lanjut laporan kinerja tahun 2022. Sub bab ini menguraikan berbagai upaya unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM selama tahun 2023 untuk mengimplementasikan berbagai rencana tindaklanjut yang temuat pada laporan kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022).

6) BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan ringkasan pencapaian kinerja selama tahun 2023 dan rencana tindaklanjut sebagai bagian rekomendasi perbaikan kinerja di tahun mendatang.

7) LAMPIRAN

a. Daftar Penghargaan
b. Pernyataan Telah Direviu
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
d. Manual IKU
e. Pohon Kinerja
f. *Cascading* Kinerja

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
TAHUN 2023

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020. Dokumen rencana strategis ini merupakan pedoman penyusunan rencana kerja bagi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan. Rencana strategis ini memuat visi dan misi kelembagaan. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan serta sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program serta kegiatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi menteri/pimpinan lembaga wajib mengacu pada visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden Tahun 2020-2024 sebagaimana termuat dalam Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019. Kementerian Investasi/BKPM menetapkan visi rencana strategis tahun 2020-2024 sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor dua dan nomor delapan dari sembilan misi presiden dan wakil presiden sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2) **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
8) Seluruh Warga;
9) **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**; dan
10) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan potensi, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi ke depan serta upaya perwujudan visi serta misi Presiden dan Wakil Presiden. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2020-2024 menetapkan tujuan:

1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

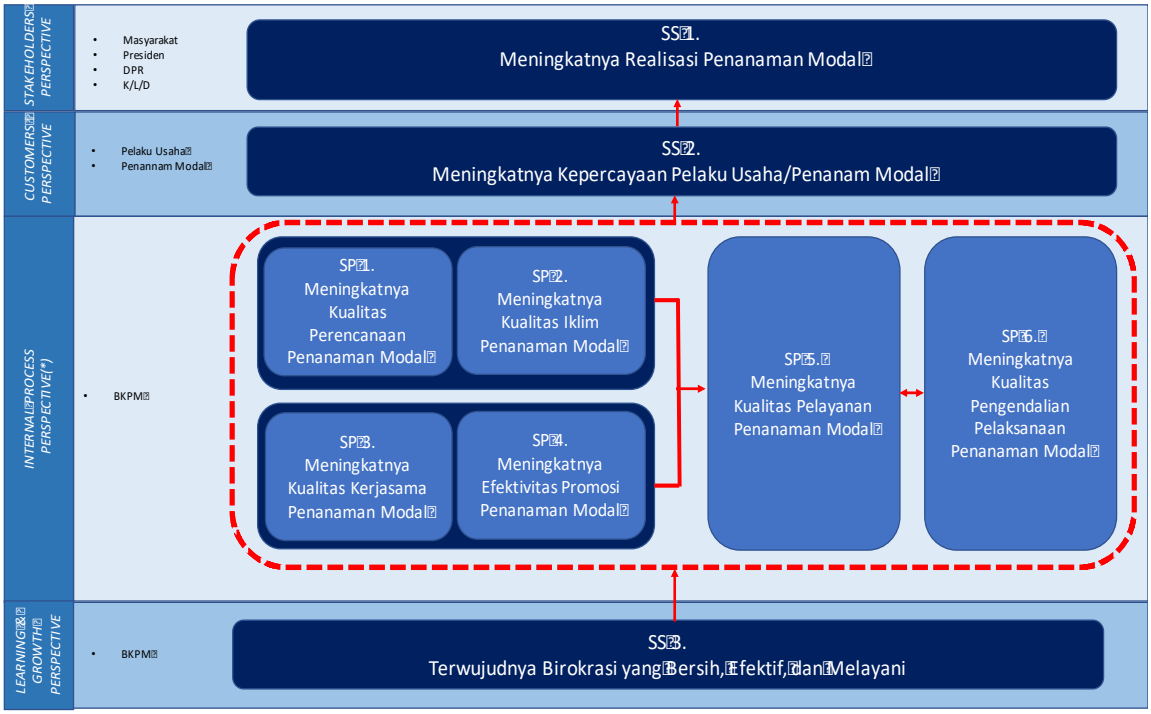

Gambar 2.1
Peta Strategi Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

Gambaran peta strategi dalam upaya Kementerian Investasi/BKPM untuk mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dapat dilihat pada diatas, Peta Strategi dilakukan melalui empat perspektif penilaian dengan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* yaitu dari *stakeholder, customer, internal process*, dan *learning and growth* atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023.

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi secara nyata yang akan dicapai dan dipengaruhi oleh satu atau beberapa program yang dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa sasaran strategis Kementerian/Lembaga dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN, namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional ***"Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian"*** sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024. Berdasarkan pertimbangan sasaran pembangunan nasional, visi-misi Presiden dan Wakil Presiden, serta tujuan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kementerian

Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal merumuskan tiga sasaran strategis pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

Berikut ini merupakan tabel keterkaitan antara visi misi Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2020-2024.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

Dukungan Kementerian Investasi/BKPM terhadapVisi Presiden dan Wakil Presiden	Dukungan Kementerian Investasi/BKPM terhadap Pelaksanaan Misi Presidendan Wakil Presiden	Tujuan	Sasaran Strategis
BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskanGotong Royong."	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Terwujudnya peningkatan daya saingpenanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal
	Pengelolaan Pemerintahanyang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Terwujudnya tata Keloladan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis per tahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Investasi/BKPM dimasukkan ke dalam tiga perspektif *Balanced Scorecard,* yaitu:

- ***Stakeholder Perspective***, terdiri dari satu Sasaran Strategis yaitu (SS-1) Meningkatnya realisasi penanaman modal, dengan indikator kinerja utama:
    a. Nilai Realisasi Penanaman Modal;
    b. Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder;
    c. Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa); dan
    d. Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN Termasuk UMKM.

- ***Customer Perspective,*** terdiri dari satu Sasaran Strategis yaitu (SS-2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, dengan indikator kinerja utama yaitu Peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB).
- ***Learning and Growth Perspective***, terdiri dari satu Sasaran Strategis yaitu (SS-3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, dengan indikator kinerja utama:
    a. Nilai Reformasi Birokrasi BKPM; dan
    b. Opini Atas Laporan Keuangan BKPM.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan target Indikator Kinerja Utama Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Indikator Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

No	Sasaran Stategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS-1 Meningkatnya realisasi penanaman modal							
1	Nilai realisasi penanamanmodal	Rp Triliun	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3
2	Nilai realisasi penanamanmodal sektor sekunder	Rp Triliun	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	%	48,3	49,0	49,7	50,6	51,7
4	Kontribusi investasi dalamnegeri/PMDN termasuk UMKM	%	48,8	49,7	50,3	51,9	53,1
SS-2 Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal							
5	Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*)	Peringkat EoDB	60	56	51	45	40
SS-3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani							
6	Nilai Reformasi Birokrasi BKPM	Predikat/ Nilai	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
7	Opini atas laporan keuangan BKPM	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.1.3. Sasaran Program

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. Perumusan Sasaran Program harus menggambarkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program unit organisasi Eselon I sesuai tugas dan fungsinya, serta memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan Peta Strategi Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024, Sasaran Program ini dimasukkan ke dalam *internal process perspective,* karena berkaitan langsung dengan program unit organisasi Eselon I yang mendukung Sasaran Strategis KementerianInvestasi/BKPM. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kementerian Investasi/BKPM sebagai berikut:

Program Penanaman Modal

1. **(SP-1) Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal**, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal.
2. **(SP-2) Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal**, dengan indikator kinerja:
   a. Jumlah Hari dan Prosedur Dalam Memulai Usaha (*starting a business*); dan
   b. Perusahaan Besar yang Bermitra dengan UMKM.
3. **(SP-3) Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal**, dengan indikator kinerja:
   a. Nilai Komitmen Penanaman Modal; dan
   b. Jumlah Minat Penanaman Modal.
4. **(SP-4) Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman moda**l, dengan indikator kinerja yaitu Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang Telah Diimplementasikan.
5. **(SP-5) Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal**, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal.
6. **(SP-6) Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal**, dengan indikator kinerja yaitu Fasilitasi Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan (*debottlenecking).*

Program Dukungan Manajemen

1. **(SP-7) Terwujudnya ASN Kementerian Investasi/BKPM yang kompeten, professional, dan berintegritas** dengan indikator kinerja Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara).
2. **(SP-8) Terwujudnya penyelanggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien** dengan indikator kinerja pelaksanaan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan penilaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM.

3. **(SP-9) Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel** dengan indikator kinerja nilai kinerja anggaran BKPM.

Tabel 2.3
Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENANAMAN MODAL							
SP-1 Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal							
1	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal	(Indeks)	3,50 dari skala 5	3,65 dari skala 5	3,75 dari skala 5	3,90 dari skala 5	4,00 dari skala 5
SP-2 Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal							
2	Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (*starting a business*)	Hari	8	6	6	4	3
		Prosedur	10	8	7	5	3
3	Perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM	Jumlah Perusahaan	120	145	167	183	205
SP-3 Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal							
4	Nilai komitmen penanaman modal	Rp Triliun	1.362,00	1.430,80	1.614,00	1.833,00	2.065,50
5	Jumlah Minat Penanaman Modal	Minat	6.900	7.400	7.900	8.450	9.100
SP-4 Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal							
6	Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	Kesepakatan / perjanjian/ perundingan	50	53	58	64	69
SP-5 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal							
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	(Indeks)	3,3 dari skala 4	3,35 dari skala 4	3,4 dari skala 4	3,45 dari skala 4	3,5 dari skala 4

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP-6 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal							
8	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*)	Perusahaan	116	126	132	138	143
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP-7 Terwujudnya ASN BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas							
9	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks	70,0%	72,5%	72,5%	75,0%	77,5%
SP-8 Terwujudnya birokrasi BKPM yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima							
10	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
11	Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM	Level	3	3	3	3	3
SP-9 Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabe							
12	Nilai kinerja anggaran BKPM	Predikat/Nilai	Baik (>80%-90%)	Baik (>80%-90%)	Baik (>80%-90%)	Baik (>80%-90%)	Baik (>80%-90%)

Kementerian Investasi/BKPM memiliki dua program yang dilaksanakan oleh tujuh unit Eselon I, yaitu Program Penanaman Modal dan Program Dukungan Manajemen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4
Program yang Dilaksanakan Unit di Kementerian Investasi/BKPM

No	Program	Unit Eselon I
1	Program Penanaman Modal (Teknis)	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
		Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
		Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
		Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman

No	Program	Unit Eselon I
		Modal
		Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
2	Program Dukungan Manajemen	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

2.1.4. Alokasi Anggaran

Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen untuk menjamin akuntabilitas dengan pertanggungjawaban setiap anggaran yang digunakan. Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen untuk menggunakan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kementerian Investasi/BKPM sebagai lembaga pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara, tidak hanya untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, namun juga untuk mewujudkan pengelolaan negara yang bersih dan bebas korupsi. Kementerian Investasi/BKPM pada tahun anggaran 2023 memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.128.605.685.000 (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar enam ratus lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Berikut ini merupakan alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023.

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023

Program	Anggaran (Rp)
Dukungan Manajemen	732.461.117.000
Penanaman Modal	396.144.568.000
Total Pagu	**1.128.605.685.000**

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam dua program sebagai berikut.

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023 Berdasarkan Program dan Satuan Kerja

No.	Program/Satuan Kerja	Pagu 2023 (Rp)
1	**Penanaman Modal**	**732.461.117.000**
	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	58.213.774.000
	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	32.231.135.000
	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	38.171.580.000
	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	286.849.448.000
	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	44.649.040.000
	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	42.643.593.000
	Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.587.768.000
	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	92.989.481.000
	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	33.125.298.000
2	**Dukungan Manajemen**	**396.144.568.000**
	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	396.144.568.000
Total		**1.128.605.685.000**

Alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2023 berdasarkan jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023
Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	158.800.253.000
2	Belanja Barang	908.933.472.000
3	Belanja Modal	60.871.960.000
Total		**1.128.605.685.000**

2.2. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1.	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.099,8
		2.	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (RpTriliun)	483,9
		3.	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	50,6
		4.	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN)termasuk UMKM (%)	51,9
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2.	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	5.	Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) (peringkat)	45
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
3.	Terwujudnya birokrasi yang bersih,efektif, dan melayani	6.	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat/nilai)	A (80)
		7.	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK)	WTP (4)

Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM tahun 2023 merupakan pelaksanaan target kinerja tahun terakhir Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024, yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Investasi/BKPM. Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023 selengkapnya disampaikan pada lampiran.

Dalam pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2023, Kementerian Investasi/BKPM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard (*BSC) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Metode BSC tersebut menerjemahkan tugas, fungsi, tujuan dan strategi ke dalam suatu peta strategi. Peta strategi tersebut menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah sasaran strategis/sasaran program yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu output-nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Perhitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula sebagai berikut:

NKO = ∑ (% Capaian Kinerja x Bobot Perspektif)

Selanjutnya, penghitungan indeks capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Apabila realisasi IKU melebihi target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
2. Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Keempat perspektif dalam penilaian menggunakan metode *Balance Scorecard* memiliki bobot yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perspektif dan Bobot *Balance Scorecard*

No	Perspektif	Bobot		
		4 Perspektif	3 Perspektif	3 Perspektif
1	*Stakeholders*	30%	40%	-
2	*Customers*	30%	-	40%
3	*Internal Process*	20%	30%	30%
4	*Learning and Growth*	20%	30%	30%

Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dikelompokkan ke dalam lima kategori sebagai berikut:

Tabel 2.10
Kategorisasi Kinerja

No	Nilai	Kode	Kategori
1	100 – ke atas	Hijau	Sangat Baik
2	76 – 99	Hijau Muda	Baik
3	61 – 75	Kuning	Cukup
4	51 – 60	Oranye	Kurang
5	50 – ke bawah	Merah	Buruk

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
TAHUN 2023

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023

Kementerian Investasi/BKPM menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2023. Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut ditetapkan melalui perjanjian kinerja Kementerian Investasi/BKPM tahun 2023. Perjanjian kinerja ini menjadi dasar dan rujukan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini juga menjadi dasar pengukuran capaian strategis yang dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024. Berikut ini merupakan rincian target dan capaian sasaran strategis Kementerian Investasi/BKPM tahun 2023.

Tabel 3.1.
Capaian Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2023			Kategori
		Target	Realisasi	%	
Meningkatnya realisasi penanaman modal	1. Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	Rp1.099,8 Triliun	Rp1.418,9 Triliun	129,01	Sangat Baik
	2. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	Rp483,9 Triliun	Rp596,3 triliun	123,23	Sangat Baik
	3. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	50,6%	51,5%	101,78	Sangat Baik
	4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	51,9%	56,2%	108,29	Sangat Baik
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/ penanam modal	5. Peringkat kemudahan berusaha *(Ease of Doing Business)* (peringkat)	45	34	124,44	Sangat Baik
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/ BKPM (predikat/nilai)	A (80)	BB (71,91)	89,89	Baik
	7. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK/nilai)	WTP (4)	WTP (4)	100,00	Sangat Baik

Sesuai dengan RKP 2023 target realisasi investasi sebesar Rp1.099,8 Triliun, dalam arahan Presiden yang disebabkan oleh keterbatasan sumber pertumbuhan perekonomian yang menjadikan investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan dan menetapkan target realisasi investasi sebesar Rp1.400 Triliun. Dengan capaian realisasi investasi sebesar Rp1.418,9 Triliun yang berarti capaian sebesar 129,1% dari target RKP 2023. Sementara mengacu kepada target yang ditetapkan Presiden tingkat capaian 101,3% dari target.

Secara total, nilai realisasi investasi sektor sekunder (manufaktur) sebesar Rp596,3 Triliun (42,0% dari realisasi investasi periode Januari-Desember 2023). Jika dirinci menurut PMA/PMDN, nilai realisasi investasi PMA untuk sektor sekunder (manufaktur) sebesar Rp424,6 triliun (57,1% dari realisasi investasi PMA). Sedangkan

untuk realisasi investasi sektor sekunder (manufaktur) pada PMDN tercatat sebesar Rp171,7 triliun (25,4% dari realisasi investasi PMDN).

Berdasarkan 3 (tiga) sasaran strategis di atas, pada sasaran pertama yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal memperoleh kategori **"Sangat Baik"** pada semua IKU (4 IKU) yang meliputi:

1) Nilai realisasi penanaman modal;
2) Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder;
3) Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa); dan
4) Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM

Sasaran strategis ke dua yaitu meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal memperoleh kategori **"Sangat Baik"**.

Sasaran strategis ke tiga yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani pada IKU Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM memperoleh kategori "Baik" dan IKU Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK/nilai) memperoleh kategori **"Sangat Baik"**.

3.2. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023

Kementerian Investasi/BKPM menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam melakukan penilaian kinerja organisasi. Menggunakan metode BSC, perhitungan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dilakukan dengan mengkomparasikan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sudut pandang. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dapat diketahui data capaian NKO Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023 adalah sebesar 109,87. Nilai tersebut berdasar pada capaian kinerja masing-masing sudut pandang sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Rata-Rata Sasaran (%)	Rata-Rata Perspektif (%)	Skor (%)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)									
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal	1. Nilai realisasi penanaman modal	(Rp Triliun)	1.099,8	1.418,9	120,00	Sangat Baik	112,52	112,52	33,76
	2. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder	(Rp Triliun)	483,9	596,3	120,00	Sangat Baik			
	3. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	(%)	50,6	51,5	101,78	Sangat Baik			
	4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM	(%)	51,9	56,2	108,29	Sangat Baik			
CUSTOMER PERSPECTIVE (30%)									
2. Meningkatnya kepercayaan	5. Peringkat kemudahan berusaha	(peringkat)	45	34	120,00	Sangat Baik	120,00	120,00	36,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Rata-Rata Sasaran (%)	Rata-Rata Perspektif (%)	Skor (%)
pelaku usaha / penanam modal	(*Ease of Doing Business*)								
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (20%)									
3. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	6.Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal	(indeks)	3,9 dari skala 5,0	4,35 dari skala 5,0	111,54	Sangat Baik	111,54	105,62	21,12
4. Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	7. Persentase rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan ditindaklanjuti	(%)	100	100	100,00	Sangat Baik	100,00		
5. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	8. Jumlah hari dalam memulai usaha/*starting a business*	(hari)	4	2,5	120,00	Sangat Baik	113,85		
	9. Jumlah prosedur dalam memulai usaha/*starting a business*	(jumlah prosedur)	5	2	120,00	Sangat Baik			
	10. Persentase realisasi kesepakatan Perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan	(%)	32	32,5	101,56	Sangat Baik			
6. Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	11. Nilai rencana penaman modal hasil berbagai kegiatan promosi penaman modal	(Rp Triliun)	1.833	1.979	107,97	Sangat Baik	108,42		
	12. Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal	(jumlah minat)	8.450	9.200	108,88	Sangat Baik			
7. Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	13. Kesepakatan/ perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	(kesepakatan / perjanjian / perundingan)	64	64	100,00	Sangat Baik	100,00		
8. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	14. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	(Indeks)	3,45 dari skala 4	3,34 dari skala 4	96,81	Baik	96,81		
9. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	15. Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya	(%)	79	106	120,00	Sangat Baik	120,00		
10. Meningkatnya kualitas teknologi	16. Indeks Sistem Pemerintahan	(nilai)	3	2,83	94,33	Baik	94,33		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Rata-Rata Sasaran (%)	Rata-Rata Perspektif (%)	Skor (%)
informasi penanaman modal	Berbasis Elektronik (SPBE)								
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (20%)									
11. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	17. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM	(predikat/ nilai)	A (80)	BB (71,91)	89,89	Baik	94,95	94,95	18,99
	18. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM	(opini BPK/nilai)	WTP (4)	WTP (4)	100,00	Sangat Baik			
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)									109,87
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)							106,58		

Berdasarkan data di atas, selain mendapatkan perhitungan terkait Nilai Kerja Organisasi (NKO) juga didapatkan perhitungan terkait Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). NPS merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan tanpa mempertimbangkan perspektif dalam *Balanced Scorecard* (BSC). Dari perhitungan di atas, Kementerian Investasi/BKPM memperoleh NKO sebesar 109,87. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 106,06 atau tumbuh sebesar 3,59%. Berikut ini ditampilkan grafik perkembangan Nilai Kerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM dari tahun 2018-2023.

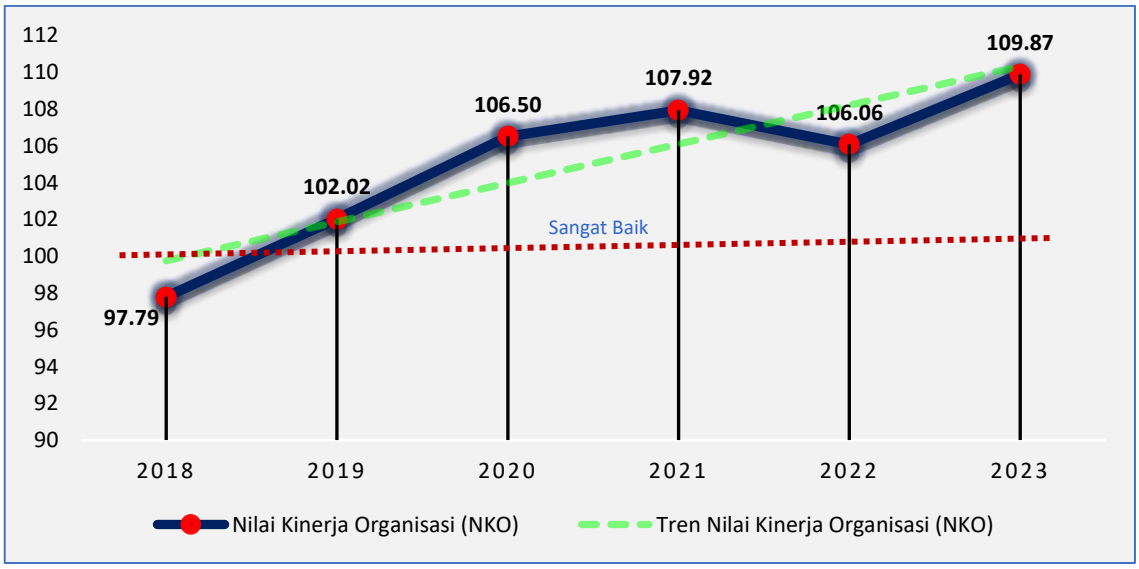

Gambar 3.1.
Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2018-2023

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan. Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, NKO Kementerian Investasi/BKPM sudah masuk dalam kategori "**Sangat Baik**" yaitu berdasarkan nilai **100-ke atas**. Secara

lebih rinci, realisasi NKO Kementerian Investasi/BKPM selama 6 (enam) tahun dari tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM
Tahun 2018-2023

No	Perspektif	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	*Stakeholder*	27,91	30,35	42,83	43,09	43,44	33,76
2	*Customer**	30,45	30,19	N/A	N/A	N/A	36,00
3	*Internal Process*	19,05	21,48	33,54	34,66	32,96	21,12
4	*Learning and Growth*	20,38	20,00	30,13	30,17	29,66	18,99
NKO		**97,79**	**102,02**	**106,50**	**107,92**	**106,06**	**109,87**

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kementerian Investasi/BKPM melakukan pengukuran kinerja secara periodik, sedangkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara triwulan/semester/tahunan. Biro Perencanaan Program dan Anggaran adalah pihak yang melaksanakan pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran hingga pelaporan secara berkala. Tujuan pelaksanaan analisis capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM pada setiap sasaran strategis untuk setiap sudut pandang adalah memaparkan realisasi indikator kinerja utama, problematika dasn kendala yang dihadapi serta upaya pemulihan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Mengacu pada peta strategi Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020-2024, capaian kinerja dapat dianalisis dengan menggunakan 4 (empat) sudut pandang *Balanced Scorecard* (BSC) yang masing-masing diukur dengan bobot tertentu yaitu:

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan atau tidak langsung baik swasta maupun pemerintah memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi. Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran strategis "Meningkatnya realisasi penanaman modal" untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) IKU yaitu:
   a. Nilai realisasi penanaman modal;
   b. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder;
   c. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa); dan
   d. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM.
2. *Customers Perspective* dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customers* dan/atau harapan organisasi terhadap *customers*. Pengguna layanan ini merupakan pihak yang terkait dengan pelayanan suatu organisasi. Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran strategis "Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal" dan diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu Peringkat kemudahan berusaha *(Ease of*

Doing Business) yang mengacu pada *World Competitiveness Yearbook 2023* yang diterbitkan *Institute for Management Development* (IMD).

3. *Internal Process Perspective* dengan bobot 20%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer (value chain).* Perspektif ini ditetapkan melalui 8 (delapan) sasaran program sebagai berikut:
   a. Sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal" diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
   b. Sasaran "Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis" diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu persentase rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan ditindaklanjuti;
   c. Sasaran "Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal" yang diukur melalui 3 (tiga) IKU yaitu jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha/*starting a business*; Jumlah prosedur dalam memulai usaha/*starting a business*; dan Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan;
   d. Sasaran "Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal" yang diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu nilai rencana penanaman modal hasil berbagai kegiatan promosi penanaman modal dan Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal;
   e. Sasaran "Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan;
   f. Sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal;
   g. Sasaran "Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya; dan
   h. Sasaran "Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal" diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot 20%, mencakup sasaran yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customers* dan *stakeholder*. Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran stategis "Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani" dan diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu:
   a. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat/nilai); dan
   b. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK/nilai)

Sasaran Strategis (SS-1) "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal"

Salah satu capaian kinerja utama dari Kementerian Investasi/BKPM adalah jumlah realisasi penanaman modal/investasi secara keseluruhan. Untuk mengukur kemajuan investasi, Kementerian Investasi/BKPM terus meningkatkan kinerjanya baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirinci sebagai berikut:

IKU-1: Nilai Realisasi Penanaman Modal

Indikator pertama yang diukur adalah nilai realisasi penanaman modal yang dihitung dari perolehan segala bentuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing diluar investasi minyak dan gas (migas), perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan kecil. Berikut rincian target dan realisasi indikator tersebut:

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Penanaman Modal

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal									
Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1): Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp Triliun)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
858,5	901	968,4	1.207,20	1.099,8	1.418,9	17,54	120,00	Sangat Baik	1.239,3

Mengacu pada penjabaran data diatas, dengan target sebesar Rp1.099,8 Triliun, realisasi nilai penanaman modal sebesar Rp1.418,9 Triliun sehingga capaian indikator ini sebesar 120,00%. Adapun dilihat dari realisasi dari tahun 2021, indikator ini menunjukkan tren positif karena dengan target yang terus meningkat, realisasi juga terus meningkat dan bahkan telah melampaui target akhir di 2024 yang tercantum dalam Renstra Kementerian Investasi/BKPM. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 maka terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 17,54% di mana capaian realisasi penanaman modal tahun Januari–Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.207,20 Triliun.

Jika dijabarkan lebih lanjut, dari total realisasi Rp1.418,9 Triliun, sebesar Rp744 Triliun atau sekitar 52,4% merupakan realisasi PMA serta Rp674,9 Triliun atau sekitar 47,6% merupakan realisasi PMDN. Capaian realisasi PMDN tahun 2023 juga meningkat apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 22,1% dari tahun 2022 (Rp552,8 Triliun). Hal ini menunjukan proporsi sebaran penanaman modal relatif seimbang. Sedangkan jika dilihat dari sebaran wilayahnya, sebesar Rp730,8 Triliun atau sekitar 51,5% investasi dari luar jawa dan Rp688,1 Triliun atau sekitar 48,5% merupakan investasi dari pulau Jawa. Hal ini menunjukan pembangunan ekonomi Indonesia semakin merata dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

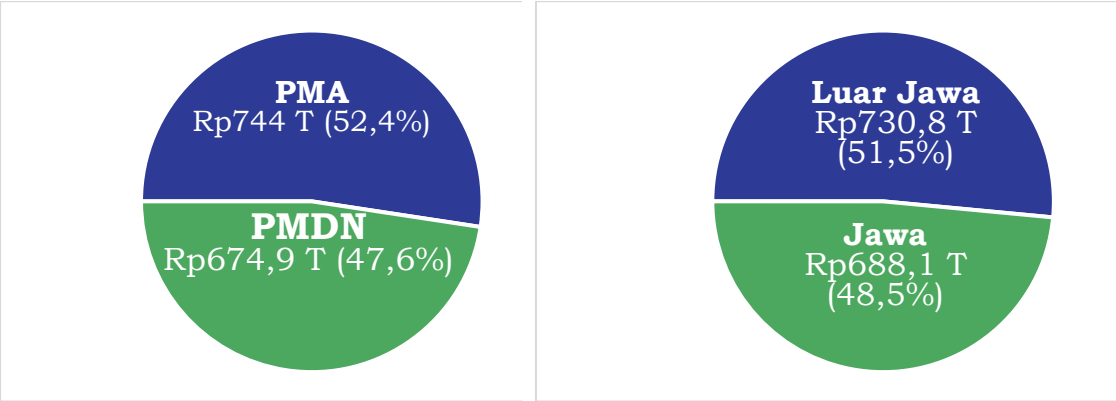

Gambar 3.2.
Realisasi Nilai Investasi
Berdasarkan PMA & PMDN serta Jawa & Luar Jawa Tahun 2023

Jika dirinci berdasarkan sebaran negara PMA, Singapura sejak tahun 2019 menempati urutan pertama, lalu diikuti Tiongkok dan Hongkong. Dimana dari tahun 2019 hingga tahun 2023, nilai investasi Singapura selalu meningkat dan di tahun 2023 nilai investasi Singapura telah mencapai USD15,4 Miliar. Berikut rincian 10 besar negara-negara yang menanamkan modalnya di Indonesia sejak tahun 2019.

2019			2020			2021			2022			2023		
No.	Negara	Investasi	No.	Negara	Investasi	No.	Negara	Investasi	No.	Negara	Investasi	No.	Negara	Investasi
1	Singapura	6,5	1	Singapura	9,8	1	Singapura	9,4	1	Singapura	13,3	1	Singapura	15,4
2	Tiongkok	4,7	2	Tiongkok	4,8	2	Hongkong	4,6	2	Tiongkok	8,2	2	Tiongkok	7,4
3	Jepang	4,3	3	Hongkong	3,5	3	Tiongkok	3,2	3	Hongkong	5,5	3	Hongkong	6,5
4	Hongkong	2,9	4	Jepang	2,6	4	Amerika Serikat	2,5	4	Jepang	3,6	4	Jepang	4,6
5	Belanda	2,6	5	Korea Selatan	1,8	5	Jepang	2,3	5	Malaysia	3,3	5	Malaysia	4,1
6	Malaysia	1,4	6	Belanda	1,4	6	Belanda	1,8	6	Amerika Serikat	3,0	6	Amerika Serikat	3,3
7	Korea Selatan	1,0	7	Malaysia	1,0	7	Korea Selatan	1,6	7	Korea Selatan	2,3	7	Korea Selatan	2,5
8	Amerika Serikat	0,98	8	Amerika Serikat	0, 74	8	Malaysia	1,4	8	Belanda	1,2	8	Belanda	1,3
9	Britis Virgin Islands	0,74	9	Taiwan	0,55	9	Bermuda	0,67	9	Bermuda	0,96	9	British Virgin Islands	0,7
10	Australia	0,34	10	Australia	0,34	10	Swiss	0,59	10	Inggris	0,62	10	Australia	0,5

Gambar 3.3.
Tren Realisasi Investasi Berdasarkan Negara Asal (Miliar USD)

Selain dari proposi PMA dan PMDN serta Jawa dan Luar Jawa, nilai realisasi penanaman modal tahun 2023, juga mengalami peningkatan per triwulannya. Pada triwulan I, realisasinya sebesar Rp329 Triliun. Angka ini kemudian meningkat menjadi Rp350 Triliun pada triwulan II dan mencapai Rp374 Triliun pada triwulan III. Hingga akhir tahun atau triwulan IV realisasinya sebesar Rp366 Triliun.

Perkembangan nilai realisasi investasi juga menunjukkan tren positif jika melihat data realisasi sejak tahun 2017 dan kemudian dirinci per triwulannya. Pada tahun 2017 misalnya, capaian realisasi sebesar Rp692,9 Triliun dengan target sebesar Rp678,8 Triliun. Realisasi ini meningkat sebesar Rp1.207,2 Triliun pada tahun 2022 atau terjadi

peningkatan sebesar 77,84%. Lalu pada tahun 2023, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, angka realisasi ini kembali meningkat menjadi Rp1.418,9 Triliun atau dengan kata lain terjadi peningkatan sebesar 17,54%.

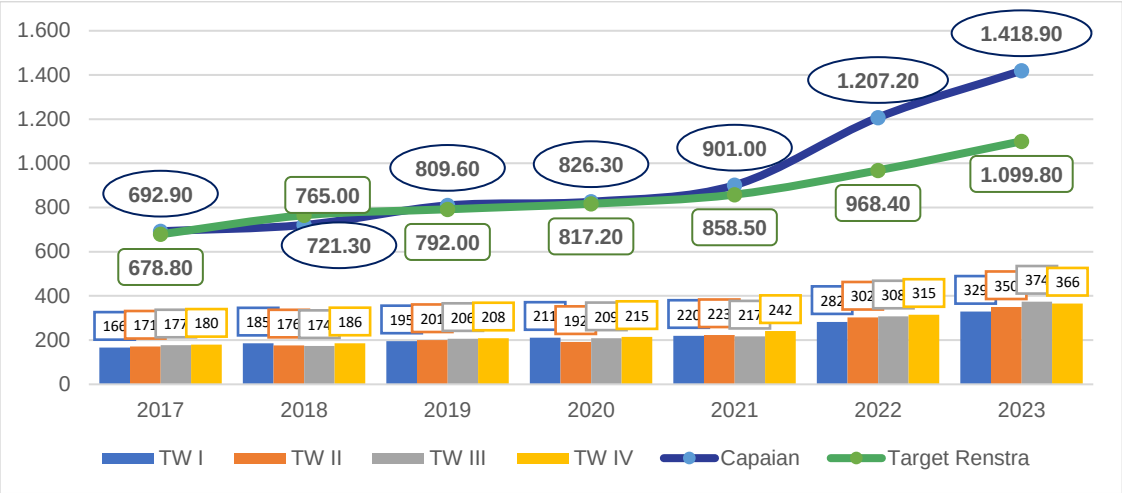

Gambar 3.4.
Perkembangan Nilai Realisasi Penanaman Modal per Triwulan Periode 2017-2023

Jika dilihat berdasarkan sektor usahanya, realisasi terbesar PMA berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan sebesar USD11,8 Miliar. Sedangkan dari PMDN, realisasi terbesar adalah sektor pertambangan sebesar Rp86,7 Triliun.

Gambar 3.5.
Lima Sektor dengan Realisasi Terbesar Berdasarkan Sektor Pada Tahun 2023

Pada Grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa realisasi investasi sektor sekunder didominasi oleh PMA, sedangkan PMDN mendominasi sektor tersier (infrastruktur dan jasa).

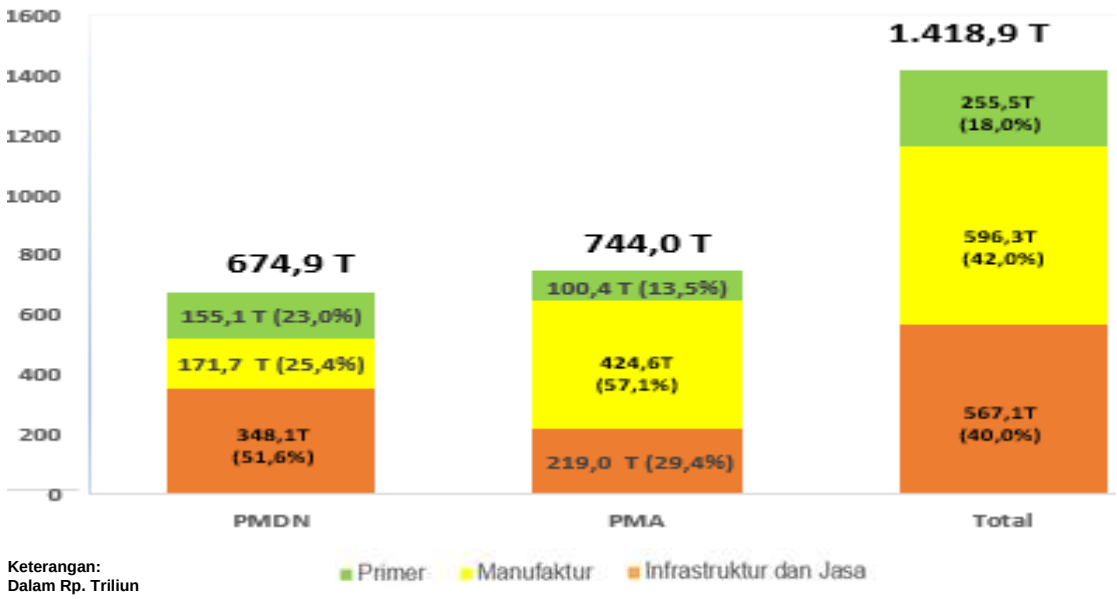

Gambar 3.6.
Realisasi Investasi PMDN dan PMA Berdasarkan Kelompok Sektor Pada Tahun 2023

Dilihat dari kualitas realisasi investasi baik berdasarkan sektor maupun sebaran wilayah dan penciptaan lapangan kerja dari data di atas menunjukan bahwa investasi di bidang manufaktur memberikan kontribusi yang sangat besar dalam realisasi investasi dan pemerataan pembangunan ekonomi yang memberikan nilai tambah di dalam negeri. Sementara dari sebaran investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diluar Jawa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Realisasi investasi PMA/PMDN periode Januari-Desember 2023 untuk lokasi proyek di luar Pulau Jawa tercatat sebesar Rp 730,8 Triliun (51,5% dari total realisasi investasi). Nilai ini meningkat 14,8% secara *year-on-year* dibandingkan dengan tahun 2022.

Realisasi investasi PMDN termasuk UMKM periode Januari-Desember 2023 tercatat sebesar Rp 953 Triliun (56,2% dari total realisasi investasi). Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian 2023 terdapat peningkatan sebesar 9,3%.

Capaian nilai realisasi penanaman modal tahun 2023 diperoleh berdasarkan penghimpunan LKPM sebanyak 337.620 proyek yang terdiri dari 266.722 proyek PMDN dan 70.898 proyek PMA. Seiring dengan peningkatan capaian realisasi investasi yang signifikan, jumlah LKPM *Online* yang berhasil dihimpun Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun 2023 meningkat sebesar 29,38% dari tahun 2022 sebanyak 260.955 proyek. Faktor lainnya adalah jumlah proyek PMDN yang terhimpun pada tahun 2023 tersebut meningkat sebesar 34,79% dari tahun 2022 sebesar 197.875 proyek dan jumlah proyek PMA yang terhimpun pada tahun 2023 meningkat sebesar 18,00% dari tahun 2022 sebanyak 60.080 proyek. Dalam menghimpun LKPM *Online* dari seluruh penanam modal (PMDN/PMA) di Indonesia, Kementerian Investasi/BKPM berupaya meningkatkan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga dan DPMPTSP baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Target nilai realisasi investasi tahun 2023 yang ditetapkan di dalam Renstra BKPM

2020-2024 merupakan target bersama yang harus dicapai dengan seluruh DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui koordinasi yang baik dan sinergis antara pusat dan daerah. Adapun target realisasi investasi per provinsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Investasi Per Provinsi Tahun 2023

No.	Provinsi	Target	Capaian 2023			PMDN	PMA
		(Rp T)	(Rp T)	Rank	(%)	(Rp T)	(Rp T)
1	Jawa Barat	188,03	210,6	1	112,01	88,01	8,28
2	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	168,58	166,7	2	98,88	95,2	71,48
3	Jawa Timur	126,29	145,1	3	114,89	74,94	70,17
4	Sulawesi Tengah	111,68	112	4	100,28	4,77	0,45
5	Bantens	82,97	103,9	5	125,18	37,97	4,45
6	Maluku Utara	78,67	80,87	6	102,80	6,9	73,97
7	Riau	90	78,47	7	87,19	48,24	30,23
8	Kalimantan Timur	64,5	71,9	8	111,47	52,17	19,72
9	Jawa Tengah	65,7	56,13	9	85,43	32,99	1,56
10	Sumatera Selatan	55	47,48	10	86,33	25,6	21,88
11	Sumatera Utara	50	39,06	11	78,12	21,57	17,48
12	Nusa Tenggara Barat	22,87	37,7	12	164,84	30,77	6,93
13	Kalimantan Utara	29,98	27	13	90,06	8	19
14	Kalimantan Barat	22,94	22,15	14	96,56	14,89	7,26
15	Kepulauan Riau	30	20,16	15	67,20	8,86	11,31
16	Kalimantan Selatan	16,21	19,76	16	121,90	14,91	4,85
17	Kalimantan Tengah	16,09	19,1	17	118,71	8,78	10,33
18	Bali	13,77	18,92	18	137,40	6,95	11,97
19	Sulawesi Selatan	14,55	16,45	19	113,06	11,47	0,34
20	Papua Tengah	20,45	14,79	20	72,32	0,46	14,33
21	Sulawesi Tenggara	21,73	14,37	21	66,13	7,73	7,24
22	Aceh	8	12,56	22	157,00	8,88	3,68
23	Lampung	11	10,89	23	99,00	7,63	3,26
24	Sulawesi Utara	5,35	10,71	24	200,19	7,69	0,2
25	Jambi	9,86	9,61	25	97,46	8,94	0,67
26	Kepulauan Bangka Belitung	21,26	9	26	42,33	7,9	1,1
27	Bengkulu	19,31	8,3	27	42,98	7,2	1,1
28	Sumatera Barat	8	6,27	28	78,38	4,49	1,79
29	Daerah Istimewa Yogyakarta	2,82	5,7	29	202,13	5,02	0,68
30	Nusa Tenggara Timur	5,31	5,25	30	98,87	3,41	1,84
31	Gorontalo	5,48	4,4	31	80,29	3,9	0,5
32	Maluku	2,02	3,48	32	172,28	1,91	1,57

No.	Provinsi	Target	Capaian 2023			PMDN	PMA
		(Rp T)	(Rp T)	Rank	(%)	(Rp T)	(Rp T)
33	Papua Barat Daya	2,56	3	33	117,19	1,7	1,3
34	Sulawesi Barat	3,36	2,3	34	68,45	2	0,3
35	Papua Barat	2,05	1,6	35	78,05	1,2	0,4
36	Papua Selatan	1,42	1,43	36	100,70	0,15	1,28
37	Papua	2,17	1,3	37	59,91	1,18	0,12
38	Papua Pegunungan	0,03	0,12	38	400,00	0,12	-

Selanjutnya, jika dilihat realisasi investasi berdasarkan wilayahnya, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan investasi tertinggi yaitu sebesar Rp210,6 Triliun atau sekitar 14,8% dari total realisasi investasi. Selanjutnya adalah DKI Jakarta dengan realisasi sebesar 166,7 Triliun atau sekitar 11,7% dari total realisasi investasi.

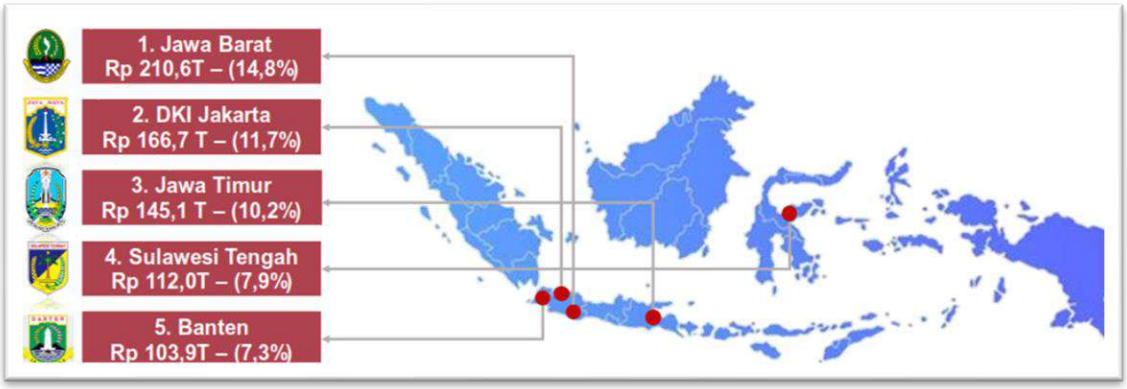

Gambar 3.7.
Lima Sektor dengan Realisasi Berdasarkan Provinsi Pada Tahun 2023

PMDN

No	Bidang Usaha	Investasi (Rp Miliar)	Proyek
1	Pertambangan	86.689,2	6.782
2	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	77.099,2	9.030
3	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	76.659,4	16.491
4	Industri Makanan	54.827,9	7.763
5	Jasa Lainnya	52.048,2	35.875
6	Perdagangan dan Reparasi	48.557,8	84.078
7	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	42.912,0	5.060
8	Listrik, Gas dan Air	37.584,9	4.592
9	Industri Kimia Dan Farmasi	33.869,9	2.920
10	Konstruksi	32.813,4	56.973
11	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	25.886,2	2.003
12	Hotel dan Restoran	23.362,9	14.482
13	Kehutanan	23.032,5	1.466
14	Industri Kertas dan Percetakan	9.295,0	1.492
15	Industri Karet dan Plastik	9.256,1	1.480
16	Industri Tekstil	7.949,8	1.723
17	Industri Mineral Non Logam	7.770,4	1.717
18	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	6.172,7	971
19	Industri Lainnya	6.113,8	3.479
20	Industri Kayu	4.610,7	1.475
21	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	4.263,3	2.632
22	Perikanan	2.506,5	3.990
23	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1.641,5	248
	TOTAL	674.923,4	266.722

PMA

No	Bidang Usaha	Investasi (US$ Juta)	Proyek
1	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	11.787,2	1.318
2	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	5.615,5	2.959
3	Industri Kimia Dan Farmasi	4.805,2	1.779
4	Pertambangan	4.715,0	969
5	Industri Kertas dan Percetakan	3.430,8	633
6	Listrik, Gas dan Air	2.742,1	852
7	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	2.574,5	6.336
8	Industri Makanan	2.262,6	3.037
9	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	2.046,2	1.118
10	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1.945,6	1.320
11	Jasa Lainnya	1.826,5	14.140
12	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	1.478,4	1.481
13	Perdagangan dan Reparasi	943,8	20.209
14	Hotel dan Restoran	811,1	7.088
15	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	782,5	593
16	Industri Karet dan Plastik	575,8	938
17	Industri Mineral Non Logam	523,4	353
18	Industri Tekstil	457,5	1.303
19	Industri Lainnya	382,5	1.389
20	Konstruksi	281,8	1.962
21	Industri Kayu	157,8	582
22	Kehutanan	96,0	182
23	Perikanan	25,7	357
	TOTAL	50.267,5	70.898

Gambar 3.8.
Jumlah Investasi dan Proyek Pada Tahun 2023

Kementerian Investasi/BKPM melalui beberapa unit kedeputiannya telah melaksanakan beberapa hal untuk mendukung capaian indikator ini, diantaranya:

1. Pelaksanaan sebanyak dari 266.722 proyek sepanjang tahun 2023 untuk mendukung PMDN dan 70.898 proyek PMA. Untuk PMDN, proyek terbanyak dilaksanakan pada sektor perdagangan dan reparasi sebanyak 84.078 proyek dan sektor konstruksi 56.973 proyek. Sedangkan untuk PMA, proyek terbanyak dilaksanakan pada sektor perdagangan dan reparasi sebanyak 20.209 proyek dan sektor jasa lainnya sebanyak 14.140 proyek.
2. Optimalisasi *Single Sign On* (SSO) sebagai media elektronik penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Mekanisme ini sudah diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko bahwa kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan kepada Kementerian Investasi/BKPM.
3. Optimalisasi fungsi koordinasi dengan daerah. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan konsolidasi data realisasi penanaman modal untuk membahas target per wilayah, perkembangan subsistem pengawasan, pencapaian realisasi anggaran Dana Dekonsentrasi maupun Dana Alokasi Khusus maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha maupun aparatur.
4. Meningkatkan jalinan kemitraan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini penting untuk membangun ekosistem industri yang saling sinergi serta kolaborasi antara industri besar dan UMKM. Hingga Triwulan IV/2023, Kementerian Investasi/BKPM telah merilis data Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tercatat selama tahun 2023 pada Sistem OSS sebanyak 3.771.540 proyek dengan nilai komitmen investasi sebesar Rp278,1 triliun. Untuk skala mikro tercatat dari 3.345.383 proyek dengan nilai komitmen sebesar Rp155,1 triliun dan skala kecil tercatat 426.157 proyek dengan nilai komitmen sebesar Rp123 triliun. Total UMK sebanyak 3.771.540 proyek dan sebesar Rp278,1 triliun di luar angka capaian realisasi investasi Non UMK tahun 2023.
5. Implementasi dari beberapa rekomendasi kebijakan yang tercantum pada LAKIN 2023 yaitu dengan Optimalisasi proses pemantauan melalui LKPM *Online* disertai dengan penguatan proses *punishment*/atau pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak tertib.
6. Meningkatkan pembinaan melalui penguatan kapasitas SDM Aparatur di pusat dan daerah melalui skema bimbingan teknis dan sosialisasi aturan teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja ke-1 ini secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi yaitu:

1. Masih adanya permasalahan terkait dengan perizinan, permasalahan dengan pemegang saham, hambatan dari masyarakat sekitar, dan gangguan keamanan;
2. Fasilitasi penyelesaian masalah terkait penanaman modal terkendala oleh pembagian kewenangan dengan pemerintah daerah sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens; dan
3. Masih belum optimalnya penanganan kasus dalam rangka percepatan investasi.

4. Pemanfaatan dokumen tata ruang untuk lahan-lahan potensi belum optimal dan terintegrasi sehingga belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan terhadap penanam modal.

Oleh karenanya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan beberapa hal diantaranya:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar realisasi investasi yang telah ditargetkan bisa tercapai;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan fasilitas penanaman modal dan/atau melaksanakan ketentuan peraturan penanaman modal guna meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha; dan
3. Optimalisasi fasilitasi pada *Tax Allowance* (TA) dan *Tax Holiday* (TH). Fasilitas *Tax Allowance* cukup diminati para investor untuk berinvestasi pada 166 bidang usaha di berbagai lokasi investasi yang tersebar di Indonesia.

Adapun pada tahun 2024, beberapa rencana tindak lanjut dari penguatan kedepannya diantaranya:

1. Menyusun rencana kegiatan yang melibatkan daerah pada awal tahun anggaran dan segera diinformasikan kepada DPMPTSP yang akan terlibat. Diharapkan kegiatan tersebut dapat terprogram dan lebih sistematis sehingga lebih memperlancar pelaksanaannya pada tahun berjalan dan meminimalisir kegiatan yang tidak dapat terlaksana;
2. Melakukan pendekatan secara intensif melalui sosialisasi tentang pemanfaatan sistem pelaporan kegiatan penanaman modal secara *online* (LKPM *Online*) berbasis risiko sehingga LKPM dapat disampaikan tepat waktu dan benar sesuai dengan periode dan tahapan pelaporan; dan
3. Pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dan terkoordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

IKU-2: Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder

Indikator selanjutnya adalah Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder. Indikator ini ditetapkan untuk menghitung realisasi penanaman modal sektor sekunder yang diraih baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di luar migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil. Adapun ruang lingkup sektor sekunder meliputi:

1. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya;
2. Industri Makanan;
3. Industri Kimia dan Farmasi;
4. Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain;
5. Industri Kertas dan Percetakan
6. Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam
7. Industri Tekstil

8. Industri Karet dan Plastik
9. Industri Mineral Non-Logam
10. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
11. Industri Kayu; dan
12. Industri Lainnya.

Berikut rincian tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder:

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal									
Indikator Kinerja Utama 2 (IKU-2) Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder (Rp Triliun)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
268,7	325,4	352,5	497,70	483,9	596,3	19,81	120,00	Sangat Baik	646,1

Pada tahun 2023, realisasi indikator Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder sebesar Rp596,3 Triliun dengan target sebesar Rp483,9 Triliun sehingga capaiannya sebesar 120,00%. Realisasi ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,81%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024, realisasi 2023 belum melampaui target yaitu sebesar Rp646,1 Triliun. Hal ini menjadi catatan evaluasi dan perbaikan di tahun 2024, agar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mampu mencapai target akhir Resntra pada tahun 2024.

Gambar 3.9.
Realisasi Penanaman Modal
Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Periode Tahun 2019-2023

Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp171,7 Triliun atau 25,4% dari total PMDN, sedangkan untuk PMA sektor industri memberikan kontribusi sebesar Rp424,6 Triliun atau 57,1% dari total PMA. Sehingga total kontribusi sektor industri pada tahun ini mencapai Rp596,3 Triliun dari target sebesar Rp483,9 Triliun.

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam pencapaian indikator ini adalah:

1. Belum optimalnya penerapan atas penggunaan kendaraan berbasis listrik (*battery electric vehicle*) khususnya di wilayah perkotaan karena belum adanya aturan teknis yang mengaturnya secara komprehensif;
2. Peta peluang Investasi yang telah disusun belum diimplementasikan lebih lanjut secara maksimal/optimal
3. Insentif kemudahan berinvestasi bagi UMKM yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya data yang tersedia.

Oleh karenanya, Kementerian Investasi/BKPM telah melaksanakan beberapa hal untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi yang intens dengan instansi lain serta menguatkan kualitas regulasi penanaman modal. Berikut beberapa hal yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait penyusunan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan;
2. Penerbitan Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi;
3. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi;
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perkoperasian ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Masukan terhadap RUU tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri;
8. Masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kota Tangerang; dan
9. Masukan terhadap Rumusan RUU Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Lebih lanjut, pada tahun 2023 Kementerian Investasi/BKPM terus menyempurnakan iklim investasi yang kondusif melalui implementasi berbagai kebijakan strategis diberbagai sektor produktif yang telah disiapkan, salah satunya

dengan mengawal proses penanaman modal oleh investor strategis secara *end-to-end*. Selain itu, dalam rangka mencapai target realisasi penanaman modal sektor sekunder, telah diberikan insentif/kemudahan bagi pelaku usaha di sektor manufaktur. Adanya kebijakan Pemerintah untuk terus mendorong Hilirisasi juga memberikan kontribusi terhadap nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder. Kementerian Investasi/BKPM juga melaksanakan kegiatan fasilitasi permasalahan atau eksekusi realisasi investasi bagi perusahaan sektor sekunder yang memiliki kendala/hambatan, agar kendala/hambatan yang dihadapi dapat diurai, sehingga perusahaan dapat merealisasikan investasinya.

Sebagai komitmen untuk meningkatkan kinerja realisasi penanaman modal sektor sekunder, Kementerian Investasi/BKPM memiliki rencana tindak lanjut kedepannya, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui integrasi kegiatan yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik;
2. Optimalisasi LKPM *Online* secara periodik serta penertiban dengan mekanisme sanksi yang tegas apabila terdapat kelalaian penanam modal; dan
3. Akselerasi pengawasan yang terintegrasi baik dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra, pemerintah daerah, serta Administrator KEK dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

IKU-3: Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (Di Luar Jawa)

Dalam rangka mengejar pemerataan ekonomi khususnya untuk wilayah diluar jawa, Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi untuk mencapai pemerataan yang ditujukan terhadap wilayah-wilayah di luar Jawa. Oleh karenanya ditetapkan indikator Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (Di Luar Jawa) untuk mengukur capaian investasi khususnya di luar pulau Jawa. Berikut tabel rincian indikator tersebut:

Tabel 3.7.
Capaian Indikator Kinerja Utama Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa)

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal									
Indikator Kinerja Utama 3 (IKU-3) Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa) (%)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
49	52	49,7	52,7	50,6	51,5	-2,28	101,78	Sangat Baik	51,7

Pada tahun 2023, ditargetkan sebesar 50,6% dari total investasi terlaksana di luar pulau Jawa. Realisasi investasi di luar pulau Jawa sebesar Rp730,8 Triliun atau sebesar 51,5% dari total keseluruhan investasi sehingga capaiannya sebesar 101,78%. Akan tetapi walaupun indikator ini sudah tercapai, realisasinya mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 52,7%. Sejak Triwulan III tahun

2020, realisasi investasi di luar pulau Jawa selalu lebih besar dibandingkan pulau Jawa. Hal ini merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa yang masif pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pada tahun 2021, realisasi indikator ini sebesar 52% (Rp468,2 Triliun) dan kemudian mengalami peningkatan persentase menjadi 52,7% (Rp636,3 Triliun) pada tahun 2022. Sehingga hal ini menunjukkan terjadi tren penurunan realisasi indikator melalui perhitungan persentase, walaupun secara jumlah rupiah semakin meningkat setiap tahunnya.

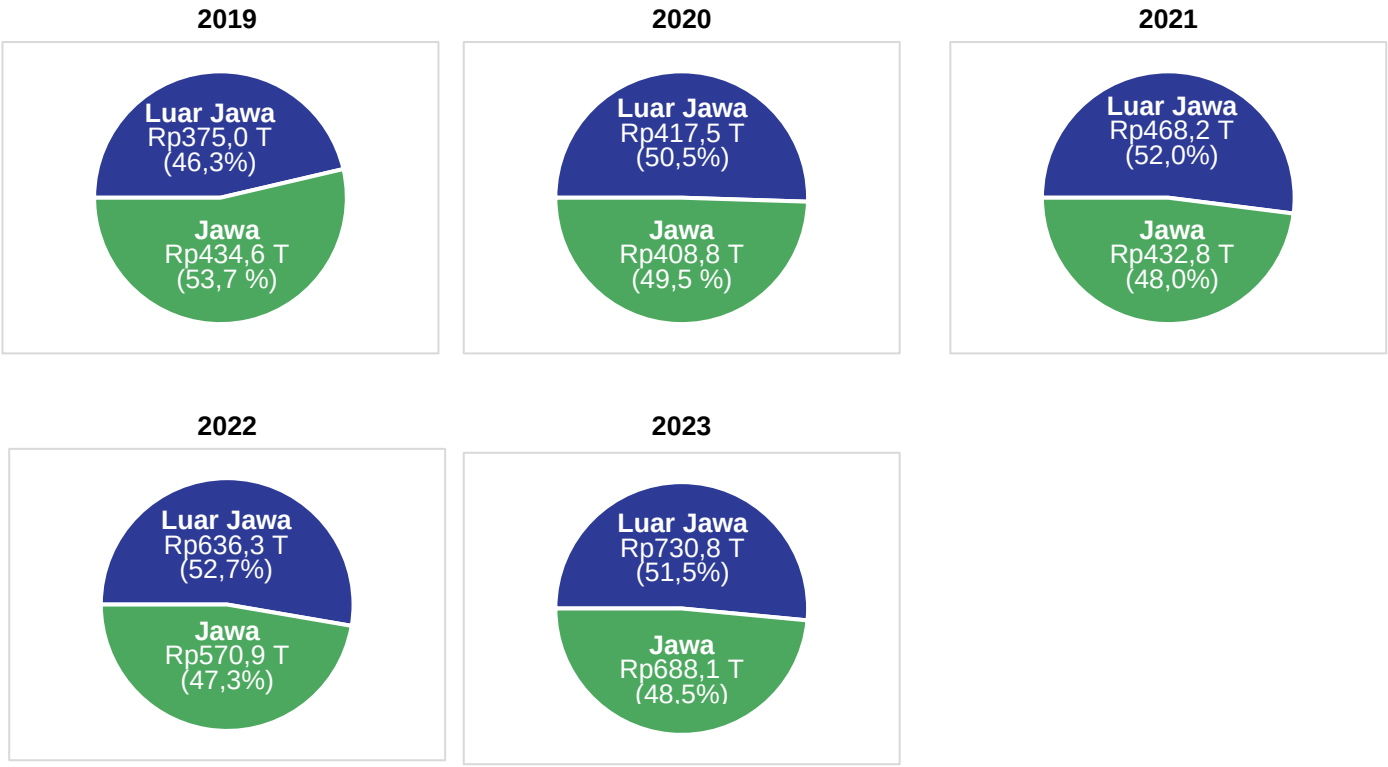

Gambar 3.10.
Realisasi Penanaman Modal di Jawa dan Luar Pulau Jawa Periode 2019-2023

Rekapitulasi capaian indikator ini diperoleh dari LKPM yang memberikan gambaran mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala kepada Kementerian Investasi/BKPM. Secara keseluruhan sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) perlu diperbaiki, mengingat realisasi penanaman modal masih terfokus di Jawa. Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan dan harmonisasi peraturan menjadi kunci penyebaran penanaman modal ke luar Jawa.

Dalam upaya pencapaian indikator ini, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya:

1. Kurangnya infrastruktur dasar pendukung seperti jalan, pelabuhan, dan bandara diluar jawa sehingga mempersulit akses ke lokasi proyek/kegiatan, sehingga hal ini

meningkatkan biaya logistik, dan juga menyebabkan pasokan energi tidak stabil dan mahal;

2. Keterampilan tenaga kerja di luar Jawa belum memadai dan belum sesuai dengan kebutuhan industri modern. Hal ini ditambah dengan kurangnya akses pelatihan dan pendidikan berkualitas untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja;
3. Masih tingginya biaya logistik di luar Jawa membuat produk menjadi kurang kompetitif dan biaya tenaga kerja di beberapa daerah di luar Jawa bisa lebih tinggi dari pada di Jawa;
4. Ketidakstabilan politik dan tingkat kriminalitas yang tinggi di beberapa daerah di luar Jawa dapat menimbulkan risiko bagi investor dan dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi.

Akan tetapi, dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM telah melaksanakan beberapa kebijakan strategis, diantaranya:

1. Melakukan percepatan pengembangan kawasan industri dan pariwisata di beberapa titik lokasi di luar Pulau Jawa. Kebijakan hilirisasi sendiri menjadi titik balik peningkatan kualitas investasi di luar Jawa. Kementerian Investasi/BKPM telah menyusun Peta Jalan Hilirasi Investasi Strategis dengan total kebutuhan investasi sebesar USD545,3 Miliar.
2. Akselerasi hilirisasi untuk beberapa komoditas strategis seperti batubara, nikel, timah, tembaga, minyak bumi, hingga kelapa sawit tersebar melimpah di wilayah-wilayah luar Jawa.
3. Penguatan dan perluasan implementasi peta jalan sebagai *trigger mechanism* bagi pemerintah pusat dan daerah agar lebih optimal dalam mengundang investor menggarap komoditas-komoditas tersebut;
4. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan konektivitas di luar pulau Jawa; Memberikan insentif dan kemudahan investasi bagi investor yang berminat menanam modal di luar pulau Jawa, seperti pembebasan pajak, keringanan biaya perizinan, dan bantuan teknis;
5. Percepatan pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus di luar pulau Jawa, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, yang menawarkan potensi sumber daya alam dan pasar yang besar;
6. Melakukan promosi dan sosialisasi investasi di luar pulau Jawa untuk menarik minat dan perhatian investor; dan
7. Mendorong kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, serta antara investor besar, menengah, dan kecil, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Kedepannya, Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen untuk meningkatkan kinerja realisasi penanaman modal sektor sekunder dengan menyusun rencana tindak lanjut, diantaranya:

1. Penguatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur di luar Jawa terkait dengan simplifikasi penanaman modal seperti pembebasan pajak, keringanan biaya perizinan, fasilitasi permasalahan atau kendala yang dihadapi penanam modal;

2. Optimalisasi pengembangan kawasan industri bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui integrasi kegiatan yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik;
4. Optimalisasi LKPM *Online* secara periodik serta penertiban dengan mekanisme sanksi yang tegas apabila terdapat kelalaian penanam modal; dan
5. Akselerasi pengawasan yang terintegrasi baik dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra, pemerintah daerah, serta Administrator KEK dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melalui subsistem pengawasan pada sistem OSS.

IKU-4: Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM

Indikator Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diarahkan untuk mengukur tingkat kemampuan para penanam modal dalam negeri termasuk UMKM. Pelibatan UMKM dalam proses investasi merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia. Berikut rincian tabel penjabaran indikator tersebut:

Tabel 3.8.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal									
Indikator Kinerja Utama 4 (IKU-4) Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM (%)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
49,7	49,6	50,3	45,80	51,9	47,60	3,93	91,71	Baik	53,1

Pada tahun 2023, realisasi PMDN sebesar Rp674,9 Triliun dari total realisasi investasi keseluruhan sebesar Rp1.418,9 Triliun, sehingga total persentasenya sebesar 47,6% dari total investasi. Persentase realisasi tersebut jika dikaitkan dengan target 2023 yaitu sebesar 51,9%, dapat dikatakan bahwa capaian ini masih belum tercapai dengan persentase sebesar 91,71%. Jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, capaian indikator ini juga tidak tercapai, seperti pada tahun 2021 capaiannya sebesar 99,7% dan pada tahun 2022 capaiannya sebesar 91,05%. Sehingga apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2023 meningkat 3,93% walaupun belum mencapai target.

Dalam proses pencapaiannya, Kementerian Investasi/BKPM menghadapi beberapa kendala, diantaranya:

1. Belum adanya dokumen perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif yang menjadi acuan bersama untuk kegiatan hilirisasi;
2. Belum masifnya sosialisasi terhadap pelaku UMKM sehingga layanan fasilitasi tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM;

3. Terbatasnya akses terhadap modal dan pembiayaan, khususnya untuk UMKM sehingga iklim usaha khususnya untuk UMKM masih belum sepenuhnya dapat dikembangkan;
4. Belum optimalnya pengembangan SDM khususnya untuk mendukung industri 4.0 dan ekosistem ekonomi digital. Hal ini berdampak terhadap belum optimalnya pemanfaatan layanan digital dari Kementerian Investasi/BKPM kepada pelaku UMKM;
5. Belum tersedianya data yang komprehensif yang menggambarkan kondisi UMKM yang berdampak pada proses penyusunan kebijakan pemberian kemudahan kepada UMKM belum optimal; dan
6. Masih belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan PMDN diantaranya:

1. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis mengenai peran masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mendukung dan mewujudkan hilirisasi investasi strategis di Indonesia, khususnya pada komoditas yang tercantum dalam Peta Jalan (*Roadmap*) Hilirisasi Investasi Strategis fase I, dengan keluaran berupa 1 (satu) dokumen Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batubara.
2. Pada sektor UMKM, Kementerian Investasi/BKPM melakukan penyesuaian target baru dari semula persentase jumlah penerbitan surat persetujuan pemberian fasilitas (*Masterlist*, *Tax Allowance* atau *Tax Holiday*) menjadi persentase Badan Usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (*Masterlist*, *Tax Allowance* atau *Tax Holiday*). Persetujuan ini diberikan untuk meningkatkan iklim investasi oleh penanam modal dalam negeri dengan harapan kemudahan usaha akan meningkatkan investasi dalam negeri.
3. Optimalisasi fasilitasi terhadap UMKM terkait dengan bea masuk, pengurangan pajak penghasilan (PPh) dan fasilitasi *Tax Holiday*. Adapun rincian jumlah badan usaha yang diterbitkan persetujuan pemberian fasilitas dari periode bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) badan usaha, dengan rincian pemberian fasilitas bea masuk (*Masterlist*) sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) badan usaha, pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan dalam bentuk *Tax Allowance* sebanyak 12 (dua belas) badan usaha dan dalam bentuk *Tax Holiday* sebanyak 30 (tiga puluh) badan usaha.
4. Pembenahan layanan publik kepada masyarakat untuk memudahkan proses perizinan investasi bagi pelaku usaha dalam negeri melalui penyediaan layanan konsultasi berbantuan OSS sepanjang tahun 2023, antara lain layanan berbantuan konsultasi secara tatap muka di *front office* serta layanan berbantuan elektronik, yaitu melalui email, Whatsapp, Instagram, dan *video call*.
5. Meningkatkan kemudahan berusaha dengan mempercepat proses perizinan berusaha melalui sistem OSS;

6. Mengeksekusi realisasi investasi besar dengan mengawal proyek-proyek strategis nasional dan prioritas nasional, serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh investor;
7. Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM dengan memberikan fasilitas dan insentif bagi investor yang melibatkan UMKM dalam rantai pasok mereka;
8. Menyebarluaskan investasi berkualitas dengan mengembangkan kawasan industri dan ekonomi khusus, serta mendorong investasi di sektor-sektor unggulan dan potensial;
9. Mendorong peningkatan investasi dalam negeri atau PMDN termasuk juga UMKM dengan memberikan bimbingan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku usaha lokal; dan
10. Mengembangkan hilirisasi investasi sumber daya alam dengan mendorong investasi di sektor-sektor yang dapat meningkatkan nilai tambah dan substitusi impor.

Kedepannya, Kementerian Investasi/BKPM telah merumuskan beberapa rencana tindak lanjut, diantaranya:

1. Perumusan kebijakan terkait dengan kemudahan penerbitan NIB bagi pelaku UMKM maupun IKM yang didasarkan pada klasifikasi data UMKM yang lebih komprehensif;
2. Penyusunan kebijakan terkait dengan insentif usaha-usaha besar yang bermitra dengan pelaku UMKM yang berujung pada penciptaan ekosistem usaha yang integratif dan memiliki nilai tambah;
3. Meningkatkan fitur-fitur dan layanan OSS untuk meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan, khususnya kepada pelaku UMKM;
4. Peningkatan koordinasi teknis dengan pemerintah daerah terkait dengan penerbitan NIB dan fasilitasi UMKM terhubung dengan usaha besar; dan
5. Penyediaan database UMKM yang lebih lengkap dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

Sasaran Strategis (SS-2) "Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal"

Salah satu aspek yang ditingkatkan ekosistem investasi di Indonesia adalah dengan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha serta menjaga kondusivitas iklim investasi. Hal ini penting untuk menjaga minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karenanya, Kementerian Investasi/BKPM menetapkan sasaran strategis yaitu "Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal", dengan IKU komponen pendukung sebagai berikut:

IKU-5: Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*)

Untuk mendukung sasaran strategis "Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal" telah ditetapkan indikator yaitu Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dengan mengacu pada pemeringkatan oleh Bank Dunia melalui *Report Ease of Doing Business.* Adapun pemeringkatan ini, sejak tahun 2022

mengacu pada *World Competitiveness Yearbook* 2023 yang diterbitkan oleh *Institute for Management Development* (IMD). Berikut penjabaran indikator tersebut:

Tabel 3.9.
Capaian Indikator Kinerja Utama Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business)*

Sasaran Strategis 2 (SS-2) Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal									
Indikator Kinerja Utama 5 (IKU-5): Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) (peringkat)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
56	N/A*	51	N/A*	45	34**	-	120,00	Sangat Baik	40,00

Keterangan:
(*) : World Bank tidak melakukan penerbitan laporan EODB.
(**) : Mengacu pada *World Competitiveness Yearbook.*

Pada tahun 2021, World Bank secara resmi diumumkan pemberhentian penerbitan laporan EODB dan adanya rencana penyusunan pendekatan baru yang dijadikan sebagai parameter penilaian iklim investasi bagi pelaku usaha. Sejak tahun 2022 peringkat kemudahan berusaha di Indonesia mengacu pada *World Competitiveness Yearbook* 2023 yang diterbitkan *Institute for Management Development* (IMD).

Dalam *World Competitiveness Yearbook* 2023, indeks daya saing kemudahan berusaha Indonesia mengalami peningkatan yang semula berada di peringkat 44 di tahun 2022, menjadi peringkat 34 di tahun 2023 dari total 64 negara di seluruh dunia. Komponen yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah kinerja perekonomian dan efisiensi bisnis. Peringkat kinerja perekonomian mengalami kenaikan dari yang sebelumnya berada di posisi 42 menjadi 29 di 2023, naik sebesar 13 peringkat. Faktor yang menjadi kekuatan pada komponen ini meliputi: pertumbuhan PDB, kestabilan harga BBM, serta pertumbuhan ekspor dan investasi. Sementara kelemahan pada komponen ini adalah menurunnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Pada komponen efisiensi bisnis, Indonesia berada di peringkat ke 20 pada 2023 dari peringkat ke 31 di tahun sebelumnya. Pada komponen ini, faktor yang menjadi kekuatan adalah pada pertumbuhan angkatan kerja, remunerasi profesional, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta akses pada layanan keuangan. Seluruh sub-faktor pada komponen ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, *World Bank* mengembangkan *Business Ready (B-Ready)* sebagai pengukuran baru Reformasi Kebijakan yang mendukung perkembangan sektor swasta menggantikan Laporan *Doing Business. B-Ready* merupakan penilaian iklim investasi dan kemudahan berusaha di 180 negara di seluruh dunia sebagai pengganti dari survei *Ease of Doing Business*, dengan 10 Topik Indikator: *Business Entry, Business Location, Utility Services, Labor, Financial Services, International Trade, Taxation, Dispute Resolution, Market Competition dan Business Insolvency*, yang hasilnya akan diumumkan pada semester pertama tahun 2024

Jika melihat tren pada periode tahun 2013-2020, telah terjadi perubahan yang cukup signifkan dengan adanya penurunan angka hasil penilaian. Pada tahun 2013, nilai Indonesia masih berada diangka 128. Angka ini terus menurun hingga pada tahun 2018 sudah berada diangka 72. Akan tetapi tren positif ini berhenti pada tahun 2019 dan tahun 2020 karena adanya kenaikan hasil penilaian menjadi 73.

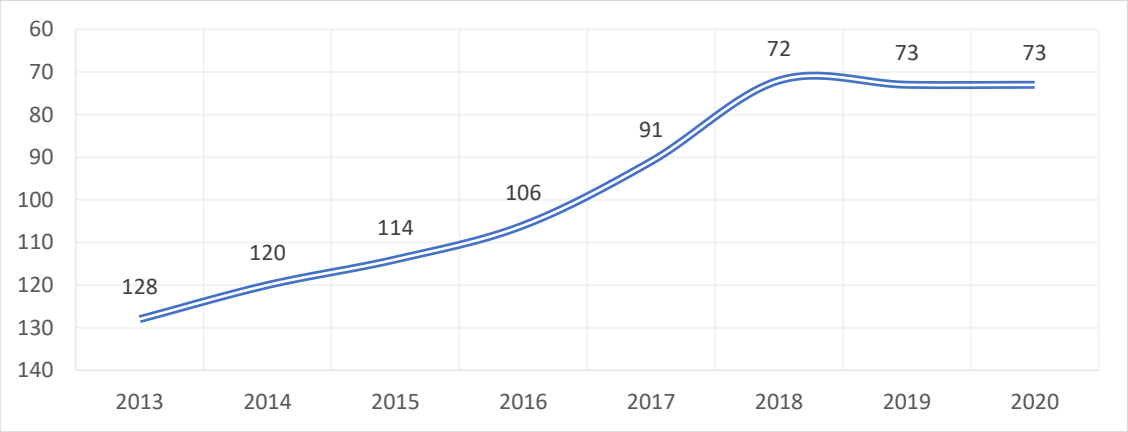

Gambar 3.11.
Hasil Penilaian Bank Dunia
Report of Ease Doing Business Periode Tahun 2013-2020

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian indikator ini, diantaranya adalah:

1. Terjadinya penurunan indikator efisiensi bisnis yang disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan angkatan kerja yang berkualitas, remunerasi yang dianggap belum baik, serta produktivitas tenaga kerja yang rendah;
2. Akses layanan keuangan yang belum sepenuhnya dapat diakses baik oleh pelaku usaha khususnya UMKM maupun tenaga kerja;
3. Adanya penyesuaian indikator penilaian yang berdampak pada belum optimalnya penyediaan data untuk pengukuran penilaian; dan
4. Proses rekapitulasi data untuk pemenuhan indikator penilaian yang membutuhkan koordinasi lintas instansi Kementerian/Lembaga yang belum optimal.

Menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM selalu berkomitmen dan berupaya mengembangkan iklim investasi agar semakin kondusif. Beberapa upaya yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dan kebijakan yang berlaku di Indonesia agar investor mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.
2. Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan deregulasi peraturan, diseminasi kebijakan, *Focus Group Discussion* (FGD) dan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional yang selain melibatkan Kementerian/Lembaga juga melibatkan instansi daerah seperti DPMPTSP dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
3. Mempercepat kemudahan berusaha yang sebelumnya 6 hari menjadi 2,5 hari. Sedangkan pada tahun 2023 nilai kepercayaan pelaku usaha/penanam modal

meningkat apabila dinilai dari keberhasilan dalam mempercepat proses kemudahan berusaha dari target 4 hari menjadi 2,5 hari.

4. Penyederhanaan prosedur dalam memulai usaha/*starting a business* (prosedur) dari target 7 prosedur menjadi menjadi 2 prosedur dengan diimplementasikannya sistem *Online* Single *Submission* (OSS), sedangkan pada tahun 2023 capaian nilai kepercayaan pelaku usaha/penanam modal meningkat apabila dinilai dari jumlah prosedur dalam memulai usaha/*starting a business* (prosedur) dari target 5 prosedur menjadi menjadi 4 prosedur dengan perbaikan dan penyempurnaan sistem OSS.
5. Kementerian Investasi/BKPM ditunjuk sebagai *focal point* atau koordinator melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, Otorita Jasa Keuangan dan Kementerian/Lembaga lainnya serta melakukan Penyusunan Rencana Aksi Survei *B-Ready* sebagai tindak lanjutnya.

Kedepannya, Kementerian Investasi/BKPM akan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut pada tahun 2024, diantaranya:

1. Melakukan konsolidasi internal untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan berusaha mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi;
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan;
3. Optimalisasi OSS untuk penerbitan NIB khususnya untuk pelaku UMKM; dan
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah melalui proses digitalisasi serta peningkatan sarana-prasarana pendukung.

Sasaran Program (SP-1) "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal"

Kementerian Investasi/BKPM telah menetapkan Sasaran Program (SP-1) yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal. Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan realisasi penanaman modal yang berkualitas dan berorentasi pada pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Disamping itu, aspek perencanaan dalam hal ini juga berperan untuk mengintegrasikan peran pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi/BKPM dengan pemerintah daerah. Untuk mengukur kualitasi perencanaan penanaman modal, maka ditetapkan indikator sebagai berikut:

IK-6: Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

Indikator Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dihitung berdasarkan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden (*stakeholder*) atas pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh Unit Kerja di

lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Indeks kepuasan diukur dalam skala linear kisaran 1-5 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik). Berikut rincian indikator tersebut:

Tabel 3.10.
Capaian Indikator Kinerja
Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

Sasaran Program 1 (SP-1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal									
Indikator Kinerja 6 (IK-6): Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal (indeks)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
3,65 dari skala 5,0	4,23 dari skala 5,0	3,75 dari skala 5,0	4,44 dari skala 5,0	3,90 dari skala 5,0	4,35 dari skala 5,0	-2,03	111,54	Sangat Baik	4,0 dari skala 5,0

Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal memiliki realisasi sebesar 4,35 dari target yang ditetapkan 3,90 sehingga capaiannya sebesar 111,54%. Walaupun realisasi telah mencapai target, akan tetapi realisasi tahun 2023 mengalami penurunan 2,03% dari tahun 2022 yang memiliki realisasi sebesar 4,44. Adapun target akhir renstra untuk indikator ini pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 4,0.

Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya:

1. Belum optimalnya identifikasi ataupun *stakeholder mapping* terkait dengan tematik kajian perencanaan investasi;
2. Dokumen perencanaan eksisting belum sepenuhnya dapat mengakomodir beberapa tematik investasi;
3. Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang terlibat belum disertai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi sehingga masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan kegiatan; dan
4. Proses penyusunan dokumen perencanaan teknokratik belum sepenuhnya dapat mengakomodir masukan dari para investor maupun *offtaker*

Untuk mengatasi hambatan serta mendukung pencapaian indikator ini, Kementerian Investasi telah menyusun beberapa dokumen perencanaan untuk meningkatkan kualitas iklim investasi di Indonesia. Berikut beberapa kebijakan strategis yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan koordinasi awal dengan para *stakeholder* terkait di lingkungan pemerintah dan swasta dalam rangka pemilihan tematik kajian dan *investment project ready to offer*. Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan atas isu-isu terkini yang menjadi *highlight* pada pengembangan investasi sektor jasa dan kawasan.
2. Koordinasi aktif dan pelibatan Kementerian/Lembaga terkait, para pelaku usaha/asosiasi, dan pemerintah daerah dalam forum-forum diskusi untuk

mendapatkan data-data yang *up to date* dan relevan dengan dokumen perencanaan yang sedang disusun. Hingga di tahap akhir, Kementerian Investasi/BKPM melakukan evaluasi menyeluruh untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan penanaman modal dilakukan melalui berbagai upaya di antaranya dengan melakukan analisis dukungan proyek terhadap pencapaian pilar *Sustainable Development* (SDGs) dan aspek keberlanjutan dari Panduan Investasi Lestari dan menjaring masukan dari calon *offtaker*/pelaku usaha melalui *market consultation*.
4. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan penanaman modal juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia/*capacity building.*
5. Membuat *platform digital* melalui *website* www.regionalinvestment.bkpm.go.id yang menampilkan proyek-proyek Peta Peluang Investasi (PPI). Pada tahun 2023, telah dilakukan *update* atau pembaharuan pada halaman *website*. Dalam fitur kontak dan pengunduhan dokumen juga telah dilakukan pendataan sehingga tim dari Kementerian Investasi dapat melakukan tindak lanjut terhadap potential investor yang berminat.

Kementerian Investasi/BKPM juga telah menetapkan strategi perencanaan sebagai rencana tindak lanjut kedepannya untuk meningkatkan realisasi penanaman modal melalui 3 dokumen yaitu:

1. Penyusunan arah kebijakan penanaman modal untuk mendorong dampak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari investasi melaui dokumn Renstra dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
2. Penyusunan profil proyek *low hanging fruit* yang secara cepat direalisasi oleh calon investor pada dokumen Peta Jalan Peluang Investasi; dan
3. Identifikasi komoditas baru yang berpotensi menjadi sumber investasi baru seperti hilirisasi bahan sumber daya alam.

Secara lebih rinci, dokumen perencanaan penanaman modal sebagai berikut:

Kriteria	Dokumen *Investment Project Ready to Offer* (IPRO)	Peta Peluang Investasi (PPI)
Tujuan	Pendetailan kajian pada aspek-aspek yang belum lengkap dan pengemasan informasi proyek yang akan ditawarkan berdasarkan dokumen perencanaan yang ada (Kajian/Studi Pendahuluan/Pra FS/FS)	Mengidentifikasi tingkat kelayakan proyek berdasarkan beberapa analisis dasar (aspek legal, teknis, pasar, finansial, sosial ekonomi dan aspek berkelanjutan)
Bentuk Keluaran	▪ Pendetailan kajian ▪ *Resume* informasi proyek dari Pra-FS/FS ▪ Memo Info dan Infografis	▪ Dokumen Pra-FS ▪ Memo Info dan Infografis ▪ Video lokasi proyek dskt ▪ WEBGIS
Cakupan Pembahasan	▪ Resume Kajian/Masterplan ▪ Pendetailan lokasi/kegiatan usaha ▪ *Mapping* proyek (Peta Eksisting & Rencana Pengembangan ke Depan) ▪ Konsep Pengembangan ▪ Dukungan infrastruktur	▪ Analisis Legal ▪ Analisis Teknis ▪ Analisis Pasar ▪ Analisis Sosial dan Ekonomi ▪ Analisis Lingkungan

Kriteria	Dokumen *Investment Project Ready to Offer* (IPRO)	Peta Peluang Investasi (PPI)
	▪ MADA (*Market Analysis & Demand Assessment*) ▪ Analisa Keuangan/Finansial	▪ Analisis Keuangan/Finansial dan Bisnis ▪ Aspek berkelanjutan ▪ Mitigasi Risiko ▪ Digitasi calon lokasi proyek
Kebutuhan Data	▪ Data Primer ▪ Data Sekunder ▪ Survei (jika terdapat kekurangan data)	▪ Data Primer ▪ Data Sekunder ▪ Survei detail terhadap wilayah studi

Secara Umum, beberapa tahapan kegiatan dari penyusunan *Investment Project Ready to Offer (*IPRO) dan Peta Peluang Investasi adalah Rapat Koordinasi Daerah, FGD dan Kunjungan Lapangan, yang bertujuan untuk menggali kebutuhan data dan informasi terkait proyek, konsolidasi serta memohon dukungan kepada Pemerintah Provinsi Daerah proyek terkait dan kunjungan lapangan dalam rangka pengecekan calon lokasi proyek, infrastruktur, kesesuaian aspek tata ruang dan status lahan, konfirmasi data kepada pemerintah daerah terkait.

Salah satu contoh IPRO yang disusun di Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah "*Hotel Resort & Culture – Leisure Park*". Kegiatan Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan *Investment Project Ready to Offer (*IPRO) ini dilaksanakan pada tanggal 12-15 September 2023 di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dihadiri oleh BAPPEDA, Dinas Pariwisata, Dinas Tata Ruang dan DPMTPSP Labuan Bajo. Rapat koordinasi ini menghasilkan Pengembangan rencana proyek investasi "*Hotel Resort & Culture – Leisure Park*" yang meliputi Hotel Resort (mencakup fasilitas: hotel, villa – eco resort, health & wellness center, MICE & WeddingVenue), dan Culture – Leisure Park (yang didalamnya mencakup: Museum & Gastro Gallery, dan Beach Club & Clift Bar) akan menciptakan *multiplier* pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 3.11
Pelaksanaan *Rapat Koordinasi* dan Kunjungan Lapangan
Kegiatan *Investment Project Ready to Offer (*IPRO)

Keluaran/Output dari kegiatan IPRO adalah pendetailan analisis kajian yang telah dilakukan Kementerian Investasi/BKPM sebelumnya, *resume* informasi proyek dari

Pra-FS/FS, Memo Info dan infografis dengan pembahasan *resume* kajian/masterplan, pendetailan lokasi/kegiatan usaha, *mapping* proyek (peta eksisting & rencana pengembangan ke depan), konsep pengembangan, dukungan infrastruktur MADA (*Market Analysis & Demand Assessment*) dan analisa keuangan/finansial.

Gambar 3.12
Output/Keluaran Kegiatan *Investment Project Ready to Offer (*IPRO)

Salah satu contoh Peta Peluang Investasi yang disusun di Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah proyek “Budidaya Udang Terintegrasi”. Kegiatan Rapat *Focus Group Discussion* (FGD) dan Kunjungan Lapangan Kegiatan Peta Peluang Investasi dilaksanakan pada tanggal 30 - 31 Agustus 2023 di Kabupaten Panajam Paser Utara dan dihadiri oleh oleh Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta perwakilan OPD Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota

Balikpapan serta Kota Bontang. Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa lokasi potensial pengembangan proyek IKN diantaranya berada di Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN dengan total luas 6.671 Ha dan di Kawasan Pengembangan IKN Kabupaten Penajam Paser Utara dengan total luas lokasi potensial 200 Ha.

Gambar 3.13
Pelaksanaan *Forum Group Discussion (FGD)* dan Kunjungan Lapangan
Kegiatan Peta Peluang Investasi

Keluaran/Output dari kegiatan Peta Peluang Investasi yaitu Dokumen Pra-FS, Memo Info dan Infografis, Video lokasi proyek dengan pembahasan berupa Analisis Legal Analisis Teknis, Analisis Pasar, Analisis Sosial dan Ekonomi, Analisis Lingkungan, Analisis Keuangan/Finansial dan Bisnis, Aspek berkelanjutan, Mitigasi Risiko dan Digitasi lokasi proyek.

Gambar 3.14
Output/Keluaran Kegiatan Peta Peluang Investasi (PPI)

Sasaran Program 2 (SP-2) "Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis"

Dalam rangka percepatan hilirisasi untuk komoditas-komoditas potensial di Indonesia, Kementerian Investasi/BKPM terus berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif agar hilirisasi yang telah ditargetkan dapat berjalan optimal. Merespon hal tersebut, Kementerian Investasi/BKPM menetapkan sasaran program yaitu "Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis". Untuk mengukur keberhasilan sasaran program tersebut maka ditetapkan Indikator Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

IK-7: Persentase Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis Yang Akan Ditindaklanjuti

Indikator yang ditetapkan untuk mendukung sasaran program ini adalah persentase rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan ditindaklanjuti. Berikut tabel rincian capaian indikator tersebut:

Tabel 3.11.
Capaian Indikator Kinerja
Persentase Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis yang Akan Ditindaklanjuti

Sasaran Program 2 (SP-2) Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis									
Indikator Kinerja 7 (IK-7) Persentase Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis yang Akan Ditindaklanjuti									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target (rekomendasi)	Realisasi (rekomendasi)	Target (%)	Realisasi (%)				
N/A	N/A	8	8	100	100	100	100	Sangat Baik	

Berdasarkan penjabaran tabel diatas, pada tahun 2023 realisasi indikator kinerja berupa persentase rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan ditindaklanjuti adalah 100% sehingga capaiannya adalah 100%. Jika dilihat dari capaian tahun sebelumnya, realisasinya sebanyak 8 (delapan) rekomendasi kebijakan dengan target 8 (delapan) rekomendasi kebijakan, sehingga capaiannya sebesar 100%. Kementerian Investasi/BKPM terus mengupayakan adanya peningkatan kualitas hilirisasi investasi strategis melalui serangkaian proses perencanaan yang melibatkan berbagai pihak seperti kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, juga asosiasi/pelaku usaha.

Kementerian Investasi/BKPM telah menyusun beberapa rekomendasi untuk optimalisasi kegiatan investasi hilirisasi. Koordinasi yang intensif dengan beberapa *stakeholders* seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat luas telah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan penyusunan rekomendasi menjadi lebih tepat sasaran dan juga sebagai bagian dari mitigasi risiko dampak.

Keberhasilan capaian indikator kinerja berupa persentase rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan ditindaklanjuti sebesar 100% pada tahun 2023 karena telah tersampaikannya rekomendasi hilirisasi investasi strategis kepada *stakeholder* terkait. Rekomendasi hilirisasi investasi strategis disampaikan dalam bentuk Kajian Hilirisasi Investasi Strategis pada 8 (delapan) sektor yaitu sektor Perkebunan, Kelautan,

Perikanan, Kehutanan, Minyak Bumi, Gas Bumi, Mineral dan Batubara. Kajian ini diharapkan menjadi landasan arah kebijakan dan pengembangan investasi yang mendukung agenda hilirisasi secara nasional melalui dukungan investasi. Kajian yang disusun pada tahun 2023 adalah Kajian Komoditas Tambahan untuk Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, Kajian Ekosistem dan Kajian Kebijakan Lain.

Di sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan komoditas tambahan yang dikaji adalah komoditas Kakao, Buah Pala, Perikanan Budidaya (Ikan Tilapia). Sedangkan untuk sektor Mineral dan Batubara komoditas tambahannya adalah komoditas Pasir Silika, Mangan, Kobal, dan Logam Tanah Jarang. Untuk Kajian Ekosistem telah disusun Kajian Ekosistem Biofuel pada sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan, Kajian Ekosistem PVC untuk sektor Minyak dan Gas Bumi serta Kajian Ekosistem Panel Surya, Baterai Kendaraan Listrik, dan Semikonduktor untuk Sektor Mineral dan Batubara. Sedangkan untuk Kajian Kebijakan Lain telah disusun Kajian Pengembangan Ekosistem *Blue/Green Hydrogen* dan *Ammonia* serta Kajian Pengelolaan Emisi Karbon.

Dalam proses penyusunan kajian hilirisasi investasi strategis, dilaksanakan berbagai akfitias, yaitu *kick-off meeting* pada tanggal 14 Juni 2023, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Eselon I Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 4 Juli 2023, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Kementerian/Lembaga pada tanggal 13 Juli 2023, dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Asosiasi/Pelaku Usaha pada tanggal 20 Juli 2023. Kemudian Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Kunjungan Lapangan (Kunlap) dengan maksud untuk mendapatkan masukan dan arahan dari pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah dan asosiasi serta pelaku usaha dalam rangka penyusunan kajian komoditas: Kakao, Buah Pala, Perikanan Budidaya (Tilapia), Pasir Silika, Mangan, Kobal, dan Logam Tanah Jarang; kajian ekosistem: *Biofuel*, *Blue/Green Ammonia* dan *Hydrogen*, *Solar Panel*, Baterai Kendaraan Listrik, Semikonduktor, serta kajian Pengelolaan Emisi Karbon yang menjadi tema utama pada kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan hilirisasi investasi strategis tahun anggaran 2023. Adapun rincian kegiatan Rakorda dan Kunlap antara lain sebagai berikut:

a. Rakorda dan Kunjungan Lapangan Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan yang dilaksanakan di Sulawesi Utara tanggal 26-27 Juli 2023, Sumatera Utara tanggal 1-3 Agustus 2023, dan Sulawesi Tengah tanggal 8-9 Agustus 2023.

Gambar 3.15.
Rakorda dan Kunlap Hilirisasi Investasi Strategis
Sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan

b. Rakorda dan Kunjungan Lapangan Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Minyak dan Gas Bumi di Jawa Barat tanggal 26-27 Juli 2023, Jawa Tengah tanggal 1-3 Agustus 2023, Jawa Timur tanggal 8-10 Agustus 2023, dan Kalimantan Timur tanggal 8-10 Agustus 2023.

Gambar 3.16.
Rakorda dan Kunlap Hilirisasi Investasi Strategis
Sektor Minyak dan Gas Bumi

c. Rakorda dan Kunjungan Lapangan Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batubara di Nusa Tenggara Timur tanggal 26-27 Juli 2023, Maluku Utara tanggal 1-3 Agustus 2023, Kepulauan Riau tanggal 9-11 Agustus 2023, Jawa Barat 21-22 Agustus 2023, dan Bangka Belitung tanggal 21-23 Agustus 2023.

Gambar 3.17.
Rakorda dan Kunlap Hilirisasi Investasi Strategis
Sektor Mineral dan Batubara

d. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema Pengembangan Ekosistem Produk tanggal 27-28 September 2023, Rantai Pasok Global tanggal 5-6 Oktober 2023, dan Dampak Ekonomi tanggal 13-14 Oktober 2023.

Gambar 3.18. Pelaksanaan FGD Pengembangan Ekosistem Produk, Pelaksanaan FGD Rantai Pasok Global, FGD Dampak Ekonomi

Dalam prosesnya, penyusunan rekomendasi kebijakan ini menghadapi beberapa kendala, diantaranya:

1. Belum adanya pemetaan atau identifikasi secara komprehensif terkait dengan potensi per masing-masing wilayah di Indonesia;
2. Kajian tematik sektor investasi yang cukup banyak sehingga perlu dilakukan kurasi mendalam untuk menentukan sektor-sektor potensial yang dapat diprioritaskan sebagai sebuah rencana jangka panjang;
3. Penyusunan rekomendasi *eksisting* masih terbatas pada analisa berdasarkan komoditas yang terbesar, sehingga belum sepenuhnya memunculkan komoditas-komoditas yang memiliki potensi nilai tambah yang tinggi; serta
4. Terbatasnya ketersediaan data hilirisasi khususnya terkait dengan potensi masing-masing wilayah di Indonesia.

Kedepannya, Kementerian Investasi/BKPM akan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut pada tahun 2024, diantaranya:

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan hilirisasi investasi strategis yang ditindaklanjuti.
2. Pelaksanaan rencana aksi terpadu yang lebih komperehensif untuk mencapai target pada Peta Jalan (*Roadmap*) Hilirisasi Invetasi Strategis.
3. Fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha hilirisasi di sektor hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Minyak Bumi, Gas Bumi, Mineral dan Batubara.
4. Koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi pada sektor hilirisasi investasi strategis.

Selain rencana tindak lanjut diatas, juga perlu melakukan berbagai program strategis berdasarkan rekomendasi hasil kajian hilirisasi investasi strategis pada 8 (delapan) sektor yaitu sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Minyak Bumi, Gas Bumi, Mineral dan Batubara. Hasil kajian dapat menjadi landasan arah kebijakan dan pengembangan investasi yang mendukung agenda hilirisasi secara nasional melalui dukungan investasi.

Sasaran Program (SP-3) "Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal"

Kementerian Investasi/BKPM menetapkan sasaran program yaitu Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal dengan 3 indikator pengukuran yaitu Jumlah hari dalam memulai usaha/*starting a business*, Jumlah prosedur dalam memulai usaha/*starting a business,* dan Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan. Berikut rincian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU):

IK-8: Jumlah Hari dalam Memulai Usaha/*Starting a Business*

Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan 4 hari dengan realisasi 2,5 hari sehingga capaiannya sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 2,5 hari dengan target 6 hari. Kementerian Investasi/BKPM terus berkomitmen untuk meningkatkan capaian indikator ini melalui berbagai upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan tahapan berusaha yang ringkas.

Tabel 3.12.
Capaian Indikator Kinerja
Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha/*Starting a Business*

Sasaran Program 3 (SP-3) Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal									
Indikator Kinerja 8 (IK-8) Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha/*Starting a Business* (Hari)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
6	7	6	2,5	4	2,5	0,00	120	Sangat Baik	3

Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses meringkas jumlah hari untuk memulai usaha, diantaranya:

1. Proses bisnis perijinan yang belum sepenuhnya dipahami oleh calon pelaku usaha sehingga masih terdapat tahapan yang dianggap sulit;
2. Belum adanya informasi terkait dengan insentif kemudahan bagi pelaku usaha yang telah mengurus perizinannya;
3. Proses peringkasan perijinan dan legalitas usaha masih belum diintegrasikan dengan berbagai program/kegiatan instansi lainnya, sehingga belum optimal untuk menarik minat pelaku usaha;
4. Proses digitalisasi yang dilakukan untuk memudahkan calon pelaku usaha belum dapat dilaksanakan di semua wilayah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan beberapa hal diantaranya:

1. Perbaikan kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing Indonesia sebagai tujuan Investasi;
2. Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat Investasi;
3. Simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan Investasi tingkat pusat/Kementerian/Lembaga dan daerah provinsi, kabupaten/kota;
4. Fasilitasi kemitraan usaha nasional antara Perusahaan PMA/PMDN yang berskala besar dengan UMKM atau pengusaha nasional di daerah;
5. Kebijakan kemudahan untuk pelaku UMKM juga terus diupayakan melalui integrasi layanan kemitraan dalam sistem OSS berbasis risiko dan fasilitasi kemitraan usaha nasional antara Perusahaan PMA/PMDN yang berskala besar dengan UMKM atau pengusaha nasional di daerah dengan total 1.025 kesepakatan kemitraan antara 280 usaha besar PMA/PMDN dengan 463 UMKM di daerah dengan nilai pekerjaan sebesar Rp6,77 triliun.

Ke depannya, Kementerian Investasi telah menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian indikator ini, diantaranya:

1. Melaksanakan berbagai kegiatan seperti penyusunan rencana aksi perbaikan kemudahan berusaha, rekomendasi perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi, dan rekomendasi peraturan perizinan investasi tingkat

pusat/kementerian lembaga dan daerah yang disimplifikasi, diharmonisasi, dan disinkronisasi;

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas fitur layanan digital eksisting, khususnya untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum optimal pemanfaatannya;
3. Penyusunan rancangan integrasi kegiatan dengan stakeholder terkait untuk memberikan insentif terhadap pelaku usaha yang telah mengurus perizinannya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam mengurus perijinan usahanya.

IK-9: Jumlah Prosedur dalam Memulai Usaha/*Starting a Business*

Indikator selanjutnya adalah Jumlah Prosedur dalam Memulai Usaha/*Starting a Business* (prosedur). Berbeda dengan indikator sebelumnya, indikator ini mengukur jumlah prosedur yang diterbitkan oleh pemerintah dalam memudahkan pelaku usaha dalam memulai usahanya. Berikut rincian tabel indikator tersebut:

Tabel 3.13.
Capaian Indikator Kinerja
Jumlah Prosedur Dalam Memulai Usaha/*Starting a Business*

Sasaran Program 3 (SP-3) Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal									
Indikator Kinerja 9 (IK-9) Jumlah Prosedur Dalam Memulai Usaha/*Starting a Business* (prosedur)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
8	8	7	2	5	2	0,00	120	Sangat Baik	3

Pada tahun 2023, realisasi indikator berhasil meringkas mekanisme untuk memulai usaha menjadi 2 prosedur melalui perbaikan dan penyempurnaan sistem *Online Single Submission* (OSS). Adapun target indikator ini sebanyak 5 prosedur, sehingga capaian indikator ini sebesar 120%. Realisasi ini telah mencapai target akhir renstra yaitu 3 prosedur.

Pada tahun 2023, Kementerian Investasi/BKPM melakukan penyederhanaan jumlah prosedur dalam memulai kegiatan usaha (*starting a business*), dari 5 prosedur menjadi menjadi 2 prosedur. Kedua prosedur tersebut adalah pembuatan akta pendirian badan usaha di notaris dan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS. Penyesuaian prosedur investasi tersebut merupakan langkah nyata serta komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia. Penyederhanaan prosedur yang dilakukan ini berpengaruh positif terhadap optimalisasi jumlah hari dalam memulai usaha. Keberhasilan optimalisasi untuk meringkas hari serta simplifikasi prosedur tidak terlepas dari agenda yang sudah dirancang Kementerian Investasi/BKPM demi menunjang keberhasilan capaian kinerja tersebut.

Prosedur dalam hal ini didefinisikan sebagai interaksi antara pendiri perusahaan dengan pihak eksternal (misalnya, instansi pemerintah, pengacara, auditor atau notaris)

atau pasangan (jika diwajibkan secara hukum). Dengan dihentikannya penerbitan laporan EoDB pada September 2021 akibatnya pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada catatan perbaikan peringkat kemudahan berusaha. Namun dengan implementasi sistem perizinan berusaha melalui OSS RBA terdapat penyederhanaan prosedur dalam memulai usaha.

Kementerian Investasi/BKPM menghadapai beberapa hambatan dalam pencapaian indikator ini adalah:

1. Masih belum sinkronnya peraturan-peraturan yang ada dalam mendukung penyederhanaan prosedur berusaha;
2. Banyaknya Kementerian/Lembaga yang terlibat sehingga menyulitkan koordinasi untuk melakukan peringkasan tahapan ataupun prosedur; dan
3. Keterbatasan jangkauan layanan bagi seluruh pelaku usaha yang disebabkan oleh jumlah SDM yang belum memadai.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diantaranya:

1. Peningkatan daya saing investasi melalui pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha;
2. Harmonisasi regulasi terkait perizinan berusaha di tingkat pusat dan daerah;
3. Fasilitasi pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah; serta
4. Validasi data perusahaan PMA/PMDN yang wajib bermitra dan pelaku UMKM di daerah yang siap dimitrakan

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas dan capaian indikator ini, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang bertugas langsung dalam memberikan layanan perijinan berusaha;
2. Sinkronisasi antar instansi untuk penyederhanaan regulasi yang sudah ada, dalam hal ini diperlukan keterlibatan berbagai kementerian/lembaga yang memiliki program kepada dunia usaha sehingga dapat dirumuskan skema penyederhanaan regulasi eksisting; dan
3. Penguatan daya saing usaha melalui integrasi program dan kegiatan dari lintas sektor maupun berbagai instansi pemerintah.

IK-10: Persentase Realisasi Kesepakatan Perusahaan PMA/PMDN yang Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Perundangan

Kementerian Investasi/BKPM melalui Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal terus berupaya mendorong kemitraan usaha nasional antara perusahaan besar dengan UMKM, hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan kesempatan bagi UMKM agar terlibat dalam penyediaan bahan baku atau rantai pasok bagi industi berskala besar ataupun sebagai sub-kontraktor, *transporter* dan sebagainya. Adanya kemitraan ini dapat mendorong UMKM untuk naik kelas sehingga memberikan kontribusi positif terhadap kualitas iklim penanaman modal maupun dalam

hal perputaran ekonomi. Hal ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 tentang reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui harmonisasi kebijakan dan mempersatukan visi terkait target investasi, perbaikan ekosistem investasi, pengimplementasian atas keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam yang berorientasi ekspor, penataan perizinan berusaha yang ideal, serta reformasi birokrasi yang telah dilakukan selama ini. Target dan capaian kinerja indikator ke 10 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14.
Capaian Indikator Kinerja
Persentase Realiasasi Kesepakatan Perusahaan PMA/PMDN yang Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sesuai dengan Peraturan Perundangan

Sasaran Program 3 (SP-3) Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal									
Indikator Kinerja 10 (IK-10) Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
N/A	N/A	30	30,69	32	32,5	5,90	101,56	Sangat Baik	34

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2023 sebesar 32,5% melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 32%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,56% dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian realisasi kinerja indikator ini meningkat sebesar 1,81% atau tumbuh sebesar 5,90%. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 yaitu sebesar 34%, realisasi pada tahun 2023 masih berada di bawahnya atau masih kurang 1,5%. Oleh karena itu, diharapkan untuk tahun 2024 realisasi pada indikator kinerja ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung terciptanya kemitraan usaha nasional, Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menjalankan kegiatan fasilitasi kemitraan usaha nasional antara perusahaan PMA/PMDN yang berskala besar dengan UMKM atau pengusaha nasional di daerah. Fasilitasi ini dilaksanakan melalui sistem kemitraan yang telah terintegrasi ke dalam sistem OSS. Pada Tahun 2023 telah dilakukan 1.025 kesepakatan kemitraan antara 280 usaha besar PMA/PMDN dengan 463 UMKM di daerah dengan total nilai pekerjaan mencapai Rp 6,77 triliun.

Gambar 3.19.
Penandatanganan Komitmen Kerjasama dalam Program Mendorong Investasi Besar (PMA/PMDN) Bermitra dengan UMKM/Pengusaha Lokal

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja ke 10 ini secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi. Beberapa hambatan dan solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja ini antara lain:

1. Peluang pekerjaan yang ditawarkan perusahaan PMA/PMDN belum termanfaatkan secara maksimal dikarenakan kemampuan atau kompetensi UMKM belum optimal, sehingga kemitraan yang dilakukan belum efektif dan berkelanjutan. Untuk itu pemetaan kebutuhan sektor bidang usaha atas kompetensi UMKM perlu dilakukan untuk meningkatkan peluang terciptanya kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha besar dan UMKM.
2. Progres dari hasil rencana kemitraan investasi dalam kegiatan kemitraan usaha *(matchmaking)* belum secara maksimal ditindaklanjuti. Oleh karena itu, adanya *Workshop* Peningkatan Daya Saing Usaha Nasional sangat bermanfaat bagi peserta guna memahami makna dari perubahan kegiatan usaha yang mereka lakukan, sehingga para pelaku usaha lebih termotivasi dalam memajukan sektor usaha.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas dan capaian indikator ini, sebagai berikut:

1. Fasilitasi kompetensi bagi para pelaku usaha UMKM yang ada di daerah agar dapat memiliki standar yang dibutuhkan oleh usaha besar
2. Diperlukan upaya melakukan monitoring terhadap tindak lanjut *(follow up)* dari pelaksanaan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan pelaku usaha nasional di daerah sehingga diperoleh informasi tentang hasil kerja sama, kesulitan bermitra, ataupun peningkatan naik kelas bagi UKM.

3. Melakukan monitoring secara berkala kepada para pelaku usaha besar dan UMKM terkait kesepakatan kemitraan yang telah dilakukan

Sasaran Program (SP-4) "Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal"

Sasaran Program 4 "Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal" didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu nilai komitmen penanaman modal dan jumlah minat penanaman modal. Untuk mendukung tercapainya target realiasi kinerja investasi pada tahun 2023, Kementerian Investasi melalui Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal melakukan berbagai kegiatan promosi yang terfokus dan terintegrasi. Beberapa strategi promosi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM, antara lain menyebarkan informasi melalui pelaksanaan *business forum* di dalam dan luar negeri, pertemuan *one-on-one meeting* baik secara luring atau daring dengan *targeted investor*, pelaksanaan *business development*, pemasangan iklan melalui media elektronik maupun cetak, penerimaan dan pendampingan misi, fasilitasi promosi daerah, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kantor perwakilan Kementerian Investasi/BKPM di 9 negara, penyusunan analisis *market intelligence*, penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal. Berbagai kegiatan promosi ini diharapkan dapat meningkatkan *awareness* dan minat investasi di Indonesia.

IK-11: Nilai Rencana Penanaman Modal Hasil Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Sebagai dukungan untuk menjaga pertumbuhan yang *sustainable*, Indonesia terus membutuhkan investasi dalam jumlah besar melalui berbagai sektor yang diunggulkan. Langkah deregulasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA juga terus dilakukan Pemerintah guna mendorong peningkatan investasi. Untuk mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah tersebut, perlu dilakukan diseminasi melalui kegiatan promosi investasi Indonesia. Kementerian Investasi/BKPM sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi terkait penanaman modal asing, memiliki peran untuk melakukan kegiatan promosi tersebut. Target dan capaian kinerja indikator ke 11 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15.
Capaian Indikator Kinerja
Nilai Rencana Penanaman Modal Hasil Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Sasaran Program 4 (SP-4) Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal									
Indikator Kinerja 11 (IK-11) Nilai Rencana Penanaman Modal Hasil Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal (Rp Triliun)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1.430,8	23.357,7	1.614	2.358	1.833	1.979	-16,07	107,97	Sangat Baik	2.065,5

Capaian realisasi kinerja indikator nilai komitmen penanaman modal sebesar Rp1.979 Triliun melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.833 Triliun sehingga capaian kinerjanya sebesar 107,97% dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian realisasi kinerja indikator ini menurun sebesar Rp379 Triliun, sehingga pertumbuhannya juga menurun sebesar 16,07%. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.065,5 Triliun, realisasi pada tahun 2023 masih sedikit di bawahnya atau masih kurang Rp86,5 Triliun. Oleh karena itu diharapkan untuk tahun 2024 realisasi pada indikator kinerja ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, perkembangan nilai komitmen penanaman modal dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16.
Perkembangan Rencana Investasi PMA (dalam Rp Triliun)

Tahun	Rencana	Realisasi
2019	1.416,7	1.233,0
2020	1.362,0	1.582,1
2021	1.430,8	23.357,7
2022	1.614,0	2.358,0
2023	1.833,0	1.979,6

Asumsi nilai tukar US$:
1. 2019: 1 US$=Rp. 14.000
2. 2020: 1 US$=Rp. 14.400
3. 2021: 1 US$=Rp. 14.600
4. 2022: 1 US$=Rp. 14.600
5. 2023: 1 US$=Rp. 14.800

Kementerian Investasi/BKPM memformulasikan sejumlah upaya untuk menarik investasi. Kegiatan promosi yang dilakukan bertujuan untuk meyakinkan investor bahwa Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang baik. Di lain sisi, promosi penanaman modal juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan para investor, dikarenakan kompetisi yang semakin berat untuk menarik masuknya investasi. Pada akhirnya, kegiatan promosi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Meskipun tantangan global yang beragam telah memengaruhi upaya promosi investasi, Indonesia tetap menjadi destinasi favorit bagi investor asing. Tantangan global ini mencakup gejolak ekonomi global, ketidakpastian politik, perubahan iklim, dan pandemi global yang telah mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Namun, pemerintah Indonesia terus memberikan dukungan yang kuat untuk mendorong investasi dengan fokus pada kemudahan berinvestasi dan pembangunan berkelanjutan. Nilai rencana penanaman modal hasil kegiatan promosi tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 108%. Adapun nilai rencana investasi strategis yang difasilitasi selama tahun 2023 antara lain:

1. Xinyi Group, merupakan perusahaan asal RRT yang berencana investasi di sektor industri kaca panel surya dengan rencana investasi sebesar Rp171,7 triliun (USD 11,6 miliar). Xinyi berencana akan mengembangkan ekosistem hilirisasi pasir kuarsa dan pasir silika yang mencakup pabrik pemrosesan pasir

silika, industri soda abu, industri kaca panel surya, industri *silicon industrial grade*, industri sel dan modul surya serta lainnya.

2. Indo-Pacific Net Zero Battery-Materials Consortium (INBC) yang berencana melakukan investasi pada ekosistem kendaraan listrik sebesar Rp133,2 triliun (USD 8,3 miliar). Konsorsium berencana untuk memproduksi 84.000 metrik ton nikel per tahun untuk kebutuha pemrosesan material baterai kendaraan listik yang menggunakan sumber energi hijau. Material baterai ditargetkan untuk diproduksi sebesar 120 GWh untuk pasar Negara-Negara Barat (dimulai dari Inggris) dan 20 GWh untuk pasar Indonesia, dengan menggandeng mitra antara lain Envision dari Inggris, Glencore dari Australia, serta Bakrie & Brothers.
3. Aspen Medical, merupakan perusahaan asal Australia yang memiliki rencana investasi di sektor kesehatan dengan nilai investasi sebesar USD 1 Miliar. Aspen Medical berencana membangun 23 rumah sakit (Kelas A dan B) dan 650 klinik dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Saat ini proyek yang sedang dibangun yaitu pembangunan rumah sakit di Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Perusahaan akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM terkait dengan proses perizinan yang tengah dilakukan. Selain itu, perusahaan juga melihat potensi lokasi lainnya yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, dan akan melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui *transfer knowledge* terhadap tenaga medis dan akan bekerjasama dengan pendidikan di Australia terkait *health training transformation* untuk melatih 650.000 perawat di Indonesia. Di samping itu, perusahaan juga akan melakukan *health technology transformation* dan membuka peluang kerja sebanyak 50.000 pekerjaan. Aspen Medical rencananya akan membawa *international expertise* untuk mendukung 6 pilar transformasi sistem kesehatan di Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Beberapa strategi promosi yang telah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk menarik investasi, antara lain menyebarkan informasi melalui pelaksanaan pemasaran investasi, *business development*, pelaksanaan *business forum* di dalam dan luar negeri, pertemuan *one-on-one* meeting secara *virtual/online* dengan *targeted investor*, bekerjasama dengan media internasional dalam menyebarkan informasi potensi investasi, penyelenggaraan pameran, serta penerimaan dan pendampingan kunjungan misi investasi, kunjungan kerja ke negara target promosi, webinar, *Regional Investment Forum* (RIF), forum bekerja sama dengan HSBC dan Bank Mandiri.

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini ditentukan juga oleh berbagai kegiatan penunjangnya, antara lain sebagai berikut:

1. Kerja Sama Promosi Investasi dengan Uni Eropa melalui ARISE+ Indonesia
   a. Diskusi dengan Komisi Eropa terkait *Global Gateway* dan Pasar Karbon di Uni Eropa
   b. *ARISE+ Indonesia Study and Contact-Building Visit to Europe*
2. Kegiatan Sail Teluk Cendrawasih (STC) 2023

a. Forum Bisnis tanggal 22 November 2023 dengan tema "Penguatan Investasi Maritim Berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia." Forum dihadiri 150 peserta dari perwakilan Kementerian/Lembaga; Duta Besar; DPMPTSP Provinsi Papua; DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya; organisasi perangkat daerah terkait; HIPMI; KADIN Daerah dan pelaku usaha. Forum dan diskusi membahas urgensi, potensi dan tantangan pengembangan investasi berkelanjutan, termasuk di ekonomi biru, di Indonesia dan dalam skala global.
b. Forum Peningkatan Kapasitas UMKM dalam Bermitra dengan Usaha Besar di Kabupaten Biak Numfor pada 22 November 2023 berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dalam rangka peningkatan kompetensi, peningkatan manajemen usaha (fasilitasi NIB dan Sertifikasi Halal), serta penyebarluasan kesempatan kemitraan bagi UMKM di Kabupaten Biak Numfor yang dihadiri sebanyak 250 peserta.
c. Konsultansi Investasi dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui booth Konsultansi Investasi dan NIB pada tanggal 22 November 2023 di KSL Ballroom selama pelaksanaan forum bisnis dan UMKM, serta tanggal 23 November 2023 di Rumah EKRAF.
d. Anugerah Investasi Bahari 2023 digelar pada 23 November 2023 dalam rangka mengapresiasi instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) di wilayah pesisir yang memperoleh hasil penilaian terbaik atas kinerja layanan investasi, yaitu Kabupaten Cianjur dan Kota Tegal (wilayah barat), Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Manado (wilayah tengah), serta Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kota Ambon (wilayah timur).
e. Acara Puncak pada 23 November 2023 diselenggarakan di Kawasan Pantai Samau, dihadiri oleh Bapak Presiden RI, beberapa Duta Besar dan perwakilan negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf TNI/Polri, Forkopimda Provinsi Papua, Forkopimda Kab. Biak Numfor, Kab. Kepalauan Yapen, Kab. Waropen, dan Kab. Sarmi, serta penerima Anugerah Investasi Bahari 2023. Acara puncak juga dihadiri oleh sekitar 10.000 orang yang terdiri atas masyarakat, aparat pemerintah pusat dan daerah, serta anggota TNI/ Polri. Acara menampilkan berbagai pagelaran budaya, diantaranya tarian selamat datang yang diiringi oleh lagu tema Sail Teluk Cenderawasih dan tarian kolosal yang diiringi oleh lagu tradisional Papua oleh 1.200 pelajar dari Kabupaten Biak Numfor. Acara Puncak ditutup dengan rangkaian parade TNI yang terdiri atas Sailing Pass dari 7 unit KRI, 4 unit KN, 6 unit Sea Rider, 1 unit Combat Boat, dan Parade 524 Perahu Saireri; Free Fall oleh 40 peterjun TNI; dan 15 paramotor.
f. Kegiatan Pra/Pasca Acara Puncak pada tanggal 21, 22 dan 24-27 November 2023, antara lain Bakti Kesehatan, Penyuluhan percepatan penurunan stunting, *Diplomatic Tour* oleh Kementerian Luar Negeri, Peresmian Kampung Nelayan Modern (KALAMO) oleh Bapak Presiden RI, Seminar *Road to Indonesia Development Forum* (RIDF) dari Kementerian PPN/Bappenas, *Yacht Rally* oleh 14 *yachter* dari berbagai negara, dan Festival Masyarakat.

Gambar 3.20.
Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023

Meskipun target capaian kinerja dapat terealisasi, Kementerian Investasi/BKPM tidak luput dari tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi sepanjang tahun 2023, yang mana merupakan tahun penuh dengan ketidakpastian dan menjadi tantangan bagi Kementerian Invenstasi/BKPM. Kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19 serta kondisi geopolitik yang belum stabil mengakibatkan berbagai negara terus melakukan penyesuaian dalam aktivitas investasinya. Hal ini menjadi ujian tersendiri bagi pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal dalam rangka mencapai target realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp1.099,8 triliun sesuai RPJMN Kementerian Investasi/BKPM yang kemudian ditingkatkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Rp1.400 triliun. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi sepanjang tahun 2023, antara lain:

1. Kondisi ekonomi global yang masih *volatile* seperti perang dagang, konflik Rusia dan Ukraina, pemananasan global, serta fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menyebabkan kekhawatiran bagi investor dan berdampak pada *appetite* investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia;
2. Indonesia mulai memasuki periode pemilihan Presiden tahun 2024 sehingga investor cenderung *wait and see* dan menunda investasinya karena menunggu hasil pemilu pada kuartal pertama 2024;
3. Perlu melengkapi informasi, optimalisasi promosi dan fasilitasi terhadap sektorsektor usaha prioritas berdasarkan wilayah/daerah yang siap ditawarkan kepada investor *(Investment Project Ready to Offer)* maupun potensi investasi regional;
4. Kurangnya sumber daya manusia dan perlunya peningkatan kompetensi promotor investasi pada sektor-sektor prioritas untuk pelaksanaan kegiatan promosi yang lebih optimal;
5. Perlunya sinkronisasi kebijakan, regulasi dan insentif untuk menarik minat investasi dari sektor-sektor yang saat ini tengah menjadi tren global, seperti energi baru terbarukan, teknologi bebas emisi dan efisiensi energi;
6. Perlu ditingkatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk koordinasi antar unit di Kementerian Investasi/BKPM untuk menunjang kegiatan promosi penanaman modal.

Gambar 3.21. *Launching* Peta Peluang Investasi

Untuk menunjang tugas dan fungsi sebagai promotor investasi, Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal melakukan promosi investasi berjenjang dan layanan investasi *end-to-end*, mulai dari analisis sektor, negara target dan pesaing serta market *intelligence* hingga fasilitasi realisasi investasi. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dibutuhkan promotor investasi yang berkompeten dan memiliki pengetahuan terbaru terkait pemasaran, konsultasi bisnis, peluang, tren dan kebijakan sektor usaha. Oleh karena itu, pada tahun 2023 Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal melakukan beberapa strategi yaitu:

1. Menerbitkan regulasi dalam bentuk Keputusan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal tentang Desain Pengembangan Kompetensi Promotor Indonesia;
2. Menyusun peta sektor prioritas investasi sesuai dengan kebijakan pemerintah dari wilayah kerja promotor investasi;
3. Melakukan pelatihan substansi promosi investasi dan *softskill* personal;
4. Pelatihan yang dilakukan bekerjasama dengan lembaga yang ahli di bidangnya masing-masing.

Selain itu, telah dilakukan beberapa inisiatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain:

1. Mengoptimalisasikan hasil kegiatan forum internasional melalui tindak lanjut fasilitasi minat investasi pada Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
2. Berkoordinasi lebih aktif dengan unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
3. Melakukan pendekatan kepada Kementerian/Lembaga terkait sektor pendukung prioritas nasional;

4. Mematangkan konsep dan rencana *Business Development* tahunan dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti perwakilan RI di luar negeri, perwakilan IIPC, dan lain sebagainya;
5. Berkoordinasi dengan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM yang memiliki program penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan dalam rangka mendukung IKN (Penyusunan PPI tersebut telah dilakukan selama kurun waktu T.A 2023 bekerjasama dengan OIKN);
6. Melakukan pengembangan kompetensi promotor investasi untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal di unit Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal secara berkala.

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Nilai Komitmen Penanaman Modal pada tahun berikutnya, beberapa rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan, antara lain:

1. Memanfaatkan analisis negara pesaing dan negara target dalam penyusunan strategi promosi terfokus berdasarkan sektor ataupun negara potensial;
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pameran terpadu bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan asosiasi usaha baik dalam maupun luar negeri;
3. Berkolaborasi dengan asosiasi bisnis dan perbankan untuk memperoleh daftar mitra potensial bagi calon penanam modal asing (PMA) ataupun calon penanam modal dalam negeri (PMDN);
4. Berkoordinasi dengan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam menyiapkan bahan promosi ataupun proyek yang dapat ditawarkan guna menarik minat calon penanam modal terhadap IKN.
5. Memanfaatkan perjanjian Indonesia dengan negara-negara mitra dan MoU Indonesia dengan dunia usaha di bidang investasi untuk mendorong peningkatan investasi asing ke Indonesia dan pengembangan kapasitas investasi dalam negeri;
6. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di unit Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai promotor investasi yang dapat mendukung kegiatan promosi skala global.

IK-12: Jumlah Minat Penanam Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Minat penanaman modal didefinisikan sebagai respons proaktif dari calon investor yang terlibat dalam berbagai aktivitas yang diorganisir oleh Kementerian Investasi/BKPM. Keterlibatan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, keikutsertaan dalam *working luncheon*, pertemuan kelompok investor, pertemuan bisnis, *follow-up* misi investasi, pameran investasi, forum investasi, forum bisnis, pengembangan bisnis, serta pertemuan kelompok dan *one-on-one meeting*, yang semua memiliki potensi untuk

berkembang ke tahap lebih lanjut. Target dan capaian kinerja indikator ke 12 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17.
Capaian Indikator Kinerja
Jumlah Minat Penanaman Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Sasaran Program 4 (SP-4) Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal									
Indikator Kinerja 12 (IK-12) Jumlah Minat Penanaman Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal (minat)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
2.523	3.246	7.900	9.064	8.450	9.200	1,50	108,88	Sangat Baik	9.100

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi kinerja indikator Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal pada tahun 2023 sebesar 9.200 minat melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 8.450 minat, sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,88% dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian realisasi kinerja indikator ini meningkat sebesar 136 minat atau tumbuh sebesar 1,50%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2021 maka realisasi capaian kinerja ini meningkat sangat signifikan sebesar 183,43% atau bertambah 5.954 minat. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 yaitu sebesar 9.100 minat, realisasi pada tahun 2023 sudah melebihi target sebanyak 100 minat. Oleh karena itu, diharapkan untuk tahun 2024 realisasi pada indikator kinerja ini dapat diupayakan melampaui target yang telah ditetapkan.

Pencapaian minat ini merupakan hasil kolaboratif dari seluruh direktorat di lingkungan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal. Kolaborasi ini melibatkan Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa, Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika, Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik, serta Direktorat Pengembangan Promosi dan IIPC, dengan rincian sebagai berikut:

1. Minat Penanaman Modal dari Direktorat Pengembangan Promosi
   Hasil kegiatan pemasaran investasi Direktorat Pengembangan Promosi melalui 9 (sembilan) Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) berupa fasilitasi dan kunjungan kerja serta penyelenggaraan forum internasional yang ditujukan kepada investor di Negara Tempat Kedudukan, diperoleh 2.733 Minat Investasi dari target 2.197 dengan pencapaian sebesar 124,4% dari target.
2. Minat Penanaman Modal dari Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
   Selama tahun 2023, dari hasil kegiatan pemasaran investasi melalui fasilitasi dan kunjungan kerja serta penyelenggaraan forum internasional yang ditujukan kepada investor di wilayah Amerika dan Eropa, diperoleh 1.137 Minat Investasi dari target 1.077 dengan pencapaian sebesar 105,6% dari target.

Gambar 3.22.
Kegiatan Pemasaran Investasi di Amerika Serikat (kiri) pada tanggal 21- 27 Juni 2023 dan di Italia (kanan) pada tanggal 30-31 Januari 2023

3. Minat Penanaman Modal dari Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika
   Melalui kegiatan pemasaran investasi berdasarkan sektor prioritas nasional, kegiatan *business development* berdasarkan sektor, penyelenggaraan forum internasional, dan Marketing Investasi Indonesia selama tahun 2023, diperoleh 2.601 minat investasi dari target sebesar 2.500 atau pencapaian 104% dari target.

Gambar 3.23.
Pelaksanaan Kegiatan Marketing Investasi Indonesia di Shanghai, RRT pada tanggal 29 November 2023

4. Minat Penanaman Modal dari Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (AASP)
   Jumlah minat penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik pada tahun 2023 sebanyak 2.729 minat investasi atau mencapai 100,5% dari target sebesar 2.716 minat investasi. Dengan kata lain, capaian tersebut sudah memenuhi target yang ditetapkan melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik sepanjang tahun 2023.

Gambar 3.24.
Pelaksanaan *Business Development*
Sektor Prioritas Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan

Rangkaian kegiatan tersebut telah berperan dalam menghasilkan total minat investasi sejumlah 9.200 entitas dan rencana investasi dengan nilai mencapai Rp1.979,6 triliun, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18.
Ringkasan Jumlah Minat Penanaman Modal Berdasarkan Unit Kerja

Kegiatan	Jumlah Minat
Direktorat Pengembangan Promosi	2.733
Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	2.729
Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	2.601
Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa	1.137
Total	**9.200**

Jika dilihat berdasarkan tren, capaian jumlah minat penanaman modal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terus meningkat seiring dengan peningkatan target jumlah minat. Pada Tahun 2023, capaian jumlah minat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 1,50%. Adapun peningkatan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19.
Perbandingan Capaian Jumlah Minat Penanaman Modal Selama 4 Tahun

Tahun	Target	Capaian
2020	1.470	2.985
2021	2.523	3.246
2022	7.900	9.064
2023	8.450	9.200

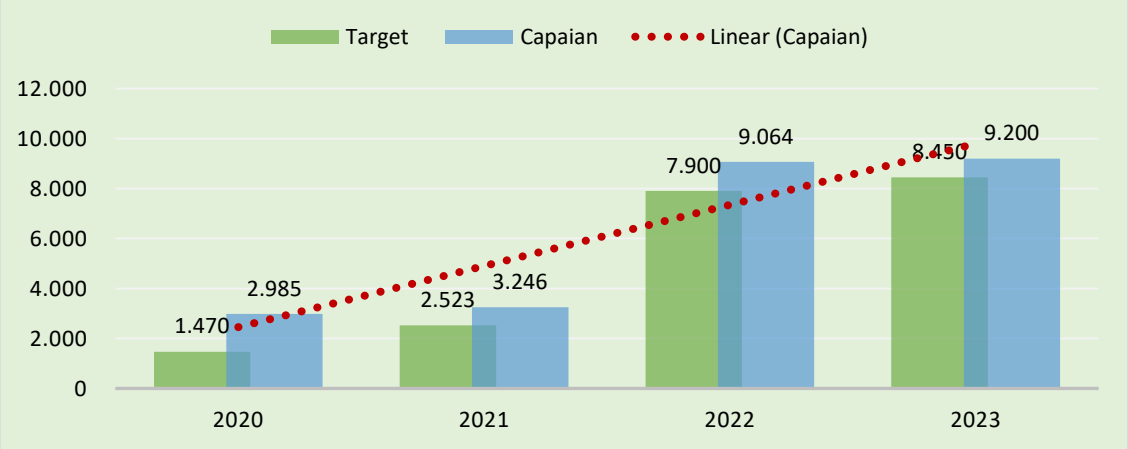

Gambar 3.25.
Tren Target dan Capaian Jumlah Minat Penanaman Modal Tahun 2020-2023

Adapun rincian daftar rencana investasi berdasarkan nama perusahaan, lokasi negara perusahaan, dan nilai investasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20.
Daftar Rencana Investasi

No	Nama Perusahaan	Negara	Nilai Investasi (Rp)
1	Baxter Healthcare	Amerika Serikat	150.000.000.000
2	Canning Indonesian Products	Amerika Serikat	888.000.000.000
3	ExxconMobil	Amerika Serikat	14.800.000.000.000
4	Microsoft	Amerika Serikat	14.800.000.000.000
5	PepsiCo	Amerika Serikat	2.146.000.000.000
6	PT Cargill Indonesia	Amerika Serikat	2.960.000.000.000
7	SEG Solar Inc.	Amerika Serikat	7.400.000.000.000
8	ACWA Power	Arab Saudi	3.182.000.000.000
9	Habib Group	Arab Saudi	44.400.000.000.000
10	Aspen Medical	Australia	750.000.000.000
11	Capricornia Prawn Australia	Australia	120.000.000.000
12	Deakin University	Australia	105.000.000.000
13	Simplr Health	Australia	370.000.000.000
14	Skyjade Partners	Australia	1.000.000.000.000
15	SunDrive	Australia	3.000.000.000.000
16	Uluu Australia	Australia	487.500.000.000
17	Western Sydney University	Australia	105.000.000.000
18	Dutch Entrepreneurial Development Bank/FMO	Belanda	4.789.428.000.000
19	HVA International	Belanda	4.440.000.000.000
20	HyET Solar	Belanda	2.960.000.000.000
21	Royal Philip	Belanda	5.535.200.000.000
22	Solinatra	Belanda	159.692.000.000
23	Soya Energy	Belanda	6.660.000.000.000
24	Wavin	Belanda	1.480.000.000.000
25	Bella Food	Bulgaria	740.000.000.000

No	Nama Perusahaan	Negara	Nilai Investasi (Rp)
26	Pelayanan Bintang Putih (Maersk)	Denmark	251.600.000.000
27	Alba Tridi Plastics Recycling Indonesia	Hong Kong	888.000.000.000
28	TAL Apparel	Hong Kong	1.480.000.000.000
29	TVS Tyres	India	592.000.000.000
30	Carbon Aceh	Indonesia	4.500.000.000.000
31	Aisin Takaoka	Jepang	207.200.000.000
32	Dowa Eco System Indonesia	Jepang	529.000.000.000
33	Ikeda Tohka Industries Co., Ltd.	Jepang	150.000.000.000
34	Allnex	Jerman	1.184.000.000.000
35	BASF	Jerman	38.480.000.000.000
36	Beiersdorf	Jerman	444.000.000.000
37	Beurer	Jerman	666.000.000.000
38	Euwelle	Jerman	444.000.000.000
39	PowerCo	Jerman	44.400.000.000.000
40	Siemes Energy	Jerman	1.598.400.000.000
41	PT Vale Indonesia Tbk	Kanada	73.299.960.000.000
42	Bygen	Korea Selatan	12.000.000.000
43	Cheil Jedang	Korea Selatan	600.000.000.000
44	Dongsung Chemical	Korea Selatan	1.100.000.000.000
45	EM-Tech	Korea Selatan	72.000.000.000
46	Hankook	Korea Selatan	5.920.000.000.000
47	Hoseong	Korea Selatan	2.200.000.000.000
48	Hyundai Energy	Korea Selatan	17.260.000.000.000
49	Hyundai Grovis	Korea Selatan	222.000.000.000
50	Hyundai Morbis	Korea Selatan	150.000.000.000
51	Hyune	Korea Selatan	44.400.000.000.000
52	KCC Glass	Korea Selatan	5.180.000.000.000
53	Korea Energy	Korea Selatan	1.036.000.000.000
54	Korea Zinc	Korea Selatan	8.880.000.000.000
55	KT&G	Korea Selatan	6.700.000.000.000
56	POSCO	Korea Selatan	26.320.000.000
57	PT Diamesco Indonesia (KMLP)	Korea Selatan	518.000.000.000
58	PT. Hyundai Motors Indonesia (HMID)	Korea Selatan	60.000.000.000
59	SK Plasma	Korea Selatan	3.700.000.000.000
60	SungEel HiTech	Korea Selatan	12.674.897.622
61	Taeseong	Korea Selatan	1.480.000.000.000
62	True Digital Leader (TDL)	Korea Selatan	2.960.000.000.000
63	Wacon	Korea Selatan	740.000.000.000
64	KUFPEC	Kuwait	74.000.000.000.000
65	Hartalega	Malaysia	7.500.000.000.000
66	Kibing	Malaysia	4.350.000.000.000
67	Inframar AS	Norwegia	18.944.000.000
68	Air Liquid Indonesia	Perancis	500.000.000.000
69	EuroChem Group	Rusia	14.800.000.000.000
70	Berg+Schmidt	Singapore	10.000.000.000
71	Almarc Engineering	Singapura	75.000.000.000
72	Entobel	Singapura	750.000.000.000

No	Nama Perusahaan	Negara	Nilai Investasi (Rp)
73	Equinix	Singapura	1.110.000.000.000
74	Mustafa Group	Singapura	3.000.000.000.000
75	PT Mowilex Indonesia	Singapura	500.000.000.000
76	R&P Singapore	Singapura	22.500.000.000
77	Raffles Medical Group	Singapura	3,000,000,000,000
78	RE Sustainability Cleantech	Singapura	1.670.000.000.000
79	RE Sustainability Cleantech	Singapura	900.000.000.000
80	RE Sustainability Cleantech	Singapura	1.670.000.000.000
81	Singtel	Singapura	9.500.000.000.000
82	Grupo Ecoener	Spanyol	29.600.000.000.000
83	Renewcell	Swedia	4.696.780.000.000
84	INBC Consortium	Swiss	133.200.000.000.000
85	Compal	Taiwan	1.480.000.000.000
86	PTT Global Chemical	Thailand	4.600.000.000.000
87	Angel Yeast Co., Ltd	Tiongkok	2.220.000.000.000
88	Baowu Group	Tiongkok	32.560.000.000.000
89	CATL / CBL	Tiongkok	79.920.000.000.000
90	ChemOne Holding Pte Ltd	Tiongkok	1.480.000.000.000
91	Conch Venture	Tiongkok	296.000.000.000
92	Guangxin Agrochemical	Tiongkok	12.580.000.000.000
93	Hailiang Education	Tiongkok	2.028.536.544.000
94	Hebang Biotechnology	Tiongkok	11.840.000.000.000
95	Hua Zhang Enviromental Resources Investment Llimited	Tiongkok	66.600.000.000.000
96	Jiangsu General Science Technology Co., Ltd	Tiongkok	2.090.000.000.000
97	Jiheng Pharmaceutical	Tiongkok	1.000.000.000.000
98	Kibing Glass	Tiongkok	9.620.000.000.000
99	Leo King Technology Group Co., Ltd	Tiongkok	740.000.000.000
100	Lianhetech	Tiongkok	1.480.000.000.000
101	Ningbo Deli Group Co., Ltd	Tiongkok	8.000.000.000.000
102	Nuoer Group	Tiongkok	1.480.000.000.000
103	PT Elsoro Multi Pratama	Tiongkok	9.176.000.000.000
104	PT Merdeka Industri Mineral	Tiongkok	4.440.000.000.000
105	PT Neta Auto Indonesia	Tiongkok	2.220.000.000.000
106	QJ Motor	Tiongkok	1.036.000.000.000
107	Techking Enterprises	Tiongkok	2.960.000.000.000
108	Wanhua Chemical	Tiongkok	14.800.000.000.000
109	Wanxinda Enterprise Group	Tiongkok	22.200.000.000.000
110	Wuxi Dreamscape Machinery Technology Co., Ltd	Tiongkok	296.000.000.000
111	Xinyi	Tiongkok	171.680.000.000.000
112	Yangzhou Tinfulong Group Co., Ltd	Tiongkok	1.258.000.000.000
113	Zhejiang Hailiang Co., Ltd	Tiongkok	12.728.000.000.000
114	Zhejiang Huayou Cobalt Company Limited	Tiongkok	31.080.000.000.000
115	Evyap Group	Turkey	1.036.000.000.000
116	Celebi Aviation Holding	Turki	740.000.000.000

No	Nama Perusahaan	Negara	Nilai Investasi (Rp)
117	MTEK	Turki	5.492.132.000.000
118	Kastamonu Entegre (KEAS)	Turkiye	37.000.000.000.000
119	Comtech Emirati Solutions	UAE	59.200.000.000
120	Intermark Global	UAE	44.400.000.000
121	Panthera International Asia Capital	UK	4.440.000.000.000

Secara umum, realisasi jumlah ketertarikan atau minat dalam investasi melalui serangkaian kegiatan promosi pada tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan standar yang ditentukan. Namun, terdapat sejumlah hambatan dalam mencapai target ketertarikan investasi selama tahun tersebut sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia dan perlunya peningkatan kompetensi promotor investasi pada sektor-sektor prioritas untuk pelaksanaan kegiatan promosi yang lebih optimal;
2. Kurang akuratnya informasi peluang usaha yang ditawarkan kepada potensial investor, terutama peluang investasi di daerah;
3. Dinamika kegiatan promosi investasi yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan promosi investasi tidak sesuai dengan rencana.

Dalam hal mengatasi hambatan yang terjadi untuk mencapai target kinerja ini, Kementerian Investasi dan BKPM telah melakukan bebera alternatif solusi diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan substansi promosi investasi dan *softskill* personal
2. Menyusun peta sektor prioritas investasi sesuai dengan kebijakan pemerintah dari wilayah kerja promotor investasi.
3. Menerbitkan regulasi dalam bentuk Keputusan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal tentang Desain Pengembangan Kompetensi Promotor Indonesia.
4. Melakukan kegiatan *Business Development* dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD)
5. Melakukan pengembangan kompetensi promotor investasi untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi.

Oleh karena itu, Kementerian Investasi/BKPM mengambil langkah tindak lanjut atas permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Melaksanakan promosi yang fokus pada sektor usaha prioritas dan potensi investasi yang siap ditawarkan kepada investor.
2. Meningkatkan koordinasi antar unit di Kementerian Investasi/BKPM untuk menunjang kegiatan promosi penanaman modal.
3. Meningkatkan kolaborasi dengan partner media dan perbankan untuk mendorong diseminasi kegiatan promosi penanaman modal di forum internasional.

Sasaran Program (SP-5) “Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal

Sasaran Program 5 “Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal” didukung oleh indikator kinerja kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat mendorong kerja sama penanaman

modal antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal investor khususnya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan fasilitasi bagi investor tersebut dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di Indonesia. Di samping itu, kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pihak swasta baik di dalam maupun luar negeri juga ditujukan untuk mendorong percepatan realisasi penanaman modal. Kerja sama penanaman modal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap iklim investasi di Indonesia, sehingga akan mendorong peningkatan realisasi penanaman modal. Adapun ruang lingkup kerja sama penanaman modal mencakup kerja sama bilateral, regional, multilateral dan pelaksanaan berusaha. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal.

IK-13: Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Yang Telah Diimplementasikan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal, Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 64 kesepakatan/perjanjian/perundingan kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan. Bentuk kesepakatan/perjanjian/perundingan ini mencakup perjanjian investasi bilateral, regional dan multilateral seperti P4M, EPA/CEPA/FTA. Adapun forum kerja sama bilateral, regional, dan multilateral yang dilakukan oleh Indonesia melalui Kementerian Investasi/BKPM dilakukan dengan negara mitra dan organisasi internasional, serta Nota Kesepahaman/MoU dengan kementerian/lembaga dan dunia usaha. Target dan capaian kinerja indikator ke 13 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21.
Capaian Indikator Kinerja
Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang Telah Diimplementasikan

Sasaran Program 5 (SP-5) Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal									
Indikator Kinerja 13 (IK-13) Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
50	58	58	155	64	64	-58,71	100,00	Sangat Baik	69

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi kinerja indikator kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan pada tahun 2023 sebesar 64 kesepakatan/perjanjian, atau mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 64 kesepakatan/perjanjian, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,00% dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian realisasi kinerja indikator ini memiliki anomali penurunan sebesar 58,71% dengan adanya pertimbangan pola pencatatan. Namun demikian jika dibandingakn

dengan tahun 2021, realisasinya meningkat sebanyak 6 kesepakatan/perjanjian. Untuk mencapai target akhir renstra tahun 2024 sebesar 69 kesepakatan/perjanjian, realisasi pada tahun 2023 masih harus ditingkatkan sebanyak 5 kesepakatan/perjanjian. Oleh karena itu diharapkan untuk tahun 2024 realisasi pada indikator kinerja ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Kesepakatan/perjanjian yang telah diimplementasikan tersebut meliputi kerja sama bilateral, regional dan multilateral Perjanjian investasi yang telah diimplementasikan terdiri dari 24 kesepakatan/perjanjian kerja sama regional dan multilateral serta 40 kesepakatan/perjanjian kerja sama bilateral.

Pada lingkup bilateral, terdapat kesepakatan/perjanjian yang terdiri dari:

1. Perjanjian investasi sebanyak 21 perjanjian investasi (BIT/P4M) Indonesia dengan negara mitra yang t diimplementasikan antara lain yaitu: BIT Indonesia-Korea Selatan, BIT Indonesia-Thailand, BIT Indonesia-Jordania, BIT Indonesia-Bangladesh, BIT Indonesia-Ceko, BIT Indonesia-Suriah, BIT Indonesia-Mongolia, BIT Indonesia-Kuba/Cuba, BIT Indonesia-Turkmenistan, BIT Indonesia-Iran, BIT Indonesia-Denmark, BIT Indonesia-Rusia, BIT Indonesia-Mauritius, BIT Indonesia-Maroko, BIT Indonesia-Sudan, BIT Indonesia-Swedia, BIT Indonesia-Polandia, BIT Indonesia-Finlandia, BIT Indonesia-Qatar, BIT Indonesia-Singapura dan BIT Indonesia-Uni Emirat Arab.

   Kemudian terdapat satu Perjanjian Investasi (*Investment* Agreement/IA) antara *Indonesia Economic Trade Office* (IETO) dengan *Taiwan Economic Trade Office* (TETO), dan satu perjanjian *Investment Support Agreement* (ISA) antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC) dari Amerika Serikat. Terdapat juga 5 perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif bilateral (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*/CEPA) dengan Bab Investasi yang telah diimplementasi, yaitu Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Jepang EPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Korea CEPA, serta Indonesia-UAE CEPA. Sehingga total tedapat 28 perjanjian internasional lingkup bilateral terkait investasi dengan mitra negara atau entitas ekonomi asing.
2. Sebanyak 7 (tujuh) forum internasional lingkup bilateral terkait ekonomi dan investasi yang dilakukan pada tahun 2023 sebagai implementasi dari komitmen atau kesepakatan antara lain yaitu:
   1) *Working Group of Investment Joint Committee Trade and Investment Indonesia Economic and Trade Office – Taipei Economic and Trade Office* (WGI JCTI IETO-TETO)
   2) *Working Group of Investment (WGI) and Senior Official Meeting* (SOM) dan *13th Ministerial Meeting* (MM) Indonesia - Singapura
   3) *Working Group on Trade and Investment* (WGTI) *of the 2nJoint Committee on Economic Cooperation* (JCEC) Indonesia-Korea Selatan
   4) *Memorandum of Understanding* dengan MITI Malaysia, melahirkan forum *Malaysia Indonesia Investment Cooperation Working Group* (MIIC-WG)
   5) *Senior Economic Officials' Meeting* (SEOM) *of Economic Trade and Investment Ministerial Meeting* (ETIMM) Indonesia - Australia

6) *Joint Economic Committee between the Republic of Indonesia and the Czech Republic*,
7) *Joint Committee Meeting* Indonesia-Mozambique

3. Nota Kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS) sebanyak 5 (lima) kesepakatan dengan berbagai mitra kerja sama dalam dan luar negeri yang dimiliki oleh Kementerian Investasi/BKPM yang disepakati pada tahun 2023 antara lain Nota Kesepahaman dengan Pimpinan Pusat Fatayat Nahdhatul Ulama, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, *The Ministry of Investment, Trade and Industry of Malaysia* (MITI), Universitas Bina Nusantara, PT Bank Rakyat Indoensia (BRI).

Gambar 3.26. *World Economic Forum* di Davos,

Kesepakatan/perjanjian kerja sama regional dan multilateral merupakan bagian dalam kerangka kegiatan *Investment Agreement* (IA) IETO - TETO, *Investment Support Agreement* RI - US, ASEAN - China *Free Trade Agreement* (FTA), ASEAN - Australia New Zealand FTA, *Investment Facilitation for Development of World Trade Organization* (WTO), ASEAN - Hong Kong FTA, ASEAN - Canada FTA, dan Investor-State Dispute Settlement Reform/ISDS) UNCITRAL. Rincian kesepakatan/perjanjian pada lingkup Regional dan Multilateral dilaksanakan dalam forum sebagai implementasi dari perjanjian yang sudah ada, yang terdiri dari:

1. Pada tingkat Regional terdapat 15 (lima belas) forum antara lain:
   1) ASEAN Coordinating Committee on Investment;
   2) IMT-GT Working Group on Trade and Investment Facilitation Meeting;
   3) ASEAN-China FTA WGI Meeting;
   4) ASEAN-Australia New Zealand FTA Committee on Investment;

5) ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting;
6) ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS);
7) ASEAN Senior Economic Officials Meeting (SEOM)/ASEAN Economic Minister (AEM) Meeting;
8) ASEAN-Hong Kong Sub-Committee on Investment;
9) High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI);
10) ASEAN-Canada FTA Working Group on Investment;
11) Committee of the Whole for ASEAN Economic Community (CoW);
12) ASEAN Investment Area (AIA) Council Meeting;
13) Pertemuan Tingkat Senior Official/Menteri IMT-GT;
14) BIMP-EAGA Trade and Investment Facilitation and Promotion Cluster (TIPC) Meeting;
15) Pertemuan Tingkat Senior Official/Menteri BIMP-EAGA.

2. Pada tingkat Multilateral terdapat sebanyak 9 (Sembilan) forum antara lain:
   1) World Economic Forum 2023;
   2) APEC Meeting (Investment Experts Group (IEG) dan Senior Official Meeting (SOM))
   3) UNESCAP Meeting of Committee on Trade Investment Enterprise and Business Innovation (CTIEBI-1);
   4) IPEF Negotiations;
   5) Trade and Investment Working Group G20 Presidensi India;
   6) Trade and Investment Ministrial Meeting G20 Presidensi India;
   7) WG III (Investor-State Dispute Settlement Reform/ISDS) UNCITRAL;
   8) Pertemuan WTO Joint Initiative on Investment Facilitation for Development (JI IFD);
   9) UNCTAD World Investment Forum 2023.

Semakin tingginya kebutuhan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan negara mitra maupun dunia usaha, berdampak pada meningkatnya kesepakatan yang dihasilkan. Disamping itu, perubahan metode penyelenggaraan perundingan/pertemuan kerja sama menjadi *hybrid* atau *virtual meeting* mendukung peningkatan partisipasi dan kesepakatan/perjanjian yang diimplementasikan.

Gambar 3.27.
ASEAN Investment Area 2023

Pada tahun 2022, terdapat peningkatan kesepakatan/perjanjian dari dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan dari target 58 kesepakatan tercapai melebihi target sebesar 155 kesepakatan. Lonjakan capaian kesepakatan tersebut mencakup kesepakatan dengan berbagai mitra dunia usaha dan strategis termasuk K/L yang masih berlaku. Namun demikian, pada tahun 2023 jumlah capaian kesepakatan (*year on year*) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dilakukan penyesuaian pencatatan khususnya yang terkait MoU atau perjanjian kerja sama dengan tidak mengikutsertakan kesepakatan dengan K/L di tahun tersebut. Meskipun terdapat penyesuaian dimaksud, realisasi kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan) tetap mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 64 ke kesepakatan.

Tabel 3.22.
Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Yang Telah Diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan)

Tahun	Target	Capaian
2022	58	155
2023	64	64

Secara garis besar Kementerian Investasi/BKPM dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, baik berupa perundingan/pertemuan pada forum bilateral, regional dan multilateral, kerja sama dengan dunia usaha dan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Nota

Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama, penyusunan rekomendasi kebijakan teknis pelaksanaan berusaha di bidang penanaman modal, serta melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kerja sama terhadap kegiatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus masuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk merealisasikan penanaman modalnya serta memberikan kemudahan pelaksanaan berusaha di Indonesia, disisi lainnya dapat mendorong para penanam modal melakukan ekspansi penanaman modal ke luar negeri *(outward investment)*, yang pada akhirnya mampu mendorong visi, misi dan tujuan Kementerian Investasi/BKPM dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk mencapai target indikator ini antara lain:

1. Pola pertemuan/perundingan secara *virtual/hybrid* mempengaruhi efektifitas pembahasan dan penyelesaian pending *issues* pada beberapa kesepakatan/perjanjian.
2. Frekuensi pertemuan dalam rangka persiapan dan perundingan tetap tinggi, namun waktu pelaksanaannya bisa berubah sewaktu-waktu yang dapat menyebabkan mundurnya target penyelesaian perjanjian/kesepakatan kerja sama internasional dari waktu yang telah direncanakan.
3. Koordinasi antar lembaga/pemangku kepentingan pemerintah Indonesia yang terlibat dalam perumusan bahan posisi perundingan masih belum optimal.
4. Masih belum optimalnya diseminasi/sosialisasi hasil-hasil perjanjian/kesepakatan yang telah dicapai karena program sosialisasi/diseminasi terhadap pemanfaatan kesepakatan perjanjian tersebut belum disetujui.
5. Ketersediaan data outward investment yang belum terpusat.
6. Belum semua K/L menetapkan NSPK yang menjadi acuan bagi aparatur untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha.
7. Masih ditemukan NSPK K/L, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang harus dikaji agar selaras antara K/L dengan pemerintah daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP dan dinas teknis terkait).
8. Belum sinkronnya peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Badan terkait dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikeluarkan oleh K/L untuk diimplementasikan baik di tingkat Pusat maupun di daerah.
9. Masih ditemukan layanan perizinan berusaha di daerah yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam NSPK K/L.
10. Belum optimalnya sosialisasi PP Nomor 5 Tahun 2021 dan NSPK K/L kepada pemerintah daerah menyebabkan kurangnya pemahaman aparatur daerah terhadap implementasi OSS.
11. Adanya refocusing sehingga dilakukan penyesuaian anggaran (*automatic adjustment*) bagi K/L secara nasional sehingga harus melakukan perubahan atau penyesuaian kegiatan.

12. Permasalahan terkait sumber daya manusia dari sisi kuantitas yang jumlahnya sangat terbatas, dan sisi kapasitas di mana diperlukan peningkatan kompetensi dan pengetahuan sehubungan dengan tugas dan fungsi unit kerja.
13. Beberapa inisiasi untuk membuat kesepakatan/perjanjian yang bersifat *top down* sehingga waktu penyiapan bahan dan persiapan teknis relatif terbatas.

Dalam tataran kerjasama penanaman modal melalui unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, memiliki rencana tindak lanjut dalam mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal antara lain:

1. Berpartisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara potensial;
2. Meningkatkan kesepakatan/perjanjian kerja sama dan MoU penanaman modal yang diimplementasikan;
3. Melakukan pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanam modal Indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negeri (*outward investment*);
4. Meningkatkan kerja sama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah dan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan K/L dan daerah untuk pemanfaatan OSS.

Sasaran Program (SP-6) "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal"

Sasaran Program 6 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal" didukung oleh indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Penanaman Modal. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal. Penilaian atas kegiatan pelayanan (konsultasi melalui tatap muka, telepon dan e-mail serta pemrosesan perizinan) penanaman modal yang dilakukan melalui survei IKM akan dapat memberikan gambaran atas persepsi dan pengalaman pelaku usaha/penanam modal secara kuantitatif. Nilai yang diperoleh dari survei tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan, sehingga dapat diketahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan bagian mana yang perlu dikembangkan. Dengan evaluasi dan pengembangan pelayanan berkelanjutan, diharapkan pelaku usaha dapat merasa nyaman dan percaya akan informasi serta pelayanan lainnya.

IK-14: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran yang ingin dicapai pada indikator kinerja ini yaitu, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal melalui penilaian atas kegiatan pelayanan (konsultasi melalui tatap muka, telepon, WhatsApp, dan email serta pemrosesan perizinan) penanaman modal yang dilakukan melalui survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) akan dapat memberikan gambaran atas persepsi dan pengalaman pelaku usaha/penanam modal secara kuantitatif.

Nilai yang diperoleh dari survei tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan sehingga dapat terus mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan bagian mana yang perlu dikembangkan. Dengan evaluasi dan

pengembangan pelayanan berkelanjutan, diharapkan pelaku usaha dapat menerima informasi yang akurat dengan waktu tunggu yang relatif singkat. Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh capaian realisasi indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.23.
Capaian Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Program 6 (SP-6) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal									
Indikator Kinerja 14 (IK-14) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal (Indeks)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
3,35 dari skala 4	3,26 dari skala 4	3,4 dari skala 4	3,4 dari skala 4	3,45 dari skala 4	3,34 dari skala 4	-1,76	96,81	Baik	3,5 dari skala 4

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2023 sebesar 3,34 kurang target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,45 dari skala 4, sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,81% dengan kategori Baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian realisasi kinerja indikator ini menurun sebesar 1,76%. Berbeda halnya jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian realisasi kinerja indikator ini meningkat sebesar 2,45%. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 yaitu sebesar 3,5 dari skala 4, realisasi pada tahun 2023 masih berada di bawahnya atau masih kurang 0,16. Oleh karena itu diharapkan untuk tahun 2024 realisasi pada indikator kinerja ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator penilaian yang digunakan dalam survei kinerja ini yaitu indikator kelembagaan dan kegiatan, kompetensi dan profesionalisme SDM, serta waktu penyelesaian perizinan berusaha yang ditetapkan. Kuesioner yang disebarkan melalui *Google Form* yang disampaikan kepada pelaku usaha setelah selesai menggunakan layanan konsultasi yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan dengan menggunakan metode *Method of Successive Interval* (MSI) secara triwulan dengan jumlah koresponden pada triwulan I adalah 85 responden, triwulan II adalah 1.996 responden, triwulan III adalah 2.342 responden, dan triwulan IV adalah 1.072 responden. Pengambilan koresponden didasarkan metode pengambilan data survei sesuai dengan Peraturan Kementerian MenPan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.24. ‘
Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan	NRR 2023	NRR 2023	NRR 2023	NRR 2023	NRR 2023
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rata-rata
1	Persyaratan Pelayanan	2.953	3.084	3.190	3.351	3.170
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	2.882	3.110	3.231	3.413	3.219
3	Waktu Penyelesaian	2.847	3.074	3.211	3.302	3.170
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3.918	3.866	3.875	3.954	3.888
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.224	3.278	3.379	3.493	3.362
6	Kompetensi Pelaksana	3.133	3.248	3.398	3.547	3.369
7	Perilaku Pelaksana	3.424	3.464	3.535	3.673	3.534
8	Sarana dan Prasarana	3.140	3.236	3.371	3.506	3.344
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.012	3.219	3.363	3.518	3.335
Nilai Rata-rata (NRR) IKM Tertimbang		**3.139**	**3.254**	**3.361**	**3.493**	**3.344**
IKM Unit Pelayanan Prioritas ({NRR IKM : 4} x 100)		**78,47**	**81,35**	**84,02**	**87,32**	**83,60**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari sembilan ruang lingkup (unsur) Pelayanan yang menjadi catatan, terdapat Nilai Rata-Rata (NRR) Tertinggi adalah biaya/tarif Pelayanan dengan indeks triwulan I adalah 3,918, triwulan II adalah 3,866, triwulan III adalah 3,875 dan triwulan IV adalah 3,954. Sementara itu, Nilai Rata-Rata (NRR) Terendah adalah persyaratan pelayanan dengan indeks triwulan I adalah 2.953, triwulan II adalah 3,084, triwulan III adalah 3,190, triwulan IV adalah 3,351.

Secara keseluruhan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kementerian Investasi/BKPM Periode Tahun 2023 adalah Baik dengan indeks sebesar 3,34. Dari 9 (sembilan) unsur pelayanan, 2 (dua) unsur mendapatkan penilaian Sangat Baik dan 7 (tujuh) unsur mendapatkan penilaian Baik. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa unsur Biaya/tarif mendapatkan penilaian indeks kepuasan paling tinggi, sedangkan unsur Persyaratan Pelayanan mendapatkan penilaian indeks kepuasan terendah.

Sistem OSS berbasis risiko yang masih dalam proses penyempurnaan termasuk pengembangan beberapa fitur dan menu perizinan berusahanya menyebabkan masih terjadi eror atau kendala sistem. Atas kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam memproses perizinan di sistem OSS berbasis risiko dan kendala tersebut tidak dapat langsung terselesaikan saat pelaku usaha melakukan konsultasi menyebabkan penilaian pada beberapa unsur ruang lingkup pelayanan menurun. Diharapkan setelah adanya pengembangan OSS berbasis risiko selesai, maka kualitas pelayanan perizinan berusaha akan semakin membaik.

Berdasarkan hasil survei diperoleh beberapa permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja unit pada tahun mendatang, di antaranya sebagai berikut:

1. Mempermudah persyaratan bagi pelaku usaha yang akan melakukan konsultasi sehingga permasalahan yang timbul terkait perizinan berusaha dapat segera tertangani.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan unit lain terkait dengan pengayaan substansi pelaksanaan perizinan berusaha agar informasi yang disampaikan kepada pelaku usaha akurat dan handal;
3. Menetapkan SLA yang terstandar dalam menangani konsultasi dengan pelaku usaha, baik dalam format *Whatsapp*, *e-mail*, telepon dan konsultasi tatap muka.
4. Peningkatan kualitas sistem OSS agar tidak sering terjadi perawatan sistem terutama pada jam – jam sibuk
5. Sistem OSS masih belum optimal dan belum dapat mengakomodir kebutuhan data teknis dari K/L, sehingga informasi yang di akses tim operator *help desk* kurang lengkap.
6. Petugas *Front Office* OSS diharapkan menguasai betul proses perizinan setiap K/L sehingga dapat memberi solusi terbaik kepada Pelaku Usaha
7. Agar ada sosialisasi penyamaan pemahaman terkait substansi perizinan antar K/L bagi para operator *help desk* sehingga tidak ada mis informasi yang disampaikan ke pelaku usaha

Selain itu, guna menjaring persepsi para *stakeholder*, Kementerian Investasi melalui Direktorat PPBSI akan meningkatkan pelaksanaan survei berikutnya. Hal ini dilakukan dengan penentuan responden yang lebih fokus kepada pihak-pihak yang selama ini terlibat langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit agar hasil survei dapat menggambarkan situasi dan kondisi *riil* (faktual) pada saat proses pelaksanaan pemberian layanan berlangsung. Adapun beberapa terobosan yang dilakukan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

1. Penambahan kuota antrian layanan konsultasi dari semula 100 pelaku usaha per hari menjadi 400 pelaku usaha per hari.
2. Dilaksanakannya kegiatan Pemberian NIB di 6 titik lokasi di seluruh Indonesia sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pada pelaku UMK perorangan.

Sementara itu, beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya:

1. Tetap konsisten melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian/Lembaga dan Daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya;
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan;
4. Diharapkan seluruh perizinan berusaha dapat diproses dan diterbitkan melalui sistem OSS berbasis risiko;
5. Diharapkan terdapat perbaikan dan pemutakhiran sarana prasarana di Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal seperti komputer dan

kelengkapannya secara berkala baik yang digunakan di *front office* maupun di *back office*.

6. Mengoptimalkan transfer pengetahuan kepada seluruh SDM di unit terkaitproses perizinan berusaha melalui OSS sehingga memiliki basic knowledgeyang sama dalam memberikan layanan berbantuan kepada pelaku usaha.

Gambar3.28.
Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB)
kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Sorong

Sasaran Program (SP-7) "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal"

Sasaran Program 7 "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal" didukung oleh indikator kinerja yaitu Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan *(debottlenecking)*. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/ BKPM diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal. Meningkatnya realisasi penanaman modal merupakan salah satu indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian diturunkan menjadi target dalam Rencana Strategis BKPM 2020-2024. Realisasi penanaman modal antara lain dipengaruhi oleh kualitas pengendalian pelaksaan penanaman modal, di antaranya dengan melakukan fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan di lapangan. Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan melibatkan *stakeholder* terkait sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan perusahaan dapat merealisasikan rencana investasinya. Sesuai dengan RKP 2023 target realisasi investasi sebesar Rp. 1.099,8 Triliun, dalam arahan Presiden yang disebabkan oleh keterbatasan sumber pertumbuhan perekonomian yang menjadikan investasi sebagai motor penggerak

utama pertumbuhan dan menetapkan target realisasi investasi sebesar Rp. 1.400 Triliun. Dengan capaian realisasi investasi sebesar Rp. 1.418,9 Triliun yang berarti capaian sebesar 129,1% dari target RKP 2023. Sementara mengacu kepada target yang ditetapkan Presiden tingkat capaian 101,3 % dari target.

Secara total, nilai realisasi investasi sektor sekunder (manufaktur) sebesar Rp 596,3 Triliun (42,0% dari realisasi investasi periode Januari-Desember 2023). Jika dirinci kepada PMA/PMDN, nilai realisasi investasi PMA untuk sektor sekunder (manufaktur) sebesar Rp 424,6 triliun (57,1% dari realisasi investasi PMA). Sedangkan untuk realisasi investasi sektor sekunder (manufaktur) pada PMDN tercatat sebesar Rp 171,7 triliun (25,4% dari realisasi investasi PMDN).

IK-15: Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat diselesaikan Permasalahannya

Setiap pelaku usaha yang sudah mendaftarkan kegiatan usahanya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dalam merealisasikan investasi pelaku usaha cukup banyak menghadapi kendala terutama:

1. Memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung serta sertifikat laik fungsi.
2. Memenuhi persyaratan dan verifikasi perizinan berusaha.
3. Memenuhi persyaratan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha/PB UMKU.
4. Permasalahan lahan.
5. Adanya penolakan dari masyarakat atas pelaksanaan kegiatan investasi.

Atas berbagai permasalahan tersebut, dilakukan berbagai upaya dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan antara lain melalui program kerja:

1. Satuan Tugas Percepatan Investasi.
2. Eksekusi Realisasi Investasi proyek-proyek mangkrak yang dibagi berdasarkan Wilayah Barat dan Timur.
3. Layanan Pendampingan Keberlanjutan Investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya
4. Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM.

Tabel 3.25.
Capaian Indikator Kinerja
Persentase Fasilitasi Perusahaan yang Dapat Diselesaikan Permasalahannya

Sasaran Program 7 (SP-7) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal									
Indikator Kinerja 15 (IK-15) Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya (persentase)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
N/A	N/A	70%	104%	79%	106%	2,42%	120,00	Sangat Baik	80%

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi kinerja indikator persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya pada tahun 2023 sebesar 106% melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 79%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 120,00% dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian realisasi kinerja indikator ini meningkat 2% atau tumbuh 2,42%. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 yaitu sebesar 80%, realisasi pada tahun 2023 sudah melebihi target. Oleh karena itu, diharapkan untuk tahun 2024 realisasi pada indikator kinerja ini tetap dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci terkait realisasi penyelesaian permasalahan yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26.
Kegiatan Fasilitasi Perusahaan yang dapat diselesaikan Permasalahannya

Direktorat	Kegiatan Fasilitasi Perusahaan yang dapat diselesaikan Permasalahannya		
	Target	Realisasi	%
DIREKTORAT WILAYAH I	70%	133%	190%
DIREKTORAT WILAYAH II	85%	100%	118%
DIREKTORAT WILAYAH III	100%	125%	125%
DIREKTORAT WILAYAH IV	70%	100%	143%
DIREKTORAT WILAYAH V	70%	70%	100%

Pada kegiatan fasilitasi permasalahan yang telah dilakukan Direktorat Wilayah I diperoleh hasil sebesar 133% dari target 70%. Adapun yang termasuk ke dalam Direktorat Wilayah I yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan dan Lampung (7 Provinsi). Kemudian pada kegiatan fasilitasi permasalahan yang telah dilakukan Direktorat Wilayah II diperoleh hasil sebesar 100% dari target 70%. Adapun yang termasuk ke dalam wewenang Direktorat Wilayah II yaitu Provinsi Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah (7 Provinsi). Selanjutnya pada kegiatan fasilitasi permasalahan yang telah dilakukan Direktorat Wilayah III diperoleh hasil sebesar 125% dari target 100%. Adapun yang termasuk ke dalam wewenang Direktorat Wilayah III yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara (7 Provinsi). Sementara itu pada kegiatan fasilitasi permasalahan yang telah dilakukan Direktorat Wilayah IV diperoleh hasil sebesar 100% dari target 70%. Adapun yang termasuk ke dalam wewenang Direktorat Wilayah IV yaitu Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan (10 Provinsi). Pada Direktorat Wilayah V diperoleh hasil sebesar 70% dari target 70%. Adapun yang termasuk ke dalam wewenang Direktorat Wilayah V yaitu Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat dan Papua Barat Daya (7 Provinsi).

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan jumlah Badan Usaha yang difasilitasi Permasalahannya secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27.
Jumlah Badan Usaha yang Difasilitasi Permasalahan

Direktorat	Fasilitasi Permasalahan yang dihadapi Perusahaan		%
	Target	Realisasi	
DIREKTORAT WILAYAH I	15	20	133%
DIREKTORAT WILAYAH II	25	25	100%
DIREKTORAT WILAYAH III	40	50	125%
DIREKTORAT WILAYAH IV	35	31	89%
DIREKTORAT WILAYAH V	5	8	160%

Pada tahun 2023, Direktorat Wilayah I telah melakukan kegiatan fasilitasi terhadap 20 Badan Usaha atau 133% dari target sebesar 15 Badan Usaha yang telah ditetapkan. Kemudian pada Direktorat Wilayah II, jumlah fasilitasi permasalahan yang terselesaikan sebanyak 25 Badan Usaha sehingga diperoleh persentase sebesar 100% dari target 25 Badan Usaha. Adapun Direktorat Wilayah III telah melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah penamanan modal kepada 50 Badan Usaha yang berarti mencapai 125% dari target 40 Badan Usaha yang telah ditetapkan. Untuk Direktorat Wilayah IV telah melaksanakan kegiatan fasilitasi permasalahan terhadap 31 Badan Usaha atau 89% dari target sebesar 35 Badan Usaha. Dan Direktorat Wilayah V telah melaksanakan kegiatan fasilitasi permasalahan terhadap 8 Badan Usaha atau 160% dari target 5 badan usaha.

Kegiatan ini merupakan pelayanan *aftercare* dari Kementerian Investasi/BKPM kepada pelaku usaha baik PMA/PMDN yang menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan proyek setelah terbitnya perizinan berusaha. Kegiatan ini melibatkan para *stakeholders* terkait seperti kementerian sektor, instansi daerah, pengelola kawasan industri, perusahaan BUMN, maupun masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah, pertama kali Kementerian Investasi/BKPM menerima laporan/surat pengaduan dari perusahaan, kemudian ditindaklanjuti dengan penelaahan masalah dan rapat fasilitasi yang bisa dilakukan lebih dari satu kali.

Secara umum, tingkat keberhasilan dan jangka waktu kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan tergantung dengan tingkat kerumitan dari kasus yang dihadapi serta pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu diperlukan koordinasi antar lembaga baik secara formal maupun informal untuk penyelesaian masalah tersebut. Beberapa kasus fasilitasi permasalahan yang membutuhkan jangka waktu panjang diantaranya adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan permasalahan lahan.

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kegiatan untuk memaksimalkan target capaian pada indikator kinerja ini, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dengan berbagai instansi terkait di pusat maupun daerah maka penting dilaksanakannya pertemuan dan koordinasi yang lebih intens dan efektif dengan instansi teknis terkait lainnya di pusat dan daerah. Hal ini mengingat banyaknya kegiatan yang akan terlaksana optimal dengan melibatkan segenap institusi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

2. Untuk mendorong pemantauan terhadap kemajuan perkembangan realisasi proyek penanaman modal dan kegiatan memfasilitasi permasalahan perusahaan, dibutuhkan beberapa perbaikan dan penyempurnaan antara lain meliputi:
   a. Pemantauan
      Melakukan pendekatan secara intensif melalui sosialisasi tentang pemanfaatan sistem pelaporan kegiatan penanaman modal secara online (LKPM Online) berbasis Risiko sehingga LKPM dapat disampaikan tepat waktu dan benar sesuai dengan periode dan tahapan pelaporan. Sanksi perlu dilaksanakan secara tegas terhadap kelalaian penanam modal atas tidak terpenuhinya kewajiban penanam modal.
   b. Pembinaan
      Pelaksanaan pembinaan harus dapat dilaksanakan secara intensif kepada penanam modal dan aparatur daerah untuk memfasilitasi permasalahan-permasalahan penanaman modal maupun indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitasi terhadap indikasi permasalahan perusahaan dapat diperoleh melalui analisis LKPM, pemantauan langsung maupun informasi atau pengaduan dari investor beserta Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah maupun asosiasi pengusaha. Melalui kegiatan pembinaan ini diharapkan semua permasalahan tersebut dapat difasilitasi dan dikoordinasi sehingga memberikan hasil yang lebih optimal terhadap investasi secara nasional.
   c. Pengawasan
      Kegiatan pengawasan dilaksanakan atas pelaksanaan ketentuan penanaman modal serta penggunaan fasilitas yang dilaksanakan secara koordinatif bersama instansi teknis terkait (instansi Pemerintah dan pemerintah daerah terkait) guna pengambilan kesimpulan dan keputusan atas hasil pengawasan di lapangan yang lebih komprehensif dan efektif termasuk menghasilkan rekomendasi yang tepat guna bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

Sasaran Program 8 (SP-8) "Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Penanaman Modal"

Sasaran program 8 adalah "Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi Penanaman Modal", yang terdiri atas satu indikator kinerja yaitu, "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)". Kementerian Investasi/BKPM diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dengan penetapan indikator ini, terutama Deputi Teknologi Informasi yang terdiri atas tiga Direktorat: 1) Direktorat Sistem Perizinan Berusaha; 2) Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur, dan Jaringan; 3) Direktorat Data dan Informasi. Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputi Teknologi

Informasi diharapkan mampu memberikan pelayanan ketersediaan data dan informasi yang baik bagi calon investor/ penanam modal.

IK-16: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Target dan capaian kinerja indikator ke 16 “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28.
Capaian Indikator Kinerja
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sasaran Program 8 (SP-8) Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal									
Indikator Kinerja 16 (IK-16) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
3,38	2,8	3	2,8	3	2,83	1,07	94,33	Baik	3

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi kinerja indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023 sebesar 2,83 kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3, sehingga capaian kinerjanya sebesar 94,33% dengan kategori Baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian realisasi kinerja indikator ini meningkat sebesar 0,03 atau naik sebesar 1,07%.

Adapun jika target akhir renstra tahun 2024 akan disamakan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 3 maka diperlukan upaya peningkatan pada aspek audit dan penerapan manajemen SPBE dimana kedua aspek tersebut dapat meningkatkan nilai capaian target. Hal ini disebabkan oleh: (1) audit dilakukan berdasarkan perencanaan dan nampak secara eksplisit di dokumen peta rencana SPBE, (2) data dukung penerapan manajemen SPBE yang sesuai/sahih sesuai masing-masing bidang manajemen dan pelaksanaannya yang mengacu pada pedoman yang seharusnya dilakukan sesuai hasil Indeks SPBE di bawah ini.

Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	**2,83**
Domain Kebijakan SPBE	2,10
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*2,10*
Domain Tata Kelola SPBE	2,30
Perencanaan Strategis SPBE	*2,00*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*2,50*
Penyelenggara SPBE	*2,50*
Domain Manajemen SPBE	1,09
Penerapan Manajemen SPBE	*1,13*
Audit TIK	*1,00*
Domain Layanan SPBE	3,95
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*3,70*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,33*

Gambar 3.29.
Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023

Hasil ini diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yaitu akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja pada indikator ini antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan penguatan pada aspek kebijakan agar dapat mendorong implementasi SPBE menjadi lebih baik.
2. Melakukan perbaikan dalam hal pengelolaan pada aspek manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan terus mengikuti pelatihan dan seminar tentang data dan informasi.
4. Melakukan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengolahan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi.
5. Penerapan dan pemanfaatan *big data analytic* untuk dapat meningkatkan transparansi serta mendukung program pemerintah dalam percepatan Investasi.
6. Melakukan diseminasi, sinkronisasi, dan konsolidasi data penanaman modal.
7. Melakukan penempatan helpdesk di pusat dan daerah.

Sasaran Strategis (SS-3) "Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Melayani"

Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki 4 (empat) prinsip utama: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Oleh sebab itu, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan mampu meningkatkan kinerja sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau *business process,* serta sumber daya manusia aparatur melalui penetapan dua indikator kinerja utama yaitu, 1) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM, dan 2) Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (Opini BPK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, mengemukakan bahwa tujuan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi adalah: 1) Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta dampak positifnya terhadap hasil pembangunan; 2) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah periode sebelumnya; 3) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara berkelanjutan; dan 4) Menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kementerian Investasi/BKPM sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat oleh peraturan. Aturan tersebut mengharuskan Kementerian Investasi/BKPM memiliki kompetensi sesuai jabatan atau wewenang, semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang diawasi oleh pengawasan eksternal. Sebagai bagian dari birokrasi, peran dan kemampuan Kementerian Investasi/BKPM harus menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM harus menjadi birokrasi yang profesional untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat *(public service).*

IKU-17: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Memasuki periode terakhir dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasikan. Percepatan yang dilakukan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait.

Adapun prinsip yang mendasari pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Dinamis: Evaluasi Reformasi Birokrasi memungkinkan perubahan pada indikator yang digunakan jika terjadi kondisi mendesak yang menyebabkan perubahan;
2. Holistik: Evaluasi Reformasi Birokrasi perlu memotret berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang dianggap terkait dengan pencapaian sasaran dan tujuan reformasi birokrasi;
3. Orientasi Hasil: Evaluasi Reformasi Birokrasi berfokus untuk mengukur hasil atau dampak dari upaya yang telah dilakukan;
4. Kolaboratif: Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan oleh berbagai pihak, lintas sektor atau kementerian/lembaga dengan menekankan kesamaan tujuan;
5. Sinergis: Penggunaan indikator dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi yang selaras atau harmonis satu sama lain; dan
6. Kontinuitas: Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan atau kesinambungan agenda reformasi birokrasi, baik RB General maupun Tematik, untuk mencapai target yang ditetapkan.

Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM adalah tingkat proses pelaksanaan RB lingkup Kementerian Investasi/BKPM. Kementerian Investasi/BKPM terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Oleh sebab itu, Kementerian Investasi/BKPM selalu menjadikan penilaian reformasi birokrasi sebagai acuan penyusunan upaya perbaikan ke depannya.

Evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Investasi/ BKPM difokuskan ke dalam upaya perbaikan terhadap komponen dan aspek yang masih kurang. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal Kementerian Investasi/BKPM, dalam rangka mencapai sasaran yaitu Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Melayani. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian pada periode sebelumnya. Capaian nilai kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM pada indikator ke 17 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.29.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani									
Indikator Kinerja Utama 17 (IKU-17) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
BB (77)	77,89	A (80)	BB (78,20)	A (80)	BB (71,91)	-8,04	89,89	Baik	A (80)

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi kinerja indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2023 adalah sebesar 71,91 dengan kategori BB dan predikat Sangat Baik. Nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80 (A), sehingga capaian kinerjanya sebesar 89,89% dengan kategori Baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian realisasi kinerja indikator ini menurun sebesar 8,04% dikarenakan terdapat perubahan mekanisme evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 yaitu sebesar 80 (A), realisasi pada tahun 2023 masih berada di bawahnya atau masih kurang 8,09 poin. Oleh karena itu, diharapkan untuk tahun 2024 realisasi pada indikator kinerja ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 terdapat perubahan mekanisme evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2023. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara manual yang terbagi ke dalam 8 (delapan) area perubahan, sedangkan pada tahun 2023 penilaian dilakukan terhadap penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan rencana aksi serta penilaian berbagai indikator yang dilakukan oleh Tim Penilai Meso dan Tim Penilai Nasional.

Dengan adanya perubahan tersebut, Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM telah menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 serta menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik. Kedua dokumen tersebut beserta capaian realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Portal RB Nasional pada tanggal 31 Oktober 2023.

Adapun kendala yang dihadapi Kementerian Investasi/BKPM untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023 ini yaitu adanya perubahan mekanisme evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang baru ditetapkan pada TW III Tahun 2023,

sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian dokumen oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh KemenPANRB melalui evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi genaral dan tematik diperoleh penilaian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.30.
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	3	3
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	7
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	97,66	1,95
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0,8
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,525	2,82
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0,5	0,5
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	76,17	3,05
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	86,79	1,74
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0,4
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	72,36	1,45

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks
		Reformasi Birokrasi				
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	80,61	1,61
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset	2	3,31	1,66
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	2	0,6
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	80,25	1,2
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	1,5	76,64	1,15
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,5	2,14	0,64
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	26,44	0,53
18	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	285	2,78
19	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1,5	1,07	0,32
20	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	85,21	1,28
21	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	Indeks SPBE	9	2,83	5,09

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks
		Reformasi Birokrasi				
22	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Capaian Prioritas Nasional	2	97,84	1,96
23	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Capaian IKU	8	100	6,09
24	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	5	5
25	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendas	4	50,7	2,03
26	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	1,95	0,08
27	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	71,14	7,11
28	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	82,25	6,58
29	RB General	Net Koefsien	Net Koefsien	10		
30	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0,8		
31	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0,8	0,8	0,8
32	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0,8		
33	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0,8	0,8	0,8
34	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Infasi (Strategi Pembangunan)	0,8		

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks
35	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1,2		
36	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	1,2	1,05	1,05
37	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	1,2		
38	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak	1,2	70	0,84
39	RB Tematik	Capaian Utama RB Tematik	Laju Infasi (Capaian Dampak)	1,2		

Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, Kementerian Investasi/BKPM selama tahun 2023 telah melakukan beberapa upaya perbaikan reformasi birokrasi antara lain:

1. Menyusun penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024;
2. Melakukan penyederhanaan struktur organisasi dengan melaksanakan evaluasi terhadap struktur organisasi Kementerian Investasi/BKPM eksisting untuk melihat ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi;
3. Menyusun kebijakan pemerintah yang berkualitas mulai dari proses pembuatan kebijakan sampai dengan proses evaluasi kebijakan;
4. Mendukung pencapaian kegiatan prioritas nasional;
5. Melakukan penyusunan bisnis proses dan prosedur operasional (SOP), implementasi *e-government*, keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip;
6. Membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Internal Kementerian Investasi/ BKPM;
7. Melakukan pemantauan dan *crosscheck* secara berkala pada pengisian SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) oleh unit kerja di Kementerian Investasi/BKPM;
8. Melakukan kegiatan pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas dengan menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan budaya kerja positif dengan harapan akan terjadi peningkatan penerapan nilai, kode etik, budaya kerja positif.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja pada indikator ini antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi baik secara internal maupun eksternal;
2. Pemerataan pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Pembentukan agen perubahan;

4. Identifikasi dan pemetaan terhadap berbagai kebijakan baik yang telah disusun maupun sedang dalam tahap penyusunan.
5. Peningkatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM.

IKU-18: Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM (Opini BPK)

Pemberian Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan *(adequate disclosures)*, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Pernyataan menolak memberikan opini *(disclaimer of opinion)* atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Capaian nilai kinerja Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM pada indikator ke 18 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.31.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM (Opini BPK)

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani									
Indikator Kinerja Utama 18 (IKU-18) Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM (Opini BPK)									
2021		2022		2023		Pertumbuhan (%)	Capaian 2023 (%)	Kategori	Target Akhir Renstra 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	0,00	100	Sangat Baik	WTP

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022 yang telah diaudit pada Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bersama dengan 81 LKKL lainnya. Capaian tersebut memenuhi 100% dari target yang ditetapkan dan memenuhi kategori "sangat baik". Pada tahun 2023, Kementerian Investasi/BKPM telah meraih penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut merupakan capaian ke-16 kali berturut-turut diterima oleh Kementerian Investasi/BKPM. Capaian kinerja ini diupayakan tetap dipertahankan untuk mencapai target akhir renstra tahun 2024.

Perolehan opini WTP merupakan hasil kontribusi dari seluruh unit kerja terkait yang dimulai sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan. Dalam rangka mencapai opini WTP, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan langkah-langkah berupa:

1. Menyusun rencana aksi dan melakukan tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksa BPK R.I. ditahun-tahun sebelumnya, selain itu juga melakukan monitoring secara berkala atas pemenuhan rencana aksi dimaksud.
2. Melakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan di bidang perbendaharaan negara khususnya peraturan-peraturan baru terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan.
3. Melakukan monitoring secara berkala atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang melibatkan unit Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Inspektorat, Biro Umum, Pengelola Anggaran Satuan Kerja, dan Unit Layanan Pengadaan.
4. Melaksanakan verifikasi, evaluasi serta konsultansi atas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan penerapan prosedur atas penyusunan laporan keuangan seluruh satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta melakukan koordinasi dengan tim Inspektorat dalam kegiatan pengawasan yang bersifat preventif.

Selanjutnya Kementerian Investasi/BKPM melalui Biro Umum beserta seluruh unit kerja terkait terus berkomitmen untuk tetap mengawal proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kegiatan, serta pelaporan keuangan agar mendapatkan predikat WTP untuk penyusunan Laporan Keuangan di tahun-tahun selanjutnya. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Kementerian Investasi/BKPM dalam Laporan Keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kementerian Investasi/BKPM telah berkomitmen untuk mengedepankan tata kelola yang baik atau *good governance*, sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Investasi/BKPM maupun penggunaan anggaran Kementerian Investasi/BKPM berdampak positif dan optimal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan Kementerian Investasi/BKPM dalam memperoleh opini WTP ini tentu tidak terbebas dari adanya kendala atau permasalahan yang menghambat proses

pencapaian kinerjanya. Adapun beberapa kendala terkait pencapaian opini WTP antara lain:

1. Terbitnya peraturan pelaksanaan anggaran baru yang belum tersosialisakan dengan baik sehingga implementasi pelaksanaan pada Kementerian/Lembaga menjadi terkendala.
2. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia khususnya di bidang pengelolaan anggaran, sehingga terdapat rangkap jabatan antara tugas dan fungsi pada unit kerja dengan pengelola anggaran.
3. Terdapat rekomendasi BPK pada tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Kementerian Investasi/BKPM terus berusaha agar dapat mengatasi berbagai kendala yang timbul agar tidak mempengaruhi proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka meraih opini Laporan Keuangan WTP antara lain:

1. Penguatan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan.
2. Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis.
3. Menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP pada Kementerian Investasi/BKPM masih perlu untuk ditingkatkan guna memaksimalkan proses kinerja, adapun rencana tindak lanjut atas kinerja pada indikator ini antara lain:

1. Menindaklanjuti penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023 dilengkapi dengan bukti bukti pendukungnya.
2. Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi/BKPM.

3.4. Keterkaitan Kinerja Unit Kerja dalam Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian

Untuk mewujudkan organisasi dan kelembagaan yang berorientasi terhadap hasil, perlu untuk memastikan bahwa struktur organisasi eksisting memiliki kesesuaian dan keterkaitan dengan kinerja yang telah ditetapkan. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan-sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun anggaran. Dalam rangka memperbaiki proses penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja setiap individu dan dengan desain strategi/program/kegiatan, maka perlu didasarkan pada proses membangun model logis (*logic model*) maupun kerangka pikir logis (*logical framework*) yang tepat.

Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dengan dukungan struktur organisasi yang baik. Pada tataran implementasi, hal ini sudah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Namun demikian dikarenakan pada renstra tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan *Balance Score Card* (BSC), maka proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja tidak terlihat secara jelas. Pada penyusunan Renstra Revisi dan Renstra di periode berikutnya Kementerian Investasi/BKPM akan menggunakan pendekatan kerangka pikir logis (*logical framework).*

Pada tahun 2023, keterkaitan antara masing-masing unit kerja dengan indikator kinerja telah diidentifikasi untuk kemudian disusun dalam kerangka pikir logis sebagai berikut:

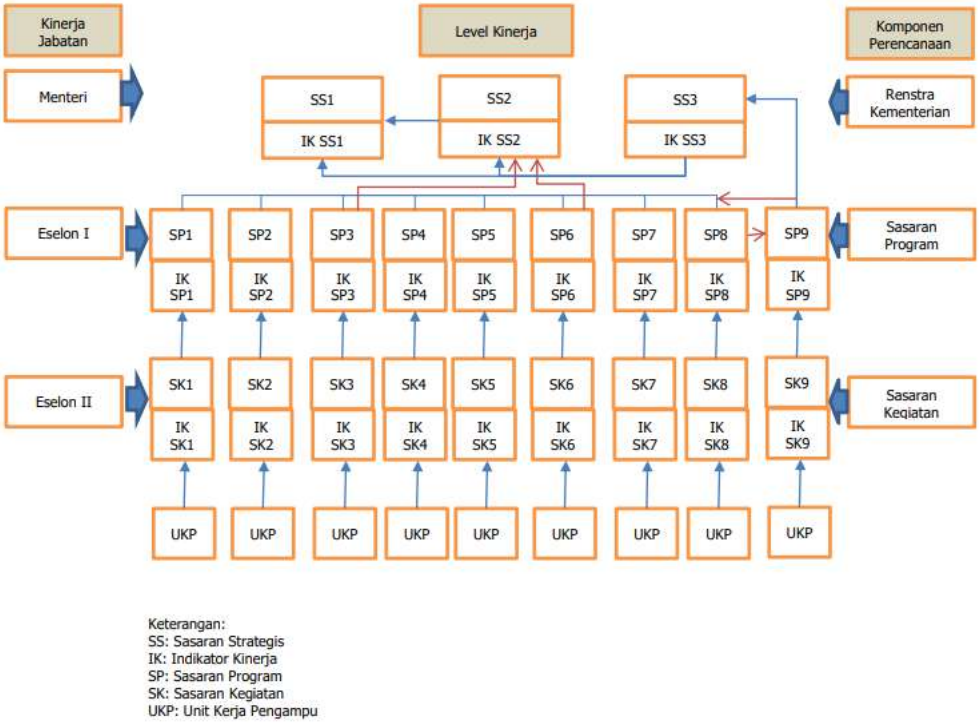

Gambar 3.30.
Kerangka Pikir Logis
Kinerja Unit Kerja dalam Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian

Mengacu pada dokumen Renstra 2020-2024 Kementerian Investasi/BKPM, terdapat 3 sasaran yang telah ditetapkan yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal, dengan indikator kinerja:
   a. Nilai Realisasi Penanaman Modal;
   b. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder;
   c. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa); dan
   d. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM.
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, dengan indikator kinerja: Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*)

3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani, dengan indikator kinerja:
   a. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM; dan
   b. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM

Capaian keberhasilan sasaran strategis ke-1 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, dipengaruhi oleh sasaran ke-2, yaitu meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal. Adapun untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis ke-1 dan ke-2 tentunya diperlukan birokrasi yang bersih, efektif dan melayani (sasaran ke-3), dengan indikator kinerja: (a) Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM; dan (2) Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM.

Dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis ke-1, terdapat 8 unit kerja yang berkontribusi secara langsung, yaitu Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Adapun unit kerja pengampu utama dalam pencapaian Sasaran Strategis ke-2 Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Sasaran ke-3 di ampu oleh Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama. Selain berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran ke-3, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama juga berperan mendukung pencapaian kinerja masing-masing Deputi.

Untuk memastikan keberhasilan hal tersebut, Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya, perencanaan, pengendalian, audit, dan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk memperkuat kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal turut berperan terutama dalam hal penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3.5. Capaian Kinerja Indikator RPJMN 2020-2024

Selain melakukan analisis terhadap capaian masing-masing indikator, perlu dilihat capaian Kementerian Investasi/BKPM terhadap indikator-indikator yang tertera di Rencana Pembangunan Jangka Menenangah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Kementerian Investasi/BKPM memiliki 6 indikator yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024, berikut rinciannya:

Tabel 3.32.
Target Indikator RPJMN Kementerian Investasi/BKPM
Periode Tahun 2020-2024

No	Capaian Indikator Peran Strategis Kementerian Investasi/BKPM terhadap Target RPJMN 2020-2024	Target Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (Ranking EoDB)					
	a. Jumlah Prosedur	-	-	-	-	5 Prosedur
	b. Waktu (Hari)	-	-	-	-	4 Hari
2	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	886	991,3	1.128,3	1.294,1	1.500
3	Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (Persen)	47,4	47,8	48,3	48,9	49,5
4	Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	246,3	316,3	422,2	573,2	782
5	Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)	45,6	46,2	47,4	48,5	49,67
6	Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	bertahap	bertahap	bertahap	bertahap	bertahap

Mengacu pada rincian tabel dibawah, indikator-indikator pada RPJMN sebagian telah tercapai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.33.
Pencapaian Target Tahun 2023 Pada RPJMN 2020-2024
Kementerian Investasi/BKPM

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Capaian	(%)
1.	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (Ranking EoDB)				
	a. Jumlah Prosedur	Jumlah Prosedur	5 Prosedur	2 Prosedur	160
	b. Waktu (Hari)	Jumlah Hari	4 Hari	2,5 hari	137,5
2.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Rp/Triliun	1.294,1	1.418,9	109,64
3.	Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN	Persentase	48,9	47,6	97,34
4.	Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	Rp/Triliun	573,2	596,3	104,03
5.	Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)	Persentase	48,5	50,6	100,32
6.	Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	Kategori	bertahap	bertahap	100

Indikator Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia yang diturunkan pada dua sub-indikator yaitu Jumlah Prosedur dan Waktu prosedur memulai usaha. Kedua sub-indikator tersebut memiliki realisasi masing-masing diatas target yang telah ditetapkan. Indikator jumlah prosedur misalnya, dengan target 5 prosedur realisasinya telah mencapai 2 prosedur. Sedangkan untuk indikator jumlah hari dengan target 4 hari realisasinya sudah mencapai 2,5 hari sehingga capaian indikator ini sebesar 137,5%.

Indikator RPJMN selanjutnya adalah nilai realisasi penanaman modal akumulatif dari PMDN dan PMA. Target yang ditetapkan sebesar Rp1.294,1 triliun dengan realisasi sebesar Rp1418,9, triliun sehingga capaiannya sebesar 109,64%.

Selanjutnya adalah indikator kontribusi realisasi PMDN terhadap total keseluruhan realisasi penanaman modal. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini sebesar 47,6% dengan target sebesar 48,9% sehingga capaiannya sebesar 97,34%. Hal ini menunjukkan kontribusi PMDN belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Indikator berikutnya adalah nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan. Target pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp573,2 triliun dengan realisasi capaiannya adalah sebesar Rp596,3 triliun atau mencapai 104,03% dari target. Adapun indikator kontribusi realisasi penanaman modal di luar Jawa sebesar 50,6% dengan target sebesar 48,5% sehingga capaiannya sebesar 100,32%. Indikator terakhir adalah Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan target tahun 2023 adalah bertahap. Sistem OSS Berbasis Risiko hingga saat ini telah terintegrasi dengan sistem kementerian/lembaga (K/L) dan telah melakukan pertukaran data untuk mempercepat proses perizinan berusaha. Sistem OSS akan terus dikembangkan secara bertahap hingga tahun 2024, sehingga capaian untuk indikator Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah 100%.

3.6. Capaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Terhadap Target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Selain menjabarkan terkait capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM dengan dokumen RPJMN 2021-2024, bagian ini menjabarkan terkait dengan realisasi indikator kinerja di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022 target RPJMN ditetapkan sebesar 1.294,1 dan sasaran ekonomi makro sebesar 1.250 Triliun.

Adapun capaian indikator ini pada tahun 2023 sebesar 1.418,9 triliun. Sehingga dibandingkan dengan target RPJMN capaiannya sebesar 109,64% dan jika dibandingkan dengan target sasaran ekonomi makro maka capaiannya sebesar 113,51%. Hal ini menunjukkan Kementerian Investasi/BKPM berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Berikut tabel rincian target dan realisasinya:

Tabel 3.34.
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2023

Uraian	Sesuai RKP Tahun 2023		Realisasi 2023	Capaian %	
	RPJMN	Sasaran		RPJMN	Sasaran
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.294,1	1.250	1418,9	109,64	113,51

3.7. Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.094.951.654.261 atau 97,02% dari total alokasi anggaran sebesar Rp1.128.605.685.000. Komposisi anggaran dan realisasi Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2023 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.35.
Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Program

No	Program/Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen (Generik)	396.144.568.000	370.933.568.525	93,64
2	Penanaman Modal (Teknis)	732.461.117.000	724.018.085.736	98,85
Jumlah		**1.128.605.685.000**	**1.094.951.654.261**	**97,02**

Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2023 berdasarkan jenis belanja secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36.
Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2023
Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja	
			Realisasi Belanja (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	158.800.253.000	141.917.304.417	89,37
2	Belanja Barang	908.933.472.000	893.828.961.599	98,34
3	Belanja Modal	60.871.960.000	59.205.388.245	97,26
Jumlah		**1.128.605.685.000**	**1.094.951.654.261**	**97,02**

Adapun jika dilihat berdasarkan realisasi anggaran per jenis Sasaran di Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.37.
Realisasi Belanja per Sasaran di Kementerian Investasi/BKPM
Tahun Anggaran 2023

Perspektif	Sasaran	Anggaran (Rp)		%
		Pagu	Realisasi	
Stakeholder	Meningkatnya realisasi penanaman modal	53.751.254.000	53.024.784.905	98,65
Customer	Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	14.540.000.000	14.495.268.277	99,69
Internal Process	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	58.213.774.000	58.010.256.285	99,65
	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	32.231.135.000	31.117.314.757	96,54
	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	23.631.580.000	23.505.310.854	99,47
	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	44.649.040.000	44.259.365.225	99,13

Perspektif	Sasaran	Anggaran (Rp)		%
		Pagu	Realisasi	
	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	286.849.448.000	282.391.055.980	98,45
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	42.643.593.000	41.837.297.208	98,11
	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	48.630.286.000	48.270.177.244	99,26
	Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	94.195.709.000	94.008.758.906	99,80
Learning and Growth	Terwujudnya birokrasi yang bersih. efektif. dan melayani	429.269.866.000	404.032.064.620	94,12
Jumlah		**1.128.605.685.000**	**1.094.951.654.261**	**97,02**

3.8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

1. Data capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS);
2. Data pagu anggaran; dan
3. Data realisasi anggaran.

Efisiensi anggaran terjadi jika sumber daya dikeluarkan melebihi capaian kinerja keluaran tertentu, maka efisiensi rendah. Sebaliknya, jika sumber daya yang dikeluarkan lebih rendah dari capaian kinerja tertentu, maka efisiensi anggarannya semakin tinggi. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan dengan hasil sebagaimana tabel sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa persentase efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) Kementerian Investasi/BKPM mencapai 9,56% yaitu dari alokasi anggaran sebesar Rp1.128.605.685.000 dengan realisasi sebesar Rp1.094.951.654.261 dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 106,58%. Kemudian apabila dilihat dari perhitungan efisiensi anggaran berdasarkan pencapaian sasaran secara umum pencapaian sasaran Kementerian Investasi/BKPM telah termasuk kategori efisien dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.38.
Efisiensi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM

Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	NPS	% Efisiensi
SS-1 Meningkatnya realisasi penanaman modal	53.751.254.000	53.024.784.905	98,65	112,52	13,87
SS-2 Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	14.540.000.000	14.495.268.277	99,69	120,00	20,31
SS-3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	429.269.866.000	404.032.064.620	94,12	94,95	0,83
SP-1 Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	58.213.774.000	58.010.256.285	99,65	111,54	11,89
SP-2 Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	32.231.135.000	31.117.314.757	96,54	100,00	3,46
SP-3 Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	23.631.580.000	23.505.310.854	99,47	113,85	14,38
SP-4 Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	286.849.448.000	282.391.055.980	98,45	108,42	9,97
SP-5 Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	44.649.040.000	44.259.365.225	99,13	100,00	0,87
SP-6 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	42.643.593.000	41.837.297.208	98,11	96,81	-1,3
SP-7 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	48.630.286.000	48.270.177.244	99,26	120,00	20,74
SP-8 Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	94.195.709.000	94.008.758.906	99,80	94,33	-5,47
Total	**1.128.605.685.000**	**1.094.951.654.261**	**97,02**	**106,58**	**9,56**

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
TAHUN 2023

BAB 4
INISIATIF PENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2022

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/94/AA.05/2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022, terdapat 11 (sebelas) poin rekomendasi untuk Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk perbaikan dan peningkatan penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Melakukan reviu dan penyempurnaan kualitas indikator kinerja tingkat pusat hingga tingkat unit kerja untuk memastikan indikator kinerja yang dirumuskan memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound* (SMART) dan cukup, serta menggambarkan ketercapaian sasaran kinerja yang ingin diwujudkan;
2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja dengan menyusun pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Dalam proses penyusunan perlu dilakukan pemetaan atas peran dan kontribusi kolaboratif dari setiap unit kerja sehingga dapat tergambar dengan baik untuk *crosscutting* kinerja antar unit kerja dalam mewujudkan kinerja organisasi;
3. Melakukan reviu terhadap penetapan target kinerja di level pusat maupun unit kerja dengan memastikan target kinerja yang progresif/meningkat setiap tahunnya, serta mengintrepretasikan sebuah kondisi baik yang ingin dicapai berdasarkan ukuran indikator kinerja yang digunakan;
4. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen IKU dengan memastikan informasi yang disajikan telah memuat definisi operasional, rumus perhitungan, dan sumber data yang sesuai dan relevan dengan subtansi seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
5. Mendorong penggunaan aplikasi manajemen kinerja dengan menyusun teknis pelaksanaan pengukuran kinerja berkala dan verifikasi kinerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM dengan memanfaatkan aplikasi SIMANTAB yang telah dibangun, sehingga dapat menunjang terlaksananya monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala;
6. Melakukan pengintegrasian hasil pengukuran kinerja individu dengan pengukuran kinerja unit/organisasi sehingga tergambar dengan baik hubungan logis pencapaian kinerja secara berjenjang;
7. Melakukan reviu dan perbaikan kualitas informasi terhadap seluruh laporan kinerja tingkat unit kerja periode berikutnya dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Melakukan reviu terhadap seluruh perhitungan capaian kinerja pada laporan kinerja pusat dan unit kerja untuk memastikan kesesuaian perhitungan capaian kinerja berdasarkan data capaian kinerja yang dimiliki, sehingga dapat menjaga kualitas informasi laporan akuntabilitas kinerja yang disusun;
9. Memastikan informasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya dimanfaatkan degan baik sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan strategi pencapaian kinerja dan besaran target kinerja tahun berikutnya;
10. Mendorong setiap unit kerja menyusun rencana aksi tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi yang telah diberikan, serta menyusun metode monitoring yang

efektif untuk memastikan setiap unit kerja menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan; dan

11. Memanfaatkan hasil penilaian AKIP internal sebagai pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment* untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di seluruh unit kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas AKIP Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 oleh KemenPAN RB, Kementerian Investasi/BKPM telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi tersebut dan melakukan berbagai upaya perbaikan. Hal ini sebagai wujud komitmen Kementerian Investasi/BKPM untuk terus mengoptimalkan kinerja organisasi yang semakin baik dan lebih berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Bagian ini akan memaparkan berbagai tindak lanjut atas rekomendasi KemenPAN RB terhadap AKIP Kementerian Investasi/BKPM tahun sebelumnya.

1. **Reviu dan Penyempurnaan Kualitas Indikator Kinerja**

   Pada tahun 2023, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan reviu dan penyempurnaan kualitas indikator kinerja, baik indikator kinerja tingkat pusat hingga unit kerja. Hal ini untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang dirumuskan memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound* (SMART) dan cukup dalam mengukur ketercapaian kinerja sesuai level kinerjanya, serta menggambarkan ketercapaian sasaran kinerja yang ingin diwujudkan. Berdasarkan hasil reviu dan penyempurnaan kualitas indikator kinerja menunjukkan terdapat beberapa indikator kinerja perlu disesuaikan, di antaranya adalah:

   a) Indikator persentase rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti.

      Sebelum dilakukan reviu, sebagaimana tertuang dalam Manual IKU tahun 2021, formula perhitungan indikator ini yaitu membandingkan antara jumlah rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal dengan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti. Hal ini berimplikasi pada perhitungan capaian kinerja tahun 2022 yang tidak logis yaitu melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu, formula indikator tersebut sudah disempurnakan menjadi:

$$NRK = \frac{\Sigma TLRK_{n-1}}{\Sigma RK_{n-1}} \times 40\% + (NDRK_{n-1} \times 30\%) + \left(\frac{\Sigma RK_n}{\Sigma TRK_n} \times 30\%\right)$$

      Keterangan:

      NRK= Persentase rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti

      TLRK= Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* terkait

      NDRK= Nota dinas/surat penyampaian rekomendasi kebijakan tahun berjalan kepada stakeholder terkait

      RK= Jumlah rekomendasi kebijakan pada Kedeputian Perencanaan Penanaman Modal

      TRK= Target rekomendasi kebijakan pada Kedeputian Perencanaan Penanaman Modal

RK= Jumlah rekomendasi kebijakan pada Kedeputian Perencanaan Penanaman Modal
n-1= Tahun sebelumnya
n= Tahun berjalan

b) Indikator persentase rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan diimplementasikan ke dalam rencana aksi
Sebelum dilakukan reviu, formula perhitungan indikator ini adalah banyaknya jumlah rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan diimplementasikan ke dalam rencana aksi pada tahun berkenaan. Namun berdasarkan hasil reviu maka indikator ini perlu disesuaikan agar lebih berorientasi *outcome.* Indikator disesuaikan menjadi persentase rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis yang ditindaklanjuti. Persentase rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis yang ditindaklanjuti adalah terlaksananya kegiatan seminar peta jalan hilirisasi investasi strategis, rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait, serta penyusunan draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Hilirisasi Investasi Strategis. Adapun formula perhitungannya adalah:
$\frac{A}{B}\ x\ 100\%$
Keterangan:
A = Jumlah kegiatan rencana aksi nasional yang ditindaklanjuti
B = Realisasi kegiatan rencana aksi nasional yang ditindaklanjuti

c) Indikator persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan
Indikator ini perlu disesuaikan agar lebih berorientasi *outcome.* Indikator ini disesuaikan menjadi persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan. Indikator ini lebih beriorientasi *outcome* karena indikator ini mengukur persentase realisasi kontrak atas kesepakatan kemitraan yang terjadi antara perusahaan PMA/PMDN dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan kewajiban pada peraturan perundangan. Formula perhitungan indikator ini adalah jumlah realisasi kontrak kemitraan dibagi jumlah kesepakatan kemitraan usaha nasional di kali 100%

Hasil reviu dan penyempurnaan kualitas indikator kinerja yang dilakukan telah dituangkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Manual IKU tahun 2023 dan digunakan oleh masing-masing Unit Kerja Pengampu dalam penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Manual IKU tahun 2023 sebagai bagian dari penyempurnaan kualitas indikator kinerja selengkapnya disampaikan pada **Lampiran.**

2. **Penyempurnaan Penjenjangan Kinerja dengan Menyusun Pohon Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021**
   Inisiasi ini dilakukan agar perjenjangan kinerja dapat menggambarkan sepenuhnya penjabaran kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal secara logis sampai dengan tingkat unit kerja, sehingga terlihat keterkaitan kontribusi dan peran kinerja antar unit kerja (*crosscutting* kinerja) dari level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja organisasi. Dalam proses penyempurnaan perjenjangan kinerja, telah dilakukan pemetaan atas peran dan kontribusi kolaboratif dari setiap unit kerja sehingga dapat tergambar dengan baik untuk *crosscutting* kinerja antar unit kerja dalam mewujudkan kinerja organisasi. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan *desk study* penyusunan pohon kinerja berbasis *outcom*e dan *cascading* kinerja. Berikut ini merupakan pohon kinerja dan *cascading* untuk masing-masing *outcome* yang telah disusun oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021.

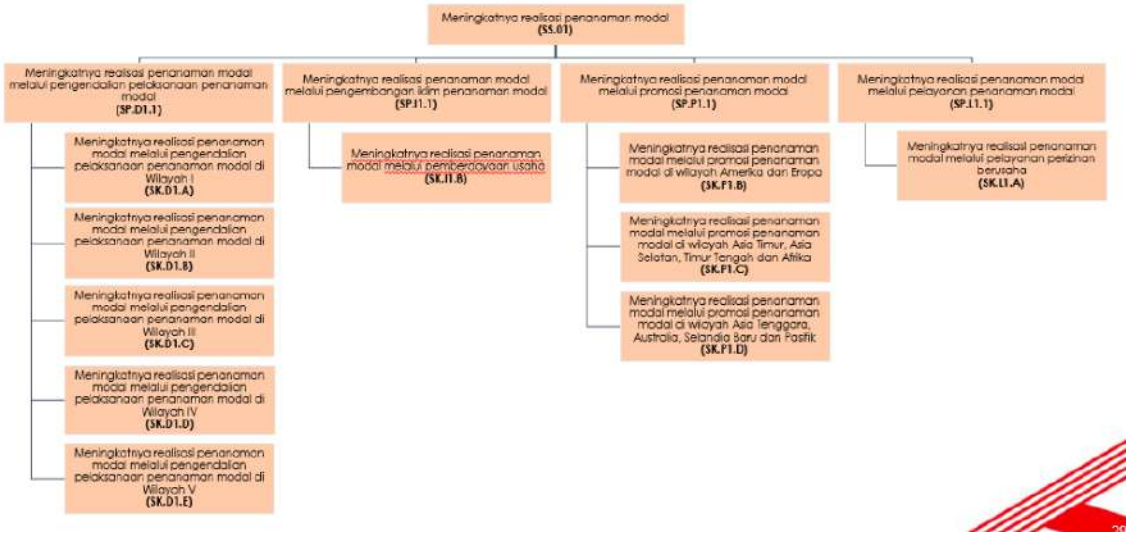

Gambar 4.1.
Pohon Kinerja Sasaran
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Pohon kinerja di atas merupakan hasil perumusan ulang dan perbaikan untuk mencapai sasaran pertama yaitu **"Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal"** yang telah disesuikan dengan logika *framework analysis* dan telah mengindentifikasi *Critical Success Factor (CSF)* pada setiap jenjang kinerjanya. Identifikasi CSF ini menjadi langkah penting untuk dapat menyusun kinerja dengan logika *framework analysis.* Berikut ini merupakan hasil identifikasi CSF untuk sasaran strategis meningkatkan realisasi penanaman modal.

OUTCOME I: MENINGKATNYA REALISASI PENANAMAN MODAL		
No.	**Faktor Penyebab (SEBAB/CARA)**	**Kondisi Yang Diperlukan (AKIBAT/HASIL)**
1	Kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan kegiatan penanaman modal di daerah	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal
2	Kebijakan penanaman modal yang kompleks dan inkonsisten menghalangi UMKM untuk beroperasi secara legal	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal
3	Kurangnya rencana promosi yang efektif sehingga pesan dan informasi yang disampaikan tidak menarik minat investor	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal
4	Kurangnya koordinasi antar instansi dalam proses pelayanan penanaman modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal

Gambar 4.2.
Identifikasi *Critical Success Factor* (CSF)
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah menyusun *cascading* kinerja untuk sasaran pertama. *Cascading* kinerja ini merupakan upaya dan langkah untuk menerjemahkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan. Berikut ini merupakan *cascading* kinerja yang telah disusun.

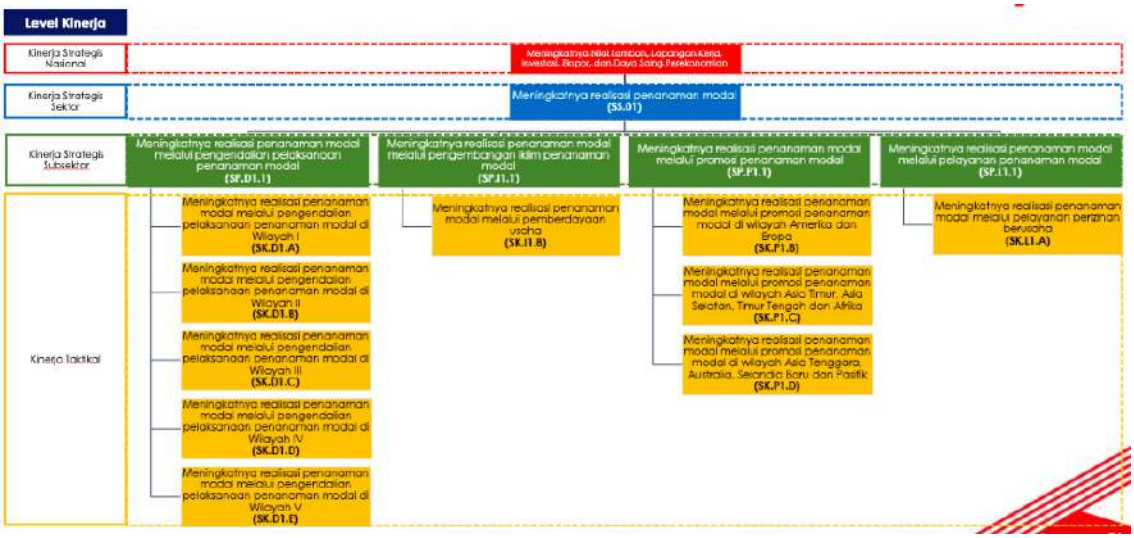

Gambar 4.3.
***Cascading* Kinerja Sasaran**
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Berdasarkan *cascading* kinerja di atas terdapat penjenjangan kinerja mulai dari kinerja strategis level nasional, kinerja strategis level sektor, kinerja strategis level subsektor, dan kinerja strategis level taktikal. Penjenjangan kinerja ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran **"Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal"** merupakan sasaran berorientasi dampak yang diwujudkan melalukan penjenjangan kinerja pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

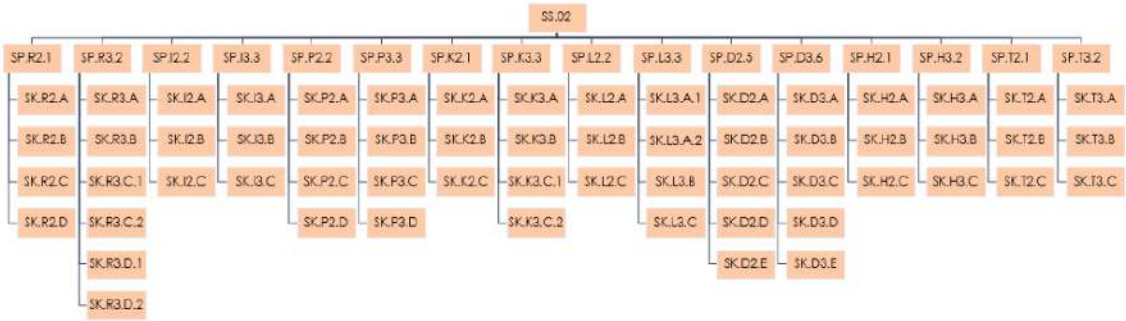

Gambar 4.4.
Pohon Kinerja Sasaran
Peningkatan Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah menyusun pohon kinerja untuk pencapaian sasaran strategis **"Peningkatan Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal".** Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah mengidentifikasi beberapa *Critical Success Factor* dalam pencapaian sasaran kinerja kedua ini sebagai berikut.

OUTCOME II: MENINGKATNYA KEPERCAYAAN PELAKU USAHA/PENANAM MODAL		
No.	**Faktor Penyebab (SEBAB/CARA)**	**Kondisi Yang Diperlukan (AKIBAT/HASIL)**
1	Tidak melibatkan pelaku usaha dalam proses perencanaan penanaman modal	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal
2	Tidak melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap bidang proyek penanaman modal yang telah direncanakan	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal
3	Tidak adanya kepastian hukum atau ketidakjelasan dalam regulasi pengembangan iklim penanaman modal	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal
4	Rendahnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar dan informasi peluang penanaman modal di daerah	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal
5	Promosi penanaman modal yang dilakukan tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya atau tidak akurat	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal
6	Strategi promosi penanaman modal yang tidak terfokus pada sektor dan negara tertentu	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal
7	Ketidakpastian dalam situasi ekonomi dan politik dapat membuat pelaku usaha ragu-ragu untuk terlibat dalam kerja sama	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama penanaman modal
8	Kurangnya koordinasi antara pemerintah negara asal dan negara tujuan penanaman modal	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal
9	Tidak responsif terhadap pertanyaan dan keluhan pelaku usaha	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal
10	Proses perizinan berusaha yang masih rumit, belum terintegrasi dan lambat	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal
11	Birokasi yang rumit dan lambat dapat menghambat pengendalian yang efektif dan membuat pelaku usaha merasa terhambat	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal
12	Kurang optimalnya pelaporan kegiatan penanaman modal di daerah	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
13	Insentif yang ditawarkan untuk mendukung hilirisasi tidak cukup menarik bagi pelaku usaha	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis
14	Kurangnya hubungan yang kuat antara industri hulu dan hilir investasi strategis	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis
15	Teknologi informasi tidak mampu mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pelaku usaha	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal
16	Sistem yang tidak terintegrasi dengan baik lintas K/L/D dalam proses penanaman modal	Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal

Gambar 4.5.
Identifikasi *Critical Success Factor* (CSF)
Peningkatan Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal

Pada tahun 2023, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah menerjemahkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan. Hasil rancangan penuangan tersebut sebagai berikut.

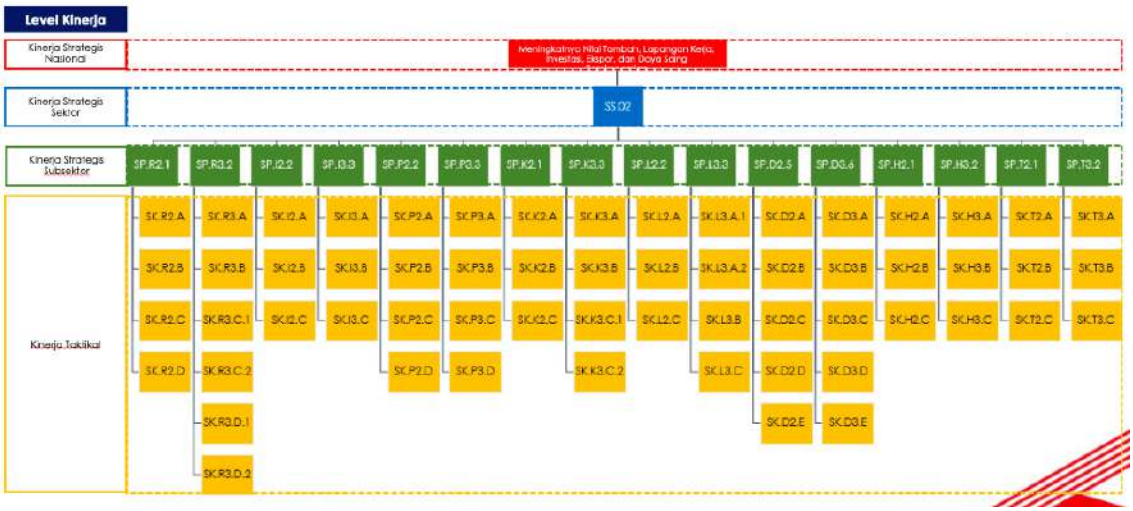

Gambar 4.6.
***Cascading* Kinerja Sasaran**
Peningkatan Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal

Berdasarkan *cascading* kinerja di atas terdapat penjenjangan kinerja mulai dari kinerja strategis level nasional, kinerja strategis level sektor, kinerja strategis level subsektor, dan kinerja strategis level taktikal. Penjenjangan kinerja ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran **"Peningkatan Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal"** merupakan sasaran berorientasi dampak yang diwujudkan melalui penjenjangan kinerja pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah melakukan perbaikan dan menyusun pohon kinerja untuk pencapaian sasaran srategis ketiga yaitu "**Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani**". Hasil penyusunan pohon kinerja ini menjadi langkah strategis untuk menjamin adanya kesinambungan dan tanggung jawab semua unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mewujudkan kinerja yang berorientasi dampak.

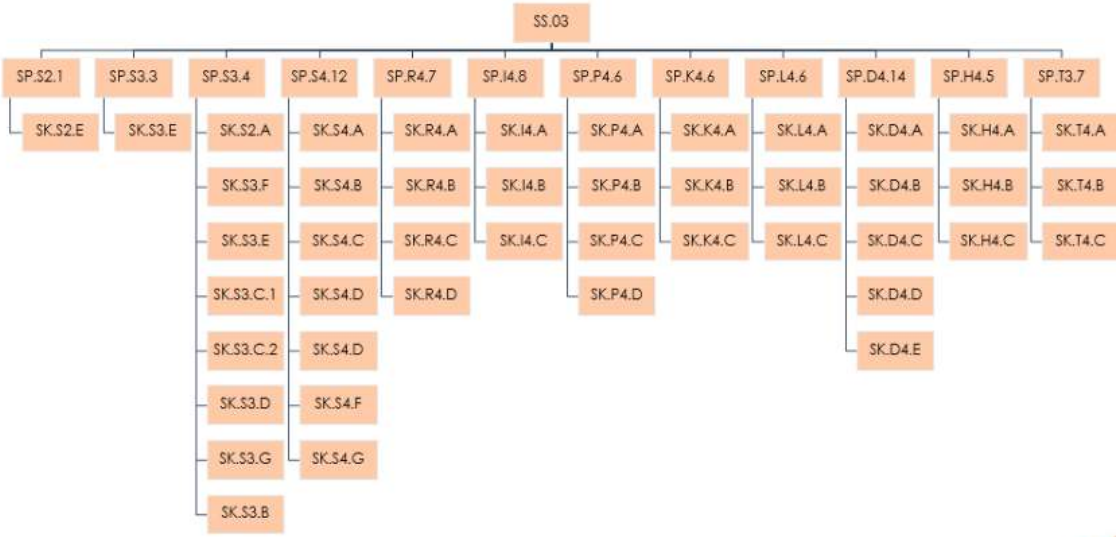

Gambar 4.7.
Pohon Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani

Pohon kinerja di atas merupakan hasil perumusan ulang dan perbaikan untuk mencapai sasaran pertama yaitu **"Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani"** yang telah disesuikan dengan logika *Framework Analysis* dan telah mengindentifikasi *Critical Success Factor (CSF)* pada setiap jenjang kinerjanya. Identifikasi CSF ini menjadi langkah penting untuk dapat menyusun kinerja dengan logika *Framework Analysis.* Berikut ini merupakan hasil identifikasi CSF untuk sasaran strategis perwujudan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

OUTCOME III: TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN MELAYANI		
No.	Faktor Penyebab (SEBAB/CARA)	Kondisi Yang Diperlukan (AKIBAT/HASIL)
1	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas
2	Kurangnya pelatihan dan kesempatan pengembangan keterampilan	Terwujudnya ASN yang kompeten, profesional dan berintegritas
3	Kurangnya komitmen dari pimpinan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas
4	Kurangnya kesadaran dan kepahaman tentang akuntabilitas	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
5	Kinerja tidak terhubung dengan rencana strategis organisasi secara keseluruhan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
6	Sasaran dan indikator kinerja tidak ditetapkan secara jelas dan spesifik	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
7	Tidak ada sistem yang efektif untuk mengukur dan memantau kinerja	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
8	Tidak ada keterlibatan yang cukup dari unit yang terkait dengan kinerja	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
9	Tanggung jawab dan wewenang tidak terdefinisi dengan baik	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
10	Tidak ada pengawasan yang memadai terhadap kinerja	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
11	Tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup lingkup Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
12	Kurangnya dukungan teknologi dan sistem informasi	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Gambar 4.8.
Identifikasi *Critical Success Factor* (CSF)
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah menerjemahkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan. Hasil penerjemahan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan sebagai berikut.

Gambar 4.9.
***Cascading* Kinerja Sasaran**
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani

Berdasarkan *cascading* kinerja di atas terdapat penjenjangan kinerja mulai dari kinerja strategis level nasional, kinerja strategis level sektor, kinerja strategis level subsektor, dan kinerja strategis level taktikal. Penjenjangan kinerja ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran **"Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani"** merupakan sasaran berorientasi dampak yang diwujudkan melalui penjenjangan kinerja pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah melakukan penyusunan *crosscutting* lintas satuan kerja untuk sasaran "**Peningkatan Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal"** dan **"Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani".** Berikut ini merupakan *crosscutting* lintas satuan kerja untuk sasaran peningkatan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal.

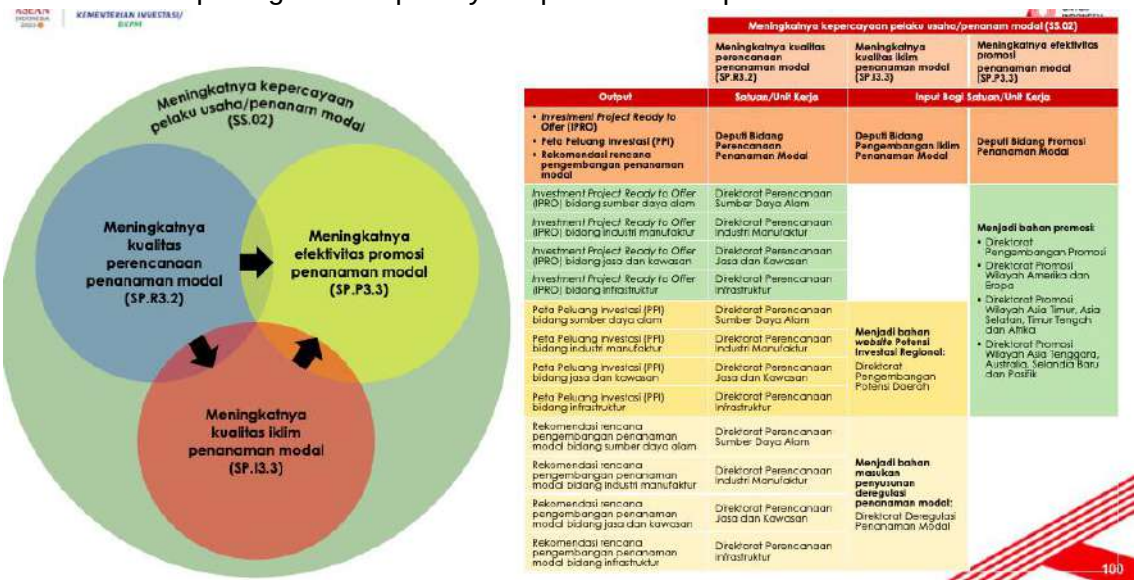

Gambar 4.10.
***Crosscutting* Lintas Satuan Kerja**
Sasaran Peningkatan Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal

Crosscutting ini merupakan bentuk penjabaran dari intansi mana saja yang melakukan kerja sama dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam perwujudan peningkatan kepercayaan pekaku usaha/penanam modal. Berdasarkan *crosscutting* yang telah disusun di atas, terdapat *output* untuk 1) *Invesment Project Ready to Offers* (IPRO); 2) Peta Peluang Investasi; dan 3) Rekomendasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal. Dalam mencapai ketiga *output* tersebut unit kerja pengampu adalah Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai *output* Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, terdapat input dari Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal.

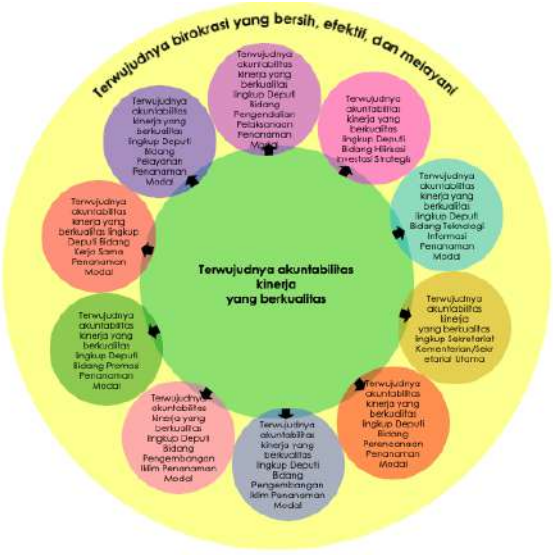

Output	Satuan Kerja	Input Bagi Satuan Kerja
Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal (Output Inspektorat)	Sekretariat Kementerian / Sekretariat Utama	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
		Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (Output BPPA)		Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
		Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
Pedoman Manajemen Akuntabilitas Kinerja (Output BPPA)		Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

Gambar 4.11.
***Crosscutting* Lintas Satuan Kerja**
Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif, dan Melayani

Berdasarkan *crosscutting* yang telah disusun di atas, terdapat *output* untuk: 1) Pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja; 2) Pedoman penyusunan perjanjian kinerja; dan 3) Pedoman manajemen akuntabilitas kinerja. Unit kerja pengampu *output* kinerja tersebut adalah Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Dalam proses dan upaya mencapai *output* tersebut, terdapat input dari: 1) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal; 2) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis; 3) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 4) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal; 5) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; 6) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 7) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Pohon Kinerja, *Cascading,* dan *Crosscutting* lintas satuan kerja yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 selengkapnya di sampaikan pada **Lampiran.**

3. **Reviu Terhadap Penetapan Target Kinerja Di Level Pusat Maupun Unit Kerja**

Pada tahun 2023, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan reviu terhadap penetapan kinerja di level pusat maupun unit kerja. Hal ini untuk memastikan target kinerja yang progresif/meningkat setiap tahunnya, serta mengintrepretasikan sebuah kondisi baik yang ingin dicapai berdasarkan ukuran indikator kinerja yang digunakan. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu perbaikan penetapan target kinerja di antaranya yaitu Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditargetkan 100. Namun, demikian hasil reviu Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan bahwa penetapan target 100 merupakan upaya untuk mengakomodasi sistem manajemen kinerja. Hal ini karena target dalam sistem harus diisi angka bukan predikat. Angka 100 yang diinput pada sistem manajemen kinerja dimaknai oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah nilai tertinggi dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu predikat WTP.

4. **Reviu dan Perbaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama**

Pada tahun 2023, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan reviu dan perbaikan terhadap Dokumen Indikator Kinerja Utama, baik level pusat maupun unit kerja. Informasi yang disajikan telah memuat definisi operasional, rumus perhitungan, dan sumber data yang sesuai dan relevan dengan subtansi seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan reviu dan perbaikan indikator kinerja untuk indikator kinerja utama. Format manual IKU 2023, telah mengakomodasi: 1) Perspektif; 2) Sasaran; 3) Deskripsi Sasaran; 4) Indikator Kinerja; 5) Deskripsi Indikator Kinerja; 6) Formula Perhitungan/Pengukuran; 6) Peyedia Data; 7) Sumber Data; 8) Tingkat Validasi IKU; 9) Polarisasi Data; 10) Perhitungan Data; 11) Periode; 12) Metode *Cascading*; 13) Target; 14) Satuan; dan 15) *Breakdown* Target per Triwulan. Perbaikan ini bertujuan agar masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat menjadikan indikator kinerja sebagai *guidline* kegiatan dan memahami indikator secara utuh.

Hasil perbaikan dokumen indikator kinerja utama dituangkan pada Manual IKU tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada **Lampiran.**

PERSENTASE RENCANA AKSI NASIONAL HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS YANG DITINDAKLANJUTI (%)
(Kode : IKSP.H3.2)

PERSPEKTIF	Internal Process
SASARAN	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis
DESKRIPSI SASARAN	Peningkatan kualitas hilirisasi investasi strategis ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Hilirisasi yang sesuai dengan kebutuhan investor serta berlandaskan pada prinsip penyusunan yang berbasis data dan fakta (evidence-based planning). Peningkatan kualitas ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kedeputian Hilirisasi Investasi Strategis dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan investasi di sektor sekunder dan dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.
INDIKATOR KINERJA	Persentase rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis yang ditindaklanjuti (%)
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	Persentase Rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis yang ditindaklanjuti adalah terlaksananya kegiatan Seminar Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, serta penyusunan draft rancangan Peraturan Presiden Tentang Hilirisasi Investasi Strategis.
FORMULA PERHITUNGAN / PENGUKURAN	$\frac{A}{B} x\ 100\%$ Keterangan: A = Jumlah kegiatan rencana aksi nasional yang ditindaklanjuti B = Realisasi kegiatan rencana aksi nasional yang ditindaklanjuti
PENYEDIA DATA	Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Direktorat Hilirisasi, Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batu Bara
SUMBER DATA	Dokumen Rencana Aksi Nasional
TINGKAT VALIDITAS IKU	☑ Lead Input ☐ Lead Proses ☐ Lag Output ☐ Lag Outcome
POLARISASI DATA	☑ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
PERHITUNGAN DATA	☐ Akumulasi ☐ Rata-Rata ☑ Nilai Posisi Akhir
PERIODE	☐ Triwulan ☐ Semester ☑ Tahun
METODE CASCADING	☐ Adopsi Langsung ☑ Lingkup Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☐ Buat Baru
TARGET	100
SATUAN	%
Breakdown Target	
TW-1	0
TW-2	0
TW-3	0
TW-4	100

Gambar 4.12.
Informasi Indikator Kinerja Utama pada Manual IKU Tahun 2023

5. **Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB)**

Pada tahun 2023, telah dilakukan rapat koordinasi dan penjelasan teknis pelaksanaan pengukuran kinerja berkala dan verifikasi kinerja melalui SIMANTAB dengan unit kerja di Kementerian Investasi/BKPM. Rapat tersebut melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM dan diampu oleh Direktorat Sistem Layanan Elektronik Infrastruktur dan Jaringan serta Inspektorat. Rapat ini bertujuan agar seluruh unit kerja memiliki kemampuan dan ketataan untuk memanfaatkan fitur verifikasi pada SIMANTAB, dan melakukan input data informasi narasi kinerja berupa permasalahan dan rencana tindak lanjut pencapaian kinerja setiap triwulannya pada SIMANTAB.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan beberapa kegiatan untuk pengoptimalan SIMANTAB di antaranya:

1) Melakukan Evaluasi SIMANTAB
   a) Melakukan evaluasi dan mengindentifikasi kebutuhan masing-masing unit kerja dengan SIMANTAB;
   b) Melakukan peninjauan ulang terhadap fitur di SIMANTAB; dan
   c) Mengidentifikasi kebutuhan integrasi dengan sistem manajemen kinerja lainnya yang sedang digunakan oleh organisasi.

2) Melakukan Identifikasi Peningkatan dan Integrasi
   a) Melakukan identifikasi area yang memerlukan peningkatan dalam SIMANTAB; dan
   b) Melakukan identifikasi sistem manajemen kinerja lainnya yang digunakan olleh organisasi dan dapat dintegrasikan.
3) Pengembangan dan Pembaruan Aplikasi
   a) Melakukan perbaikan dan pengembangan SIMANTAB.
4) Melakukan Uji Coba dan Penyesuaian
   a) Melakukan uji coba internal untuk memastikan keberfungsian dan kualitas SIMANTAB yang telah diperbarui; dan
   b) Melibatkan pengguna dan pemangku kepentingan terkait untuk menguji aplikasi untuk mendapatkan umpan balik.
5) Melakukan Pelatihan dan Penyuluhan
   a) Pelatihan penggunaan aplikasi; dan
   b) Pembuatan panduan yang jelas dan mudah dimengerti.
6) Implementasi dan Integrasi
   a) Mengimplementasikan SIMANTAB yang diperbarui di seluruh organisasi dan unit kerja terkait; dan
   b) Melakukan integrasi antara SIMANTAB dan sistem manajemen kinerja lainnya, seperti sinkronisasi data dan pembaharuan teratur.
7) Monitoring dan Evaluasi
   a) Melakukan evaluasi secara rutin dan mengakomodasi berbagai masukan serta rekomendasi perbaikan.
8) Melakukan Perbaikan Berkelanjutan
   a) Melakukan identifikasi dan klasifikasi mana saja yang perlu perbaikan dan menjadi dasar untuk perbaikan ke depan.

Perbaikan dan pengoptimalan SIMANTAB juga meliputi penambahan beberapa fitur akuntabilitas kinerja seperti penginputan matrik rencana aksi.

Gambar 4.13.
Menu Rencana Aksi di SIMANTAB

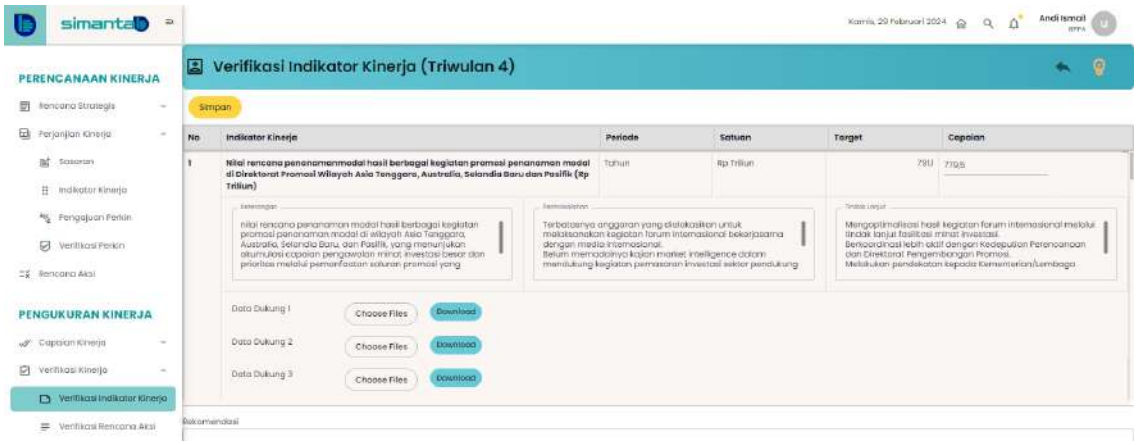

Gambar 4.14.
Menu Verifikasi Indikator Kinerja pada SIMANTAB

Gambar 4.15.
Menu Verifikasi Rencana pada SIMANTAB

Aplikasi SIMANTAB juga telah dilengkapi dengan fitur verifikasi kinerja dalam pengukuran kinerja. Dalam rangka pengoptimalan dan pemanfatan fitur tersebut Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan:

1) Penyusunan *manual book* yang lebih operasional dan teknis; dan
2) Sosialisasi penggunaan SIMANTAB kepada lingkup internal.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan perbaikan SIMANTAB untuk mengakomodasi pembuatan menu tambahan verifikasi kinerja untuk APIP Inspektorat sebagai bahan monitoring dan verifikasi pada capaian rencana aksi dan indikator kinerja.

6. **Pengintegrasain Hasil Pengukuran Kinerja Individu dengan Unit/Organisasi**

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berupaya melakukan pengintegrasian hasil pengukuran kinerja individu dengan pengukuran kinerja unit/organisasi sehingga tergambar dengan baik hubungan logis pencapaian kinerja secara berjenjang. Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2023 telah melakukan beberapa upaya dan kegiatan untuk pengintegrasian tersebut. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga sudah

melakukan beberapa kegiatan untuk pengintegrasian pengukuran kinerja individu dan unit/organisasi antara lain:

1) Sosialisasi terkait Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
2) Koordinasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang berorientasi pada pencapaian target kinerja Unit/Organisasi.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah berupaya mengintegrasikan secara manual perjanjian kinerja yang telah disusun pada aplikasi SIMANTAB untuk level esselon I dan II. Inputan perjanjian kinerja ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang diinput pada aplikasi e-kinerja BKN. Hasil input di dalam aplikasi e-kinerja BKN ini menjadi dasar penurunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) level fungsional madya, muda, pratama, dan staf. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah menyusun *roadmap* dan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2020-2024. *Roadmap* dan rencana aksi ini merupakan *guidline* perwujudan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Tujuan penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sejalan dengan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional tahun 2020-2024 yaitu untuk menciptkan “Pemerintahan yang baik dan bersih” dengan indikator hasil (*outcome)* berupa Indeks Reformasi Birokrasi serta indikator dampak *(impact)* berupa:

a. Peringkat *Ease of Doing Business/EoDB,* yaitu peringkat kemudahan dalam melakukan bisnis di suatu negara. Peringkat EoDB dirilis oleh World Bank dengan berlandaskan pada hasil survei dan pengukuran terhadap 11 indikator kemudahan berusaha pada berbagai tahapan bisnis mulai dari indikator memulai usaha hingga penyelesaian perkara dan kepailitan;
b. Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*), yaitu indeks yang diukur setiap tahun oleh organisasi internasional, dengan bertujuan untuk mengetahui persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi pada jabatan publik dan politik;
c. *Government Effectiveness Index*; yaitu indeks mengenai tingkat efektivitas tata kelola pemerintahan yang diukur oleh organisasi internasional World Bank dengan tujuan untuk menilai kualitas layanan publik, layanan sipil, tingkat independensi layanan dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah atas kebijakan tersebut; dan
d. *Trust Barometer*, yaitu sebuah studi kepercayaan (*trust study*) yang diselenggarakan secara tahunan oleh perusahaan komunikasi global Edelman dengan hasil berupa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, entitas bisnis, media, dan LSM. *Trust Barometer* merupakan salah satu studi paling komprehensif di level global karena melibatkan responden dengan skala besar dan memanfaatkan data dengan rentang waktu yang sangat panjang (5 hingga 13 tahun).

Upaya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengintegrasikan sistem ini menjadi salah satu komponen penilaian dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

7. Reviu dan Perbaikan Kualitas Informasi Laporan Kinerja Tingkat Unit

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan reviu dan perbaikan kualitas informasi terhadap seluruh laporan kinerja tingkat unit kerja periode berikutnya dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Reviu dan perbaikan ini karena masih terdapat temuan kinerja di level unit kerja yang belum menyajikan informasi analisis capaian kinerja organisasi yang memadai. Hal ini karena tidak terdapat informasi terkait perbandingan kinerja dengan target jangka menengah, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Berdasarkan pada beberapa catatan tersebut, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan beberapa kegiatan untuk reviu serta perbaikan kualias laporan kinerja di antaranya:

1) Menyampaikan nota dinas melalui Sesmen kepada unit esselon I dan II di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM terkait sistematika penyusunan laporan kinerja unit kerja esselon I dan II;
2) Sosialisasi format penyusunan laporan kinerja tingkat unit;
3) Melakukan reviu laporan kinerja masing-masing unit kerja oleh APIP Inspektorat; dan
4) Perumusan hasil penilaian laporan kinerja esselon I dan II oleh APIP Inspektorat.

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memberikan nota dinas kepada unit esselon I dan II untuk memberikan gambaran dan sistemtika laporan kinerja. Hal ini menjadi dasar acuan masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menindaklanjuti pembuatan laporan kinerja sesuai dengan format yang telah diberikan. Hal ini merupakan upaya dan tindak lanjut evaluasi serta rekomendasi perbaikan tahun sebelumnya agar laporan kinerja masing-masing unit kerja sudah sesuai format dan terdapat standar baku.

8. Reviu Perhitungan Capaian Kinerja pada Laporan Kinerja Level Pusat dan Unit Kerja

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan reviu terhadap seluruh perhitungan capaian kinerja pada laporan kinerja pusat dan unit kerja untuk memastikan kesesuaian perhitungan capaian kinerja berdasarkan data capaian kinerja yang dimiliki, sehingga dapat menjaga kualitas informasi laporan akuntabilitas kinerja yang disusun. Reviu ini bertujuan agar capaian kinerja menjadi logis atas kinerja yang telah dilakukan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal sudah melakukan perbaikan atas dua capaian indikator kinerja yang melebihi 100% yaitu 1) Persentase rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti; dan 2) Persentase rencana proyek penanaman modal yang terfasilitasi.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	KATEGORI	RATA-RATA	SKOR
CUSTOMER PERSPECTIVE									
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal	1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) perencanaan penanaman modal (indeks)	3,75 dari skala 5,0	4,40 dari skala 5,0	117,33	Sangat Baik	117,33	46,93
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE									
2	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	2	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal (indeks)	3,75 dari skala 5,0	4,44 dari skala 5,0	118,40	Sangat Baik	108,49	32,55
		3	Persentase rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti (%)	100	108,33	108,33	Sangat Baik		
		4	Persentase Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang dipromosikan (%)	100	100	100,0	Sangat Baik		
		5	Persentase rencana proyek penanaman modal yang terfasilitasi (%)	100	115,72	115,72	Sangat Baik		
		6	Persentase peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan (%)	100	100	100,0	Sangat Baik		
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE									

Gambar 4.16.
Dua Indikator Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal di Laporan Kinerja Tahun 2022 yang Perlu Dilakukan Reviu dan Penyempurnaan

Perbaikan dua indikator tersebut telah dilakukan dan dimuat pada manual IKU tahun 2023. Berikut ini merupakan perbandingan formula perhitungan pada manual IKU tahun 2022 dan manual IKU tahun 2023 untuk indikator persentase rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti.

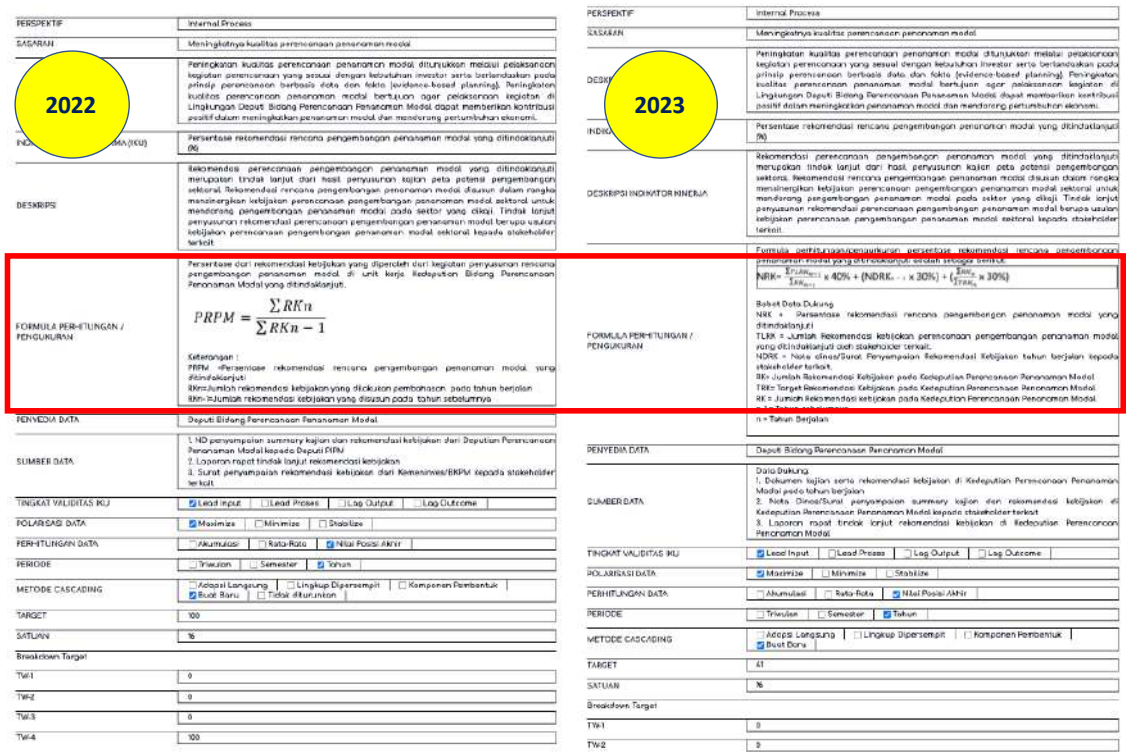

Gambar 4.17.
Perbaikan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Rencana Pengembangan Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti pada Manual IKU Tahun 2023

9. Pemanfaatan Informasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Investasi/Badan Penanaman Modal tahun 2022 bahwa masih terdapat adanya target kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa disertai penjelasan yang cukup. Pada tahun 2023, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mengupayakan pemanfaatan informasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya dimanfaatkan dengan baik sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan strategi pencapaian kinerja dan besaran target kinerja tahun berikutnya. Dapat dipastikan bahwa pada perencanaan tahun 2023, tidak terdapat lagi unit kerja yang menetapkan target kinerja lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini penting agar terdapat kesinambungan target yang progresif ke depan, sehingga tidak terdapat penurunan target dibandingkan tahun sebelumnya.

10. Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Setiap Unit Kerja

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman modal terus berkomitmen dan berupaya mendorong setiap unit kerja menyusun rencana aksi tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi yang telah diberikan, serta menyusun metode monitoring yang efektif untuk memastikan setiap unit kerja menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2023 melakukan beberapa kegiatan untuk *monitoring*

perbaikan perencanaan kinerja pada setiap unit kerja seperti penambahan indikator persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti pada perspektif *learning and growth* di seluruh unit kerja. Hal ini dilakukan agar setiap unit kerja menindaklanjuti hasil penilaian evaluasi AKIP satuan kerja di tahun sebelumnya, yang didalam hasil evaluasi tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti di tahun berjalan oleh unit-unit kerja di bawah satuan kerja yang dievaluasi oleh Inspektorat.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi/BKPM (predikat / nilai)	80
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran Kementerian Investasi/BKPM	2	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi/BKPM (%)	90
		3	Indeks kualitas layanan perencanaan program dan anggaran (indeks)	3,5
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Perencanaan Program dan Anggaran	4	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80
		5	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Perencanaan Program dan Anggaran (%)	90
		6	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan Program dan Anggaran TA 2022 (%)	5

Gambar 4.18.
Penambahan Indikator Rekomendasi Evaluasi AKIP yang Ditindaklajuti pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga berkomitmen untuk memberikan penguatan kepada masing-masing unit kerja untuk menyusun rencana aksi rekomendasi tindak lanjut pada unit esselon I dan II dari hasil evaluasi AKIP oleh Inspketorat di tahun 2023.

11. Pemanfaatan Penilaian AKIP sebagai Dasar Pemberian *Reward and Punishment*

Memanfaatkan hasil penilaian AKIP internal sebagai pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment* untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di seluruh unit kerja. Pemberian *reward and punishment* ini penting sebagai upaya untuk mengapreasi kinerja unit di level internal serta stimulus untuk perbaikan ke depannya. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2023 telah melakukan upaya penyusunan peraturan pemberian *reward and punishment* di tahun

2024. Penerapan pemberian *reward and punishment* saat ini masih dalam proses pembahasan. Pada peraturan tersebut, unsur-unsur penilaian pemberian *reward and punishment* mencakup capaian kinerja organisasi, penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), presensi/kehadiran pegawai, dan penilaian ekspektasi pimpinan.

4.2. Upaya Akseleratif Lainnya dalam Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas di Tahun 2023 Berdasarkan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Tahun 2022

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan berbagai inisiatif dalam rangka peningkatan kinerja akuntabilitas kinerjanya. Selain berupaya untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga berupaya untuk mengimplementasikan berbagai rencana tindaklanjut yang temuat pada laporan kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022). Hal ini agar ada keberlanjutan dan perbaikan, tidak hanya berkaitan dengan akuntabilitas kinerja, namun berkaitan juga dengan akselerasi program dan kegiatan yang dilakukan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan tepat sasaran.

Upaya ini merupakan wujud dari komitmen dan konsistensi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk terus berupaya melakukan perbaikan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga berkomitmen **untuk menciptakan kesinambungan** perbaikan dengan menggunakan dasar hasil evaluasi AKIP tahun 2022. Berikut ini merupakan beberapa upaya akseleratif yang telah dilakukan.

1. Peningkatan Kompetensi Aparatur dalam Upaya Akselerasi Pencapaian Kinerja Penanaman Modal

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2023 mengikutsertakan 21 orang peserta dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan skema pelatihan reguler dan kerja sama. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga mengikutsertakan 6 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS yang dilaksanakan oleh LAN. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga melaksanakan Diklat Fungsional melalui Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal dan Pelatihan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), *Training of Trainers Online Single Submission Risk Based Approach* (TOT OSS RBA) dan Tenaga Pendamping Dana Alokasi Khusus (TPDAK) Fasilitasi Penanaman Modal.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Pusdiklat telah menyelanggarakan pelatihan PTSP Bidang Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Dasar secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) sebanyak 16 angkatan, dengan jumlah peserta 884 orang;

2. Pelatihan PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan secara daring sebanyak 3 angkatan dengan jumlah peserta 149 orang; dan
3. Pelatihan PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Sektoral secara daring sebanyak 3 angkatan, dengan jumlah peserta sebanyak 150 peserta.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berupaya meningkatkan kinerja aparatur dengan pemberian besasiswa. Pada tahun 2023, sebanyak 15 orang mendapatkan beasiswa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah Penerima Beasiswa Tahun 2023

No.	Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa
1	LPDP Kementerian Keuangan	6
2	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Badan Perencana Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren Bappenas) 2023	2
3	*Australia for ASEAN Scholarships for the 2023 Intake*	1
4	*The Hyundai Motor Chung Mong-Koo Foundation Scholarship*	1
5	*MEXT Scholarship*	1
6	*Lee Kuan Yew School of Public Policy*	1
7	*POSCO Asia Fellowship*	1
8	*KOICA Scholarship*	1
9	Kemenkominfo	1
Jumlah		**15**

Pada tahun 2023, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan promosi investasi berjenjang dan layanan investasi *end-to-end*, mulai dari analisis sektor, negara target dan pesaing serta *market intelligence* hingga fasilitasi realisasi investasi. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dibutuhkan promotor investasi yang berkompeten dan memiliki pengetahuan terbaru terkait pemasaran, konsultasi bisnis, peluang, tren dan kebijakan sektor usaha. Oleh karena itu, pada tahun 2023 melalui Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal juga melakukan beberapa upaya yaitu:

1. Menerbitkan regulasi dalam bentuk Keputusan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal tentang Desain Pengembangan Kompetensi Promotor Indonesia;
2. Menyusun peta sektor prioritas investasi sesuai dengan kebijakan pemerintah dari wilayah kerja promotor investasi;
3. Melakukan pelatihan substansi promosi investasi dan *softskill* personal; dan
4. Pelatihan yang dilakukan bekerjasama dengan lembaga yang ahli di bidangnya masing-masing.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga melakukan beberapa pelatihan untuk sumber daya manusia/personil dalam rangka peningkatan promosi penanaman modal, beberapa pelatihan tersebut diantaranya:

1. Pelatihan faktor-faktor yang mempengaruhi tahapan pengambilan keputusan berinvestasi perusahaan multinasional bekerjasama dengan *Business Expert dari Ernst & Young*;
2. Pelatihan teknik berkomunikasi dengan pejabat pemerintah dan *top level management* perusahaan multinasional bekerjasama dengan *expert* dari Tony Blair Institute (TBI) Indonesia;
3. Pelatihan *Business Etiquette dan Netiquette* sebagai promotor investasi oleh John Robert Powers; dan
4. Mengoptimalkan *talent* DNA sebagai promotor investasi oleh *ESQ Training.*

2. Penguatan Produk Hukum Bidang Investasi

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2023 telah menerbitkan produk hukum Peraturan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelanggaraan Dekosentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Kepala di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
5. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Rodak Empat dalam Rangka Percepetan Investasi.

Penyusunan berbagai produk hukum tersebut merupakan upaya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memberikan referensi dan kepastian hukum. Berbagai produk hukum tersebut disusun berdasarkan kondisi faktual, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 2023, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga mendapatkan penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) memndapatkan peringkat ke-14 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Transformasi Sistem Layanan Elektronik dan Sistem Perizinan Berusaha

Sistem layanan elekronik menjadi salah satu ruang yang dapat terus ditingkatkan dan disesuiakan dengan mekanisme kerja dalam sistem akuntabilitas kinerja. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2023 terus melakukan upaya transformasi sistem layanan elektronik guna mencapai efisiensi serta efektivitas kegiatan di era disrupsi. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan komitmen yang kuat yang ditunjukkan dengan penerapannya dalam bentuk berbagai layanan elektronik. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal saat ini telah memiliki berbagai aplikasi untuk mendukung layanannya. Berbagai aplikasi ini ke depan perlu dikembangkan arsitektur aplikasi yang dapat mengonsolidasikan dan mengintegrasikan data, melalui proses *extract, transform, load (ETL)*, agar data-data yang ada dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Data yang telah terkonsolidasi pada *data mart* juga merupakan sumber pencadangan data, analisis, dan pelaporan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah mengembangkan *data mart* dalam aplikasi potensi investasi regional. Hal ini akan mempermudah akses data hanya dengan menggunakan satu kata kunci pencarian.

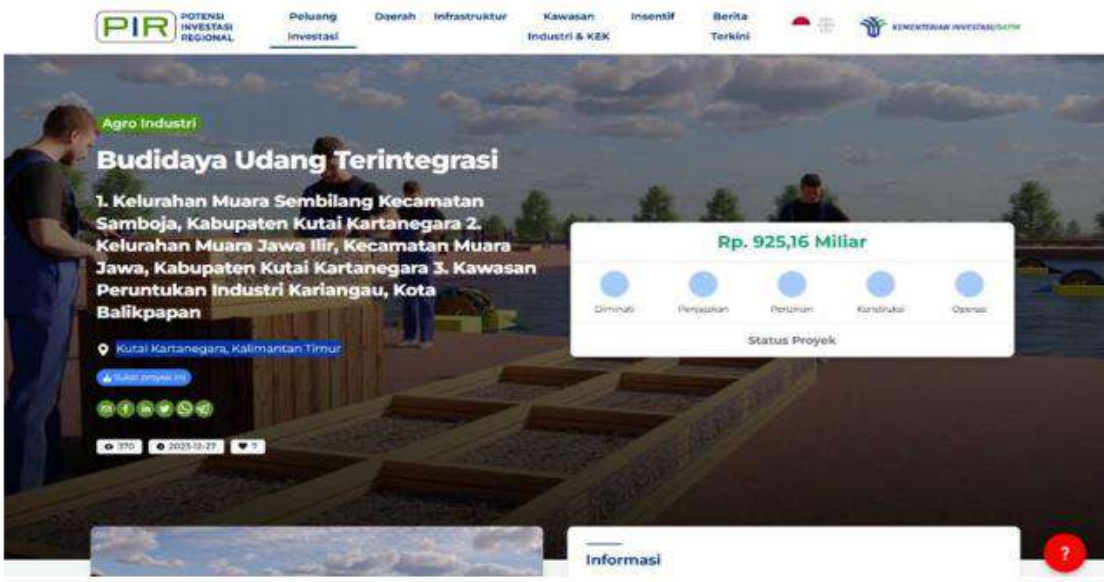

Gambar 4.18.
Informasi yang Terdapat dalam Aplikasi Peta Investasi Regional

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah melakukan pengintegrasian seluruh sistem internal. Seluruh layanan yang ada di Kementerian Investasi/BKPM 100% telah didukung aplikasi. Koordinasi dan sinkronisasi secara ekternal juga telah dilakukan. Pada tahun 2023, OSS telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan 21 K/L dari 25 K/L dengan capaian persentase sebesar 84% telah terintegrasi. Upaya transformasi layanan data dan informasi juga didukung melalui pengembangan aplikasi ***Bussiness Intelegence.*** *Business Intelligence* (BI) merupakan rangkaian aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyuguhkan akses data untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Diharapkan dengan dilakukannya Pengembangan

Business Intelligence (BI) akan dapat membantu pimpinan, kementerian/lembaga, investor, peneliti/mahasiswa dan berbagai pihak untuk mengakses data dan informasi yang tersedia di Kementerian Investasi/BKPM secara cepat dan akurat.

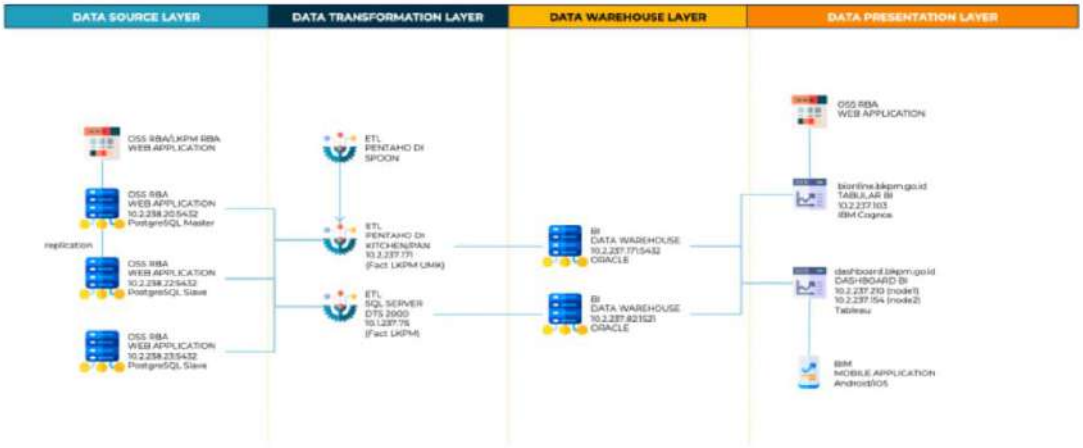

Gambar 4.19.
Arsitektur DWH dan ETL Existing

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyajian data serta informasi perkembangan kegiatan perizinan berusaha dan pengawasan berbasis risiko (OSS RBA) melalui kegiatan pengembangan *Business Intelligence* (BI) dilaksanakan kegiatan penyajian data dalam bentuk ***dashbord*** dan ***report*** yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna data**.**

Gambar 4.20.
Pemanfaatan *Dasbord* dalam kegiatan *Press Release*

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Direktorat Data dan Informasi juga menyediakan *dashboard* statistik penerbitan NIB. Pada *dashboard* pengguna data dapat mengetahui secara cepat jumlah NIB yang telah diterbitkan selama penerapan OSS RBA, terdapat *dashboard* yang menyajikan jumah proyek yang didaftarkan oleh pelaku usaha serta jumlah izin yang telah diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Gambar 4.21.
***Dashboard* Statistik Perizinan Usaha OSS RBA**

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2023 telah melakukan penguatan tata kelola administrasi melalui *e-office*. Salah satu pemanfaatan *e-office* adalah dalam penerbitan *Letter of Intent* (LoI). Selama tahun 2023 telah diselesaikan 385 buah surat LoI yang dapat dikategorikan sebagai bahan/tanggapan fasilitasi atas surat permintaan konsultasi permasalahan dari pelaku usaha maupun Kementerian/ Lembaga/Daerah melalui sistem *e-office* dengan *digital signature*.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2023 telah melakukan beberapa upaya transformasi sistem perizinan berusaha di antaranya:

1. Melakukan *update* integrasi baik berupa penambahan maupun perbaikan *service* dalam rangka meningkatkan fungsi dan mengurangi risiko terjadinya kendala atau *bugs*;
2. Menambahkan beberapa fitur untuk menjawab kebutuhan pengguna misalnya fitur bantuan kendala akun, perubahan data lampiran teknis, perluasan jasa serta *corporate account* untuk pembuatan NIB secara kolektif;
3. Meningkatkan jangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan mengakomodir bentuk badan usaha BUMDES dan BUMDESMA;
4. Meningkatkan fungsi sistem OSS sebagai *single portal* misalnya dalam memproses PBG dan SLF dimana pelaku usaha dapat mengakses SIMBG *Single Sign On* melalui Sistem OSS;
5. Meningkatkan keamanan pengguna sistem OSS melalui penerapan *Two Factor Authentication* (2 FA); dan
6. Melakukan penyempurnaan proses bisnis pemrosesan perizinan berusaha maupun PB UMKU sesuai dengan regulasi yang berlaku.

4. Penyusunan Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2023-2040

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan penyusunan peta jalan hiirisasi investasi strategis tahun 2023-2040. Peta jalan ini merupakan *guideline* untuk melakukan berbagai kerja dan kegiatan dalam pengoptimalan capaian kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Terdapat 8 (delapan) sektor dan 21 (dua puluh satu) komoditas yang menjadi dasar penyusunan peta jalan.

Gambar 4.22.
8 Sektor dan 21 Komoditas Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis

Peta jalan ini memuat sasaran, pohon industri, dan cadangan pasar global dari masing-masing komoditas hilirisasi investasi strategis. Salah satu komoditas strategis hilirisasi adalah nikel. Sasaran hilirisasi nikel adalah: 1) Lima besar produsen baterai kendaraan listrik dunia; dan 2) Dua besar produsen *stainless steel* dunia.

Gambar 4.23.
Peta Jalan Hilirisasi Nikel

Sasaran strategis tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam pohon industri. Pohon industri ini memberikan gambaran secara holistik dan komprehensif terkait proses hilirisasi komoditas nikel sebagaimana termuat pada gambar berikut ini.

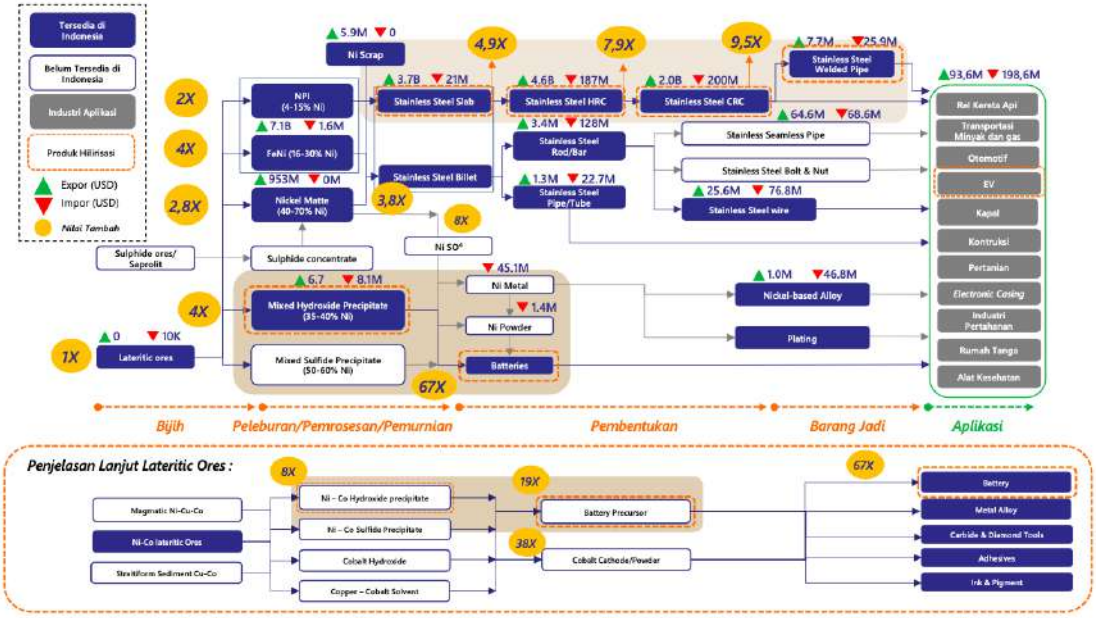

Gambar 4.24.
Pohon Industri Komoditas Nikel

Pohon industri ini kemudian dianalisis sebagai bagian untuk penentuan pasar dengan melihat cadangan komoditas nikel di dunia. Hal ini penting sebagai dasar untuk memetakan persaingan global serta tidak hanya mementingkan proyeksi ekonomi tetapi juga aspek keberlanjutan dan lingkungan.

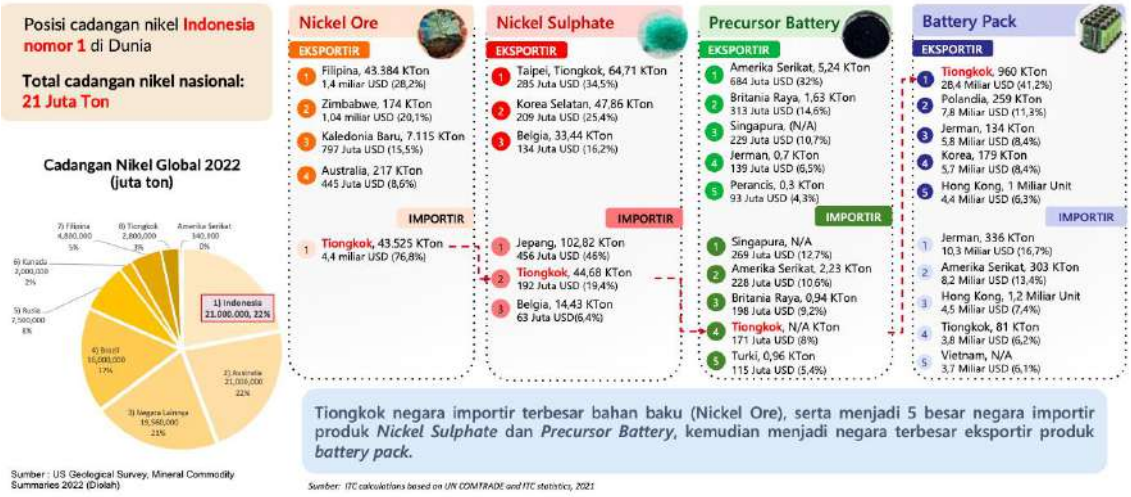

Gambar 4.25.
Cadangan dan Pasar Global Komoditas Nikel

5. Peningkatan Efektifitas Pemanfaatan Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2024

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Tujuan dari dekonsentrasi adalah: 1) Meningkatkan capaian target realisasi penanaman modal; 2) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas

pemerintah pusat di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan 3) Meningkatkan efektivitas peran dan posisi gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah provinsi. Dasar hukum pelaksanaan dekonsentrasi ini adalah Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekosentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal (DAK Nonfisik FPM) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitasi penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun tujuan dari DAK Nonfisik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan capaian realisasi penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota;
2. Meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pelaku Usaha mengenai ketentuan pelaksanaan;
3. Meningkatkan pemahaman penanaman modal, dan
4. Meningkatkan minat penanam modal untuk melakukan Penanaman Modal di daerah.

Selanjutnya, dalam rangka menetapkan lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2024, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menyusun kajian **"Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal"** pada tahun 2023. Kajian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan fasilitasi Penanaman Modal di daerah, terutama untuk pengawasan realisasi Penanaman Modal. Berdasarkan analisis dalam kajian yang telah dilakukan terdapat beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi prioritas penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal (DAK NF FPM) Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan kriteria berikut: (1) Kondisi dan kemampuan daerah dalam merealisasikan investasi; (2) Kondisi geografis daerah; (3) Kinerja pengelolaan DAK NF FPM tahun sebelumnya; (4) Keselarasan Lokasi dengan Prioritas Nasional Tahun 2024 (DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2024) dan Rencana Induk Pengembangan Provinsi Papua (RIPPP); dan (5) Kemampuan keuangan.
2. Daerah penerima DAK NF FPM tahun 2024 yaitu sebanyak 38 Provinsi dan 399 Kabupaten/Kota;
3. Dari alokasi DAK NF FPM tahun 2024 yang ditetapkan, jumlah total output kegiatan sebanyak 125.033, yang terdiri dari target output pada level Provinsi sebanyak 15.933 dengan 4 (empat) menu kegiatan. Adapun pada level Kabupaten/Kota sebanyak 109.100 dengan 3 (tiga) menu kegiatan.
   Empat menu kegiatan untuk level provinsi adalah:
   a) Pengawasan penanaman modal;
   b) Bimbingan teknis kepada para pelaku usaha;

c) Penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha; dan
d) Penyusunan peta potensi investasi provinsi

Tiga menu kegiatan untuk level kabupaten/kota adalah:

a) Pengawasan penanaman modal;
b) Bimbingan teknis kepada para pelaku usaha; dan
c) Penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024.

6. Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB) Pemerintah Daerah serta Kinerja PBB Kementerian/Lembaga Tahun 2023

Kementerian Investasi/BKPM memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan penanaman modal melalui upaya peningkatan kemudahan berusaha dan kompetensi penyelenggara perizinan berusaha di pusat maupun daerah. Peranan ini sebagaimana tercantum didalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 yang telah diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 134 Tahun 2023 berupa kegiatan penilaian kinerja kementerian negara/Lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana telah diselenggarakan setiap tahunnya sejak tahun 2021.

Kegiatan penilaian kinerja diharapkan dapat mendorong peran pemerintah daerah melalui perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten, kota) dalam rangka menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha sesuai UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang beserta berbagai peraturan pelaksanaan sebagai turunan UU Cipta Kerja, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

Adapun rangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja, yakni:

1. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemerintah Daerah serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga;
2. *Workshop* pengisian Penilaian Mandiri melalui Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Kegiatan Penilaian Mandiri yang terdiri dari pengisian Penilaian Mandiri melalui Sistem TIK, Verifikasi Penilaian Mandiri, *Quality Control* hasil Verifikasi Penilaian Mandiri, Penetapan Kategori hasil Penilaian Mandiri.
4. Penyampaian hasil penilaian kinerja pemerintah daerah dan kementerian negara/ lembaga dari Kementerian Investasi/BKPM kepada Kementerian Keuangan sebagaimana diamanatkan didalam Perpres No.42 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

5. Penetapan Nomine terhadap Pemerintah Daerah dan Kementerian Negara/ Lembaga dengan kategori “Sangat Baik” untuk dilakukan Uji Pemaparan dan Uji Petik; dan
6. Pemberian Penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Negaa/Lembaga yang berkinerja Terbaik.

Gambar 4.26.
Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023

7. Penguatan Fasilitasi Insentif Pajak Bagi Investor dan Badan Usaha

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan fasilitasi terhadap UMKM terkait dengan bea masuk, pengurangan pajak penghasilan (PPh) dan fasilitasi *Tax Holiday.* Adapun rincian jumlah badan usaha yang diterbitkan persetujuan pemberian fasilitas dari periode bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) badan usaha, dengan rincian pemberian fasilitas bea masuk (*Masterlist*) sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) badan usaha, pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan dalam bentuk *Tax Allowance* sebanyak 12 (dua belas) badan usaha dan dalam bentuk *Tax Holiday* sebanyak 30 (tiga puluh) badan usaha.

8. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2023 berhasil menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB adalah sebanyak 4.315 NIB atau melampaui target 4.250 NIB dengan rincian terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2.
Capaian Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK Perseorangan yang Diterbitkan melalui Kegiatan Fasilitasi Layanan NIB

No.	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta Mendapatkan NIB	Target
1.	Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta	25 Mei 2023	950	1.000
2.	Kota Pekanbaru, Riau	10 Agustus 2023	689	650
3.	Kota Palu, Sulawesi Tengah	19 September 2023	674	650
4.	Kota Sorong, Papua Barat Daya	11 Oktober 2023	691	650
5.	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	11 November 2023	675	650
6.	Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1 Desember 2023	636	650
Total			**4.315**	**4.250**

Beberapa terobosan atau inisiatif Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mempercepat capaian pemberian NIB sebagai syarat pelaku usaha untuk mengakses jangkuan pasar serta jejaring investor yang lebih luas adalah:

1. Penambahan kuota antrian layanan konsultasi dari semula 100 pelaku usaha per hari menjadi 400 pelaku usaha per hari; dan
2. Dilaksanakannya kegiatan Pemberian NIB di 6 titik lokasi di seluruh Indonesia sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pada pelaku UMK perorangan.

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
TAHUN 2023

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka menjalankan misi serta visi selama tahun 2023. Visi dan misi tersebut merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Investasi/ BKPM mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Seluruh unit kerja Kementerian Investasi/ BKPM telah berkolaborasi, bersinergi, dan berkomitmen untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja serta menghadapi berbagai hambatan di tahun 2023. Kolaborasi dan sinergitas tidak hanya dilakukan dalam lingkup internal Kementerian Investasi/BKPM, namun juga telah dilakukan dengan pihak eksternal di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian PPN/Bappenas. Dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2023, Kementerian Investasi/BKPM merealisasikan anggaran sebesar Rp1.094.951.654.261.

Berbagai upaya dan alokasi dana yang telah direalisasikan selama tahun 2023 menunjukkan pencapaian kinerja sangat baik. Hal ini ditandai dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM sebesar 109,87 dengan tingkat efisiensi mencapai 9,56. Selain itu rata-rata pencapaian sasaran kinerja (NPS) mencapai 106,58, dengan rincian:

1) Sasaran Strategis 1 (SS-1): Meningkatnya realisasi penanaman modal sebesar 112,52% (kategori sangat baik);
2) Sasaran Strategis 2 (SS-2): Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal tidak dapat diketahui hasilnya dikarenakan indikator peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) tidak dirilis oleh bank Dunia dan untuk sementara digantikan dengan *Report of Doing Business* sebesar 120,00% (kategori sangat baik)
3) Sasaran Strategis 3 (SS-3): Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani sebesar 94,95% (kategori baik).
4) Sasaran Program 1 (SP-1): Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal sebesar 111,54% (kategori sangat baik);
5) Sasaran Program 2 (SP-2) : Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis sebesar 100% (kategori sangat baik);
6) Sasaran Program 3 (SP-3): Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal sebesar 113,85% (kategori sangat baik);
7) Sasaran Program 4 (SP-4): Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal sebesar 108,42% (kategori sangat baik);
8) Sasaran Program 5 (SP-5): Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal sebesar 100,00%(kategori sangat baik);
9) Sasaran Program 6 (SP-6): Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal sebesar 96,81% (kategori baik);

10) Sasaran Program 7 (SP-7): Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebesar 120,00% (kategori sangat baik); dan
11) Sasaran Program (SP-8): Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal sebesar 94,33% (kategori baik).

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kementerian Investasi/BKPM sudah tepat sasaran dan proses penganggaran pun dilakukan dengan baik. Akan tetapi Kementerian Investasi/BKPM perlu untuk terus meningkatkan kinerjanya mengingat masih terdapat masalah/hambatan selama tahun 2023, dan tantangan yang dihadapi di tahun mendatang semakin kompleks. Oleh karena itu komitmen, sinergitas, inovasi, dan transformasi perlu terus dilakukan.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerjanya pada tahun 2024. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada tahun 2023, terdapat beberapa rencana tindak lanjut untuk mengatasi berbagai permasalahan serta kendala yang ada. Berikut ini merupakan rencana tindak lanjut Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2024, antara lain:

1. **Pembenahan Kemudahan Berusaha**
   a) Menyusun rencana kegiatan yang melibatkan daerah pada awal tahun anggaran dan segera diinformasikan kepada DPMPTSP yang akan terlibat. Diharapkan kegiatan tersebut dapat terprogram dan lebih sistematis sehingga lebih memperlancar pelaksanaannya pada tahun berjalan dan meminimalkan kegiatan yang tidak dapat terlaksana;
   b) Melakukan pendekatan secara intensif melalui sosialisasi tentang pemanfaatan sistem pelaporan kegiatan penanaman modal secara *online* (LKPM Online) berbasis risiko sehingga LKPM dapat disampaikan tepat waktu dan benar sesuai dengan periode dan tahapan pelaporan;
   c) Pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dan terkoordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melalui subsistem pengawasan pada sistem OSS;
   d) Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui integrasi kegiatan yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik;
   e) Optimalisasi LKPM Online secara periodik serta penertiban dengan mekanisme sanksi yang tegas apabila terdapat kelalaian penanam modal;
   f) Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan konektivitas di luar pulau Jawa; Memberikan insentif dan kemudahan investasi bagi investor yang berminat menanam modal di luar pulau Jawa, seperti pembebasan pajak, keringanan biaya perizinan, dan bantuan teknis;
   g) Percepatan pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus di luar pulau Jawa, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa

Tenggara, yang menawarkan potensi sumber daya alam dan pasar yang besar;

h) Melakukan promosi dan sosialisasi investasi di luar pulau Jawa untuk menarik minat dan perhatian investor;

i) Penguatan konektivitas dan Pengembangan infrastruktur di luar Jawa terkait dengan simplifikasi penanaman modal seperti pembebasan pajak, keringanan biaya perizinan, fasilitasi permasalahan atau kendala yang dihadapi penanam modal;

j) Mendorong kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta, serta antara investor besar, menengah, dan kecil, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan;

k) Kemudahan penerbitan NIB bagi pelaku UMKM maupun IKM;

l) Peningkatan koordinasi teknis dengan pemerintah daerah terkait dengan penerbitan NIB dan fasilitasi UMKM terhubung dengan usaha besar;

m) Penyediaan *database* UMKM yang lebih lengkap berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga;

n) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada level pelaksana melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta Tugas Belajar. Peningkatan upaya koordinasi dengan kementerian/lembaga/ daerah dan *stakeholder* terkait dalam melakukan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perizinan di tingkat pusat atau kementerian/lembaga.

2. Eksekusi Realisasi Penanaman Modal Besar

a) Melakukan pendampingan realisasi penanaman modal besar secara *end to end services*;

b) Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dengan melibatkan *stakeholder* pusat dan daerah secara komprehensif dan tuntas yang dilakukan secara formal maupun informal;

c) Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di pusat maupun daerah melalui pertemuan dan koordinasi yang lebih sering, lebih efektif dan intensif dengan instansi teknis terkait lainnya di pusat dan daerah;

d) Melakukan pendekatan secara intensif melalui sosialisasi tentang pemanfaatan sistem pelaporan kegiatan penanaman modal secara *online* (LKPM Online) berbasis Risiko;

e) Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS; dan

f) Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan bagi pelaku usaha melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk percepatan realisasi penanaman modal.

3. **Formulasi Strategi Penanam Modal Besar Bermitra dengan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah**
   a) Melakukan pembaharuan data perusahaan besar (PMA/PMDN) yang wajib bermitra secara berkala;
   b) Penyusunan regulasi terkait:
      1) Rancangan Undang–Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
      2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
   c) Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan K/L, pemerintah daerah dan asosiasi nasional, untuk pembaharuan data perusahaan besar (PMA/PMDN) dalam rangka:
      1) Pemenuhan kebutuhan rantai pasok produksi (*supply chain*).
      2) Penguatan data pelaku usaha nasional (PMDN) khususnya UMKM untuk menjadi mitra usaha potensial.
      3) Pengoptimalan pengaruh kegiatan Usaha Besar agar signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di lokasi proyek.
      4) Pemberdayaan dan pengembangan sektor usaha mikro dan kecil.
      5) Peningkatan pengembangan usaha nasional (PMDN) khususnya UMKM agar mampu naik kelas.
   d) Fasilitasi kompetensi bagi para pelaku usaha UMKM yang ada di daerah agar dapat memiliki standar yang dibutuhkan oleh usaha besar; dan
   e) Diperlukan upaya melakukan monitoring terhadap tindak lanjut (*follow up*) dari pelaksanaan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan pelaku usaha nasional di daerah sehingga diperoleh informasi tentang hasil kerja sama, kesulitan bermitra, ataupun peningkatan naik kelas bagi UKM.

4. **Diseminasi Penanaman Modal Berkualitas.**
   a) Mendorong percepatan penerbitan peraturan daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
   b) Melakukan kegiatan *workshop* penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan evaluasi dokumen RUPM;
   c) Fasilitasi percepatan penanaman modal Proyek Strategis Nasional (PSN), baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun swasta nasional;
   d) Fasilitasi percepatan proyek-proyek infrastruktur serta pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah;
   e) Menyusun analisis kebijakan penanaman modal terkait pemberian insentif fiskal/non fiskal kepada perusahaan; dan
   f) Pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi hasil penanaman modal.

5. **Promosi Penanaman Modal Terfokus Berdasarkan Negara dan Sektor**
   a) Memanfaatkan analisis negara pesaing dan negara target dalam penyusunan strategi promosi terfokus berdasarkan sektor ataupun negara potensial;
   b) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pameran terpadu bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan asosiasi usaha baik dalam maupun luar negeri;
   c) Berkolaborasi dengan asosiasi bisnis dan perbankan untuk memperoleh daftar mitra potensial bagi calon penanam modal asing (PMA) ataupun calon penanam modal dalam negeri (PMDN);
   d) Berkoordinasi dengan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam menyiapkan bahan promosi ataupun proyek yang dapat ditawarkan guna menarik minat calon penanam modal terhadap IKN;
   e) Memanfaatkan perjanjian Indonesia dengan negara-negara mitra dan MoU Indonesia dengan dunia usaha di bidang investasi untuk mendorong peningkatan investasi asing ke Indonesia dan pengembangan kapasitas investasi dalam negeri; dan
   f) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di unit Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai promotor investasi yang dapat mendukung kegiatan promosi skala global.

6. **Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri Khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.**
   a) Kemudahan penerbitan NIB bagi pelaku UMKM maupun IKM;
   b) Peningkatan koordinasi teknis dengan pemerintah daerah terkait dengan penerbitan NIB dan fasilitasi UMKM terhubung dengan usaha besar; dan
   c) Penyediaan *database* UMKM yang lebih lengkap berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

7. **Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis**
   a) Penyusunan rekomendasi kebijakan hilirisasi investasi strategis yang ditindaklanjuti;
   b) Pelaksanaan rencana aksi terpadu yang lebih komprehensif untuk mencapai target pada Peta Jalan (*Roadmap*) Hilirisasi Invetasi Strategis;
   c) Fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha hilirisasi di sektor hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, Kehutanan, Minyak Bumi, Gas Bumi, Mineral dan Batubara; dan
   d) Koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi pada sektor hilirisasi investasi strategis.

Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai unsur, baik unit kerja yang ada di Kementerian Investasi/ BKPM maupun juga dengan pihak-pihak dari luar Kementerian Investasi/BKPM. Laporan kinerja ini dapat dijadikan titik pijak perbaikan kinerja di masa mendatang, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang inovatif sehingga pada akhirnya dapat terwujud BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan

Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
TAHUN 2023

PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM TAHUN 2023

Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kementerian Investasi/BKPM meraih penghargaan dalam acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 dari Ombudsman RI.

Penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik (opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik) adalah salah satu upaya pencegahan guna mengukur penyelenggara pelayanan baik di tingkat Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Diraihnya penghargaan ini tentunya sebagai bukti bahwa Kementerian Investasi/BKPM merupakan salah satu Kementerian yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara baik.

Penghargaan sebagai Kementerian di bawah Koordinasi Kemenko Marves yang telah berhasil melaksanakan Program Prioritas Nasional Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2023

Kementerian Investasi/BKPM meraih penghargaan sebagai Kementerian di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang telah berhasil melaksanakan Program Prioritas Nasional Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2023.

Sinergitas dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait telah dilakukan secara baik oleh Kementerian Investasi/ BKPM. Penghargaan ini sebagai wujud bahwa Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen tinggi untuk terus berkontribusi optimal dalam pelaksanaan program prioritas nasional guna mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045.

Penghargaan atas dukungannya dalam pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023

Kementerian Investasi/BKPM meraih Penghargaan atas dukungannya dalam pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan bertajuk “RB XPerience dan Penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI Tahun 2023” dengan tema: Dari Visi Menjadi Aksi, RB Berdampak untuk Indonesia Maju. Kementerian Investasi/BKPM menjadi salah satu instansi penerima penghargaan Apresiasi K/L Pendukung dalam Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023 di antara 7 K/L. Penghargaan ini merupakan hasil komitmen bersama seluruh pimpinan dan pegawai serta sinergi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM.

Lebih lanjut, kegiatan ini menandai komitmen dan semangat instansi-instansi pemerintah dalam mencapai reformasi birokrasi dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, sekaligus pendorong percepatan pembangunan nasional demi Indonesia maju dan mencapai visi 2045. Adapun tujuan Kegiatan RB Xperience dan Apresiasi Penyerahan Hasil Evaluasi RB Tahun 2023 adalah 1) Meningkatkan pemahaman instansi pemerintah terhadap implementasi kebijakan RB dan RB Tematik; 2) Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian RB berdampak; 3) Memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah atas capaian RB secara instansional; 4) Memberikan informasi kepada masyarakat atas capaian RB pemerintah selama tahun 2023.

Penghargaan Anugerah Media Humas 2023

Penghargaan AMH 2023 diberikan kepada juara terbaik untuk enam kategori, yakni Siaran Pers (Media Online), Media Sosial, Website, Kampanye Komunikasi Publik, Penerbitan Media Internal *(Inhouse Magazine)*, dan Media Audiovisual. AMH 2023 diikuti oleh 87 peserta yang terdiri atas Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, PTN, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Indonesia.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil meraih dua penghargaan untuk kategori Siaran Pers dan Website dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dua penghargaan yang berhasil diraih yaitu Terbaik ke-2 Kategori Siaran Pers (Media Online) serta Terbaik ke-3 Kategori Website untuk Kelompok Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Penghargaan AMH ini yang pertama sejak BKPM berubah menjadi Kementerian Investasi/BKPM di tahun 2021. Hal ini menjadi motivasi bagi pelayan publik dalam memastikan komunikasi yang *citizen-centric*, terukur, dan mengedukasi. Selain itu, Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi terhadap keberhasilan komunikasi publik dan dukungan hubungan masyarakat di kementerian dan lembaga, pemerintah daerah serta BUMN dan perguruan tinggi dalam menyukseskan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Indonesia.

Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 15 Kali Berturut-Turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berhasil meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini merupakan pencapaian ke 15 secara berturut-turut sejak tahun 2007. Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan lima komponen dalam memberikan penilaian/predikat yaitu: 1) Laporan realisasi anggaran; 2) Neraca; 3) Laporan Operasional; 4) Laporan berupa ekuitas; dan 5) Catatan atas laporan keuangan. Dari kelima komponen tersebut, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal secara konsisten berhasil memberikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan rasional.

Hal ini menunjukkan komitmen Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menggunakan anggaran secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Dengan perluasan tugas setelah perubahan nomenklatur dari Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2021, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal menujukkan kinerja anggaran yang konsisten serta penuh tanggung jawab dalam penggunaan anggaran negara.

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
TAHUN 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Inspektur

Kukuh Agung Pribadi

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44 Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : +6221 525 2008 (Hunting), Faksimile : +6221 525 4945 Situs : www.bkpm.go.id, E-mail : Info@bkpm.go.id

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Bahlil Lahadalia**
Jabatan	:	Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 Januari 2023

Menteri Investasi / Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.099,8
		2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	483,9
		3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	50,6
		4	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	51,9
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	5	Peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) (peringkat)	45
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat/nilai)	A (80)
		7	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK/nilai)	WTP (4)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penanaman Modal	732.461.117.000
2	Dukungan Manajemen	396.144.568.000
Total Anggaran Tahun 2023		**1.128.605.685.000**

Jakarta, 30 Januari 2023

Menteri Investasi / Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
TAHUN 2023

MANUAL IKU TAHUN 2023

KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

MANUAL IKU 2023

KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

MANUAL IKU 2023

KEMENTERIAN INVESTASI /
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PEDOMAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

MANUAL IKU 2023

KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NILAI REALISASI PENANAMAN MODAL (RP TRILIUN)
(Kode : IKSS.01.1)

PERSPEKTIF	Stakeholder
SASARAN	Meningkatnya realisasi penanaman modal
DESKRIPSI SASARAN	Meningkatnya realisasi penanaman modal merupakan salah satu indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian diturunkan menjadi target dalam Rencana Strategis BKPM 2020-2024. Peningkatan penanaman modal dilaksanakan melalui: (1) harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah; serta (2) fasilitasikemudahan usaha dan penanaman modal, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan penanaman modal melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
INDIKATOR KINERJA	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	▪ Nilai realisasi penanaman modal adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Industri Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil. ▪ Nilai realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dalam mata uang Rupiah (Rp). ▪ Realisasi Periode Pelaporan adalah nilai realisasi penanaman modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) baik untuk tahap konstruksi maupun tahap produksi. Nilai realisasi penanaman modal ini merupakan nilai perolehan bukan nilai pembukuan perusahaan. ▪ Total akumulasi realisasi sampai dengan periode pelaporan adalah nilai realisasi penanaman modal yang merupakan wujud dari kegiatan nyata yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Berusaha sampai dengan periode pelaporan yang terkini. ▪ Komponen realisasi terdiri dari: 1. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasum, fasus. 2. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (spareparts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. 3. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya overhead perusahaan, termasuk modal kerja apabila perusahaan belum siap produksi komersil. 4. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai berproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu turnover pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead perusahaan.
FORMULA PERHITUNGAN / PENGUKURAN	▪ Nilai realisasi penanaman modal diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala kepada Kementerian Investasi/BKPM, di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Industri Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Triwulan	Periode	Waktu Penyampaian
I	Januari – Maret	Tanggal 1 – 10 April tahun berjalan
II	April – Juni	Tanggal 1 – 10 Juli tahun berjalan
III	Juli – September	Tanggal 1 – 10 Oktober tahun berjalan
IV	Oktober – Desember	Tanggal 1 – 10 Januari tahun berikutnya

▪ Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan/atau Online Single Submission (OSS) untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha/penanam modal.
▪ Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring melalui SPIPISE dan/atau OSS.

Kementerian Investasi/BKPM melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring tersebut.

- Hasil kompilasi disampaikan ke publik paling lambat:

1. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
2. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
3. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
4. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

- Data realisasi penanaman modal diperoleh dari LKPM yang disetujui sesuai lokasi proyek, yang wilayahnya terbagi menjadi:

1. Wilayah I, meliputi: seluruh provinsi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung.
2. Wilayah II, meliputi: seluruh Provinsi Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
3. Wilayah III, meliputi: seluruh Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.
4. Wilayah IV, meliputi: seluruh Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
5. Wilayah V, meliputi: seluruh Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.

- Formula perhitungan / pengukuran:

$$RPM = \sum_{i=1}^{n} RW_i$$

Keterangan :
RPM = Realisasi Penanaman Modal Nasional per Triwulan
RW = Realisasi Penanaman Modal per Direktorat Wilayah
i = Indeks Direktorat Wilayah pada Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
n = Jumlah Diektorat Wilayah pada Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (n=4)

PENYEDIA DATA	1. Direktorat Wilayah I, 2. Direktorat Wilayah II, 3. Direktorat Wilayah III, 4. Direktorat Wilayah IV, dan 5. Direktorat Wilayah V
SUMBER DATA	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Direktorat Data dan Informasi
TINGKAT VALIDITAS IKU	☐ Lead Input | ☐ Lead Proses | ☐ Lag Output | ☑ Lag Outcome |
POLARISASI DATA	☑ Maximize | ☐ Minimize | ☐ Stabilize |
PERHITUNGAN DATA	☑ Akumulasi | ☐ Rata-Rata | ☐ Nilai Posisi Akhir |
PERIODE	☑ Triwulan | ☐ Semester | ☐ Tahun |
METODE CASCADING	☐ Adopsi Langsung | ☐ Lingkup Dipersempit | ☐ Komponen Pembentuk | ☑ Buat Baru |
TARGET	1.099,8
SATUAN	Rp Triliun
Breakdown Target	
TW-1	250
TW-2	250
TW-3	250
TW-4	349,8

NILAI REALISASI PENANAMAN MODAL SEKTOR SEKUNDER (RP TRILIUN)
(Kode : IKSS.01.2)

PERSPEKTIF	Stakeholder
SASARAN	Meningkatnya realisasi penanaman modal
DESKRIPSI SASARAN	Meningkatnya realisasi penanaman modal merupakan salah satu indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian diturunkan menjadi target dalam Rencana Strategis BKPM 2020-2024. Peningkatan penanaman modal dilaksanakan melalui: (1) harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah; serta (2) fasilitasikemudahan usaha dan penanaman modal, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan penanaman modal melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
INDIKATOR KINERJA	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	▪ Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor sekunder, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Industri Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil. ▪ Nilai realisasi penanaman modal dalam negeri sektor sekunder dan penanaman modal asing sektor sekunder dalam mata uang Rupiah (Rp). ▪ Penanaman modal sektor sekunder meliputi: a. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya b. Industri Makanan c. Industri Kimia dan Farmasi d. Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain e. Industri Kertas dan Percetakan f. Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam g. Industri Tekstil h. Industri Karet dan Plastik i. Industri Mineral Non Logam j. Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki k. Industri Kayu l. Industri Lainnya
FORMULA PERHITUNGAN / PENGUKURAN	▪ Nilai realisasi penanaman modal diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala kepada Kementerian Investasi/BKPM, di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Industri Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Triwulan	Periode	Waktu Penyampaian
I	Januari – Maret	Tanggal 1 – 10 April tahun berjalan
II	April – Juni	Tanggal 1 – 10 Juli tahun berjalan
III	Juli – September	Tanggal 1 – 10 Oktober tahun berjalan
IV	Oktober – Desember	Tanggal 1 – 10 Januari tahun berikutnya

▪ Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan/atau Online Single Submission (OSS) untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha/penanam modal.
▪ Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring melalui SPIPISE dan/atau OSS. Kementerian Investasi/BKPM melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring tersebut.
▪ Hasil kompilasi disampaikan ke publik paling lambat:

1. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
2. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
3. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
4. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

- Data realisasi penanaman modal diperoleh dari LKPM yang disetujui sesuai lokasi proyek, yang wilayahnya terbagi menjadi:

1. Wilayah I, meliputi: seluruh provinsi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung.
2. Wilayah II, meliputi: seluruh Provinsi Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
3. Wilayah III, meliputi: seluruh Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.
4. Wilayah IV, meliputi: seluruh Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
5. Wilayah V, meliputi: seluruh Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.

- Formula perhitungan / pengukuran:

$$RSS = \sum_{i=1}^{n} RS_i$$

Keterangan :
RSS = Realisasi Penanaman Modal untuk Sektor Sekunder per Triwulan
RS = Realisasi Penanaman Modal per bidang usaha pada sektor sekunder
i = Indeks bidang usaha sektor sekunder
n = Jumlah total bidang usaha sektor sekunder yang masuk dalam perhitungan (n=12)

PENYEDIA DATA	1. Direktorat Wilayah I, 2. Direktorat Wilayah II, 3. Direktorat Wilayah III, 4. Direktorat Wilayah IV, dan 5. Direktorat Wilayah V
SUMBER DATA	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Direktorat Data dan Informasi
TINGKAT VALIDITAS IKU	☐ Lead Input ☐ Lead Proses ☐ Lag Output ☑ Lag Outcome
POLARISASI DATA	☑ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
PERHITUNGAN DATA	☑ Akumulasi ☐ Rata-Rata ☐ Nilai Posisi Akhir
PERIODE	☑ Triwulan ☐ Semester ☐ Tahun
METODE CASCADING	☐ Adopsi Langsung ☐ Lingkup Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☑ Buat Baru
TARGET	483,9
SATUAN	Rp Triliun
Breakdown Target	
TW-1	100
TW-2	100
TW-3	100
TW-4	183,9

SEBARAN PENANAMAN MODAL BERKUALITAS (DI LUAR JAWA) (%)
(Kode : IKSS.01.3)

PERSPEKTIF	Stakeholder
SASARAN	Meningkatnya realisasi penanaman modal
DESKRIPSI SASARAN	Meningkatnya realisasi penanaman modal merupakan salah satu indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian diturunkan menjadi target dalam Rencana Strategis BKPM 2020-2024. Peningkatan penanaman modal dilaksanakan melalui: (1) harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah; serta (2) fasilitasikemudahan usaha dan penanaman modal, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan penanaman modal melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
INDIKATOR KINERJA	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	▪ Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) menjadi aspek yang perlu diperbaiki, mengingat realisasi penanaman modal masih terfokus di Jawa. ▪ Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan, dan harmonisasi peraturan menjadi kunci untuk penyebaran penanaman modal ke luar Jawa. Aspek-aspek tersebut juga menjadi kunci sukses dari upaya percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. ▪ Salah satu upaya untuk meningkatkan penanaman modal di pusat-pusat pertumbuhan adalah melalui kemudahan izin dan fasilitasi penanaman modal.
FORMULA PERHITUNGAN / PENGUKURAN	▪ Nilai realisasi penanaman modal diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala kepada Kementerian Investasi/BKPM, di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Industri Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Triwulan	Periode	Waktu Penyampaian
I	Januari – Maret	Tanggal 1 – 10 April tahun berjalan
II	April – Juni	Tanggal 1 – 10 Juli tahun berjalan
III	Juli – September	Tanggal 1 – 10 Oktober tahun berjalan
IV	Oktober – Desember	Tanggal 1 – 10 Januari tahun berikutnya

▪ Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan/atau Online Single Submission (OSS) untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha/penanam modal.
▪ Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring melalui SPIPISE dan/atau OSS. Kementerian Investasi/BKPM melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring tersebut.
▪ Hasil kompilasi disampaikan ke publik paling lambat:

1. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
2. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
3. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
4. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

▪ Data realisasi penanaman modal diperoleh dari LKPM yang disetujui sesuai lokasi proyek, yang wilayahnya terbagi menjadi:

1. Wilayah I, meliputi: seluruh provinsi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung.
2. Wilayah II, meliputi: seluruh Provinsi Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
3. Wilayah III, meliputi: seluruh Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.
4. Wilayah IV, meliputi: seluruh Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
5. Wilayah V, meliputi: seluruh Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.

- Formula perhitungan / pengukuran:

$$SLJ = \frac{RPM - RPMJ}{RPM} \; x \; 100\%$$

Keterangan :
SLJ = Sebaran Penanaman Modal Luar Jawa
RPM = Realisasi Penanaman Modal Nasional per Triwulan
RPMJ = Realisasi Penanaman Modal di Pulau Jawa per Triwulan

PENYEDIA DATA	1. Direktorat Wilayah I, 2. Direktorat Wilayah II, 3. Direktorat Wilayah III, 4. Direktorat Wilayah IV, dan 5. Direktorat Wilayah V
SUMBER DATA	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Direktorat Data dan Informasi
TINGKAT VALIDITAS IKU	☐ Lead Input ☐ Lead Proses ☐ Lag Output ☑ Lag Outcome
POLARISASI DATA	☑ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize
PERHITUNGAN DATA	☐ Akumulasi ☑ Rata-Rata ☐ Nilai Posisi Akhir
PERIODE	☑ Triwulan ☐ Semester ☐ Tahun
METODE CASCADING	☐ Adopsi Langsung ☐ Lingkup Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☑ Buat Baru
TARGET	50,6
SATUAN	%

Breakdown Target

TW-1	50,6
TW-2	50,6
TW-3	50,6
TW-4	50,6

KONTRIBUSI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TERMASUK UMKM (%)
(Kode : IKSS.01.4)

PERSPEKTIF	Stakeholder
SASARAN	Meningkatnya realisasi penanaman modal
DESKRIPSI SASARAN	Meningkatnya realisasi penanaman modal merupakan salah satu indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian diturunkan menjadi target dalam Rencana Strategis BKPM 2020-2024. Peningkatan penanaman modal dilaksanakan melalui: (1) harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah; serta (2) fasilitasikemudahan usaha dan penanaman modal, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan penanaman modal melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
INDIKATOR KINERJA	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	▪ Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. ▪ Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta. ▪ Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimum Rp.2,5 milyar. ▪ Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp2,5 milyar sampai paling tinggi Rp50 milyar.
FORMULA PERHITUNGAN / PENGUKURAN	▪ Nilai realisasi penanaman modal diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala kepada Kementerian Investasi/BKPM, di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Industri Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Triwulan	Periode	Waktu Penyampaian
I	Januari – Maret	Tanggal 1 – 10 April tahun berjalan
II	April – Juni	Tanggal 1 – 10 Juli tahun berjalan
III	Juli – September	Tanggal 1 – 10 Oktober tahun berjalan
IV	Oktober – Desember	Tanggal 1 – 10 Januari tahun berikutnya

▪ Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan/atau Online Single Submission (OSS) untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha/penanam modal.
▪ Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring melalui SPIPISE dan/atau OSS. Kementerian Investasi/BKPM melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring tersebut.
▪ Hasil kompilasi disampaikan ke publik paling lambat:

1. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
2. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
3. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
4. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

▪ Data realisasi penanaman modal diperoleh dari LKPM yang disetujui sesuai lokasi proyek, yang wilayahnya terbagi menjadi:

1. Wilayah I, meliputi: seluruh provinsi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung.
2. Wilayah II, meliputi: seluruh Provinsi Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
3. Wilayah III, meliputi: seluruh Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

4. Wilayah IV, meliputi: seluruh Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
5. Wilayah V, meliputi: seluruh Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.

- Formula perhitungan / pengukuran:

$$Kontribusi\ PMDN = \frac{RPMDN}{RPM}\ x\ 100\%$$

Keterangan :
KPMDN = Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri
RPMDN = Realisasi penanaman modal yang dihasilkan penanam modal dalam negeri termasuk UMKM per Triwulan
RPM = Realisasi penanaman modal Nasional (untuk PMA dan PMDN termasuk UMKM) per Triwulan

PENYEDIA DATA	1. Direktorat Wilayah I, 2. Direktorat Wilayah II, 3. Direktorat Wilayah III, 4. Direktorat Wilayah IV, dan 5. Direktorat Wilayah V
SUMBER DATA	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Direktorat Data dan Informasi
TINGKAT VALIDITAS IKU	☑ Lead Input ☐ Lead Proses ☐ Lag Output ☐ Lag Outcome
POLARISASI DATA	☐ Maximize ☑ Minimize ☐ Stabilize
PERHITUNGAN DATA	☐ Akumulasi ☑ Rata-Rata ☐ Nilai Posisi Akhir
PERIODE	☑ Triwulan ☐ Semester ☐ Tahun
METODE CASCADING	☐ Adopsi Langsung ☐ Lingkup Dipersempit ☑ Komponen Pembentuk ☐ Buat Baru
TARGET	51,9
SATUAN	%
Breakdown Target	
TW-1	51,9
TW-2	51,9
TW-3	51,9
TW-4	51,9

PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS) (PERINGKAT)
(Kode : IKSS.02.5)

PERSPEKTIF	Customer
SASARAN	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal
DESKRIPSI SASARAN	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal sangat terkait dengan capaian realisasi penanaman modal, oleh karena itu pemerintah perlu menciptakan iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif untuk menarik minat investor. Selama ini, hambatan utama Indonesia dalam menarik investor adalah inkonsistensi regulasi. Regulasi yang berubah-ubah, tumpang tindih, serta kontradiktif baik antara kementerian dan lembaga maupun antar daerah. Faktor lainnya adalah persoalan pajak, tenaga kerja, hal yang berkaitan dengan perizinan lahan, kurang memadainya infrastruktur nasional baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan inovatif untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif diantaranya dengan memberikan fasilitas fiskal dan kemudahan perizinan berusaha.
INDIKATOR KINERJA	Peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) (peringkat)
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	▪ Peringkat kemudahan berusaha (Doing Business) adalah pemeringkatan negara-negara yang dilakukan untuk mengukur seberapa kondusif kerangka regulasi dan kebijakan yang ada di suatu negara terkait dalam hal dimulainya berusaha dan kegiatan suatu usaha lokal. Survei global ini dilakukan sejak tahun 2012 oleh International Finance Corporation (IFC) /World Bank Group terhadap tidak kurang 180 negara di seluruh dunia. ▪ Survei kemudahan berusaha sejatinya dimaksudkan mendorong ekonomi agar dapat bersaing menuju peraturan yang lebih efisien dengan jalan menawarkan tolok ukur terukur untuk reformasi dan berfungsi sebagai sumber bagi akademisi, jurnalis, periset sektor swasta dan lain-lain yang tertarik pada iklim usaha. Selain itu, survei kemudahan berusaha menawarkan laporan subnasional terperinci, yang secara mendalam mencakup peraturan bisnis dan reformasi di berbagai kota dan wilayah di suatu negara. Laporan ini memberikan data tentang kemudahan berbisnis, memberi peringkat pada setiap lokasi, dan merekomendasikan reformasi untuk memperbaiki kinerja di masing-masing area indikator. Kota-kota yang dipilih dapat membandingkan peraturan bisnis mereka dengan kota-kota lain di ekonomi atau wilayah 190 negara. ▪ Survei menggunakan metodologi standar untuk melihat respon sistem hukum terhadap situasi yang relatif sama (situasi kemudahan berusaha), terlepas dari ragam sistem hukum yang ada di masing-masing negara yang disurvei. Hasil survei dirumuskan dalam 10 parameter, yaitu: a. Memulai usaha b. Mengurus Izin Pembangunan (konstruksi) c. Instalasi Listrik d. Mendaftarkan Tanah e. Memperoleh Kredit f. Perlindungan Terhadap Investor Kecil g. Membayar Pajak h. Perdagangan Lintas Batas i. Penegakan Kontrak j. Penyelesaian Kepailitan
FORMULA PERHITUNGAN / PENGUKURAN	Menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh International Finance Corporation (IFC) /World Bank Group
PENYEDIA DATA	Direktorat Deregulasi Penanaman Moda
SUMBER DATA	International Finance Corporation (IFC) /World Bank Group (https://www.doingbusiness.org/)
TINGKAT VALIDITAS IKU	☐ Lead Input ☐ Lead Proses ☐ Lag Output ☑ Lag Outcome
POLARISASI DATA	☐ Maximize ☑ Minimize ☐ Stabilize
PERHITUNGAN DATA	☐ Akumulasi ☐ Rata-Rata ☑ Nilai Posisi Akhir
PERIODE	☐ Triwulan ☐ Semester ☑ Tahun
METODE CASCADING	☐ Adopsi Langsung ☐ Lingkup Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☑ Buat Baru
TARGET	45
SATUAN	Peringkat
Breakdown Target	
TW-1	0

TW-2	0
TW-3	0
TW-4	45

NILAI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM (PREDIKAT/NILAI)
(Kode : IKSS.03.6)

PERSPEKTIF	Learning & Growth
SASARAN	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani
DESKRIPSI SASARAN	Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan atau wewenang, semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Oleh karena itu birokrasi harus bisa dipahami, melalui peran dan kemampuannya, menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Inti birokrasi yang profesional adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat (public service), sehingga cita-cita, inisiatif dan upaya-upaya perlu diarahkan agar terwujud birokrasi yang bersih, efektif dan melayani.
INDIKATOR KINERJA	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat/nilai)
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	▪ Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (i) kelembagaan atau organisasi; (ii) ketatalaksanaan atau business process; dan (iii) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). ▪ Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM merupakan ukuran perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Investasi/BKPM. ▪ Nilai diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) setiap tahunnya, terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi di Kementerian Investasi/BKPM, yaitu: (i) manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (ii) peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (iii) organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); (iv) tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prisip-prinsip good governance; (v) SDM aparatur; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (vi) akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (vii) pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (viii) pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
FORMULA PERHITUNGAN / PENGUKURAN	Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Investasi/BKPM dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.
PENYEDIA DATA	Biro Umum
SUMBER DATA	Hasil penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan RB
TINGKAT VALIDITAS IKU	☐ Lead Input | ☐ Lead Proses | ☐ Lag Output | ☑ Lag Outcome
POLARISASI DATA	☑ Maximize | ☐ Minimize | ☐ Stabilize
PERHITUNGAN DATA	☐ Akumulasi | ☐ Rata-Rata | ☑ Nilai Posisi Akhir
PERIODE	☐ Triwulan | ☐ Semester | ☑ Tahun
METODE CASCADING	☐ Adopsi Langsung | ☐ Lingkup Dipersempit | ☐ Komponen Pembentuk | ☑ Buat Baru
TARGET	80
SATUAN	Nilai
Breakdown Target	
TW-1	0
TW-2	0
TW-3	0
TW-4	80

OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM (OPINI BPK)
(Kode : IKSS.03.7)

PERSPEKTIF	Learning & Growth
SASARAN	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani
DESKRIPSI SASARAN	Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan atau wewenang, semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Oleh karena itu birokrasi harus bisa dipahami, melalui peran dan kemampuannya, menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Inti birokrasi yang profesional adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat (public service), sehingga cita-cita, inisiatif dan upaya-upaya perlu diarahkan agar terwujud birokrasi yang bersih, efektif dan melayani.
INDIKATOR KINERJA	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK)
DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	Opini atas laporan keuangan hanya dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa BPK RI yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan K/L sekali dalam setahun. Hal yang dilakukan oleh Biro Umum dalam rangka menuju opini WTP adalah melaksanakan seluruh kegiatan pengawasan internal berupa: verifikasi, monitoring, evaluasi serta konsultansi atas pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Biro Umum juga berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan penerapan prosedur atas penyusunan laporan keuangan seluruh satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta melakukan koordinasi dengan tim Inspektorat dalam kegiatan pengawasan yang bersifat preventif.
FORMULA PERHITUNGAN / PENGUKURAN	Opini atas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK
PENYEDIA DATA	Biro Umum
SUMBER DATA	BPK
TINGKAT VALIDITAS IKU	☐ Lead Input ☐ Lead Proses ☐ Lag Output ☑ Lag Outcome
POLARISASI DATA	☐ Maximize ☑ Minimize ☐ Stabilize
PERHITUNGAN DATA	☐ Akumulasi ☐ Rata-Rata ☑ Nilai Posisi Akhir
PERIODE	☐ Triwulan ☐ Semester ☑ Tahun
METODE CASCADING	☐ Adopsi Langsung ☐ Lingkup Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☑ Buat Baru
TARGET	100
SATUAN	Opini BPK
Breakdown Target	
TW-1	0
TW-2	0
TW-3	0
TW-4	100

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
TAHUN 2023

POHON KINERJA

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

Pohon Kinerja dan *Cascading* Kinerja *Outcome* Kementerian Investasi/BKPM

TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Kementerian Investasi (Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi)	**Badan Koordinasi Penanaman Modal** (Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal)
Tugas: Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.	**Tugas:** Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsi: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi; 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Investasi; 4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Investasi; dan 5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Investasi.	**Fungsi:** 1. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional; 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal; 3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal; 4. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; 5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; 6. Pembuatan peta penanaman modal Indonesia; 7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal; 8. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; 9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; 10. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; 11. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; 12. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal; 13. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM; 14. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM; 15. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan 16. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM (1)

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program
1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal ***Indikator:*** *Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)*	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal ***Indikator:*** *a. Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)* *b. Nilai realisasipenanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)* *c. Sebaran penanaman modal berkualitas(di luar Jawa) (%)* *d. Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM (%)*	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal ***Indikator:*** *a. Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)* *b. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)* *c. Sebaran penanaman modal berkualitas(di luar Jawa) (%)* *d. Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM (%)* 2. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal ***Indikator:*** *Kontribusi UMKM terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)* 3. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal ***Indikator:*** *Nilai rencana penanaman modal (Rp Triliun)* 4. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal ***Indikator:*** *Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB (%)*
	2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal ***Indikator:*** *Indeks kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (Indeks)*	5. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal ***Indikator:*** *Indeks kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) atas perencanaan penanaman modal (Indeks)* 6. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal ***Indikator:*** *Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal (Indeks)* 7. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal ***Indikator:*** *a. Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)* *b. Jumlah hari dalam memulai usaha (starting a business) (Hari)* *c. Jumlah prosedur dalam memulai usaha (starting a business) (Prosedur)* 8. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal ***Indikator:*** *a. Persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (%)* *b. Persentase peningkatan sektor unggulan daerah yang dimanfaatkan (%)* 9. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal ***Indikator:*** *Indeks kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal (Indeks)* 10. Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal ***Indikator:*** *Jumlah minat penanaman modal (Minat)* 11. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama penanaman modal ***Indikator:*** *Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal (Indeks)* 12. Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal ***Indikator:*** *Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan)* 13. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal ***Indikator:*** *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal (Indeks)* 14. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal ***Indikator:*** *Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha (%)* 15. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal ***Indikator:*** *Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (Indeks)* 16. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal ***Indikator:*** *Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)* 17. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis ***Indikator:*** *Indeks kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) hilirisasi investasi strategis (Indeks)* 18. Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis ***Indikator:*** *Persentase rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis yang ditindaklanjuti (%)* 19. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal ***Indikator:*** *Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal (Indeks)* 20. Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal ***Indikator:*** *Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)*

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM (2)

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima ***Indikator:*** *Nilai Reformasi Birokrasi (Predikat/Nilai)*	3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani ***Indikator:*** *a. Nilai Reformasi Birokrasi (Predikat/Nilai)* *b. Opini atas laporan keuangan (Opini BPK)*	21. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas ***Indikator:*** *a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (Predikat/Nilai)* *b. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (Opini BPK)* 22. Terwujudnya ASN yang kompeten, profesional dan berintegritas ***Indikator:*** *Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (%)* 23. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas ***Indikator:*** *a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi/BKPM (Predikat/Nilai)* *b. Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi/BKPM (Level)* *c. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi/BKPM (%)* *d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Investasi/BKPM (Nilai)* 24. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama ***Indikator:*** *a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Nilai)* *b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Predikat/Nilai)* *c. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%)* *d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Nilai)* *e. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%)* 25. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal ***Indikator:*** *a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Nilai)* *b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Predikat/Nilai)* *c. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)* *d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Nilai)* *e. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)* 26. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal ***Indikator:*** *a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Nilai)* *b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Predikat/Nilai)* *c. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)* *d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Nilai)* *e. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)* 27. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal ***Indikator:*** *a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (Nilai)* *b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (Predikat/Nilai)* *c. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (%)* *d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (Nilai)* *e. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (%)* 28. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal ***Indikator:*** *a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (Nilai)* *b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (Predikat/Nilai)* *c. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)* *d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (Nilai)* *e. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)*

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM (3)

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima ***Indikator:*** *Nilai Reformasi Birokrasi (predikat/nilai)*	3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani ***Indikator:*** *a. Nilai Reformasi Birokrasi (predikat/nilai)* *b. Opini atas laporan keuangan (Opini BPK)*	29. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal ***Indikator:*** *a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (Nilai)* *b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (Predikat/Nilai)* *c. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)* *d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (Nilai)* *e. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)* 30. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ***Indikator:*** *a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Nilai)* *b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Predikat/Nilai)* *c. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)* *d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Nilai)* *e. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)* 31. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup lingkup Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis ***Indikator:*** *a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (Nilai)* *b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (Predikat/Nilai)* *c. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (%)* *d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (Nilai)* *e. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (%)* 32. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal ***Indikator:*** *a. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (Nilai)* *b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (Predikat/Nilai)* *c. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (%)* *d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (Nilai)* *e. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (%)*

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

Pohon Kinerja
Outcome I

IDENTIFIKASI
CRITICAL SUCCESS FACTOR (CSF) – *OUTCOME* I

SASARAN STRATEGIS I: Meningkatnya realisasi penanaman modal (*OUTCOME* I)
SASARAN STRATEGIS II: Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (*OUTCOME* II)
SASARAN STRATEGIS III: Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (*OUTCOME* III)

***OUTCOME* I: MENINGKATNYA REALISASI PENANAMAN MODAL**		
No.	**Faktor Penyebab (SEBAB/CARA)**	**Kondisi Yang Diperlukan (AKIBAT/HASIL)**
1	Kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan kegiatan penanaman modal di daerah	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal
2	Kebijakan penanaman modal yang kompleks dan inkonsisten menghalangi UMKM untuk beroperasi secara legal	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal
3	Kurangnya rencana promosi yang efektif sehingga pesan dan informasi yang disampaikan tidak menarik minat investor	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal
4	Kurangnya koordinasi antar instansi dalam proses pelayanan penanaman modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal

MENGURAI *CRITICAL SUCCESS FACTOR* (CSF) KEPADA KONDISI ANTARA SAMPAI KE KONDISI OPERASIONAL – *OUTCOME* I

OUTCOME I: MENINGKATNYA REALISASI PENANAMAN MODAL (KODE: SS.01)				
No.	***Critical Success Factor***	**Kode**	**Kondisi Yang Diperlukan**	**Kode**
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal	SP.D1.1	▪ Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	SK.D1.A
			▪ Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II	SK.D1.B
			▪ Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III	SK.D1.C
			▪ Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV	SK.D1.D
			▪ Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V	SK.D1.E
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal	SP.I1.1	▪ Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pemberdayaan usaha	SK.I1.B
3	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal	SP.P1.1	▪ Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa	SK.P1.B
			▪ Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	SK.P1.C
			▪ Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	SK.P1.D
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal	SP.L1.1	▪ Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan perizinan berusaha	SK.L1.A

POHON KINERJA
"MENINGKATNYA REALISASI PENANAMAN MODAL"

- Meningkatnya realisasi penanaman modal **(SS.01)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal **(SP.D1.1)**
    - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I **(SK.D1.A)**
    - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II **(SK.D1.B)**
    - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III **(SK.D1.C)**
    - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV **(SK.D1.D)**
    - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V **(SK.D1.E)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal **(SP.I1.1)**
    - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pemberdayaan usaha **(SK.I1.B)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal **(SP.P1.1)**
    - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa **(SK.P1.B)**
    - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika **(SK.P1.C)**
    - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik **(SK.P1.D)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal **(SP.L1.1)**
    - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan perizinan berusaha **(SK.L1.A)**

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

Cascading Kinerja *Outcome* I

PENUANGAN POHON KINERJA KE KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN

Level Kinerja

Kinerja Strategis Nasional

- Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian

Kinerja Strategis Sektor

- Meningkatnya realisasi penanaman modal **(SS.01)**

Kinerja Strategis Subsektor

- Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal **(SP.D1.1)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I **(SK.D1.A)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II **(SK.D1.B)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III **(SK.D1.C)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV **(SK.D1.D)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V **(SK.D1.E)**
- Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal **(SP.I1.1)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pemberdayaan usaha **(SK.I1.B)**
- Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal **(SP.P1.1)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa **(SK.P1.B)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika **(SK.P1.C)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik **(SK.P1.D)**
- Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal **(SP.L1.1)**
  - Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan perizinan berusaha **(SK.L1.A)**

Kinerja Taktikal

KINERJA STRATEGIS SEKTOR SEBAGAI SASARAN STRATEGIS DAN UKURAN KINERJA MENTERI/LEMBAGA

Kinerja Strategis Sektor	Meningkatnya realisasi penanaman modal (SS.01)

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024				
Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.239,3				
Sasaran Strategis	**Indikator Sasaran Strategis**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya realisasi penanaman modal (SS.01)	1. Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3
	2. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
	3. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	48,3	49,0	49,7	50,6	51,7
	4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	48,8	49,7	50,3	51,9	53,1

KINERJA STRATEGIS SUBSEKTOR SEBAGAI SASARAN PROGRAM DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON I

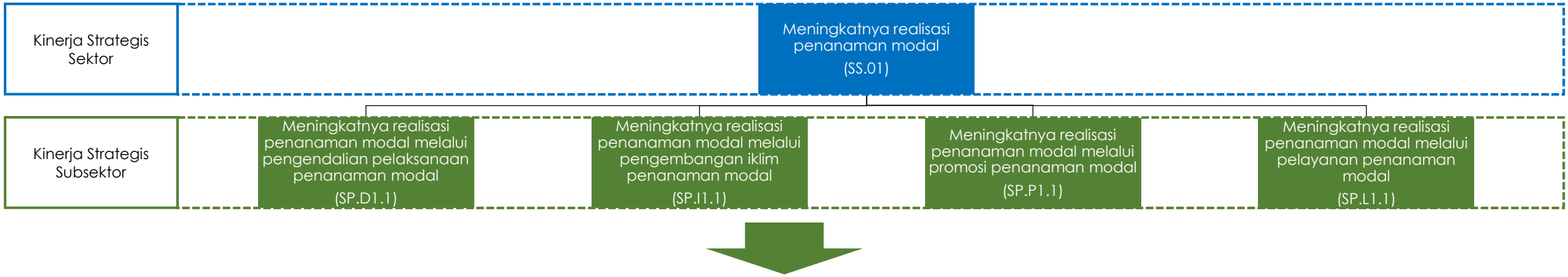

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya realisasi penanaman modal (SS.01)	1. Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3
	2. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
	3. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	48,3	49,0	49,7	50,6	51,7
	4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	48,8	49,7	50,3	51,9	53,1
Sasaran Program	**Indikator Sasaran Program**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D1.1)	1. Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3
	2. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
	3. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	48,3	49,0	49,7	50,6	51,7
	4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	48,8	49,7	50,3	51,9	53,1
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal (SP.I1.1)	Kontribusi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	N/A	N/A	10	15	20
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal (SP.P1.1)	Nilai rencana penanaman modal (Rp Triliun)	1,362	1,430,8	1,614	1,833	2.065,5
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal (SP.L1.1)	Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB (%)	N/A	N/A	30	80	90

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (1)

Kinerja Strategis Subsektor	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D1.1)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal (SP.I1.1)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal (SP.P1.1)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal (SP.L1.1)	
Kinerja Strategis Taktikal	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (SK.D1.A)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (SK.D1.B)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (SK.D1.C)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (SK.D1.D)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (SK.D1.E)

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D1.1)	1. Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3
	2. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
	3. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	48,3	49,0	49,7	50,6	51,7
	4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	48,8	49,7	50,3	51,9	53,1
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (SK.D1.A)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah I (Rp Triliun)	182,0	197,5	193,22	198	223,1
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (SK.D1.B)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah II (Rp Triliun)	210,3	176	217,3	236,5	266,5
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (SK.D1.C)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah III (Rp Triliun)	230,1	328,5	342,45	384,9	433,7
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (SK.D1.D)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah IV (Rp Triliun)	194,8	171,7	202,2	214,5	241,7
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (SK.D1.E)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah V (Rp Triliun)	N/A	N/A	13,22	66	74,4

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (2)

Kinerja Strategis Subsektor	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D1.1)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal (SP.I1.1)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal (SP.P1.1)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal (SP.L1.1)
Kinerja Strategis Taktikal		Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pemberdayaan usaha (SK.I1.B)		

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal (SP.I1.1)	Kontribusi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	N/A	N/A	10	15	20
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pemberdayaan usaha (SK.I1.B)	Kontribusi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	N/A	N/A	10	15	20

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (3)

Kinerja Strategis Subsektor	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D1.1)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal (SP.I1.1)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal (SP.P1.1)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal (SP.L1.1)
Kinerja Strategis Taktikal	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa (SK.P1.B)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P1.C)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P1.D)	

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal (SP.P1.1)	Nilai rencana penanaman modal (Rp Triliun)	1,362	1,430,8	1,614	1,833	2.065,5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa (SK.P1.B)	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa (Rp Triliun)	N/A	N/A	N/A	313,6	353,4
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P1.C)	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (Rp Triliun)	N/A	N/A	N/A	728	820,5
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P1.D)	Nilai rencana penanamanmodal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (Rp Triliun)	N/A	N/A	N/A	791,1	891,6

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (4)

Kinerja Strategis Subsektor	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D1.1)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal (SP.I1.1)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal (SP.P1.1)	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal (SP.L1.1)
Kinerja Strategis Taktikal	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan perizinan berusaha (SK.L1.A)			

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal (SP.L1.1)	Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB (%)	N/A	N/A	30	80	85
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan perizinan berusaha (SK.L1.A)	Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB (%)	N/A	N/A	30	80	85

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

Pohon Kinerja
Outcome II

IDENTIFIKASI
CRITICAL SUCCESS FACTOR (CSF) – *OUTCOME* II

SASARAN STRATEGIS I: Meningkatnya realisasi penanaman modal (*OUTCOME* I)

SASARAN STRATEGIS II: Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (*OUTCOME* II)

SASARAN STRATEGIS III: Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (*OUTCOME* III)

***OUTCOME* II: MENINGKATNYA KEPERCAYAAN PELAKU USAHA/PENANAM MODAL**		
No.	**Faktor Penyebab (SEBAB/CARA)**	**Kondisi Yang Diperlukan (AKIBAT/HASIL)**
1	Tidak melibatkan pelaku usaha dalam proses perencanaan penanaman modal	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal
2	Tidak melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap bidang proyek penanaman modal yang telah direncanakan	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal
3	Tidak adanya kepastian hukum atau ketidakjelasan dalam regulasi pengembangan iklim penanaman modal	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal
4	Rendahnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar dan informasi peluang penanaman modal di daerah	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal
5	Promosi penanaman modal yang dilakukan tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya atau tidak akurat	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal
6	Strategi promosi penanaman modal yang tidak terfokus pada sektor dan negara tertentu	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal
7	Ketidakpastian dalam situasi ekonomi dan politik dapat membuat pelaku usaha ragu-ragu untuk terlibat dalam kerja sama	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama penanaman modal
8	Kurangnya koordinasi antara pemerintah negara asal dan negara tujuan penanaman modal	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal
9	Tidak responsif terhadap pertanyaan dan keluhan pelaku usaha	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal
10	Proses perizinan berusaha yang masih rumit, belum terintegrasi dan lambat	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal
11	Birokrasi yang rumit dan lambat dapat menghambat pengendalian yang efektif dan membuat pelaku usaha merasa terhambat	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal
12	Kurang optimalnya pelaporan kegiatan penanaman modal di daerah	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
13	Insentif yang ditawarkan untuk mendukung hilirisasi tidak cukup menarik bagi pelaku usaha	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis
14	Kurangnya hubungan yang kuat antara industri hulu dan hilir investasi strategis	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis
15	Teknologi informasi tidak mampu mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pelaku usaha	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal
16	Sistem yang tidak terintegrasi dengan baik lintas K/L/D dalam proses penanaman modal	Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal

MENGURAI *CRITICAL SUCCESS FACTOR* (CSF) KEPADA KONDISI ANTARA SAMPAI KE KONDISI OPERASIONAL – *OUTCOME* II (1)

OUTCOME II: MENINGKATNYA KEPERCAYAAN PELAKU USAHA/PENANAM MODAL (KODE: SS.02)				
No.	***Critical Success Factor***	**Kode**	**Kondisi Yang Diperlukan**	**Kode**
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal	SP.R2.1	▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal bidang sumber daya alam	SK.R2.A
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal bidang industri manufaktur	SK.R2.B
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal bidang jasa dan kawasan	SK.R2.C
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal bidang infrastruktur	SK.R2.D
2	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	SP.R3.2	▪ Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal bidang sumber daya alam	SK.R3.A
			▪ Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan penanaman modal bidang industri manufaktur	SK.R3.B
			▪ Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan penanaman modal bidang jasa dan kawasan	SK.R3.C.1
			▪ Meningkatnya penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	SK.R3.C.2
			▪ Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur	SK.R3.D.1
			▪ Meningkatnya fasiltasi percepatan pelaksanaan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	SK.R3.D.2
3	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal	SP.I2.2	▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap deregulasi penanaman modal	SK.I2.A
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pemberdayaan usaha	SK.I2.B
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan potensi daerah	SK.I2.C
4	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	SP.I3.3	▪ Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal melalui perbaikan deregulasi	SK.I3.A
			▪ Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar	SK.I3.B
			▪ Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah	SK.I3.C
5	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal	SP.P2.2	▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan promosi penanaman modal	SK.P2.A
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa	SK.P2.B
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	SK.P2.C
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	SK.P2.D
6	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	SP.P3.3	▪ Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas	SK.P3.A
			▪ Meningkatnya jumlah *awareness*, minat dan rencana investasi di wilayah Amerika dan Eropa	SK.P3.B
			▪ Meningkatnya jumlah *awareness*, minat dan rencana investasi di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	SK.P3.C
			▪ Meningkatnya jumlah *awareness*, minat dan rencana investasi di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	SK.P3.D

MENGURAI *CRITICAL SUCCESS FACTOR* (CSF) KEPADA KONDISI ANTARA SAMPAI KE KONDISI OPERASIONAL – *OUTCOME* II (2)

OUTCOME II: MENINGKATNYA KEPERCAYAAN PELAKU USAHA/PENANAM MODAL (KODE: SS.02)				
No.	***Critical Success Factor***	***Kode***	**Kondisi Yang Diperlukan**	**Kode**
7	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama penanaman modal	SP.K2.1	▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama bilateral di bidang penanaman modal	SK.K2.A
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal	SK.K2.B
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelaksanaan berusaha Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	SK.K2.C
8	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	SP.K3.2	▪ Meningkatnya kerja sama bilateral di bidang penanaman modal	SK.K3.A
			▪ Meningkatnya kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal	SK.K3.B
			▪ Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan berusaha Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	SK.K3.C.1
			▪ Meningkatnya kualitas kinerja pelaksanaan berusaha di pusat dan di daerah	SK.K3.C.2
9	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal	SP.L2.2	▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan perizinan berusaha sektor industri	SK.L2.A
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan perizinan berusaha sektor non industri	SK.L2.B
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pelayanan fasilitas berusaha	SK.L2.C
10	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	SP.L3.3	▪ Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor industri	SK.L3.A.1
			▪ Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di Kementerian Investasi/BKPM	SK.L3.A.2
			▪ Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor non industri	SK.L3.B
			▪ Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas berusaha	SK.L3.C
11	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal	SP.D2.5	▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	SK.D2.A
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II	SK.D2.B
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III	SK.D2.C
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV	SK.D2.D
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V	SK.D2.E
12	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	SP.D3.6	▪ Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	SK.D3.A
			▪ Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II	SK.D3.B
			▪ Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III	SK.D3.C
			▪ Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV	SK.D3.D
			▪ Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V	SK.D3.E

MENGURAI *CRITICAL SUCCESS FACTOR* (CSF) KEPADA KONDISI ANTARA SAMPAI KE KONDISI OPERASIONAL – *OUTCOME* II (3)

OUTCOME II: MENINGKATNYA KEPERCAYAAN PELAKU USAHA/PENANAM MODAL (KODE: SS.02)				
No.	***Critical Success Factor***	**Kode**	**Kondisi Yang Diperlukan**	**Kode**
13	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis	SP.H2.1	▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis di bidang perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan	SK.H2.A
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis bidang minyak dan gas bumi	SK.H2.B
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis di bidang mineral dan batubara	SK.H2.C
14	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	SP.H3.2	▪ Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis di bidang perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan	SK.H3.A
			▪ Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi	SK.H3.B
			▪ Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis di bidang mineral dan batubara	SK.H3.C
15	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal	SP.T2.1	▪ Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission* - OSS)	SK.T2.A
			▪ Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap sistem layanan elektronik, infrastruktur dan jaringan penanaman modal	SK.T2.B
			▪ Meningkatnya kepercayaan pengguna data dan informasi penanaman modal terhadap layanan data dan informasi	SK.T2.C
16	Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	SP.T3.2	▪ Meningkatnya kualitas sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	SK.T3.A
			▪ Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem layanan elektronik, infrastruktur dan jaringan	SK.T3.B
			▪ Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengolahan data penanaman modal	SK.T3.C

POHON KINERJA
“MENINGKATNYA KEPERCAYAAN PELAKU USAHA/PENANAM MODAL”

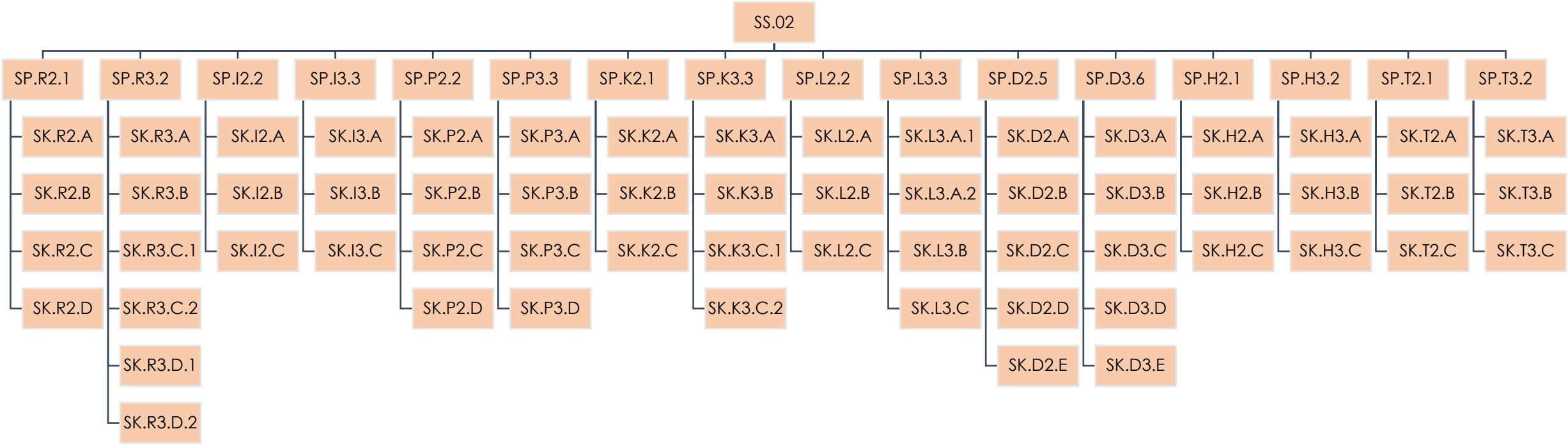

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

Cascading Kinerja *Outcome* II

PENUANGAN POHON KINERJA KE KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN

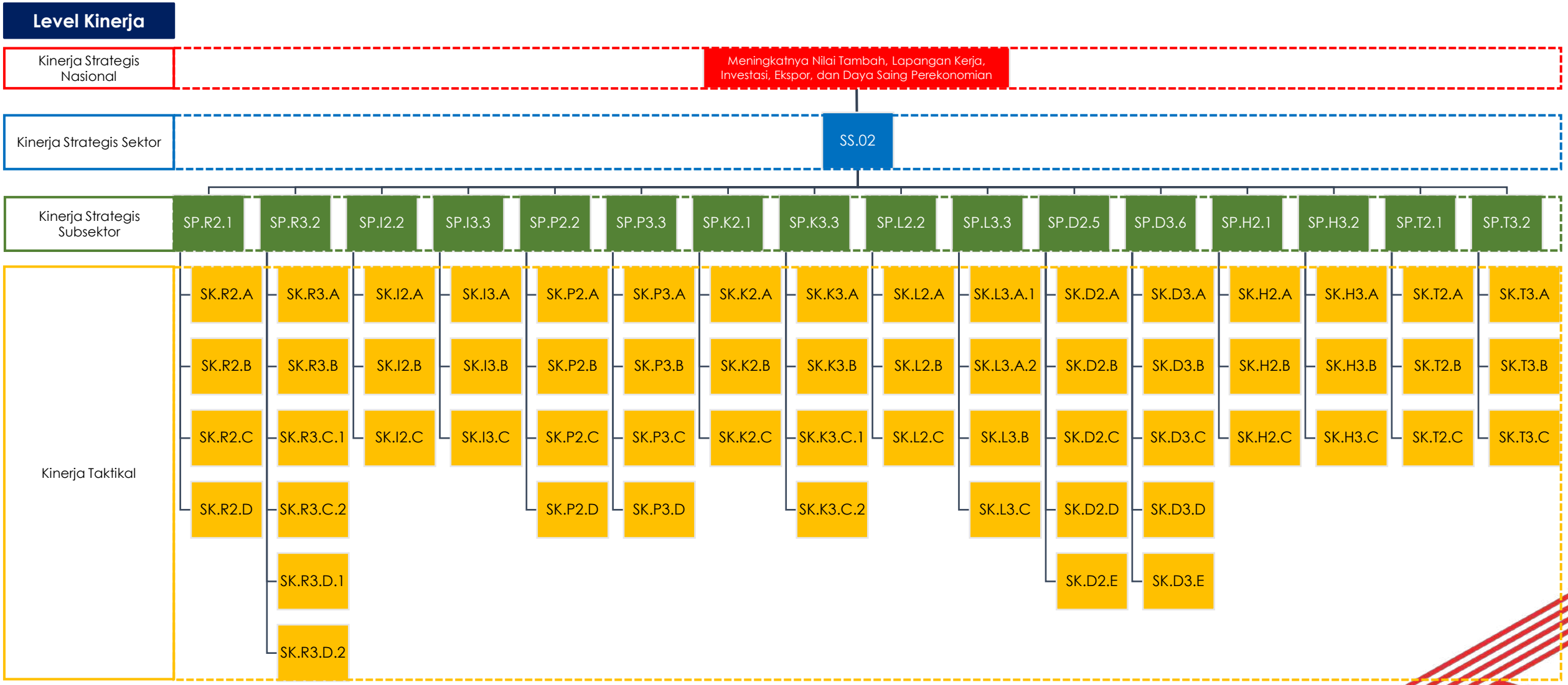

KINERJA STRATEGIS SEKTOR SEBAGAI SASARAN STRATEGIS DAN UKURAN KINERJA MENTERI/LEMBAGA

Kinerja Strategis Sektor	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (SS.02)

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024				
Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.239,3				
Sasaran Strategis	**Indikator Sasaran Strategis**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (SS.02)	Indeks kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (Indeks)	N/A	N/A	N/A	3,5 dari 4,0	3,7 dari 4,0

KINERJA STRATEGIS SUBSEKTOR SEBAGAI SASARAN PROGRAM DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON I (1)

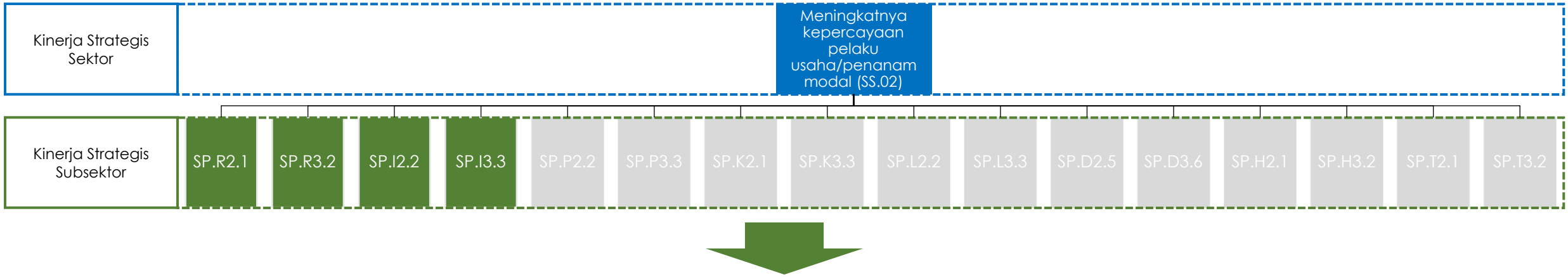

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (SS.02)	Indeks kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (Indeks)	N/A	N/A	N/A	3,5 dari 4,0	3,7 dari 4,0
Sasaran Program	**Indikator Sasaran Program**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal (SP.R2.1)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas perencanaan penanaman modal (indeks)	3,5	3,65	3,75	4,2	4,5
Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal (SP.R3.2)	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal (indeks)	3,5	3,65	3,75	4,2	4,5
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal (SP.I2.2)	1. Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	N/A	N/A	3,2	3,5	3,7
	2. Jumlah hari dalam memulai usaha (*starting a business*) (Hari)	8	6	6	4	3
	3. Jumlah prosedur dalam memulai usaha (*starting a business*) (Prosedur)	10	8	7	5	3
Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal (SP.I3.3)	1. Persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (%)	N/A	N/A	30	32	34
	2. Persentase peningkatan sektor unggulan daerah yang dimanfaatkan (%)	N/A	N/A	N/A	80	85

KINERJA STRATEGIS SUBSEKTOR SEBAGAI SASARAN PROGRAM DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON I (2)

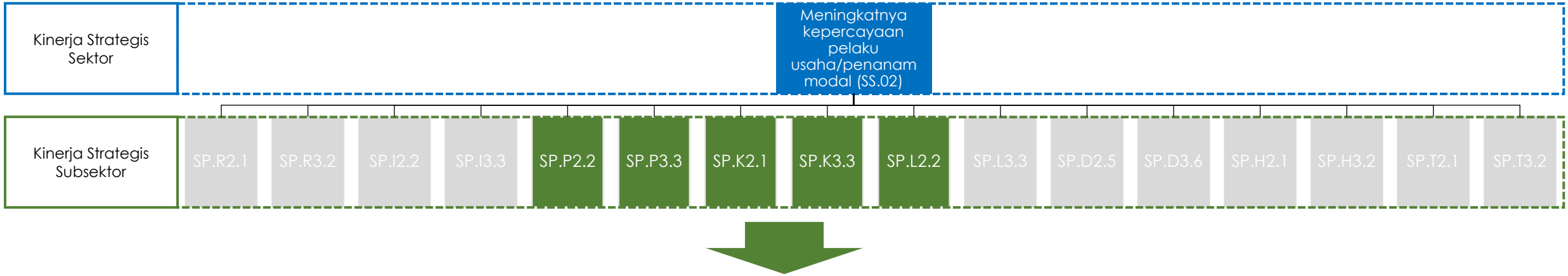

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (SS.02)	Peringkat kemudahan berusaha (Peringkat EoDB)	60	56	51	45	40
Sasaran Program	**Indikator Sasaran Program**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal (SP.P2.2)	Indeks kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal (Indeks)	3,5 dari 5	2,8 dari 4	3,0 dari 4	3,6 dari 4	3,8 dari 4
Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal (SP.P3.3)	Jumlah minat penanaman modal (Minat)	6.900	7.400	7.900	8.450	9.100
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama penanaman modal (SP.K2.1)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal (Indeks)	2,75	3,0	3,3	3,6	3,8
Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal (SP.K3.3)	Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan	50	53	58	64	69
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal (SP.L2.2)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal (Indeks)	3,3	3,35	3,4	3,45	3,5

KINERJA STRATEGIS SUBSEKTOR SEBAGAI SASARAN PROGRAM DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON I (3)

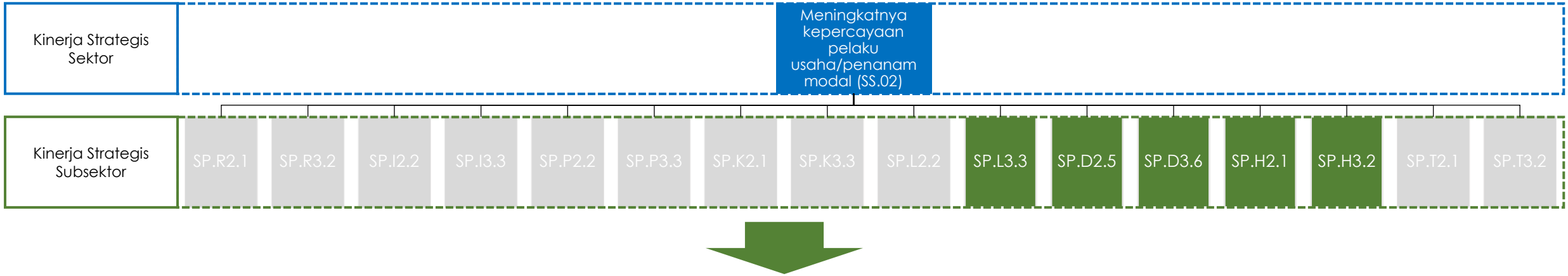

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (SS.02)	Peringkat kemudahan berusaha (Peringkat EoDB)	60	56	51	45	40
Sasaran Program	**Indikator Sasaran Program**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal (SP.L3.3)	Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha (%)	N/A	N/A	70	85	90
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D2.5)	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (Indeks	3,5 dari 5	2,8 dari 4	3 dari 4	3,3 dari 4	3,5 dari 4
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D3.6)	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	67	67	70	79	80
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis (SP.H2.1)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) hilirisasi investasi strategis (Indeks)	N/A	N/A	2,9	3,6	3,8
Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis (SP.H3.2)	Persentase rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis yang ditindaklanjuti (%	N/A	N/A	N/A	100	100

KINERJA STRATEGIS SUBSEKTOR SEBAGAI SASARAN PROGRAM DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON I (4)

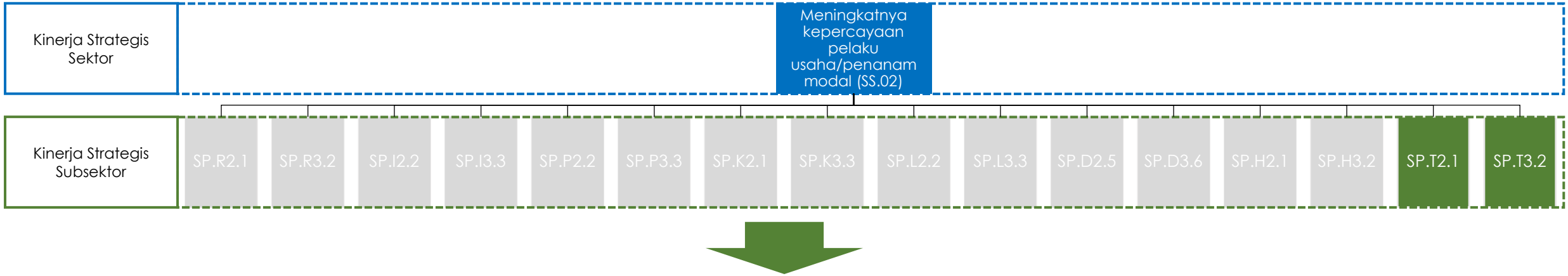

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (SS.02)	Peringkat kemudahan berusaha (Peringkat EoDB)	60	56	51	45	40
Sasaran Program	**Indikator Sasaran Program**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal (SP.T2.1)	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal (Indeks)	N/A	N/A	2,8	3,6	3,8
Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal (SP.T3.2)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	N/A	3,3	3,0	3,0	3,5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (1)

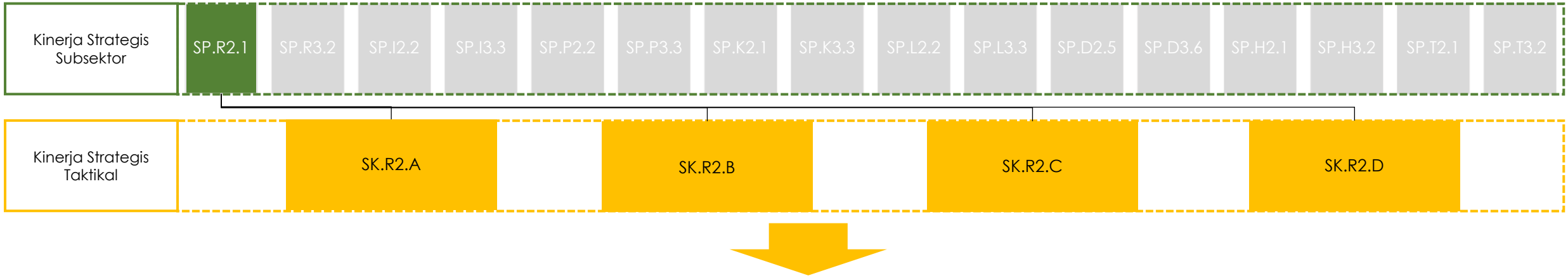

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal (SP.R2.1)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas perencanaan penanaman modal (indeks)	3,5	3,65	3,75	4,2	4,5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal bidang sumber daya alam (SK.R2.A)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas perencanaan penanaman modal bidang sumber daya alam (indeks)	3,5	3,65	3,75	4,2	4,5
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal bidang industri manufaktur (SK.R2.B)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas perencanaan penanaman modal bidang industri manufaktur (indeks)	3,5	3,65	3,75	4,2	4,5
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal bidang jasa dan kawasan (SK.R2.C)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas perencanaan penanaman modal bidang jasa dan kawasan (indeks)	3,5	3,65	3,75	4,2	4,5
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal bidang infrastruktur (SK.R2.D)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas perencanaan penanaman modal bidang infrastruktur (indeks)	3,5	3,65	3,75	4,2	4,5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (2)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.3	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal	SK.R3.A	SK.R3.B	SK.R3.C.1	SK.R3.C.2	SK.R3.D.1	SK.R3.D.2										

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal (SP.R3.2)	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal (indeks)	3,5	3,65	3,75	4,2	4,5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal bidang sumber daya alam (SK.R3.A)	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal bidang sumber daya alam (indeks)	3,5	3,65	3,75	4,2	4,5
Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan penanaman modal bidang industri manufaktur (SK.R3.B)	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal bidang industri manufaktur (indeks)	3,5	3,65	3,75	4,2	4,5
Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan penanaman modal bidang jasa dan kawasan (SK.R3.C.1)	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal bidang jasa dan kawasan (indeks)	3,5	3,65	3,75	4,2	4,5
Meningkatnya penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (SK.R3.C.2)	Persentase penyelesaian masalah strategis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur (SK.R3.D.1)	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur (indeks)	3,5	3,65	3,75	4,2	4,5
Meningkatnya fasiltasi percepatan pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (SK.R3.D.2)	Persentase rencana proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (3)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.3	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal			SK.I2.A				SK.I2.B				SK.I2.C					

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal (SP.I2.2)	Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	N/A	N/A	3,2	3,5	3,7
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap deregulasi penanaman modal (SK.I2.A)	Indeks kepuasan stakeholder atas perbaikan deregulasi penanaman modal (indeks)	N/A	N/A	3,2	3,8	3,9
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pemberdayaan usaha (SK.I2.B)	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar (indeks)	N/A	3	3,2	3,4	3,6
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan potensi daerah (SK.I2.C)	Indeks kualitas informasi potensi investasi di daerah (indeks)	3,5	3,1	3,2	3,3	3,5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (4)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.3	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal			SK.I3.A				SK.I3.B					SK.I3.C				

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal (SP.I3.3)	1. Jumlah hari dalam memulai usaha (*starting a business*) (Hari)	8	6	6	4	3
	2. Jumlah prosedur dalam memulai usaha (*starting a business*) (Prosedur)	10	8	7	5	3
	3. Persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (%)	N/A	N/A	30	32	34
	4. Persentase peningkatan sektor unggulan daerah yang dimanfaatkan (%)	N/A	N/A	N/A	80	85
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal melalui perbaikan deregulasi (SK.I3.A)	Persentase rekomendasi peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar (SK.I3.B)	Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (%)	N/A	100	30	32	34
Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah (SK.I3.C)	Persentase peningkatan sektor unggulan daerah yang dimanfaatkan (%)	N/A	N/A	N/A	80	85

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (5)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.3	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal		SK.P2.A			SK.P2.B			SK.P2.C			SK.P2.D					

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal (SP.P2.2)	Indeks kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal (Indeks)	3,5 dari 5	2,8 dari 4	3,0 dari 4	3,6 dari 4	3,8 dari 4
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan promosi penanaman modal (SK.P2.A)	Indeks kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal (indeks)	3,5	2,8	3,0	3,7	3,8
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa (SK.P2.B)	Indeks kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa (indeks)	N/A	N/A	3,0	3,3	3,8
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P2.C)	Indeks kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (indeks)	N/A	N/A	3,0	3,6	3,8
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P2.D)	Indeks kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (indeks)	N/A	N/A	3,0	3,6	3,8

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (6)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.3	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal		SK.P3.A			SK.P3.B				SK.P3.C				SK.P3.D			

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal (SP.P3.3)	Jumlah minat penanaman modal (Minat)	6.900	7.400	7.900	8.450	9.100
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas (SK.P3.A)	Jumlah minat penanaman modal hasil berbagai kegiatan promosi penanaman modal (minat)	N/A	N/A	3.349	2.157	2.323
Meningkatnya jumlah *awareness*, minat dan rencana investasi di wilayah Amerika dan Eropa (SK.P3.B)	Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa (minat)	N/A	N/A	1.352	1.077	1.160
Meningkatnya jumlah *awareness*, minat dan rencana investasi di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P3.C)	Jumlah minat penanaman modal hasil kegiatan promosi di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (minat)	N/A	N/A	1.737	2.500	2.692
Meningkatnya jumlah *awareness*, minat dan rencana investasi di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P3.D)	Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (minat)	N/A	N/A	1.462	2.716	2.925

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (7)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.3	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal			SK.K2.A				SK.K2.B				SK.K2.C					

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama penanaman modal (SP.K2.1)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal (Indeks)	2,75	3,0	3,3	3,6	3,8
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama bilateral di bidang penanaman modal (SK.K2.A)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama bilateral (indeks)	N/A	3,0	3,0	3,6	3,8
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal (SK.K2.B)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama regional dan multilateral (indeks)	N/A	3,0	3,1	3,6	3,8
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelaksanaan berusaha Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (SK.K2.C)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pelaksanaan berusaha (indeks)	N/A	3,0	3,0	3,6	3,8

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (8)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.2	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal		SK.K3.A			SK.K3.B				SK.K3.C.1				SK.K3.C.2			

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal (SP.K3.2)	Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan)	50	53	58	64	69
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kerja sama bilateral di bidang penanaman modal (SK.K3.A)	Kesepakatan/perjanjian kerja sama bilateral yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/ perundingan)	N/A	N/A	39	40	43
Meningkatnya kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal (SK.K3.B)	Kesepakatan/perjanjian kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/ perundingan)	N/A	N/A	19	24	26
Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan berusaha Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (SK.K3.C.1)	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pelaksanaan berusaha di bidang penanaman modal yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	50	50	60
Meningkatnya kualitas kinerja pelaksanaan berusaha di pusat dan di daerah (SK.K3.C.2)	Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja (%)	N/A	50	50	50	60

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (9)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.2	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal			SK.L2.A			SK.L2.B					SK.L2.C					

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal (SP.L2.2)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal (Indeks)	3,3	3,35	3,4	3,45	3,5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan perizinan berusaha sektor industri (SK.L2.A)	Indeks kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor industri (indeks)	N/A	N/A	3,0	3,45	3,5
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan perizinan berusaha sektor non industri (SK.L2.B)	Indeks kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor non industri (indeks)	N/A	N/A	3,4	3,4	3,5
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan fasilitas berusaha (SK.L2.C)	Indeks kualitas pelayanan fasilitas berusaha (indeks)	N/A	N/A	3,4	3,5	3,5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (10)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.2	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal		SK.L3.A.1			SK.L3.A.2				SK.L3.B				SK.L3.C			

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal (SP.L3.3)	Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha (%)	N/A	N/A	70	85	90
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor industri (SK.L3.A.1)	Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha sektor industri (%)	N/A	N/A	70	85	90
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di Kementerian Investasi/BKPM (SK.L3.A.2)	Persentase hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan PTSP Pusat di Kementerian Investasi/BKPM yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor non industri (SK.L3.B)	Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha sektor non industri (%)	N/A	N/A	70	85	90
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas berusaha (SK.L3.C)	Persentase badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (*masterlist*, *tax allowance* atau *tax holiday*) (%)	100	100	100	100	100

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (11)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.2	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal		SK.D2.A		SK.D2.B		SK.D2.C		SK.D2.D		SK.D2.E						

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D2.5)	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (Indeks)	3,5 dari 5	2,8 dari 4	3,0 dari 4	3,3 dari 4	3,5 dari 4
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (SK.D2.A)	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (indeks)	3,5	2,8	3,0	3,1	3,5
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (SK.D2.B)	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (indeks)	3,5	2,8	3,0	3,3	3,5
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (SK.D2.C)	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (indeks)	3,5	2,8	3,0	3,3	3,5
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (SK.D2.D)	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (indeks)	3,5	2,8	3,0	3,4	3,5
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (SK.D2.E)	Indeks kepuasan pelaku usaha /penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (indeks)	N/A	N/A	3,0	3,3	3,5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (12)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.2	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal		SK.D3.A		SK.D3.B		SK.D3.C		SK.D3.D		SK.D3.E						

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D3.6)	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	67	67	70	79	80
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (SK.D3.A)	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah I (%)	67	67	70	70	72
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (SK.D3.B)	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah II (%)	67	67	70	85	86
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (SK.D3.C)	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah III (%)	67	67	70	100	100
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (SK.D3.D)	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah IV (%)	67	67	70	70	72
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (SK.D3.E)	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah V (%)	67	67	70	70	72

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (14)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.2	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal			SK.H2.A			SK.H2.B					SK.H2.C					

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis (SP.H2.1)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) hilirisasi investasi strategis (Indeks)	N/A	N/A	2,9	3,6	3,8
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis di bidang perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan (SK.H2.A)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) hilirisasi investasi strategis bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan (indeks)	N/A	N/A	N/A	3,6	3,8
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis bidang minyak dan gas bumi (SK.H2.B)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi (indeks)	N/A	N/A	N/A	3,6	3,8
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis di bidang mineral dan batubara (SK.H2.C)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) hilirisasi investasi strategis di bidang mineral dan batubara (indeks)	N/A	N/A	N/A	3,6	3,8

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (13)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.2	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal			SK.H3.A			SK.H3.B					SK.H3.C					

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis (SP.H3.1)	Persentase rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis di bidang perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan (SK.H3.A)	Persentase rencana aksi nasional bidang perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi (SK.H3.B)	Persentase rencana aksi nasional sektor minyak dan gas bumi yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	100	100
Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis di bidang mineral dan batubara (SK.H3.C)	Persentase rencana aksi nasional sektor mineral dan batubara yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	100	100

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (15)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.2	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal			SK.T2.A			SK.T2.B					SK.T2.C					

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal (SP.T2.1)	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal (Indeks)	N/A	N/A	2,8	3,6	3,8
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission* - OSS) (SK.T2.A)	Indeks kepuasan pengguna layanan berbantuan *Online Single Submission* (OSS) (Indeks)	N/A	N/A	2,5	3,2	3,8
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap sistem layanan elektronik, infrastruktur dan jaringan penanaman modal (SK.T2.B)	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal (indeks)	N/A	N/A	2,8	3,6	3,8
Meningkatnya kepercayaan pengguna data dan informasi penanaman modal terhadap layanan data dan informasi (SK.T2.C)	Indeks kepuasan pengguna layanan data dan informasi (indeks)	N/A	N/A	2,8	3,1	3,8

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (16)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.R2.1	SP.R3.2	SP.I2.2	SP.I3.3	SP.P2.2	SP.P3.3	SP.K2.1	SP.K3.2	SP.L2.2	SP.L3.3	SP.D2.5	SP.D3.6	SP.H2.1	SP.H3.2	SP.T2.1	SP.T3.2
Kinerja Strategis Taktikal			SK.T3.A			SK.T3.B					SK.T3.C					

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal (SP.T3.1)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	N/A	3,3	3,0	3,0	3,5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kualitas sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (SK.T3.A)	Persentase Peningkatan Pengguna Sistem *Online Single Submission* (OSS) (%)	N/A	N/A	N/A	25	30
Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem layanan elektronik, infrastruktur dan jaringan (SK.T3.B)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	N/A	3,3	3,0	3,0	3,5
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengolahan data penanaman modal (SK.T3.C)	Persentase pengguna data dan informasi penanaman modal (%)	N/A	N/A	75	97,96	100

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

Pohon Kinerja *Outcome* III

IDENTIFIKASI
CRITICAL SUCCESS FACTOR (CSF) – *OUTCOME* III

SASARAN STRATEGIS I: Meningkatnya realisasi penanaman modal (*OUTCOME* I)
SASARAN STRATEGIS II: Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal (*OUTCOME* II)
SASARAN STRATEGIS III: Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (*OUTCOME* III)

***OUTCOME* III: TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN MELAYANI**		
No.	**Faktor Penyebab (SEBAB/CARA)**	**Kondisi Yang Diperlukan (AKIBAT/HASIL)**
1	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas
2	Kurangnya pelatihan dan kesempatan pengembangan keterampilan	Terwujudnya ASN yang kompeten, profesional dan berintegritas
3	Kurangnya komitmen dari pimpinan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas
4	Kurangnya kesadaran dan kepahaman tentang akuntabilitas	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
5	Kinerja tidak terhubung dengan rencana strategis organisasi secara keseluruhan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
6	Sasaran dan indikator kinerja tidak ditetapkan secara jelas dan spesifik	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
7	Tidak ada sistem yang efektif untuk mengukur dan memantau kinerja	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
8	Tidak ada keterlibatan yang cukup dari unit yang terkait dengan kinerja	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
9	Tanggung jawab dan wewenang tidak terdefinisi dengan baik	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
10	Tidak ada pengawasan yang memadai terhadap kinerja	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
11	Tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup lingkup Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
12	Kurangnya dukungan teknologi dan sistem informasi	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal

MENGURAI *CRITICAL SUCCESS FACTOR* (CSF) KEPADA KONDISI ANTARA SAMPAI KE KONDISI OPERASIONAL – *OUTCOME* III (1)

OUTCOME III: TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN MELAYANI (KODE: SS.03)				
No.	***Critical Success Factor***	***Kode***	**Kondisi Yang Diperlukan**	**Kode**
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas	SP.S2.1	▪ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui layanan umum yang berkualitas	SK.S2.E
2	Terwujudnya ASN yang kompeten, profesional dan berintegritas	SP.S3.3	▪ Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal	SK.S3.E
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas	SP.S3.4	▪ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	SK.S2.A
			▪ Meningkatnya kepatuhan pegawai dan institusi Kementerian Investasi/BKPM terhadap peraturan perundang-undangan	SK.S3.F
			▪ Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal	SK.S3.E
			▪ Meningkatnya pelayanan hubungan masyarakat	SK.S3.C.1
			▪ Meningkatnya pelayanan informasi perizinan berusaha berbasis risiko	SK.S3.C.2
			▪ Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan tata usaha pimpinan	SK.S3.D
			▪ Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Investasi/BKPM dan aparatur daerah bidang penanaman modal	SK.S3.G
			▪ Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum penanaman modal	SK.S3.B
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	SP.S4.12	▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Perencanaan Program dan Anggaran	SK.S4.A
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Hukum	SK.S4.B
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	SK.S4.C
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Protokol dan Tata Usaha	SK.S4.D
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Umum	SK.S4.E
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Inspektorat	SK.S4.F
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan	SK.S4.G

MENGURAI *CRITICAL SUCCESS FACTOR* (CSF) KEPADA KONDISI ANTARA SAMPAI KE KONDISI OPERASIONAL – *OUTCOME* III (2)

OUTCOME III: TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN MELAYANI (KODE: SS.03)				
No.	***Critical Success Factor***	***Kode***	**Kondisi Yang Diperlukan**	**Kode**
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	SP.R4.7	▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam	SK.R4.A
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur	SK.R4.B
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan	SK.R4.C
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Infrastruktur	SK.R4.D
6	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	SP.I4.8	▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	SK.I4.A
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha	SK.I4.B
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pengembangan Potensi Daerah	SK.I4.C
7	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	SP.P4.6	▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pengembangan Promosi	SK.P4.A
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa	SK.P4.B
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	SK.P4.C
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	SK.P4.D
8	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	SP.K4.6	▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Bilateral	SK.K4.A
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral	SK.K4.B
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	SK.K4.C

MENGURAI *CRITICAL SUCCESS FACTOR* (CSF) KEPADA KONDISI ANTARA SAMPAI KE KONDISI OPERASIONAL – *OUTCOME* III (2)

OUTCOME III: TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN MELAYANI (KODE: SS.03)				
No.	***Critical Success Factor***	***Kode***	**Kondisi Yang Diperlukan**	**Kode**
9	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	SP.L4.6	▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	SK.L4.A
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	SK.L4.B
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha	SK.L4.C
10	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	SP.D4.14	▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah I	SK.D4.A
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah II	SK.D4.B
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah III	SK.D4.C
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah IV	SK.D4.D
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah V	SK.D4.E
11	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	SP.H4.5	▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	SK.H4.A
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi	SK.H4.B
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara	SK.H4.C
12	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	SP.T3.7	▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Sistem Perizinan Berusaha	SK.T4.A
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan	SK.T4.B
			▪ Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Data dan Informasi	SK.T4.C

POHON KINERJA
“TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN MELAYANI”

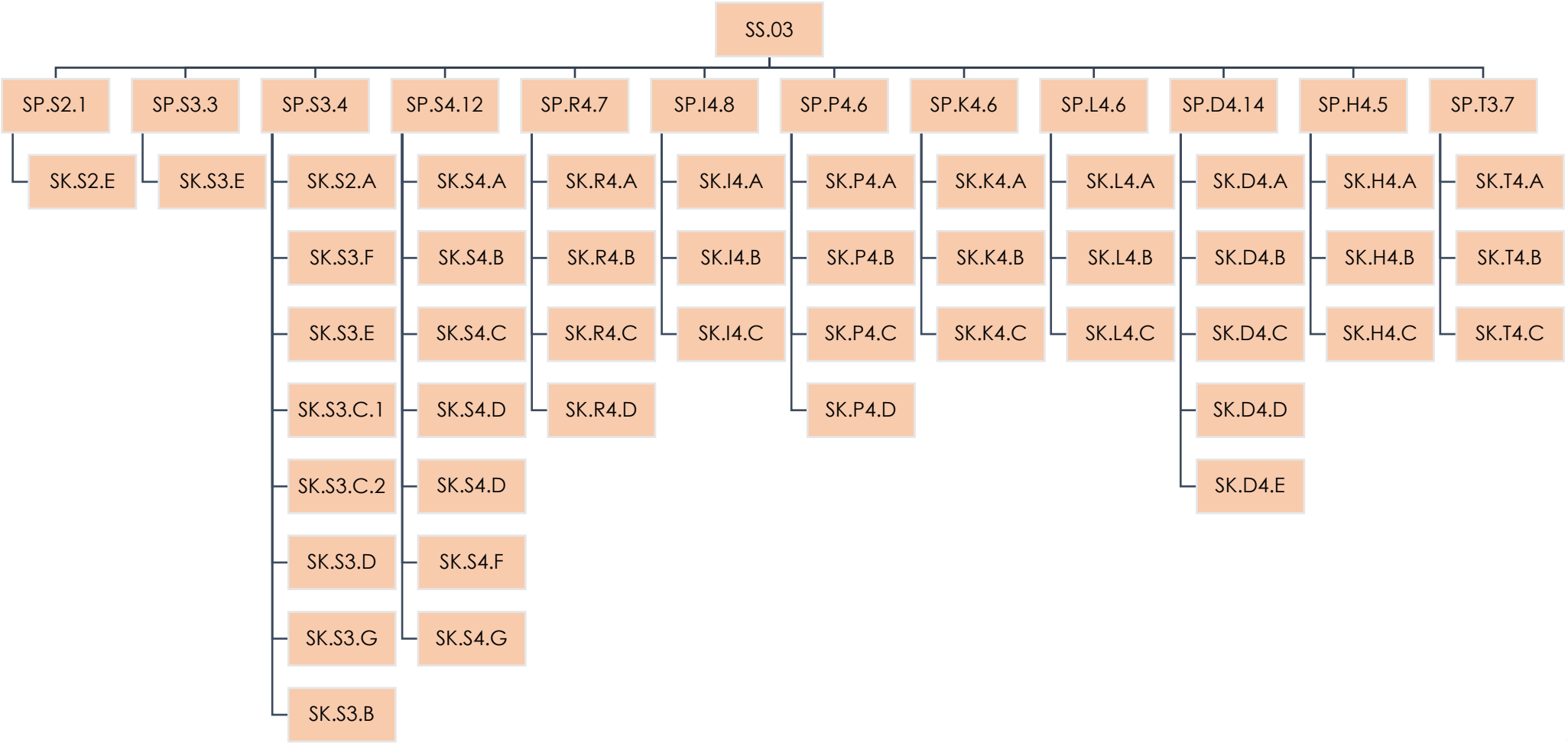

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

Cascading Kinerja *Outcome* II

PENUANGAN POHON KINERJA KE KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN

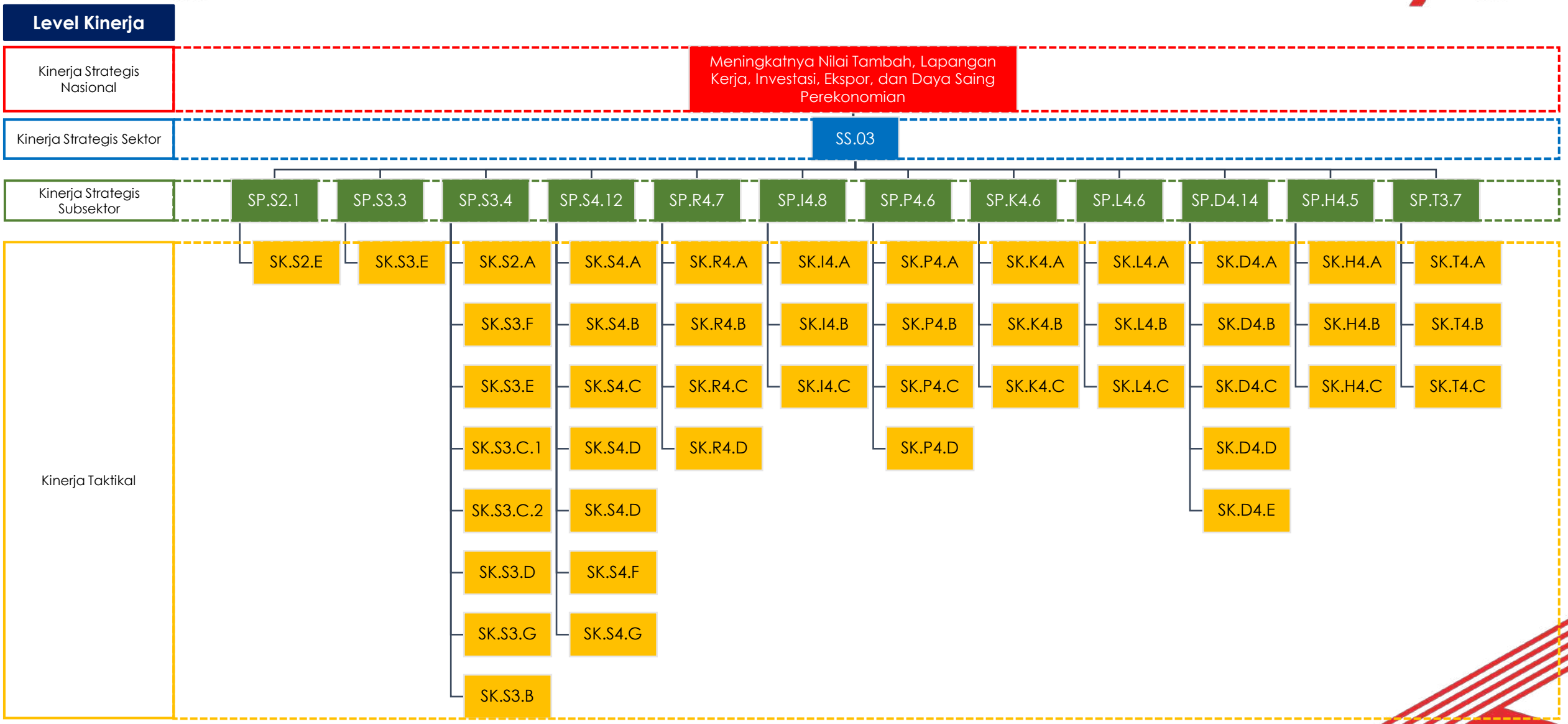

KINERJA STRATEGIS SEKTOR SEBAGAI SASARAN STRATEGIS DAN UKURAN KINERJA MENTERI/LEMBAGA

Kinerja Strategis Sektor	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS.03)

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024				
Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima	Nilai Reformasi Birokrasi (predikat/nilai)	A (>80%-90%)				
Sasaran Strategis	**Indikator Sasaran Strategis**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS.03)	1. Nilai Reformasi BirokrasiKementerian Investasi/BKPM (Predikat/Nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
	2. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

KINERJA STRATEGIS SUBSEKTOR SEBAGAI SASARAN PROGRAM DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON I (1)

Kinerja Strategis Sektor	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS.03)											
Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS.03)	1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (Predikat/Nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
	2. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran Program	**Indikator Sasaran Program**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas (SP.S2.1)	1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (Predikat/Nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
	2. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Terwujudnya ASN yang kompeten, profesional dan berintegritas (SP.S3.3)	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (%)	70	72,5	72,5	75	77,5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas (SP.S3.4)	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi/BKPM (Predikat/Nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
	2. Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi/BKPM (Level)	3	3	3	3	3
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi/BKPM (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Investasi/BKPM (Nilai)	N/A	N/A	70	85	90

KINERJA STRATEGIS SUBSEKTOR SEBAGAI SASARAN PROGRAM DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON I (2)

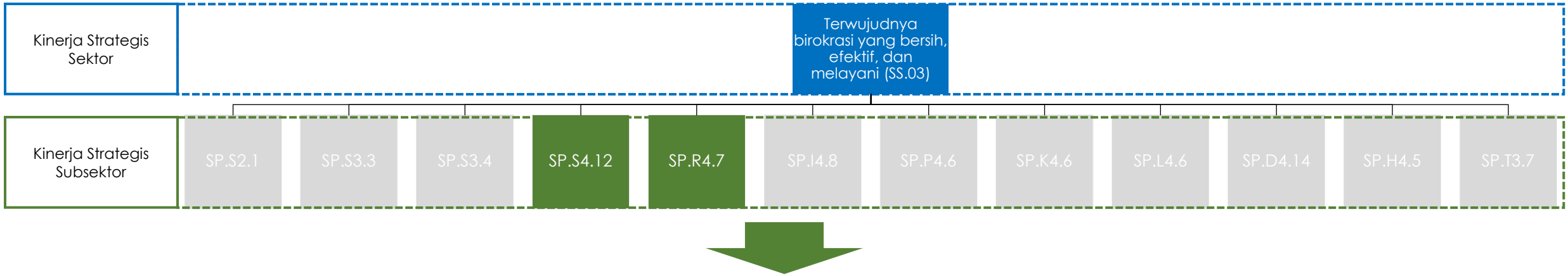

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS.03)	1. Nilai Reformasi Birokrasi (predikat/nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
	2. Opini atas laporan keuangan BKPM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran Program	**Indikator Sasaran Program**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (SP.S4.12)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	82
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	87
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (SP.R4.7)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	82
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	87
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS SUBSEKTOR SEBAGAI SASARAN PROGRAM DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON I (3)

ASEAN INDONESIA 2023 | KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM | DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA 78 TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

Kinerja Strategis Sektor: Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS.03)

Kinerja Strategis Subsektor: SP.S2.1 | SP.S3.3 | SP.S3.4 | SP.S4.12 | SP.R4.7 | **SP.I4.8** | **SP.P4.6** | SP.K4.6 | SP.L4.6 | SP.D4.14 | SP.H4.5 | SP.T3.7

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS.03)	1. Nilai Reformasi Birokrasi (predikat/nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
	2. Opini atas laporan keuangan BKPM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran Program	**Indikator Sasaran Program**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (SP.I4.8)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	82
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	87
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (SP.P4.6)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	82
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	87
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS SUBSEKTOR SEBAGAI SASARAN PROGRAM DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON I (4)

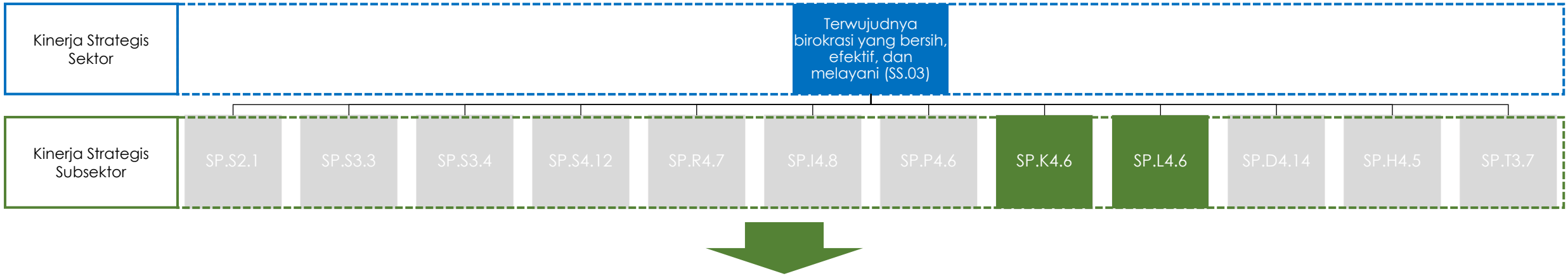

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS.03)	1. Nilai Reformasi Birokrasi (predikat/nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
	2. Opini atas laporan keuangan BKPM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran Program	**Indikator Sasaran Program**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (SP.K4.6)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	82
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	87
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (SP.L4.6)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	82
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	87
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS SUBSEKTOR SEBAGAI SASARAN PROGRAM DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON I (5)

Kinerja Strategis Sektor	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS.03)
Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1 · SP.S3.3 · SP.S3.4 · SP.S4.12 · SP.R4.7 · SP.I4.8 · SP.P4.6 · SP.K4.6 · SP.L4.6 · SP.D4.14 · SP.H4.5 · SP.T3.7

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS.03)	1. Nilai Reformasi Birokrasi (predikat/nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
	2. Opini atas laporan keuangan BKPM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran Program	**Indikator Sasaran Program**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (SP.K4.6)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	82
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	87
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (SP.L4.6)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	82
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	87
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS SUBSEKTOR SEBAGAI SASARAN PROGRAM DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON I (6)

Kinerja Strategis Sektor	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS.03)											
Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS.03)	1. Nilai Reformasi Birokrasi (predikat/nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
	2. Opini atas laporan keuangan BKPM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran Program	**Indikator Sasaran Program**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (SP.T3.7)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	82
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	87
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (1)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal						SK.S2.E						

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas (SP.S2.1)	1. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (Predikat/Nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
	2. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui layanan umum yang berkualitas (SK.S2.E)	1. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (Predikat/Nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
	2. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (2)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal						SK.S3.E						

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya ASN yang kompeten, profesional dan berintegritas (SP.S3.3)	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (%)	70	72,5	72,5	75	77,5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal (SK.S3.E)	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (%)	70	72,5	72,5	75	77,5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (3)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal	SK.S2.A	SK.S3.F	SK.S3.E	SK.S3.C.1	SK.S3.C.2	SK.S3.D	SK.S3.G	SK.S3.B				

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas (SP.S3.4)	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi/BKPM (Predikat/Nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
	2. Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi/BKPM (Level)	3	3	3	3	3
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi/BKPM (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Investasi/BKPM (Nilai)	N/A	N/A	70	85	90
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan program dan anggaran yang berkualitas (SK.S2.A)	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi/BKPM (Predikat/Nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi/BKPM (%)	90	90	90	90	90
Meningkatnya kepatuhan pegawai dan institusi Kementerian Investasi/BKPM terhadap peraturan perundang-undangan (SK.S3.F)	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi/BKPM (level)	3	3	3	3	3
Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal (SK.S3.E)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Investasi/BKPM (Nilai)	N/A	N/A	70	85	87
Meningkatnya pelayanan hubungan masyarakat (SK.S3.C.1)	Nilai keterbukaan informasi badan publik (nilai)	N/A	N/A	50	75	80
Meningkatnya pelayanan informasi perizinan berusaha berbasis risiko (SK.S3.C.2)	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan informasi perizinan berusaha berbasis risiko (indeks)	N/A	N/A	3	3,1	3,2
Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan tata usaha pimpinan (SK.S3.D)	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi/BKPM (Nilai)	N/A	N/A	N/A	60	65
Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Investasi/BKPM dan aparatur daerah bidang penanaman modal (SK.S3.G)	Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal (indeks)	7,6	7,6	7,8	8	8,2
Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum penanaman modal (SK.S3.B)	Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan (indeks)	3,3	3	3	3,3	3,5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (4a)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal	SK.S2.A	SK.S2.B	SK.S2.C	SK.S2.D	SK.S2.E	SK.S2.F	SK.S2.G					

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (SP.S4.12)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	82
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	87
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%)	5	5	5	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Perencanaan Program dan Anggaran (SK.S4.A)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Perencanaan Program dan Anggaran (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan Program dan Anggaran TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Hukum (SK.S4.B)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Hukum (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Biro Hukum TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (SK.S4.C)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Biro Komunikasi dan Layanan Informasi TA 2022 (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (4b)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal	SK.S2.A	SK.S2.B	SK.S2.C	SK.S2.D	SK.S2.E	SK.S2.F	SK.S2.G					

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (SP.S4.12)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	82
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	87
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%)	5	5	5	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Protokol dan Tata Usaha (SK.S4.D)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Protokol dan Tata Usaha (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Biro Protokol dan Tata Usaha TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Umum (SK.S4.E)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Umum (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Biro Umum TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Inspektorat (SK.S2.F)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Inspektorat TA 2022 (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (4c)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal	SK.S2.A	SK.S2.B	SK.S2.C	SK.S2.D	SK.S2.E	SK.S2.F	SK.S2.G					

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (SP.S4.12)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	82
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	87
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%)	5	5	5	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan (SK.S4.G)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan TA 2022 (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (5a)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal		SK.R4.A			SK.R4.B			SK.R4.C			SK.R4.D	

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (SP.R4.7)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	80	80	80	80	80
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	70	85	90
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam (SK.R4.A)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur (SK.R4.B)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur TA 2022 (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (5b)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal		SK.R4.A		SK.R4.B			SK.R4.C			SK.R4.D		

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (SP.R4.7)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	80	80	80	80	80
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	70	85	90
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan (SK.R4.C)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Infrastruktur (SK.R4.D)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Perencanaan Infrastruktur (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Perencanaan Infrastruktur TA 2022 (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (6)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal		SK.I4.A				SK.I4.B			SK.I4.C			

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (SP.I4.8)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	80	80	80	80	80
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	70	85	90
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Deregulasi Penanaman Modal (SK.I4.A)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Deregulasi Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Deregulasi Penanaman Modal TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (SK.I4.B)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pengembangan Potensi Daerah (SK.I4.C)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pengembangan Potensi Daerah (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pengembangan Potensi Daerah TA 2022 (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (7a)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal		SK.P4.A		SK.P4.B				SK.P4.C		SK.P4.D		

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (SP.P4.6)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	80	80	80	80	80
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	70	85	90
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pengembangan Promosi (SK.P4.A)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pengembangan Promosi (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pengembangan Promosi TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa (SK.P4.B)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa TA 2022 (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (7b)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal		SK.P4.A		SK.P4.B			SK.P4.C			SK.P4.D		

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (SP.P4.6)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	80	80	80	80	80
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	70	85	90
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P4.C)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P4.D)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik TA 2022 (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (8)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal		SK.K4.A			SK.K4.B				SK.K4.C			

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (SP.K4.6)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	80	80	80	80	80
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	70	85	90
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Bilateral (SK.K4.A)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Kerja Sama Bilateral (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Kerja Sama Bilateral TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral (SK.K4.B)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha (SK.K4.C)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha TA 2022 (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (9)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal		SK.L4.A			SK.L4.B				SK.L4.C			

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (SP.L4.6)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	80	80	80	80	80
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	70	85	90
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri (SK.L4.A)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri (SK.L4.B)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha (SK.L4.C)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha TA 2022 (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (10a)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal		SK.D4.A		SK.D4.B		SK.D4.C			SK.D4.D		SK.D4.E	

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (SP.D4.14)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	80	80	80	80	80
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	70	85	90
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah I (SK.D4.A)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah I (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah I TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah II (SK.D4.B)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah II (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah II TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah III (SK.D4.C)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah III (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah III TA 2022 (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (10b)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal		SK.D4.A		SK.D4.B		SK.D4.C				SK.D4.D	SK.D4.E	

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (SP.D4.14)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Nilai)	30	30	30	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	80	80	80	80	80
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	90	90	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	70	85	90
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	5	5	5	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah IV (SK.D4.D)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah IV (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah IV TA 2022 (%)	5	5	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah V (SK.D4.E)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah V (%)	90	90	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah V TA 2022 (%)	5	5	5	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (11)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal		SK.H4.A			SK.H4.B				SK.H4.C			

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (SP.H4.5)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (Nilai)	N/A	N/A	N/A	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	80
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (%)	N/A	N/A	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	90
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (%)	N/A	N/A	N/A	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (SK.H4.A)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (%)	N/A	N/A	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan TA 2022 (%)	N/A	N/A	N/A	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi (SK.H4.B)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi (%)	N/A	N/A	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi TA 2022 (%)	N/A	N/A	N/A	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara (SK.H4.C)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara (%)	N/A	N/A	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara TA 2022 (%)	N/A	N/A	N/A	5	5

KINERJA STRATEGIS TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN UKURAN KINERJA JABATAN ESELON II (12)

Kinerja Strategis Subsektor	SP.S2.1	SP.S3.3	SP.S3.4	SP.S4.12	SP.R4.7	SP.I4.8	SP.P4.6	SP.K4.6	SP.L4.6	SP.D4.14	SP.H4.5	SP.T3.7
Kinerja Strategis Taktikal		SK.T4.A				SK.T4.B			SK.T4.C			

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (SP.T4.6)	1. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	N/A	30	30
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (Predikat/Nilai)	N/A	N/A	N/A	80	80
	3. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (%)	N/A	N/A	90	90	90
	4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (Nilai)	N/A	N/A	N/A	85	90
	5. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (%)	N/A	N/A	N/A	5	5
Sasaran Kegiatan	**Indikator Sasaran Kegiatan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Sistem Perizinan Berusaha (SK.T4.A)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Sistem Perizinan Berusaha (%)	N/A	N/A	90	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Sistem Perizinan Berusaha TA 2022 (%)	N/A	N/A	5	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan (SK.T4.B)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan (%)	N/A	N/A	N/A	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan TA 2022 (%)	N/A	N/A	N/A	5	5
Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Data dan Informasi (SK.T4.C)	1. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	N/A	N/A	N/A	80	82
	2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Data dan Informasi (%)	N/A	N/A	N/A	90	90
	3. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Data dan Informasi TA 2022 (%)	N/A	N/A	N/A	5	5

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

Terima Kasih

Kementerian Investasi/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44,
Jakarta 12190 – Indonesia
T: +62 21 525 2008
F: +62 21 525 4945
E: info@bkpm.go.id
Bkpm.go.id
investindonesia.go.id

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.099,8
		2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	483,9
		3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	50,6
		4	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	51,9
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	5	Peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) (peringkat)	45
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat/nilai)	80
		7	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK)	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.099,8
		2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	483,9
		3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	50,6
		4	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	51,9
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal	5	Indeks kepuasan pelaku usaha /penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (indeks)	3,3
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	6	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	79
		7	Persentase tingkat kepatuhan badan usaha atas penggunaan fasilitas penanaman modal dan/atau melaksanakan ketentuan peraturan penanaman modal (%)	80
		8	Persentase badan usaha yang mendapatkan layanan pendampingan keberlanjutan investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70
		9	Persentase badan usaha yang menerima fasilitas penanaman modal dalam rangka eksekusi realisasi investasi (%)	70
		10	Persentase penanganan kasus dalam rangka percepatan investasi yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	70
		11	Persentase perusahaan investasi besar yang bermitra dengan UMKM (%)	100
		12	Persentase potensi realisasi proyek mangkrak yang dapat diselesaikan	75

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		12	permasalahannya (%)	75
		13	Persentase proyek yang dipantau perkembangan realisasinya pada 34 provinsi dalam rangka dekonsentrasi (%)	80
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	14	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (nilai)	30
		15	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (predikat / nilai)	80
		16	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	90
		17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (nilai)	85
		18	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	5

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal	1	Kontribusi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (%)	15
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal	2	Indeks kualitas iklim penanaman modal (Indeks)	3,5
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	3	Jumlah hari dalam memulai usaha / starting a business (hari)	4
		4	Jumlah prosedur dalam memulai usaha / starting a business (prosedur)	5
		5	Persentase rekomendasi peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti (%)	100
		6	Persentase peningkatan sektor unggulan daerah yang dimanfaatkan (%)	80
		7	Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan (%)	32
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (nilai)	30
		9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (predikat / nilai)	80
		10	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	90
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (nilai)	85
		12	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal	1	Nilai rencana penanaman modal hasil berbagai kegiatan promosi penanaman modal (Rp Triliun)	1.833
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal	2	Indeks kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal (indeks)	3,6
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	3	Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal (minat)	8.450
		4	Persentase perusahaan asing yang berhasil difasilitasi untuk melakukan relokasi dan diversifikasi geografis ke Indonesia (%)	100
		5	Persentase rekomendasi sektor dalam kegiatan pemasaran investasi terfokus yang ditindaklanjuti (%)	100
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	6	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (nilai)	36,22
		7	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (predikat / nilai)	80
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (%)	90
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (nilai)	85
		10	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (%)	5

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal	1	Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB (%)	80
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal (indeks)	3,45
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	3	Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha (%)	85
		4	Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan konsultasi berbantuan Online Single Submission (%)	85
		5	Persentase badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (masterlist, tax allowance atau tax holiday) (%)	100
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	6	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (nilai)	30
		7	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (predikat / nilai)	80
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	90
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (nilai)	85
		10	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (%)	5

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal	1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) atas perencanaan penanaman modal (indeks)	4,2
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	2	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal (indeks)	4,2
		3	Persentase rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang ditindaklanjuti (%)	61
		4	Persentase Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang ditindaklanjuti (%)	61
		5	Persentase rencana proyek penanaman modal yang difasilitasi (%)	100
		6	Persentase peta peluang investasi (PPI) yang ditindaklanjuti (%)	61
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	7	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	30
		8	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (predikat / nilai)	80
		9	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	90
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	85
		11	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap kerja sama penanaman modal	1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal (indeks)	3,6
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	2	Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan)	58
		3	Persentase kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal dalam dan luar negeri yang disepakati (%)	50
		4	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pelaksanaan berusaha di bidang penanaman modal yang ditindaklanjuti (%)	50
		5	Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja (%)	50
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	6	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (nilai)	30
		7	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (predikat / nilai)	80
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)	90
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (nilai)	85
		10	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (%)	5

ASEAN INDONESIA 2023 | KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA
TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis	1	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) hilirisasi investasi strategis (indeks)	3,6
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	2	Persentase rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan tindaklanjuti (%)	100
		3	Persentase rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis yang ditindaklanjuti (%)	100
		4	Persentase rencana proyek hilirisasi investasi strategis yang difasilitasi (%)	100
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	5	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (nilai)	30
		6	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (predikat / nilai)	80
		7	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (%)	90
		8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (nilai)	85
		9	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (%)	5

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal	1	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal (indeks)	3,63
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3
		3	Indeks kepuasan pengguna Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) (Indeks)	3,2
		4	Persentase sinkronisasi/koordinasi integrasi sistem K/L/D pada sistem OSS (%)	80
		5	Persentase sistem internal yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM (%)	100
		6	Tingkat keamanan jaringan internet di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM (%)	100
		7	Persentase pengguna data dan informasi penanaman modal (%)	97,96
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi	8	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Teknologi Informasi (nilai)	30
		9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Teknologi Informasi (predikat / nilai)	80
		10	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Teknologi Informasi (%)	90
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi (nilai)	85
		12	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi (%)	5

ASEAN INDONESIA 2023

KEMENTERIAN INVESTASI/ BKPM

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas	1	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat / nilai)	80
		2	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK)	3
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
2	Terwujudnya ASN Kementerian Investasi/BKPM yang kompeten, profesional, dan berintegritas	3	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kementerian Investasi/BKPM (%)	75
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas	4	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi/BKPM (predikat / nilai)	80
		5	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi/BKPM (level)	3
		6	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi/BKPM (%)	90
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Investasi/BKPM (nilai)	85
		8	Nilai keterbukaan informasi badan publik (nilai)	75
		9	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi/BKPM (Nilai)	60
		10	Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal (indeks)	8
		11	Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan (indeks)	3,3
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	12	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (nilai)	30
		13	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (predikat / nilai)	80
		14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%)	90
		15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (nilai)	85
		16	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%)	5

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
TAHUN 2023

CASCADING KINERJA

MATRIKS *CASCADING* INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM TAHUN 2023

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
Meningkatnya realisasi penanaman modal (SS.01)	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Triliun	1.099,8	Adopsi Langsung	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D1.1)	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Triliun	1.099,8	Sama Persis	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (SK.D1.A)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah I	Rp Triliun	198	Akumulasi	Direktorat Wilayah I
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (SK.D1.B)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah II	Rp Triliun	236,5	Akumulasi	Direktorat Wilayah II
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (SK.D1.C)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah III	Rp Triliun	384,9	Akumulasi	Direktorat Wilayah III
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (SK.D1.D)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah IV	Rp Triliun	214,5	Akumulasi	Direktorat Wilayah IV
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (SK.D1.E)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah V	Rp Triliun	66	Akumulasi	Direktorat Wilayah V
				Buat Baru	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal (SP.P1.1)	Nilai rencana penanaman modal	Rp Triliun	1,833	Kontribusi	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa (SK.P1.B)	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa	Rp Triliun	313,6	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P1.C)	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	Rp Triliun	728	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah AATA
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P1.D)	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	Rp Triliun	791,1	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah AASP
				Buat Baru	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal (SP.L1.1)	Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB	%	80	Sama Persis	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Adopsi Langsung	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan perizinan berusaha (SK.L1.A)	Persentase Nomor Induk Berusaha(NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB (%)	%	80	Kontribusi	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder	Rp Triliun	483,9	Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D1.1)	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Triliun	1.099,8	Kontribusi	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (SK.D1.A)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah I	Rp Triliun	198	Akumulasi	Direktorat Wilayah I
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (SK.D1.B)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah II	Rp Triliun	236,5	Akumulasi	Direktorat Wilayah II
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (SK.D1.C)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah III	Rp Triliun	384,9	Akumulasi	Direktorat Wilayah III
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (SK.D1.D)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah IV	Rp Triliun	214,5	Akumulasi	Direktorat Wilayah IV
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (SK.D1.E)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah V	Rp Triliun	66	Akumulasi	Direktorat Wilayah V
				Buat Baru	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal (SP.P1.1)	Nilai rencana penanaman modal	Rp Triliun	1,833	Kontribusi	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa (SK.P1.B)	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa	Rp Triliun	313,6	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P1.C)	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	Rp Triliun	728	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah AATA
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Asia	Rp Triliun	791,1	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah AASP

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
												modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P1.D)	Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik				
				Buat Baru	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal (SP.L1.1)	Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB	%	80	Sama Persis	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Adopsi Langsung	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan perizinan berusaha (SK.L1.A)	Persentase Nomor Induk Berusaha(NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB (%)	%	80	Kontribusi	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	%	50,6	Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D1.1)	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Triliun	1.099,8	Kontribusi	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (SK.D1.A)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah I	Rp Triliun	198	Akumulasi	Direktorat Wilayah I
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (SK.D1.B)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah II	Rp Triliun	236,5	Akumulasi	Direktorat Wilayah II
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (SK.D1.C)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah III	Rp Triliun	384,9	Akumulasi	Direktorat Wilayah III
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (SK.D1.D)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah IV	Rp Triliun	214,5	Akumulasi	Direktorat Wilayah IV
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (SK.D1.E)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah V	Rp Triliun	66	Akumulasi	Direktorat Wilayah V
				Buat Baru	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal (SP.P1.1)	Nilai rencana penanaman modal	Rp Triliun	1,833	Kontribusi	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa (SK.P1.B)	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa	Rp Triliun	313,6	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P1.C)	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	Rp Triliun	728	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah AATA
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P1.D)	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	Rp Triliun	791,1	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah AASP
				Buat Baru	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal (SP.L1.1)	Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB	%	80	Sama Persis	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Adopsi Langsung	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan perizinan berusaha (SK.L1.A)	Persentase Nomor Induk Berusaha(NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB (%)	%	80	Kontribusi	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM	%	51,9	Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D1.1)	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Triliun	1.099,8	Kontribusi	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (SK.D1.A)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah I	Rp Triliun	198	Akumulasi	Direktorat Wilayah I
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (SK.D1.B)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah II	Rp Triliun	236,5	Akumulasi	Direktorat Wilayah II
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (SK.D1.C)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah III	Rp Triliun	384,9	Akumulasi	Direktorat Wilayah III
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (SK.D1.D)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah IV	Rp Triliun	214,5	Akumulasi	Direktorat Wilayah IV
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (SK.D1.E)	Nilai realisasi penanaman modal di Wilayah V	Rp Triliun	66	Akumulasi	Direktorat Wilayah V
				Buat Baru	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengembangan iklim penanaman modal (SP.I1.1)	Kontribusi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	%	15	Sama Persis	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Adopsi Langsung	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pemberdayaan usaha (SK.I1.B)	Kontribusi Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	%	15	Sama Persis	Direktorat Pemberdayaan Usaha
				Buat Baru	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui	Nilai rencana penanaman modal	Rp Triliun	1,833	Kontribusi	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa	Rp Triliun	313,6	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
					promosi penanaman modal (SP.P1.1)							modal di wilayah Amerika dan Eropa (SK.P1.B)					
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P1.C)	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	Rp Triliun	728	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah AATA
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P1.D)	Nilai rencana penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	Rp Triliun	791,1	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah AASP
				Buat Baru	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan penanaman modal (SP.L1.1)	Persentase Nomor Induk Berusaha (NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB	%	80	Sama Persis	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Adopsi Langsung	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pelayanan perizinan berusaha (SK.L1.A)	Persentase Nomor Induk Berusaha(NIB) UMK perseorangan yang diterbitkan melalui kegiatan fasilitasi layanan NIB (%)	%	80	Kontribusi	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal (SS.02)	Indeks kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	Indeks	3,5	Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal (SP.R2.1)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas perencanaan penanaman modal	Indeks	4,2	Formula Indeks	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal bidang sumber daya alam (SK.R2.A)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas perencanaan penanaman modal bidang sumber daya alam (indeks)	Indeks	4,2	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal bidang industri manufaktur (SK.R2.B)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas perencanaan penanaman modal bidang industri manufaktur (indeks)	Indeks	4,2	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal bidang jasa dan kawasan (SK.R2.C)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas perencanaan penanaman modal bidang jasa dan kawasan (indeks)	Indeks	4,2	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap perencanaan penanaman modal bidang infrastruktur (SK.R2.D)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas perencanaan penanaman modal bidang infrastruktur (indeks)	Indeks	4,2	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
				Buat Baru	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal (SP.R3.2)	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal	Indeks	4,2	Formula Indeks	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal bidang sumber daya alam (SK.R3.A)	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal bidang sumber daya alam	Indeks	4,2	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan penanaman modal bidang industri manufaktur (SK.R3.B)	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal bidang industri manufaktur	Indeks	4,2	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan penanaman modal bidang jasa dan kawasan (SK.R3.C.1)	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal bidang jasa dan kawasan	Indeks	4,2	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
											Buat Baru	Meningkatnya penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (SK.R3.C.2)	Persentase penyelesaian masalah strategis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang difasilitasi	%	100	Kontribusi	
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur (SK.R3.D.1)	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur	Indeks	4,2	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
											Buat Baru	Meningkatnya fasiltasi percepatan pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (SK.R3.D.2)	Persentase rencana proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang difasilitasi	%	100	Kontribusi	
				Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan iklim penanaman modal (SP.I2.2)	Indeks kualitas iklim penanaman modal	Indeks	3,5	Formula Indeks	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap deregulasi penanaman modal (SK.I2.A)	Indeks kepuasan stakeholder atas perbaikan deregulasi penanaman modal	Indeks	3,8	Formula Indeks	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pemberdayaan usaha (SK.I2.B)	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar	Indeks	3,4	Formula Indeks	Direktorat Pemberdayaan Usaha

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan potensi daerah (SK.I2.C)	Indeks kualitas informasi potensi investasi di daerah	Indeks	3,3	Formula Indeks	Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
				Buat Baru	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal (SP.I3.3)	Jumlah hari dalam memulai usaha (*starting a business*)	Hari	4	Kontribusi	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Buat Baru	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal melalui perbaikan deregulasi (SK.I3.A)	Persentase rekomendasi peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti	%	100	Kontribusi	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
						Jumlah prosedur dalam memulai usaha (*starting a business*)	Prosedur	5	Kontribusi		Buat Baru						
						Persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	%	32	Kontribusi		Adopsi Langsung	Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar (SK.I3.B)	Persentase realisasi kesepakatan perusahaan PMA/PMDN yang bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	%	32	Sama Persis	Direktorat Pemberdayaan Usaha
						Persentase peningkatan sektor unggulan daerah yang dimanfaatkan	%	80	Kontribusi		Adopsi Langsung	Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah (SK.I3.C)	Persentase peningkatan sektor unggulan daerah yang dimanfaatkan	%	80	Sama Persis	Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
				Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal (SP.P2.2)	Indeks kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal	Indeks	3,6	Formula Indeks	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengembangan promosi penanaman modal (SK.P2.A)	Indeks kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal	Indeks	3,7	Formula Indeks	Direktorat Pengembangan Promosi
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa (SK.P2.B)	Indeks kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa	Indeks	3,3	Formula Indeks	Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P2.C)	Indeks kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	Indeks	3,6	Formula Indeks	Direktorat Promosi Wilayah AATA
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P2.D)	Indeks kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	Indeks	3,6	Formula Indeks	Direktorat Promosi Wilayah AASP
				Buat Baru	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal (SP.P3.3)	Jumlah minat penanaman modal	Minat	8.450	Kontribusi	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Komponen Pembentuk	Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas (SK.P3.A)	Jumlah minat penanaman modal hasil berbagai kegiatan promosi penanaman modal	Minat	2.157	Akumulasi	Direktorat Pengembangan Promosi
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya jumlah awareness, minat dan rencana investasi di wilayah Amerika dan Eropa (SK.P3.B)	Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa	Minat	1.077	Akumulasi	Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya jumlah awareness, minat dan rencana investasi di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P3.C)	Jumlah minat penanaman modal hasil kegiatan promosi di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	Minat	2.500	Akumulasi	Direktorat Promosi Wilayah AATA
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya jumlah awareness, minat dan rencana investasi di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P3.D)	Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	Minat	2.716	Akumulasi	Direktorat Promosi Wilayah AASP
				Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama penanaman modal (SP.K2.1)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama penanaman modal	Indeks	3,6	Formula Indeks	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama bilateral di bidang penanaman modal (SK.K2.A)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama bilateral	Indeks	3,6	Formula Indeks	Direktorat Kerja Sama Bilateral
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal (SK.K2.B)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kerja sama regional dan multilateral	Indeks	3,6	Formula Indeks	Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelaksanaan berusaha Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (SK.K2.C)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas pelaksanaan berusaha	Indeks	3,6	Formula Indeks	Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
				Buat Baru	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal (SP.K3.2)	Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	kesepakatan/ perjanjian/ perundingan	64	Kontribusi	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Komponen Pembentuk	Meningkatnya kerja sama bilateral di bidang penanaman modal (SK.K3.A)	Kesepakatan/perjanjian kerja sama bilateral yang telah diimplementasikan	kesepakatan/ perjanjian/ perundingan	40	Akumulasi	Direktorat Kerja Sama Bilateral
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal (SK.K3.B)	Kesepakatan/perjanjian kerja sama regional dan multilateral di bidang penanaman modal yang telah diimplementasikan	kesepakatan/ perjanjian/ perundingan	24	Akumulasi	Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral
											Buat Baru	Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan berusaha Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (SK.K3.C.1)	Persentase rekomendasi kebijakan teknis pelaksanaan berusaha di bidang penanaman modal yang ditindaklanjuti	%	50	Kontribusi	Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha
											Buat Baru	Meningkatnya kualitas kinerja pelaksanaan berusaha di pusat dan di daerah (SK.K3.C.2)	Persentase DPMPTSP yang mendapatkan hasil penilaian dengan minimal kategori Baik berdasarkan penetapan penilaian kinerja	%	50	Kontribusi	
				Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal (SP.L2.2)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	Indeks	3,45	Formula Indeks	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan perizinan berusaha sektor industri (SK.L2.A)	Indeks kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor industri	Indeks	3,45	Formula Indeks	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan perizinan berusaha sektor non industri (SK.L2.B)	Indeks kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor non industri	Indeks	3,4	Formula Indeks	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pelayanan fasilitas berusaha (SK.L2.C)	Indeks kualitas pelayanan fasilitas berusaha	Indeks	3,5	Formula Indeks	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha
				Buat Baru	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal (SP.L3.3)	Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha	%	85	Kontribusi	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor industri (SK.L3.A.1)	Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha sektor industri	%	85	Formula Indeks	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
											Buat Baru	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di Kementerian Investasi/BKPM (SK.L3.A.2)	Persentase hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan PTSP Pusat di Kementerian Investasi/BKPM yang ditindaklanjuti	%	100	Kontribusi	
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha sektor non industri (SK.L3.B)	Persentase peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha sektor non industri	%	85	Formula Indeks	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri
											Buat Baru	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas berusaha (SK.L3.C)	Persentase badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (*masterlist*, *tax allowance* atau *tax holiday*)	%	100	Kontribusi	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha
				Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D2.5)	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Indeks	3,3	Formula Indeks	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (SK.D2.A)	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	Indeks	3,1	Formula Indeks	Direktorat Wilayah I
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (SK.D2.B)	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II	Indeks	3,3	Formula Indeks	Direktorat Wilayah II
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (SK.D2.C)	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III	Indeks	3,3	Formula Indeks	Direktorat Wilayah III
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (SK.D2.D)	Indeks kepuasan pelaku usaha/penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV	Indeks	3,4	Formula Indeks	Direktorat Wilayah IV

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (SK.D2.E)	Indeks kepuasan pelaku usaha /penanam modal atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V	Indeks	3,3	Formula Indeks	Direktorat Wilayah V
				Buat Baru	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (SP.D3.6)	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya	%	79	Kontribusi	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Komponen Pembentuk	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (SK.D3.A)	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah I	%	70	Formula Indeks	Direktorat Wilayah I
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (SK.D3.B)	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah II	%	85	Formula Indeks	Direktorat Wilayah II
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (SK.D3.C)	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah III	%	100	Formula Indeks	Direktorat Wilayah III
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (SK.D3.D)	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah IV	%	70	Formula Indeks	Direktorat Wilayah IV
											Komponen Pembentuk	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (SK.D3.E)	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya di Wilayah V	%	70	Formula Indeks	Direktorat Wilayah V
				Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis (SP.H2.1)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) hilirisasi investasi strategis	Indeks	3,6	Formula Indeks	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis di bidang perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan (SK.H2.A)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) hilirisasi investasi strategis bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan	Indeks	3,6	Formula Indeks	Direktorat Hilirisasi, Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis bidang minyak dan gas bumi (SK.H2.B)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi	Indeks	3,6	Formula Indeks	Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap hilirisasi investasi strategis di bidang mineral dan batubara (SK.H2.C)	Indeks kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*) hilirisasi investasi strategis di bidang mineral dan batubara	Indeks	3,6	Formula Indeks	Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara
				Buat Baru	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis (SP.H3.1)	Persentase rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis yang ditindaklanjuti	%	100	Formula Indeks	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis di bidang perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan (SK.H3.A)	Persentase rencana aksi nasional bidang perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan yang ditindaklanjuti (%)	%	100	Formula Indeks	Direktorat Hilirisasi, Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi (SK.H3.B)	Persentase rencana aksi nasional sektor minyak dan gas bumi yang ditindaklanjuti	%	100	Formula Indeks	Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis di bidang mineral dan batubara (SK.H3.C)	Persentase rencana aksi nasional sektor mineral dan batubara yang ditindaklanjuti	%	100	Formula Indeks	Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara
				Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap teknologi informasi penanaman modal (SP.T2.1)	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal	Indeks	3,6	Formula Indeks	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission* - OSS) (SK.T2.A)	Indeks kepuasan pengguna layanan berbantuan *Online Single Submission* (OSS)	Indeks	3,2	Formula Indeks	Direktorat Sistem Perizinan Berusaha
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap sistem layanan elektronik, infrastruktur dan jaringan penanaman modal (SK.T2.B)	Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi penanaman modal	Indeks	3,6	Formula Indeks	Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan
											Lingkup Dipersempit	Meningkatnya kepercayaan pengguna data dan informasi penanaman modal terhadap layanan data dan informasi (SK.T2.C)	Indeks kepuasan pengguna layanan data dan informasi	Indeks	3,1	Formula Indeks	Direktorat Data dan Informasi

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
				Buat Baru	Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal (SP.T3.1)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,0	Kontribusi	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	Buat Baru	Meningkatnya kualitas sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (SK.T3.A)	Persentase Peningkatan Pengguna Sistem *Online Single Submission* (OSS)	%	25	Kontribusi	Direktorat Sistem Perizinan Berusaha
											Adopsi Langsung	Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem layanan elektronik, infrastruktur dan jaringan (SK.T3.B)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,0	Sama Persis	Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan
											Buat Baru	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengolahan data penanaman modal (SK.T3.C)	Persentase pengguna data dan informasi penanaman modal	%	97,96	Kontribusi	Direktorat Data dan Informasi
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani (SS.03)	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM	Predikat/Nilai	A (80)	Adopsi Langsung	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas (SP.S2.1)	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM	Predikat/Nilai	A (80)	Sama Persis	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Adopsi Langsung	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui layanan umum yang berkualitas (SK.S2.E)	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM	Predikat/Nilai	A (80)	Sama Persis	Biro Umum
				Buat Baru	Terwujudnya ASN yang kompeten, profesional dan berintegritas (SP.S3.3)	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	%	75	Kontribusi	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Adopsi Langsung	Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal (SK.S3.E)	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	%	75	Sama Persis	Biro Umum
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas (SP.S3.4)	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi/BKPM	Predikat/Nilai	A (>80%-90%)	Sama Persis	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Adopsi Langsung	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan program dan anggaran yang berkualitas (SK.S2.A)	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi/BKPM	Predikat/Nilai	A (>80%-90%)	Sama Persis	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
											Buat Baru	Meningkatnya pelayanan hubungan masyarakat (SK.S3.C.1)	Nilai keterbukaan informasi badan publik	Nilai	75	Kontribusi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
											Buat Baru	Meningkatnya pelayanan informasi perizinan berusaha berbasis risiko (SK.S3.C.2)	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan informasi perizinan berusaha berbasis risiko	Indeks	3,1	Kontribusi	
											Buat Baru	Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan tata usaha pimpinan (SK.S3.D)	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi/BKPM	Nilai	60	Kontribusi	Biro Protokol dan Tata Usaha
											Buat Baru	Meningkatnya kualitas aparatur Kementerian Investasi/BKPM dan aparatur daerah bidang penanaman modal (SK.S3.G)	Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal	Indeks	8	Kontribusi	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
											Buat Baru	Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum penanaman modal (SK.S3.B)	Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan	Indeks	3,3	Kontribusi	Biro Hukum
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (SP.S4.12)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Nilai	30	Kontribusi	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Stop						
						Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Predikat/Nilai	80	Kontribusi	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Perencanaan Program dan Anggaran (SK.S4.A)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Hukum (SK.S4.B)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Biro Hukum
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (SK.S4.C)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Protokol dan Tata Usaha (SK.S4.D)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Biro Protokol dan Tata Usaha
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Umum (SK.S4.E)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Biro Umum
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Inspektorat (SK.S2.F)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Inspektorat
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan (SK.S4.G)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (SP.R4.7)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	Nilai	30	Kontribusi	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	Stop						
						Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	Predikat/Nilai	80	Kontribusi	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam (SK.R4.A)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur (SK.R4.B)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan (SK.R4.C)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Infrastruktur (SK.R4.D)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (SP.I4.8)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Nilai)	Nilai	30	Kontribusi	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Stop						
						Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Predikat/Nilai	80	Kontribusi	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Deregulasi Penanaman Modal (SK.I4.A)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (SK.I4.B)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Pemberdayaan Usaha
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pengembangan Potensi Daerah (SK.I4.C)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (SP.P4.6)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Nilai	30	Kontribusi	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Stop						
						Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Predikat/Nilai	80	Kontribusi	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pengembangan Promosi (SK.P4.A)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Pengembangan Promosi
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa (SK.P4.B)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P4.C)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah AATA
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P4.D)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Promosi Wilayah AASP
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (SP.K4.6)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Nilai	30	Kontribusi	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Stop						
						Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Predikat/Nilai	80	Kontribusi	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Bilateral (SK.K4.A)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Kerja Sama Bilateral
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral (SK.K4.B)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas	%	80	Kontribusi	Direktorat Kerja Sama

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
												Sama Pelaksanaan Berusaha (SK.K4.C)	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti				Pelaksanaan Berusaha
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (SP.L4.6)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Nilai	30	Kontribusi	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Stop						
						Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Predikat/Nilai	80	Kontribusi	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri (SK.L4.A)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri (SK.L4.B)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha (SK.L4.C)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (SP.D4.14)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai	30	Kontribusi	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Stop						
						Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Predikat/Nilai	80	Kontribusi	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah I (SK.D4.A)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Wilayah I
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah II (SK.D4.B)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Wilayah II
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah III (SK.D4.C)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Wilayah III
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah IV (SK.D4.D)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Wilayah IV
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah V (SK.D4.E)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Wilayah V
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (SP.H4.5)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	Nilai	30	Kontribusi	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	Stop						
						Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	Predikat/Nilai	80	Kontribusi	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (SK.H4.A)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Hilirisasi, Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi (SK.H4.B)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara (SK.H4.C)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (SP.T4.6)	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	Nilai	30	Kontribusi	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	Stop						
						Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang	Predikat/Nilai	80	Kontribusi	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Sistem Perizinan Berusaha (SK.T4.A)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Sistem Perizinan Berusaha

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
						Teknologi Informasi Penanaman Modal					Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan (SK.T4.B)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Data dan Informasi (SK.T4.C)	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	%	80	Kontribusi	Direktorat Data dan Informasi
	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM	Opini BPK	WTP	Adopsi Langsung	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas (SP.S2.1)	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM	Opini BPK	WTP	Sama Persis	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Adopsi Langsung	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui layanan umum yang berkualitas (SK.S2.E)	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM	Opini BPK	WTP	Sama Persis	Biro Umum
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas (SP.S3.4)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi/BKPM	%	90	Kontribusi	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Adopsi Langsung	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan program dan anggaran yang berkualitas (SK.S2.A)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi/BKPM	%	90	Sama Persis	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
						Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi/BKPM	Level	3	Kontribusi	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Adopsi Langsung	Meningkatnya kepatuhan pegawai dan institusi Kementerian Investasi/BKPM terhadap peraturan perundang-undangan (SK.S3.F	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi/BKPM	Level	3	Sama Persis	Inspektorat
						Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Investasi/BKPM	Nilai	85	Kontribusi	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Adopsi Langsung	Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal (SK.S3.E)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Investasi/BKPM	Nilai	85	Sama Persis	Biro Umum
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (SP.S4.12)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	%	90	Formula Indeks	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Perencanaan Program dan Anggaran (SK.S4.A)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Perencanaan Program dan Anggaran	%	90	Formula Indeks	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Hukum (SK.S4.B)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Hukum	%	90	Formula Indeks	Biro Hukum
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (SK.S4.C)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	%	90	Formula Indeks	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Protokol dan Tata Usaha (SK.S4.D)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Protokol dan Tata Usaha	%	90	Formula Indeks	Biro Protokol dan Tata Usaha
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Umum (SK.S4.E)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Biro Umum	%	90	Formula Indeks	Biro Umum
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Inspektorat (SK.S2.F)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat	%	90	Formula Indeks	Inspektorat
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan (SK.S4.G)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Pusat Pendidikan dan Pelatihan	%	90	Formula Indeks	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
						Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Nilai	85	Kontribusi	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Stop						
						Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	%	5	Kontribusi	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Perencanaan Program dan Anggaran (SK.S4.A)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Biro Perencanaan Program dan Anggaran TA 2022	%	5	Formula Indeks	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Hukum (SK.S4.B)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Biro Hukum TA 2022	%	5	Formula Indeks	Biro Hukum
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (SK.S4.C)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Biro Komunikasi dan Layanan Informasi TA 2022	%	5	Formula Indeks	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Protokol dan Tata Usaha (SK.S4.D)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Biro Protokol dan Tata Usaha TA 2022	%	5	Formula Indeks	Biro Protokol dan Tata Usaha
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Biro Umum (SK.S4.E)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Biro Umum TA 2022	%	5	Formula Indeks	Biro Umum
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Inspektorat (SK.S2.F)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Inspektorat TA 2022	%	5	Formula Indeks	Inspektorat

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan (SK.S4.G)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan TA 2022	%	5	Formula Indeks	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (SP.R4.7)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	%	90	Formula Indeks	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam (SK.R4.A)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam	%	90	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur (SK.R4.B)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur	%	90	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan (SK.R4.C)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan	%	90	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Infrastruktur (SK.R4.D)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Perencanaan Infrastruktur	%	90	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
						Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	Nilai	85	Kontribusi	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	Stop						
						Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	%	5	Kontribusi	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam (SK.R4.A)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur (SK.R4.B)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan (SK.R4.C)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Perencanaan Infrastruktur (SK.R4.D)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Perencanaan Infrastruktur TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (SP.I4.8)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	90	Formula Indeks	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Deregulasi Penanaman Modal (SK.I4.A)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Deregulasi Penanaman Modal	%	90	Formula Indeks	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (SK.I4.B)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pemberdayaan Usaha	%	90	Formula Indeks	Direktorat Pemberdayaan Usaha
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pengembangan Potensi Daerah (SK.I4.C)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pengembangan Potensi Daerah	%	90	Formula Indeks	Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
						Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai	85	Kontribusi	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Stop						
						Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	%	5	Kontribusi	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Deregulasi Penanaman Modal (SK.I4.A)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Deregulasi Penanaman Modal TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (SK.I4.B)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Pemberdayaan Usaha
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pengembangan Potensi Daerah (SK.I4.C)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pengembangan Potensi Daerah TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (SP.P4.6)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	%	90	Formula Indeks	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pengembangan Promosi (SK.P4.A)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pengembangan Promosi	%	90	Formula Indeks	Direktorat Pengembangan Promosi
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa (SK.P4.B)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa	%	90	Formula Indeks	Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P4.C)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika	%	90	Formula Indeks	Direktorat Promosi Wilayah AATA
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P4.D)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik	%	90	Formula Indeks	Direktorat Promosi Wilayah AASP
						Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Nilai	85	Kontribusi	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Stop						
						Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	%	5	Kontribusi	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pengembangan Promosi (SK.P4.A)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pengembangan Promosi TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Pengembangan Promosi
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa (SK.P4.B)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (SK.P4.C)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Promosi Wilayah AATA
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (SK.P4.D)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Promosi Wilayah AASP
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal (SP.K4.6)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	%	90	Formula Indeks	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Bilateral (SK.K4.A)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Kerja Sama Bilateral	%	90	Formula Indeks	Direktorat Kerja Sama Bilateral
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral (SK.K4.B)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral	%	90	Formula Indeks	Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha (SK.K4.C)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha	%	90	Formula Indeks	Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha
						Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Nilai	85	Kontribusi	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Stop						
						Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	%	5	Kontribusi	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Bilateral (SK.K4.A)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Kerja Sama Bilateral TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Kerja Sama Bilateral
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral (SK.K4.B)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha (SK.K4.C)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (SP.L4.6)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	%	90	Formula Indeks	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri (SK.L4.A)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	%	90	Formula Indeks	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri (SK.L4.B)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri	%	90	Formula Indeks	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha (SK.L4.C)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha	%	90	Formula Indeks	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha
						Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Nilai	85	Kontribusi	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Stop						
						Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	%	5	Kontribusi	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri (SK.L4.A)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri (SK.L4.B)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha (SK.L4.C)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (SP.D4.14)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	90	Formula Indeks	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah I (SK.D4.A)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah I	%	90	Formula Indeks	Direktorat Wilayah I
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah II (SK.D4.B)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah II	%	90	Formula Indeks	Direktorat Wilayah II
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah III (SK.D4.C)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah III	%	90	Formula Indeks	Direktorat Wilayah III
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah IV (SK.D4.D)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah IV	%	90	Formula Indeks	Direktorat Wilayah IV
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah V (SK.D4.E)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Wilayah V	%	90	Formula Indeks	Direktorat Wilayah V
						Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai	85	Kontribusi	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Stop						
						Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	5	Kontribusi	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah I (SK.D4.A)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah I TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Wilayah I
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah II (SK.D4.B)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah II TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Wilayah II
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah III (SK.D4.C)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah III TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Wilayah III
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah IV (SK.D4.D)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah IV TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Wilayah IV
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Wilayah V (SK.D4.E)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah V TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Wilayah V
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis (SP.H4.5)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	%	90	Formula Indeks	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (SK.H4.A)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	%	90	Formula Indeks	Direktorat Hilirisasi, Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi (SK.H4.B)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi	%	90	Formula Indeks	Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi

LEVEL 0					LEVEL 1							LEVEL 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Metode Cascading	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU	Metode Cascading	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Ke Atasan	PJ IKU
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara (SK.H4.C)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara	%	90	Formula Indeks	Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara
						Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	Nilai	85	Kontribusi	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	Stop						
						Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	%	5	Kontribusi	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (SK.H4.A)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Hilirisasi, Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi (SK.H4.B)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara (SK.H4.C)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara
				Buat Baru	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal (SP.T4.6)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	%	90	Formula Indeks	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Sistem Perizinan Berusaha (SK.T4.A)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Sistem Perizinan Berusaha	%	90	Formula Indeks	Direktorat Sistem Perizinan Berusaha
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan (SK.T4.B)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan	%	90	Formula Indeks	Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Data dan Informasi (SK.T4.C)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Data dan Informasi	%	90	Formula Indeks	Direktorat Data dan Informasi
						Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	Nilai	85	Kontribusi	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	Stop						
						Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	%	5	Kontribusi	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Sistem Perizinan Berusaha (SK.T4.A)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Sistem Perizinan Berusaha TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Sistem Perizinan Berusaha
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan (SK.T4.B)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan
											Lingkup Dipersempit	Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Direktorat Data dan Informasi (SK.T4.C)	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Data dan Informasi TA 2022	%	5	Formula Indeks	Direktorat Data dan Informasi

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM